RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN PASURUAN

2024

BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 112 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerinatah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 87 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2024;
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode sisa 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD (Perangkat Daerah) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) setelah disepakati dengan DPRD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII	:	PENUTUP

(2) Uraian secara rinci RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal,10 JULI 2023
WAKIL BUPATI PASURUAN,

KH. MUJIB IMRON, SH,MH.

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 10 JULI 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 112

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
DAFTAR GAMBAR 4
DAFTAR TABEL 6
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 **Latar Belakang I-1**
1.2 **Landasan Hukum Penyusunan I-2**
1.3 **Hubungan Antar Dokumen I-9**
1.4 Maksud Dan Tujuan **..... I-10**
1.5 Sistematika Penulisan **..... I-11**
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah **..... II-1**
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1
2.1.1.2 Kondisi Topografi II-2
2.1.1.3 Kondisi Geologi II-4
2.1.1.4 Kondisi Hidrologi II-8
2.1.1.5 Kondisi Klimatologi II-12
2.1.1.6 Kondisi Penggunanaan Lahan. II-13
2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah. II-16
2.1.1.8 Wilayah Potensi Rawan Bencana II-18
2.1.1.9 Kondisi Demografi II-24
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-31
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-31
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II-43
2.1.2.2.1 Urusan Pendidikan II-43
2.1.2.2.2 Urusan Kesehatan II-44
2.1.2.2.3 Urusan Ketenagakerjaan II-48
2.1.2.2.4 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-50
2.1.2.2.5 Urusan Pangan II-50
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga II-51
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-53
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar II-53
1. Urusan Pendidikan II-53
2. Urusan Kesehatan II-56
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-58
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman II-63
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat II-66
6. Urusan Sosial II-68
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non-Dasar II-70
7. Urusan Ketenagakerjaan II-70
8. Urusan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-72
9. Urusan Pangan II-74
10. Urusan Pertanahan II-76
11. Urusan Lingkungan Hidup II-79

12. Urusan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-83
13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-84
14. Urusan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-85
15. Urusan Perhubungan II-86
16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II-87
17. Urusan Komunikasi dan Informatika II-89
18. Urusan Penanaman Modal II-91
19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga II-92
20. Urusan Statistik II-93
21. Urusan Persandian II-94
22. Urusan Kebudayaan II-95
23. Urusan Perpustakaan II-96
24. Urusan Kearsipan II-97

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan II-98
25. Urusan Kelautan dan Perikanan II-98
26. Urusan Pariwisata II-99
27. Urusan Pertanian II-101
28. Urusan Perdagangan II-106
29. Urusan Perindustrian II-107
30. Urusan Transmigrasi II-108

2.1.3.4 Fokus Layanan Unsur Pendukung II-109
1. Sekretariat Daerah II-109
2. Sekretariat DPRD II-110

2.1.3.5 Fokus Layanan Unsur Penunjang II-111
1. Unsur Perencanaan II-111
2. Unsur Keuangan II-112
3. Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan II-114
4. Unsur Penelitian dan Pengembangan Daerah II-116

2.1.3.6 Fokus Layanan Unsur Pengawasan II-116
1. Inspektorat Daerah II-116

2.1.3.7 Fokus Layanan Unsur Kewilayahan II-117
1. Kecamatan II-117

2.1.3.8 Fokus Layanan Unsur Pemerintahan Umum II-120
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik II-120

2.1.4 **Aspek Daya Saing Daerah II-121**

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-121

2.1.4.2 Fokus Fasilitas/Infrastruktur Wilayah II-123

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi. II-125

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia. II-125

2.1.5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). II-126

2.2 **Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-127**

2.2.1 Realisasi Program atau Kegiatan yang Tidak Memenuhi, Telah Memenuhi dan Melebihi Target Kinerja Hasil atau Keluaran yang Direncanakan II-127
2.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program atau Kegiatan..... II-127
2.2.2.1 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program atau Kegiatan II-127
2.2.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Tercapainya atau Melebihi Target Kinerja Program atau Kegiatan II-128
2.2.3 Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program RPJMD dan Kinerja Pembangunan Daerah..... II-128
2.2.4 Kebijakan atau Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut..... II-131
2.3 **Permasalahan Pembangunan Daerah..... II-134**
2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah..... II-134
2.3.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah..... II-135
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH..... .. III-1
3.1 **Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1**
3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional..... III-5
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur III-6
3.2 **Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-8**
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-9
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-13
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah..... III-19
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... IV-1
4.1 **Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... IV-1**
4.2 **Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024..... IV-1**
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1
6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) **..... VI-1**
6.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) **..... VI-3**
BAB VII PENUTUP..... VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasuruan II-2
Tabel 2.2 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibu Kota Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun II-3
Tabel 2.3 Sungai di Kabupaten Pasuruan II-9
Tabel 2.4 Jumlah Sumber Air dan Debit yang dapat dimanfaatkan di Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015..... II-10
Tabel 2.5 Suhu Udara dan Kelembaban Udara di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 ..... II-12
Tabel 2.6 Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 ..... II-13
Tabel 2.7 Persebaran Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan..... II-14
Tabel 2.8 Kejadian Bencana di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 ..... II-23
Tabel 2.9 Kejadian Kebakaran di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022..... II-24
Tabel 2.10 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2022 ..... II-25
Tabel 2.11 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2022 (Jiwa/Km2) II-25
Tabel 2.12 Dinamika Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Jiwa) II-27
Tabel 2.13 Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2022 (Jiwa) II-27
Tabel 2.14 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2022 ..... II-28
Tabel 2.15 Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2022 (Jiwa) II-29
Tabel 2.16 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2022 ..... II-30
Tabel 2.17 Komposisi Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2022 ..... II-30
Tabel 2.2.1 Kontribusi Lapangan Usaha Terhadadap Volume dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 ..... II-32
Tabel 2.2.2 Profil Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.. II-35
Tabel 2.2.3 Perkembangan IPM Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 ... II-38
Tabel 2.2.4 Rincian Hasil Evaluasi Indeks RB Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2019 dan Tahun 2020-2022..... II-41
Tabel 2.2.5 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 ..... II-45
Tabel 2.1.3.1 Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2018-2022 ..... II-53
Tabel 2.1.3.2 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2018-2022 Berdasarkan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi, Nomor 5676/MPK.A/PR.07.05/ 2023 ..... II-56
Tabel 2.1.3.2 Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2018-2022 ..... II-56
Tabel 2.1.3.3 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2022 ..... II-58

Tabel 2.1.3.3.a Kondisi Jalan di Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022 ..... II-61
Tabel 2.1.3.3.b Standar Pelayanan Minimal Bidang Jalan di Indonesia..... II-62
Tabel 2.1.3.4 Capaian Indikator SPM dan IKK Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 – 2022 ..... II-63
Tabel 2.1.3.5 Capaian Kinerja Urusan Trantibumlinmas II-66
Tabel 2.1.3.6 Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2018-2022 ..... II-69
Tabel 2.1.3.7 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2018-2022... II-71
Tabel 2.1.3.8 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2022..... II-73
Tabel 2.1.3.9 Capaian IKK outcome Urusan Pangan Tahun 2018-2022 ..... II-74
Tabel` 2.1.3.10.1 Capaian IKK Outcome Urusan Pertanahan..... II-76
Tabel 2.1.3.10.2 Jumlah Identifikasi Pemetahan Pertanahan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 – 2022 ..... II-77
Tabel 2.1.3.11 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2018-2022 ..... II-80
Tabel 2.1.3.12 Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2022 ..... II-84
Tabel 2.1.3.13 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2022 ..... II-84
Tabel 2.1.3.14 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2018-2022 ..... II-85
Tabel 2.1.3.15 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018-2022 ..... II-86
Tabel 2.1.3.16.1 Data Jumlah Koperasi dan Usaha mikro di kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 ..... II-88
Tabel 2.1.3.16.2 Capaian Kinerja (IKK outcome) Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2018-2022 ..... II-88
Tabel 2.1.3.17 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi Informatika..... II-90
Tabel 2.1.3.18 Capaian Kinerja (IKK outcome) Urusan Penanaman Modal Tahun 2018-2022 ..... II-91
Tabel 2.1.3.19 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018-2022 ..... II-92
Tabel 2.1.3.20 Capaian Kinerja Urusan Statistik II-94
Tabel 2.1.3.21 Capaian Kinerja Urusan Persandian..... II-95
Tabel 2.1.3.22 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2022 ..... II-95
Tabel 2.1.3.23 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2018-2022..... II-96
Tabel 2.1.3.24 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2018-2022..... II-97
Tabel 2.1.3.25 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022 ..... II-98
Tabel 2.1.3.26.1 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018-2022 ..... II-99
Tabel 2.1.3.26.2 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018-2022 ..... II-100
Tabel 2.1.3.27 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018-2022 ..... II-101
Tabel 2.1.3.28 Capaian Kinerja (IKK outcome) Urusan Perdagangan Tahun 2018-2022 ..... II-106
Tabel 2.1.3.29 Capaian Kinerja (IKK outcome) Urusan Perindustrian Tahun 2018-2022 ..... II-107
Tabel 2.1.3.30 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2018-2022 ..... II-108
Tabel 2.1.3.32 Capaian Kinerja Unsur Sekretariat DPRD Tahun 2018-2022 ..... II-111

Tabel 2.1.3.33 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan Tahun 2018-2022 ..... II-112
Tabel 2.1.3.34 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan Tahun 2018-2022 ..... II-112
Tabel 2.1.3.35 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018-2022 ..... II-114
Tabel 2.1.3.36 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018-2022 ..... II-116
Tabel 2.1.3.37 Capaian Kinerja Layanan Unsur Pengawasan Tahun 2018-2022 ..... II-118
Tabel 2.1.3.38 (a) Capaian IKM Kecamatan Tahun 2018-2022 ..... II-110
Tabel 2.1.3.38 (b) Capaian Indikator Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan Tahun 2018-2022 ..... II-119
Tabel 2.1.3.8.1 Realisasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2018-2022 ..... II-120
Tabel 2.1.4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 ..... II-121
Tabel 2.1.4.2 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 ..... II-122
Tabel 2.1.4.3 Produktivitas Total Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 ..... II-123
Tabel 2.1.4.4 Angka Kriminalitas di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 ..... II-125
Tabel 2.1.4.5 Rasio Lulusan S1/S2/S3 dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 ..... II-125
Tabel 2.59 Jumlah Program/Kegiatan yang Tidak Tercapai, Tercapai dan Melebihi Target II-127
Tabel 2.3.1 Permasalahan Strategis Daerah menurut Sasaran Pembangunan Daerah II-135
Tabel 2.3.2 Permasalahan Urusan Pemerintah Daerah II-136
Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Beberapa Negara III-2
Tabel 3.3 Keterkaitan Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan III-7
Tabel 3.4 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2025 ..... III-12
Tabel 3.5 Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten PasuruanTahun 2021-2025 ..... III-17
Tabel 3.6 Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2025 ..... III-20
Tabel 4.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 ..... IV-1
Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Beberapa Negara III-2 8

No table of figures entries found.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan I-10
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Pasuruan II-1
Gambar 2.2 Kondisi Topografi Wilayah Kabupaten Pasuruan II-2
Gambar 2.3 Kondisi Jenis Tanah di Wilayah Kabupaten Pasuruan II-6
Gambar 2.4 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pasuruan II-13
Gambar 2.5 Peta Ancaman Gunung Meletus Kabupaten Pasuruan di Wilayah Kabupaten Pasuruan II-19
Gambar 2.6 Peta Ancaman Tanah Longsor Kabupaten Pasuruan II-20
Gambar 2.7 Peta Kondisi Kerawanan Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Pasuruan II-21
Gambar 2.8 Peta Ancaman Angina tau Cuaca Ekstrim Kabupaten Pasuruan II-21
Gambar 2.9 Peta Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Pasuruan II-22
Gambar 2.10 Peta Ancaman Kekeringan Kabupaten Pasuruan II-22
Gambar 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2022 ..... II-31
Gambar 2.2.2 Inflasi Kabupaten Pasuruan/Kota Probolinggo, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-33
Gambar 2.2.3 Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-35
Gambar 2.2.4 Pendapatan/PDRB Perkapita Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-36
Gambar 2.2.5 TPT Kab. Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-37
Gambar 2.2.6 IPM Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-38
Gambar 2.2.7 Indeks Kesenjangan Wilayah Kab. Pasuruan Tahun 2018-2022 ..... II-39
Gambar 2.2.8 Sebaran PDRB perkapita perkecamatan Kab. Pasuruan Tahun 2018-2022 ..... II-40
Gambar 2.2.9 Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-40
Gambar 2.2.10 Indeks RB Kab. Pasuruan Tahun 2018-2022 ..... V-41
Gambar 2.2.11 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 ..... V-43
Gambar 2.2.12 Harapan Sekolah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022. V-44
Gambar 2.2.13 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022V-13
Gambar 2.2.14 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 ..... V-46
Gambar 2.2.15 Tren Perkembangan Desa Siaga Aktif Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 ..... V-47
Gambar 2.2.16 Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 ..... VI-48

Gambar 2.2.17 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 ..... V-49
Gambar 2.2.18 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 ..... VI-49
Gambar 2.2.19 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) II-50
Gambar 2.2.20 Angka Kecukupan Gizi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022..... II-51
Gambar 2.2.21 Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2020 ..... II-52
Gambar 2.2.22 Jumlah Atlit dan Pemuda Berprestasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 ..... II-53
Gambar 2.1.3.3.1 Indeks Ketahanan Air di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022..... II-62
Gambar 2.1.3.3.2 Indeks Aksesibilitas Wilayah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022..... II-63
Gambar 2.1.3.5.1 Capaian Indeks Ketahanan Daerah..... II-67
Gambar 2.1.3.5.2 Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022..... II-68
Gambar 2.1.3.6.1 Persentase PMKS Tahun 2018-2022 ..... II-70
Gambar 2.1.3.9.1 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan II-75
Gambar 2.1.3.9.2 Pola Pangan Harapan Tahun 2018-2022 ..... II-75
Gambar 2.1.3.13.1 Persentase Desa Mandiri Tahun 2019-2022..... II-85
Gambar 2.1.3.16.1 Perkembangan Omset Usaha Mikro dan Koperasi 2018-2022..... II-89
Gambar 2.17.1 Capaian Indeks SPBE Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022..... II-91
Gambar 2.18.1 Realisasi Investasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 ... II-92
Gambar 2.1.3.24.1 Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan Tahun 2018-2022 .... II-97
Gambar 2.1.3.28.1 Nilai Transaksi Perdagangan Tahun 2018-2022..... II-107
Gambar 2.1.3.35.1 Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2020-2022 ..... II-115
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia..... III-2
Gambar 4.1 Grand Design RKPD Kabupaten Pasuruan 1..... IV-25
Gambar 4.2 Grand Design RKPD Kabupaten Pasuruan 2..... IV-25
Gambar 4.3 Grand Design RKPD Kabupaten Pasuruan 3..... 1V-26

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 112
TANGGAL : 10 Juli 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD Tahun 2024 bersifat khusus karena disusun tidak berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menerjemahkan visi misi Bupati terpilih, melainkan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026. RPD Tahun 2024 - 2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

RKPD Tahun 2024 secara umum memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja berupa rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta pagu indikatif anggaran di tahun berkenaan. Prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2024 ditetapkan dengan menjaga keselarasan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur Nomor 050/5871/201.3/2023 Tanggal 5 April 2023 Tentang Penyelarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2024. SE tersebut antara lain menjelaskan bahwa “prioritas pembangunan kabupaten/kota agar diselaraskan dengan prioritas pembangunan provinsi dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang pada Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur serta mengacu hasil musrenbang RKPD tahun 2024”.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa tahapan penyusunan RKPD dimulai dari proses Persiapan Penyusunan RKPD, Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Penyusunan Rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Perumusan Rancangan Akhir RKPD, dan Penetapan RKPD.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu:

1. Secara substansial, menjadi arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan Perangkat Daerah (PD) penanggung jawab;
2. Secara normatif, menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta landasan bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, berfungsi sebagai arahan untuk melaksanakan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) PD; dan
4. Secara faktual, berfungsi sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program, kegiatan dan subkegiatan. Kedudukan RKPD Tahun 2024 merupakan perencanaan tahun pertama dalam RPD Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahanan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4700);

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4723);
7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 1 Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 6402);
21) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

23) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
26) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
28) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

30) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
31) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 269);
32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
34) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
35) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);
36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
38) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
40) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
42) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2);
43) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
44) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 2);

45) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12);
46) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4);
47) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementrian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga. Perencanaan nasional diwujudkan melalui perencanaan pembangunan tingkat daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). INMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2022 mengamanatkan penyusunan RPD untuk periode 2024-2026 untuk Bupati yang masa jabatannya berakhir di tahun 2023, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

Dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan 2024-2024 yang berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan isu strategis di Kabupaten Pasuruan.

RKPD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional yang meliputi RPJMN dan RKP serta di tingkat provinsi

terdapat dokumen RPJMD Provinsi dan RKPD Provinsi. Dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan dan acuan bagi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan. Dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan RAPBD. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pada Pemerintah Pusat dan pada Pemerintah Daerah ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

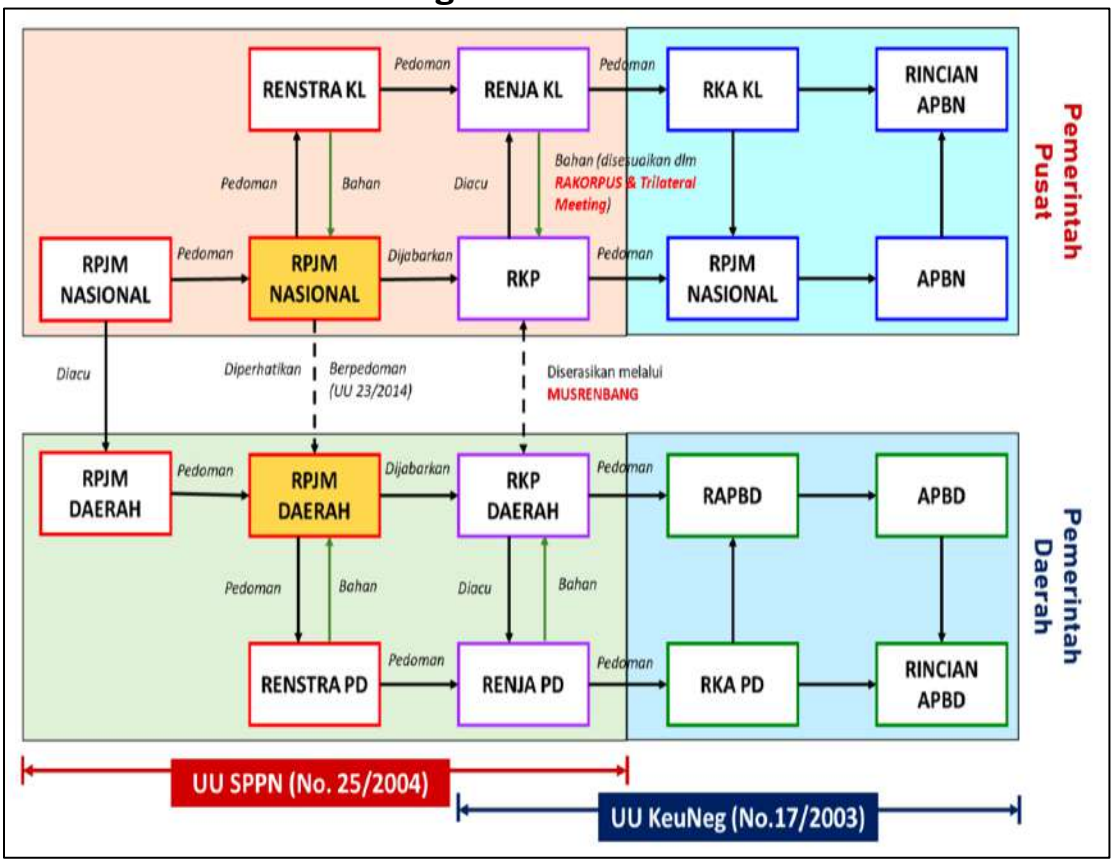

Sumber: Kemendagri, 2018
Keterangan: Pada periode 2024-2026 RPJMD diganti RPD

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kabupaten Pasuruan didukung dengan pemetaan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan

daerah dengan menyelaraskan pada tujuan dan sasaran pembangunan nasional, dan provinsi. Selain itu, maksud penyusunan RKPD Kabupaten Tahun 2024 yaitu:

- Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dengan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Menciptakan sinergi antara program prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dengan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaran pemerintahan Kabupaten Pasuruan;
- Terciptanya efesiensi pengalokasian anggaran belanja dan juga terciptanya efektifitasnya anggaran pendapatan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dapat dijadikan untuk:

a. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024;
b. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024;
c. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun 2024;
d. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional agar target capaian RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, khususnya arah kebijakan pada tahun pertama dapat tercapai;
e. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penanggaran tahunan pembangunan daerah; dan

f. Mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Adapun dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, RKP/program strategis nasional, dan RPKD Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penyusunan RPKD Kabupeten Pasuruan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengna pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian Ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek geografi, demografi, potensi sumber daya, aspek RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPD.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Provinsi/Kabupaten. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan tujuan dan sasaran pembangunan 3 (tiga) tahun yang diambil dari dokumen RPD Kabupaten Pasuruan.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPD) tahun rencana. Berisi Prioritas,

Sasaran, Indikator sasaran dan interkoneksi diantaranya. Disajikan pula interkoneksi dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Program Prioritas

Memuat Rencana Program beserta besaran pagu dana yang akan dilaksanakan guna mendukung prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2024, serta rekapitulasi belanja di setiap Perangkat Daerah.

5.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Berisi tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Memuat paling sedikit kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut setelah penetapan RKPD

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Pasuruan merupakan daerah terluas ke-12 (dua belas) di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 1.474,02 km2. Secara astronomis, Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat 7°32'34" - 7°57'20" Lintang Selatan dan 112°33'55"-113°05'37" Bujur Timur, berada di delta jalur Surabaya - Jember/Banyuwangi/Bali, Surabaya - Malang, dan Malang-Jember/Banyuwangi/Bali, sehingga sangat strategis dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Pusat pemerintahan Kabupaten Pasuruan atau ibukota berada di Kecamatan Bangil, dengan batas wilayah administratif:

Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan dan Selat Madura
Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo
Sebelah Selatan : Kabupaten Malang
Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu

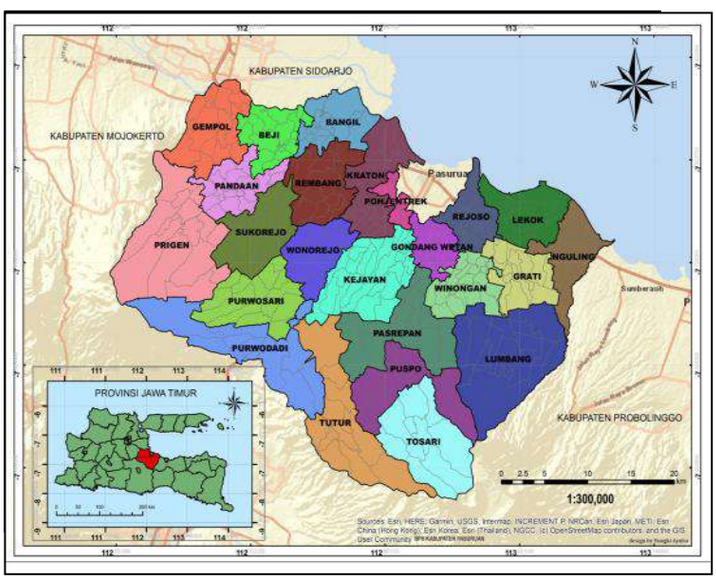

Secara administrasi Kabupaten Pasuruan, terbagi menjadi 24 kecamatan, 24 Kelurahan, dan 341 Desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Lumbang dan terkecil Kecamatan Pohjentrek.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Pasuruan
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Pasuruan Menurut Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)
			Desa	Kelurahan		
1	Purwodadi	Desa Purwodadi	13	-	102,46	6,95
2	Tutur	Desa Wonosari	12	-	86,30	5,85
3	Puspo	Desa Puspo	7	-	58,35	3,96
4	Lumbang	Desa Cukurguling	12	-	125,55	8,52
5	Pasrepan	Desa Pasrepan	17	-	89,95	6,10
6	Kejayan	Kel. Kejayan	24	1	79,15	5,37
7	Wonorejo	Desa Wonorejo	15	-	47,30	3,21
8	Purwosari	Kel. Purwosari	14	1	59,87	4,06
9	Sukorejo	Desa Glagahsari	19	-	58,18	3,95
10	Prigen	Kel. Prigen	9	-	121,90	8,27
11	Pandaan	Kel. Petungsari	14	4	43,27	2,94
12	Gempol	Desa Karangrejo	15	-	64,92	4,40
13	Beji	Desa Beji	12	2	39,90	2,71
14	Bangil	Kel. Kolursari	4	11	44,60	3,03
15	Rembang	Desa Rembang	17	-	42,52	2,88
16	Kraton	Desa Kraton	25	-	50,75	3,44
17	Pohjentrek	Desa Susukan Rejo	11	3	11,88	0,81
18	Gondangwetan	Kel. Gondangwetan	19	1	26,25	1,78
19	Winongan	Desa winongan Lor	18	-	45,97	3,12
20	Grati	Kel. Gratitunon	14	1	50,78	3,45
21	Nguling	Desa Nguling	15	-	42,60	2,89
22	Lekok	Desa Tambaklekok	11	-	46,57	3,16
23	Rejoso	Desa Rejoso Lor	16	-	37,00	2,51
24	Tosari	Desa Tosari	8	-	98,00	6,65
Kabupaten Pasuruan		**Kecamatan Bangil**	**341**	**24**	**1.474,02**	**100**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

2.1.1.2. Kondisi Topografi

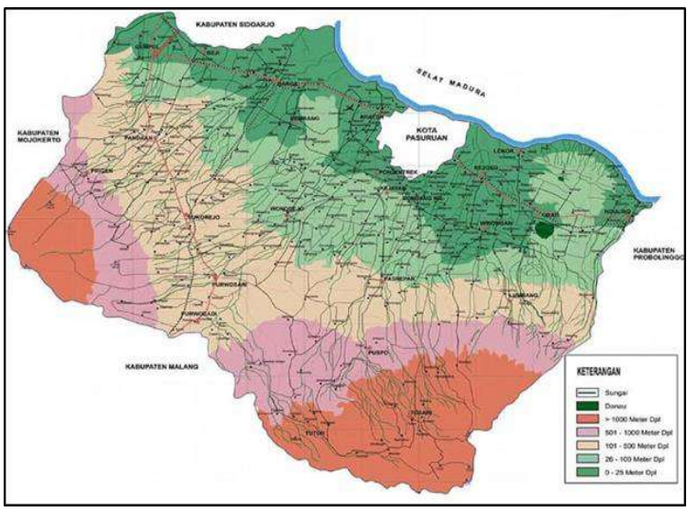

Gambar 2.2 Kondisi Topografi Wilayah Kabupaten Pasuruan
Sumber: RTRW Kabupaten Pasuruan, 2010

Topografi wilayah Kabupaten Pasuruan terbagi menjadi beberapa klasifikasi wilayah berdasarkan ketinggian dan tingkat kemiringan lahan. Tingkat ketinggian lahan terbagi menjadi:

- Wilayah pantai dengan ketinggian 0–12,5 mdpl seluas 18.819,04 ha atau 12,77%.
- Wilayah dataran rendah dengan ketinggian 12,5–500 mdpl seluas 80.169,44 ha atau 54,39 % dari luas wilayah.
- Wilayah perbukitan dengan ketinggian 500–1000 mdpl seluas 21.877,17 ha atau 14,84% dari luas wilayah.
- Wilayah pegunungan dengan ketinggian 1000–2000 mdpl seluas 18.615,08 ha atau 12,63% dari luas wilayah.
- Wilayah dengan ketinggian >2000 mdpl seluas 7.920,77 ha atau sekitar 5,37% dari luas wilayah.

Tingkat kemiringan lahan menurut kondisi kelerengan wilayah terbagi menjadi:

- Kelerengan >1.000 meter DPL, berada di Kecamatan Tosari, Kecamatan Tutur dan sebagian Kecamatan Prigen (pengunungan Prigen);
- Kelerengan 501 – 1.000 meter DPL, berada di Kecamatan Puspo, sebagian Kecamatan Tosari, Kecamatan Tutur, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Pasrepan dan Kecamatan Lumbang;
- Kelerengan 101 – 500 meter DPL, berada di Kecamatan Lumbang;
- Kelerengan 26 – 100 meter DPL, berada di sebagian Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Grati, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Rembang, Kecamatan Beji dan Kecamatan Gempol;
- Kelerengan 0 – 25 meter DPL, berada di bagian utara tepatnya di wilayah kawasan pesisir yang paling dominan, di antaranya Kecamatan Nguling, Kecamatan Grati, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lekok, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Kraton, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bangil, Kecamatan Beji dan Kecamatan Gempol.

Tabel 2.2
Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibu Kota Menurut Kecamatan

Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibu Kota (km)
Purwodadi	500–1.000	26,5
Tutur	>1.000	46,5
Puspo	500–1.000	40,5
Lumbang	100–500	37,5
Pasrepan	100–500	30
Kejayan	25–100	20
Wonorejo	25–100	20

Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibu Kota (km)
Purwosari	100–500	23
Sukorejo	100–500	16,5
Prigen	>1.000	19
Pandaan	100–500	11,5
Gempol	0–25	11,5
Beji	0–25	3
Bangil	0–25	0
Rembang	25–100	7
Kraton	0–25	10,5
Pohjentrek	0–25	18,5
Gondang Wetan	0–25	21
Winongan	0–25	28,5
Grati	25–100	29
Nguling	0–25	37
Lekok	25–100	31,5
Rejoso	0–25	22,5
Tosari	>1.000	53
Purwodadi	500–1.000	26,5
Tutur	>1.000	46,5
Puspo	500–1.000	40,5
Lumbang	100–500	37,5

Sumber : Badan Pertanahan Nasional, 2022 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

2.1.1.3. Kondisi Geologi

Jenis geologi di Wilayah Kabupaten Pasuruan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu: batuan permukaan, batuan sedimen dan batuan gunung api. Dengan banyaknya jenis batuan yang ada, menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang cukup kaya. Dilihat dari struktur geologi, Kabupaten Pasuruan terbagi atas dua kelompok besar yaitu gunung api kuarter muda (*young quarternary*) seluas 52,43% dan kuarter tua (*old quarternary*) seluas 34,95%.

Secara garis besar jenis batuan yang ada di Kabupaten Pasuruan dikelompokkan ke dalam:

1. Endapan Permukaan
   1) Batuan Alluvium:
      1. Terdiri dari bahan kerakal, kerikil, pasir, lempung dan lumpur;
      2. Terdiri dari endapan sungai dan endapan pantai. Endapan sungai terhampar di sepanjang daerah aliran Sungai Rejoso sedangkan endapan pantai terhampar disepanjang pantai Selat Madura, sebagian besar berupa pasir kasar-halus dan

lepas. Wilayah setempat banyak tercampur pecahan cangkang cangkang, moluska atau kerang-kerangan dan koral.

2) Batuan Sedimen

- Formasi Kabuh:
  1. Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batu lempung tufan, batu pasir gampingan, konglomerat, lempung dan tuf vulkan;
  2. Sebarannya tidak luas, terdapat di sekitar Desa Raci dan di Beji.
- Formasi Jombang:
  1. Terdiri dari bahan breksi, batu pasir tufan, batu lempung tufan, lempung, batu gamping dan tufan;
  2. Sebarannya terdapat di sekitar Raci, sebelah selatan Bangil, Beji dan Gondangwetan.
- Formasi Welang:
  1. Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batu pasir, lempung, konglomerat dan tuf vulkan;
  2. Sebarannya tidak luas di Sungai Welang.

2. Batuan Gunung Api

a. Batuan Gunung Api Quarter Bawah (Gendis). Terdiri dari bahan breksi gunung api, tuf breksi, lava, tuf dan aglomerat.

b. Batuan Gunung Api Quarter Tengah (Ringgit). Terdiri dari batuan gunung api ringgit dan batuan gunung api tengger tua.

c. Batuan Gunung Api Arjuna – Welirang. Terdiri dari breksi gunung api, lava, breksi tufan dan tuf.

d. Batuan Gunung Api Tengger. Terdiri dari tuf pasiran, tuf batu apung, tuf abu dan aglomerat.

e. Tuf Rabano. Terdiri dari tuf pasiran, tuf batu apung, breksituf dan tuf halus.

f. Batuan Gunung Api Kuarter Atas Penanggungan. Terdiri dari breksi gunung api, lava tuf, breksi tufan, aglomerat dan lahar.

g. Batuan Gunung Api Bromo:

1) Terdiri dari breksi gunung api, lava, tuf, tuf breksi dan lahar;

2) Batuan ini merupakan endapan hasil kegiatan erupsi dari kelompok Gunung Bromo. Pusat erupsinya berpindah-pindah yang saling berdekatan, antara lain pada Gunung Bromo I

(+2392 meter), Gunung Bromo II (+ 2339 m) dan Gunung Batok (+ 2440 m). Gunung Bromo dianggap sebagai salah satu gunung api yang masih aktif.

h. Pasir Gunung Api Tengger:
   1) Terdiri dari pasir gunung api, bom gunung api dan batu apung;
   2) Pasir gunung api ini merupakan endapan piroklastika muda yang terendapkan dalam kawah tengger, berbentuk tapal kuda yang mengelilingi kelompok Gunung Bromo.

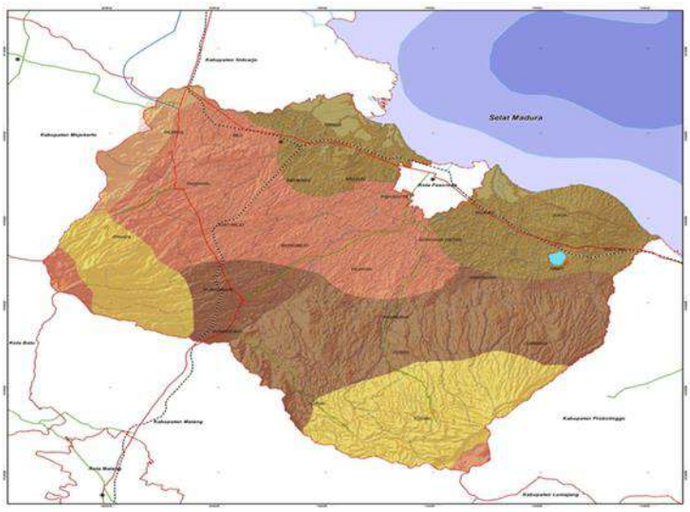

Gambar 2.3 Kondisi Jenis Tanah di Wilayah Kabupaten Pasuruan
Sumber: RTRW Kabupaten Pasuruan, 2010

Keberagaman jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Pasuruan karena dipengaruhi oleh faktor litologi dan strukturnya, yaitu mencakup: alluvial, regosol, andosol, grumosol, mediteran dan latosol. Jenis tanah di Kabupaten Pasuruan secara garis besar dikelompokkan dalam 6 (enam) kelompok besar yaitu :

1. Alluvial
   a. Bahan Induk : alluvial dari aneka macam asal;
   b. Sifat dan Corak
      Warna: kelabu, Tekstur: liat, Keasaman: aneka, Zat organik: kadar lemah, Kejenuhan: sedang hingga tinggi, Permeabilitas: rendah, Kepekaan erosi: tinggi tetapi karena daerahnya datar tidak sampai lanjut tingkatnya;
   c. Pemakaian: padi sawah, palawija dan perikanan.
2. Regosol
   a. Bahan induk : alluvial dari aneka macam asal;
   b. Sifat dan Corak
      Warna: kelabu hingga kuning, Tekstur: pasir, Kadar liat: <40%, Keasaman: aneka, Zat organik: kadar rendah, Kejenuhan: aneka, Permeabilitas: tinggi, Kepekaan erosi: tinggi;
   c. Pemakaian: padi sawah, palawija, tebu dan sayuran

3. Andosol
    a. Bahan induk : abu dan tuf vulkan;
    b. Sifat dan Corak

       Warna: hitam hingga kuning, Tekstur: lempung hingga debu dan liat menurun, Keasaman: agak masam hingga netral, Zat organik: lemah, Kejenuhan: basa, Permeabilitas: sedang, Kepekaan erosi: besar;
    c. Pemakaian: sayuran, bunga-bungaan, teh, kopi dan hutan pinus.
4. Grumusol
    a. Bahan induk : merjel, liat, tuf vulkan;
    b. Sifat dan Corak

       Warna: kelabu hingga hitam, Tekstur: liat makin ke bawah makin meningkat, Keasaman: sedikit asam hingga alkalin, Zat organik: kadar rendah, Kejenuhan: basa tinggi, Permeabilitas: rendah, Kepekaan erosi: besar;
    c. Pemakaian: padi sawah, jagung, kedelai, tebu, kapas dan hutan jati.
5. Mediteran
    a. Bahan induk : batu kapur keras, batuan sedimen dan tuf vulkan basa;
    b. Sifat dan Corak

       Warna: kuning hingga merah, Tekstur: lempung liat, Keasaman: agak masam hingga netral, Zat organik: rendah, Kejenuhan: basa tinggi, Permeabilitas: sedang, Kepekaan erosi: besar hingga sedang;
    c. Pemakaian: padi sawah, tegalan dan rumput ternak.
6. Latosol
    a. Bahan induk : tuf vulkan, bahan vulkan;
    b. Sifat dan Corak

       Warna: merah hingga kuning, Tekstur: liat tetap dari atas hingga ke bawah, Keasaman: masam hingga agak masam, Zat organik: kadar rendah hingga agak sedang di lapisan atas dan menurun ke bawah, Kejenuhan: basa rendah hingga sedang, Permeabilitas: tinggi, Kepekaan erosi: kecil;
    c. Pemakaian: padi sawah, jagung, umbian, kelapa, coklat, cengkeh, kopi maupun hutan tropika.

2.1.1.4. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Pasuruan memiliki 7 (tujuh) sungai yang mengalir, yaitu Sungai Lawean, Sungai Rejoso, Sungai Gembong, Sungai Welang, Sungai Masangan, Sungai Kedunglarangan dan Sungai Petrung. Sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Pasuruan dan bermuara di Selat Madura yaitu:

- Sungai Laweyan : bermuara di Desa Penunggul - Kecamatan Nguling
- Sungai Rejoso : bermuara di wilayah Kecamatan Rejoso
- Sungai Gembong : bermuara di wilayah Kota Pasuruan
- Sungai Welang : bermuara di Desa Pulokerto – Kecamatan Kraton
- Sungai Masangan : bermuara di Desa Raci – Kecamatan Bangil
- Sungai Kedung Larangan : bermuara di Desa Kalianyar – Kecamatan Bangil

Umumnya, penduduk Kabupaten Pasuruan memanfaatkan aliran sungai untuk irigasi teknis lahan pertanian. Selain dapat memberi manfaat bagi penduduk setempat, hampir seluruh sungai tersebut berpotensi menjadi penyebab bencana banjir. Banjir luapan sungai di Kabupaten Pasuruan disebabkan oleh rusaknya hutan, pendangkalan sungai, tingginya curah hujan, perubahan tata ruang, dan lain sebagainya.

Kabupaten Pasuruan mempunyai potensi air cukup besar baik berupa air permukaan maupun air tanah, oleh karena itu disamping sistem aliran sungai di Kabupaten Pasuruan terdapat juga danau atau waduk alami cukup besar dan sejumlah mata air. Untuk potensi air tanah akan digambarkan melalui kondisi hidrogeologi. Kondisi hidrologi Wilayah Kabupaten Pasuruan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Air Permukaan

Di wilayah Kabupaten Pasuruan mengalir enam sungai besar yang bermuara di Selat Madura, yaitu Sungai Lawean, Sungai Rejoso, Sungai Gembong, Sungai Welang, Sungai Masangan dan Sungai Kedunglarangan. Oleh karena itu tingkat pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian cukup memadai. Selain potensi sungai di atas, terdapat danau dan sejumlah mata air. Potensi tersebut agak terganggu dengan perubahan iklim yang ekstrem sehingga hujan lebih banyak dimungkinkan menjadi *run off* dibandingkan menjadi *recharge* potensi air permukaan dan infiltrasi untuk air tanah dangkal dan dalam.

Terdapat 15 (lima belas) sungai yang melintasi Kabupaten Pasuruan yang secara umum sungai-sungai tersebut merupakan sungai yang tidak terlalu panjang, di bagian hulunya memiliki kemiringan dasar sungai yang terjadi, dan ada beberapa sungai yang merupakan sungai musiman sehingga pada musim kemarau debit air tidak teratur. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Sungai di Kabupaten Pasuruan

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m^3/detik)	Debit Min (m^3/detik)
1	Sungai Kambeng	7,33	-	-	-	121,14	0,049
2	Sungai Kedunglarangan	13,99	31	17	4,8	71,65	0,5
3	Sungai Masangan	5,95	-	-	-	-	-
4	Sungai Raci	6,87	-	-	-	-	-
5	Sungai Gerongan	6,22	-	-	-	-	-
6	Sungai Pilang	9,82	-	-	-	-	-
7	Sungai Welang	40, 09	29	23	4,53	95,15	0,95
8	Sungai Gembong	8,57	17	13	2,42	137	0,38
9	Sungai Petung	14,34	15	12	4,88	73,42	0,75
10	Sungai Rejoso	15,72	25	18	4	27,19	10,40
11	Sungai Lawean	30,71	11	7	-	-	-
12	Sungai Kramat	13,61	26	13	5,35	5,75	0,70
13	Sungai Pakelan	45,60	16,03	9	1,68	35,52	0,74
14	Sungai Rondoningo	24,16	11,6	8,5	1,47	3,34	0,30
15	Sungai Pancarglagas	16,06	13	11	2,54	0,42	12,08

Sumber : Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup-Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2020

2. Danau

Danau yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, merupakan sumber mata air dan terletak di Kecamatan Grati, dikenal dengan nama Ranugrati yang mempunyai volume efektif sebesar 5013 m3 dan volume maksimum sebesar 5217 m3, serta mampu mengeluarkan debit maksimum 980 l/det dan debit minimum 463 l/det. Dari sejumlah sumber air yang ada di Kabupaten Pasuruan yang terbesar adalah Sumber Air Umbulan di Kecamatan Winongan dengan debit

maximumnya 4000an l/det, kemudian Sumber Mata Air Banyu Biru yang terletak di Kecamatan Winongan dengan debit maximumnya 225 l/det.

3. Sumber Air

Di Wilayah Kabupaten Pasuruan terdapat banyak sumber air yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan antara lain Kecamatan Prigen, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Purwodadi. Sumber air terbanyak berada di Kecamatan Prigen sejumlah 59 sumber air dengan debit minimum 510 liter/detik dan maksimum 955,01 liter/detik. Sebaran sumber air di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Jumlah Sumber Air dan Debit yang dapat dimanfaatkan di Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Sumber	Debit Total	
			Minimum (I/det)	Maksimum (I/det)
1	Prigen	59	510,00	955,01
2	Pandaan	10	305,00	401,01
3	Gempol	12	169,80	275,01
4	Beji	22	205,00	371,01
5	Bangil	3	105,00	130,01
6	Rembang	14	479,00	687,01
7	Sukorejo	13	136,00	295,01
8	Purwosari	24	358,00	684,01
9	Purwodadi	29	211,00	417,01
10	Kraton	1	15,00	30,01
11	Tutur	7	46,00	181,01
	Jumlah	**194**	**2.539,80**	**4.426,11**

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Pasuruan, 2015

4. Air Tanah

Secara umum air tanah di wilayah Kabupaten Pasuruan ini mengalir dari daerah imbuh di daerah puncak dan tubuh Gunung (G.) Arjuno dan G. Welirang, serta G. Bromo ke daerah luahnya, yaitu daerah dataran Gempol-Bangil-Pasuruan-Rejoso. Besarnya aliran air tanah dari daerah imbuh di daerah Pegunungan Arjuno-Welirang dan Pegunungan Bromo-Tengger tersebut ke daerah luasya di daerah dataran Gempol-Bangil-Pasuruan-Rejoso sangat dipengaruhi oleh jenis batuan yang dilaluinya, serta penyebaran akuifernya. Oleh karena itu penyebaran air tanah tidaklah merata di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan, di mana keterdapatan serta potensinya akan sangat tergantung pada sifat lapisan akuifernya. Sedangkan sifat akuifer tersebut akan ditentukan oleh

parameter dari akuifernya, yang antara lain menyangkut kapasitas jenis dan keterusannya.

Wilayah Kabupaten Pasuruan berdasarkan kuantitasnya (besarnya aliran air tanah) dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu Besar (debit > 10 liter/detik), Sedang (debit : 210 liter/detik), dan Kecil (debit < 2 liter/detik). Sedangkan menurut kualitas air tanahnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES /SK /VI I/ 2002 (Tabel 9) termasuk kategori baik.

a. Wilayah Potensi Air Tanah Tinggi

Wilayah potensi air tanah tinggi ini menempati hampir seluruh daerah dataran tinggi, yaitu meliputi seluruh wilayah Kec Wonorejo, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondang Wetan, dan Kecamatan Winongan, serta sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Grati.

b. Wilayah Potensi Air Tanah Sedang

Wilayah potensi air tanah sedang ini meliputi daerah dataran aluvium pantai dan kaki gunung api, yaitu meliputi hampir seluruh wilayah Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lekok, dan Kecamatan Nguling, serta sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Prigen, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Grati.

c. Wilayah Potensi Air Tanah Rendah

Wilayah potensi air tanah rendah ini mempunyai penyebaran hampir seluruh daerah tubuh dan puncak gunung api Arjuno-Welirang serta daerah perbukitan bergelombang yang ditutupi oleh batuan sedimen padu F. Jombang dan F. Kabuh, yaitu meliputi hampir seluruh wilayah Kecamatan Tutur, Kecamatan Tosari, Kecamatan Puspo dan Kecamatan Lumbang, serta sebagian wilayah Kecamatan Beji, Kecamatan Rembang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Pasrepan.

2.1.1.5. Kondisi Klimatologi

Wilayah Kabupaten Pasuruan pada umumnya beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh tiupan angin Muson. Angin Muson ini mempengaruhi pola iklim dan mengakibatkan terjadinya musim hujan (angin Muson Timur) dan musim kemarau (angin Muson Barat). Rata-rata suhu udara tertinggi terjadi pada Bulan Mei dan terendah pada Bulan Juli. Sedangkan rata-rata kelembaban udara tertinggi pada bulan Januari dan terendah terjadi pada bulan September.

Tabel 2.5
Suhu Udara dan Kelembaban Udara di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelembaban Udara (%)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	17,2	21,3	25,4	73,0	94,0	98,0
Februari	17,1	21,4	25,7	74,0	92,0	99,0
Maret	17,5	21,9	26,3	62,0	91,0	98,0
April	17,0	21,8	26,6	62,0	90,0	98,0
Mei	18,2	22,4	26,6	59,5	90,0	98,0
Juni	17,1	21,9	26,7	59,0	88,0	98,0
Juli	16,3	21,1	25,9	53,6	86,0	97,9
Agustus	16,0	21,4	26,8	51,3	84,0	98,0
September	17,1	22,3	27,5	45,0	80,0	94,0
Oktober	17,8	21,8	25,8	62,8	91,0	99,0
November	18,2	21,8	25,4	66,4	93,0	99,0
Desember	16,9	21,5	26,1	60,8	91,0	98,1

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka, 2023

Musim hujan biasanya terjadi mulai Bulan November sampai dengan Bulan Mei, sedangkan musim kemarau biasanya mulai Bulan Juni sampai dengan Bulan Oktober. Data curah hujan sepanjang tahun 2022 di Kabupaten Pasuruan berdasarkan Data BMKG Stasiun Geofisika Pasuruan sebagaimana pada grafik di bawah ini.

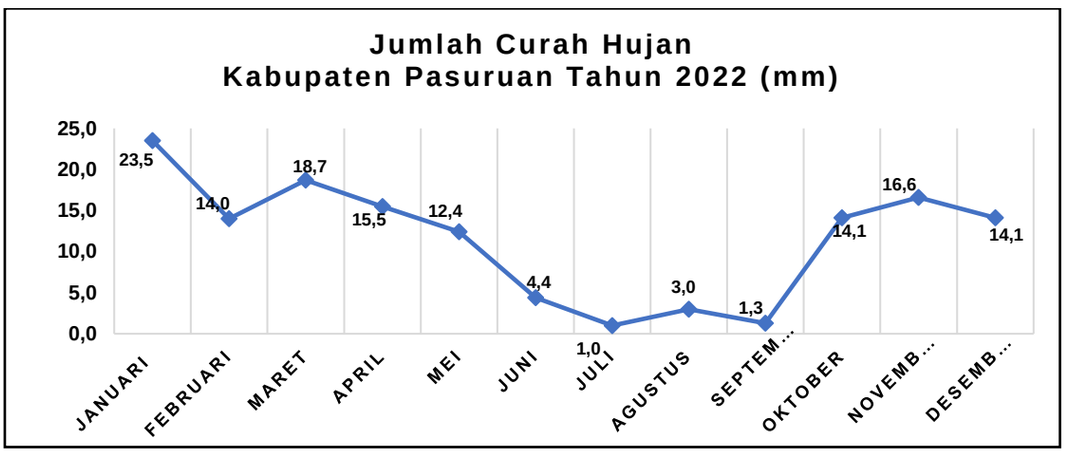

Grafik 2.1 Jumlah Curah Hujan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka, 2022

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa curah hujan paling tinggi terjadi pada Bulan Januari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada Bulan Juli. Rata-rata curah hujan per bulan Kabupaten Pasuruan adalah 11,6 mm.

2.1.1.6. Kondisi Penggunanaan Lahan.

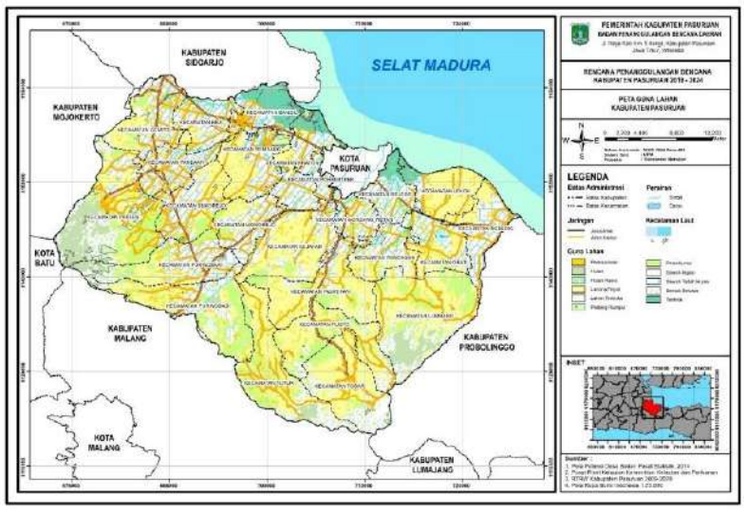

Penggunaan lahan merupakan proses panjang pembangunan yang berpengaruh terhadap kerentanan suatu wilayah.

Gambar 2.4 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pasuruan
Sumber: Badan Pertanahan Nasional, 2017

Persebaran penggunaan lahan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa luas guna lahan terbesar di Kabupaten Pasuruan adalah sawah irigasi, dengan total luasan 389.073.550,587 m2. Luas lahan terbangun adalah 15.261.758,771 m2 (11,19%) dari luas total Kabupaten Pasuruan. Hutan dan semak belukar yang menjadi variabel nilai kerentanan masing masing memiliki luas 176.485.297,965 m2 dan 40.232.080,775 m2. Luas hutan sangat berpengaruh pada tingkat resiko bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor, karena rusaknya hutan dapat meningkat resiko bencana pada tiga jenis bencana tersebut.

Tabel 2.6
Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2013

No	Uraian Penggunaan Lahan	Luas Lahan (m^2)	(%)
1	Aneka Industri	14.765.996,387	0,994%
2	Industri Kecil	344.680,139	0,023%
3	Jasa dan Permukiman	151.082.038,245	10,169%
4	Peternakan Unggas	306.630,756	0,021%
5	Tambak	25.195.544,215	1,696%
6	Sawah Irigasi	389.073.550,587	26,187%
7	Sawah Tadah Hujan	22.819.534,847	1,536%
8	Buah-Buahan	87.986,002	0,006%
9	Kebun Campuran	48.162.199,470	3,242%
10	Perkebunan (Sudah Menghasilkan)	41.673.344,380	2,805%
11	Tegalan/Ladang	535.637.977,722	36,051%
12	Hutan Sejenis	176.485.297,965	11,878%
13	Padang Rumput	10.501.461,735	0,707%
14	Semak	40.232.080,775	2,708%

No	Uraian Penggunaan Lahan	Luas Lahan (m^2)	(%)
15	Kolam Air Tawar	15.667,390	0,001%
16	Lapangan Olahraga	3.198.786,977	0,215%
17	Tanah Kosong Sudah Diperuntukan	483.204,616	0,033%
18	Tanah kosong/tanah terbuka	18.181.668,571	1,224%
19	Sungai	3.225.073,791	0,217%
20	Danau/Situ/Telaga	1.888.426,623	0,127%
21	Jalan Aspal	1.197.233,686	0,081%
22	Kuburan/Pemakaman	1.201.168,810	0,081%

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, Hasil Digitasi dan Analisa, 2013

Berdasarkan Tabel 2.6, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Persentase luasan penggunaan lahan terhadap luasan keseluruhan wilayah Kabupaten Pasuruan yang terbesar yaitu tegalan/ladang (sekitar 36,1%), sawah irigasi (sekitar 26,2%), dan hutan (sekitar 1,9%), jasa dan permukiman penduduk (sekitar 10,2%);
- Luasan penggunaan lahan untuk Industri secara umum (terhadap keseluruhan luasan wilayah Kabupaten Pasuruan) adalah relatif kecil yaitu sekitar kurang dari 1%;
- Luasan penggunaan lahan untuk hutan (bukan penetapan kawasan) adalah sekitar 11,9%.

Potensi (kasar) untuk pembangunan terhadap lahan-lahan tidak potensial (diluar budidaya pertanian dan lindung) masih relatif cukup besar ke depan (yaitu meliputi penggunaan lahan berupa padang rumput, semak, dan tanah kosong) adalah sekitar 69.398.415,697 m2 atau 6.939,84 ha atau 4,7%.

Tabel 2.7
Persebaran Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasuruan

Penggunaan Lahan	Purwodadi	Tutur	Puspo	Lumbang
Padang Rumput	78,25	18,38	8,43	3,03
Semak Belukar	640,17	1.572,10	1.436,09	2.847,90
Permukiman	884,50	610,85	276,23	236,80
Sawah Irigasi	686,69	0	0	1,12
Sawah Tadah Hujan	885,89	0	0,68	16,87
Ladang/Tegal	2.831,85	4.105,22	3.769,23	5.233,57
Perkebunan	2.415,67	2.301,80	1.644,27	2.522,45
Air Tawar	0,27	0	0	0,33
Hutan	240,51	422,92	54,04	1.413,03
Penggunaan Lahan	**Pasrepan**	**Kejayan**	**Wonorejo**	**Purwosari**
Padang Rumput	3,17	14.30	5,03	304,09
Semak Belukar	578,13	230,02	0	604,44

Permukiman	553,83	773,23	608,56	968,61
Sawah Irigasi	727,50	2.048,90	2543,94	2.257,34
Sawah Tadah Hujan	217,98	471.31	162,28	1.066,08
Ladang/Tegal	5.030,84	4.030,64	693,33	1.268,77
Perkebunan	1.230,34	426,74	349,59	1.065,99
Air Tawar	0	0	0	
Hutan	0	0	0	360,66
Penggunaan Lahan	**Sukorejo**	**Prigen**	**Pandaan**	**Gempol**
Padang Rumput	81,02	1.155,44	18,51	105,93
Semak Belukar	29,22	0	1,88	90,35
Permukiman	844,52	3.956,80	821,13	1.167,19
Sawah Irigasi	2.662,80	1.306,03	3.147,84	2.751,17
Sawah Tadah Hujan	0	25,29	0	8,52
Ladang/Tegal	1.429,96	2.004,58	302,87	1.331,39
Perkebunan	763,38	0	61,46	431.67
Air Tawar	0	3,49	4,36	41,67
Hutan	0	2.453,39	0	0
Lahan Terbuka	0	1,02	0	0
Padang Pasir	0	0	0	121,37
Penggunaan Lahan	**Beji**	**Bangil**	**Rembang**	**Kraton**
Padang Rumput	24,44	107,85	541,49	143,08
Semak Belukar	29,59		5,94	
Permukiman	658,24	491,51	562,71	636,54
Sawah Irigasi	2823,36	1.378,19	2.130,96	3.117,82
Sawah Tadah Hujan	0	0	0	0
Ladang/Tegal	294,23	91,69	2.412,23	600,43
Perkebunan	65,50	22.,56	60,84	86,60
Air Tawar	19,01	28,48	4,56	33,81
Hutan	0	0	0	0
Lahan Terbuka	0	0	0	0
Padang Pasir	0	0	0	0
Hutan Rawa	0	151,56	0	0
Tambak	0	2.047,03	0	812,89
Penggunaan Lahan	**Pohjentrek**	**Gondangwetan**	**Winongan**	**Grati**
Padang Rumput	0	6,52	4,89	
Semak Belukar	0	0,21	358,80	101,41
Permukiman	0	446,19	369,41	664,53
Sawah Irigasi	1.015,73	1.926,53	1.813,36	1.672,27
Sawah Tadah Hujan			82,98	163,53
Ladang/Tegal	0,36	0	1286,76	1.675,14
Perkebunan	45,01	319,29	375,25	198,08
Air Tawar	3,08	0	0,15	0
Hutan	0	0	0	0
Lahan Terbuka	0	0	0	0
Padang Pasir	0	0	0	0

Hutan Rawa	0	0	0	0
Tambak	0	0	0	0
Penggunaan Lahan	**Nguling**	**Lekok**	**Rejoso**	**Tosari**
Padang Rumput	10,15	31,38	15,53	63,72
Semak Belukar	5,39	24,67	0	2.371,48
Permukiman	603,13	488,59	380,54	105,72
Sawah Irigasi	1.676,37	440,48	2.262,94	0
Sawah Tadah Hujan	1.171,71	18,65	0	0,09
Ladang/Tegal	1.025,11	3.245,32		4.380,63
Perkebunan	11,53	8,15	257,16	950,95
Air Tawar	1,13	5,26	20,96	0
Hutan	0	0	0	0
Lahan Terbuka	0	0	0	12,33
Padang Pasir	0	0	0	0
Hutan Rawa	3,79	18,91	7,59	0
Tambak	24,52	483,14	571,22	0
Danau	0	2,66	0	0,29
Padang Pasir	0	0	0	275,01

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia 1:25.000

2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah.

A. Pengembangan Pariwisata

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwistaan Nasional Tahun 2010 – 2025, Kabupaten Pasuruan masuk dalam salah satu Prioritas Nasional Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS). Gunung Bromo merupakan salah satu destinasi utama yang mampu menarik kunjungan Wisatawan Nusantara maupun Internasional. Selanjutnya Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 tahun 2019, tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, yang menjadi regulasi dalam rangka percepatan Pembangunan Berbasis Kawasan di Tingkat Regional Jawa Timur.

Dalam rangka mendukung Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) khususnya di Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga mengembangkan sektor lainnya yang menunjang Sektor Pariwisata. Salah satunya adalah Sektor Pertanian dan Perikanan dengan

membentuk Kawasan Agropolitan. Kawasan Agropolitan meliputi Kecamatan Tutur, Tosari, Puspo, Lumbang, Prigen, Purwodadi, Purwosari, Sukorejo, Rembang dan Wonorejo. Tujuan dibentuknya Kawasan Agropolitan adalah untuk mendukung Wisata Bromo Tengger Semeru sehingga Wisatawan tidak hanya berkunjung ke Gunung Bromo tetapi juga Kawasan Agropolitan ini. Potensi Unggulan dari Kawasan Agropolitan ini antara lain adalah Apel, Durian, Bunga Krisan, Bunga Edelweis, Kentang, Kopi, Paprika, Susu, Bunga Sedap Malam dan Mangga Putar.

Pada tahun 2023, Kabupaten Pasuruan melaksanakan pembangunan Gerbang Wisata Rest Area Bromo Tengger Cultural di Desa Ngadiwono di Kecamatan Tosari melalui ITDP tahap III. Selain itu Kabupaten Pasuruan juga mengembangkan AATP (Arjuno Agro Technopark) sebagai pendukung Kawasan Bromo Tengger Semeru.

Kondisi eksiting dan rencana pengembangan kawasan Prioritas Pariwisata Kabupaten Pasuruan antara lain:

1. Penguatan Wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (proyek KSPN) Peningkatan Fasilitas BTS (Pengembangan Wisata Halal Pemandian Alam Banyubiru) di desa Desa Sumberejo, Kecamatan Winongan;
2. Penataan dan Pengembangan Kawasan Agropolitan (Kawasan Agropolitan Tutur – Tosari) yaitu Pusat Pengembangan Perbenihan Kentang Tosari di Desa Ngadiwono Kecamatan Tosari dan Kebun Dinas Tutur (Rencana Rest Area) di Desa Wonosari, Kecamatan Tutur;
3. Penataan dan Pengembangan wisata Edukasi Peternakan Purwosari dan Penataan Kawasan Pusat Pelayanan Peternakan (UPA) di Desa Sumberejo, Kecamatan Purwosari.

B. Pengembangan Kawasan Agropolitan

Dalam rangka mendukung Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) khususnya di Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga mengembangkan sektor lainnya yang menunjang Sektor Pariwisata. Salah satunya adalah Sektor Pertanian dan Perikanan dengan membentuk Kawasan Agropolitan. Kawasan Agropolitan meliputi Kecamatan Tutur, Tosari, Puspo, Lumbang, Prigen, Purwodadi, Purwosari, Sukorejo, Rembang dan Wonorejo. Tujuan dibentuknya

Kawasan Agropolitan adalah untuk mendukung Wisata Bromo Tengger Semeru sehingga Wisatawan tidak hanya berkunjung ke Gunung Bromo tetapi juga Kawasan Agropolitan ini. Potensi Unggulan dari Kawasan Agropolitan ini antara lain adalah Apel, Durian, Bunga Krisan, Bunga Edelweis, Kentang, Kopi, Paprika, Susu, Bunga Sedap Malam dan Mangga Putar.

C. Pengembangan Kawasan Minapolitan

Lokasi pengembangan Kawasan Minapolitan Budidaya Perikanan di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

1. Kecamatan Beji : Desa Gunungsari sebagai lokasi pengembangan minapolitan lele;
2. Kecamatan Grati : Desa Ranuklindungan, Desa Sumber Dawesari, Kelurahan Gratitunon sebagai lokasi kawasan minapolitan nila;
3. Kecamatan Rejoso : Desa Jarangan dan Desa Patuguran sebagai lokasi kawasan minapolitan udang dan bandeng;
4. Kecamatan Lekok : Desa Tambak Lekok sebagai lokasi Kawasan minapolitan udang dan bandeng.

Upaya pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Pasuruan, anatara lain:

1. Peningkatan industry budidaya ikan melalui normalisasi saluran tambak desa dan pembangunan jembatan saluran tambak desa;
2. Pengendalian atau penanganan hama atau penyakit dan penanganan limbah;
3. Peningkatan nilai tambah produksi perikanan melalui pembinaan atau pelatihan bagi kelompok pengolahan dan pemasaran;
4. Revitalisasi TPI;
5. Pengembangan Wisata Manggrove.

2.1.1.8. Wilayah Potensi Rawan Bencana

A. Rawan Bencana Alam

Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya tidak terlepas dari kondisi geofisiknya. Keberadaan gunung berapi, adanya dataran rendah dan kondisi dataran tinggi yang mulai terdegradasi menjadikan Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa potensi bencana alam yaitu:

1. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi

Yaitu kawasan Gunung Bromo seluas 1.320 ha dan daerah waspada seluas 751 ha yang berada di Desa Ngadirejo, Mororejo, Wonokitri dan Desa Kedawung di Kecamatan Tosari dan Gunung Welirang, sedangkan kawasan rawan bencana gunung berapi di Gunung Welirang seluas 1.368 Ha dan waspada seluas 809 Ha yang meliputi sebagian dari Desa Lumbangrejo dan Kelurahan Pecalukan di Kecamatan Prigen, Desa Cendono, Desa Sumberejo dan Desa Tambaksari di Kecamatan Purwosari.

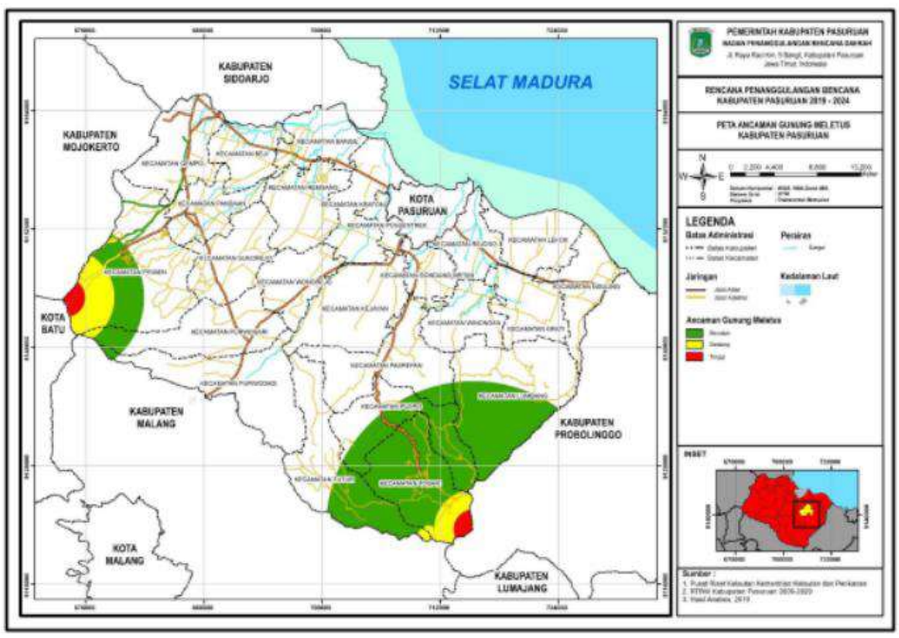

Gambar 2.5 Peta Ancaman Gunung Meletus Kabupaten Pasuruan
Sumber: RPB Kabupaten Pasuruan

2. Kawasan Rawan Longsor/Kerawanan Gerakan Tanah

Potensi kawasan longsor di Kabupaten Pasuruan teridentifikasi seluas 37.626,4 ha, yaitu di wilayah dengan kelerengan > 40%. Wilayah tersebut berada di Kecamatan Tutur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang dan Kecamatan Prigen.

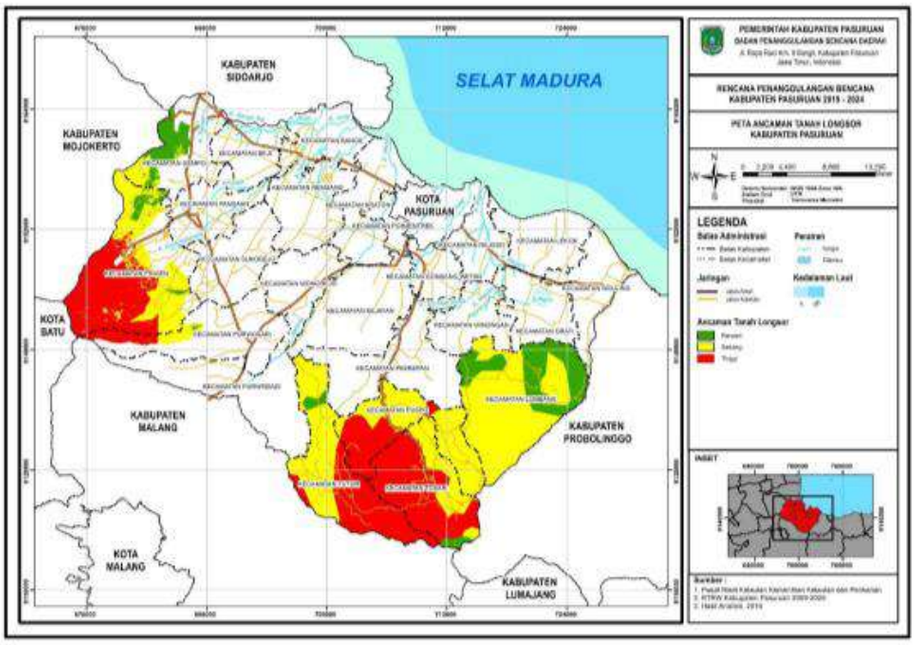

Gambar 2.6 Peta Ancaman Tanah Longsor Kabupaten Pasuruan
Sumber: RPB Kabupaten Pasuruan,

3. Kawasan Rawan Banjir

Potensi kawasan rawan banjir teridentifikasi seluas 11.948,15 ha, berada di Kecamatan Gempol, Beji, Rembang, Bangil, Kraton, Grati, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso dan Winongan. Wilayah tersebut merupakan daerah hilir yang dipengaruhi adanya daerah aliran sungai. Kondisi banjir ini disebabkan adanya hujan di hulu sungai cukup tinggi sehingga mengakibatkan air meluap.

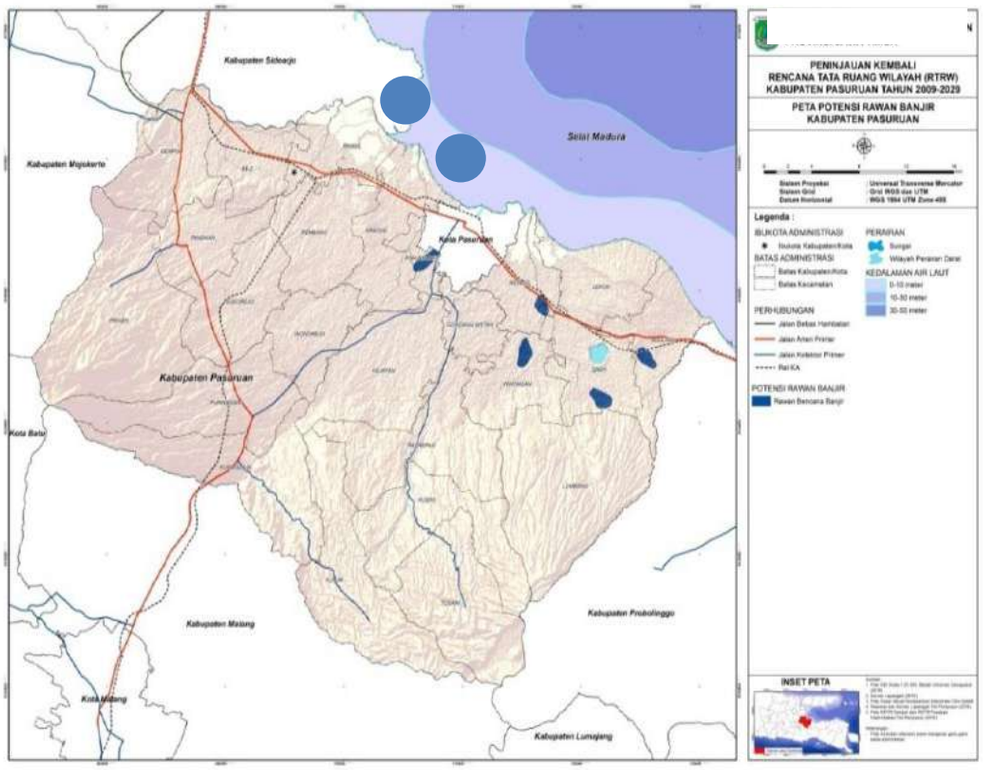

Gambar 2.7 Peta Kondisi Kerawanan
Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Pasuruan
Sumber: BPBD Kabupaten Pasuruan, 2017

4. Kawasan Rawan Bahaya Angin Puyuh/Puting Beliung

Berpotensi di Kecamatan Gempol, Pandaan dan Sukorejo serta kemungkinan beberapa kecamatan lain mengingat terjadinya anomali iklim pada beberapa tahun terakhir.

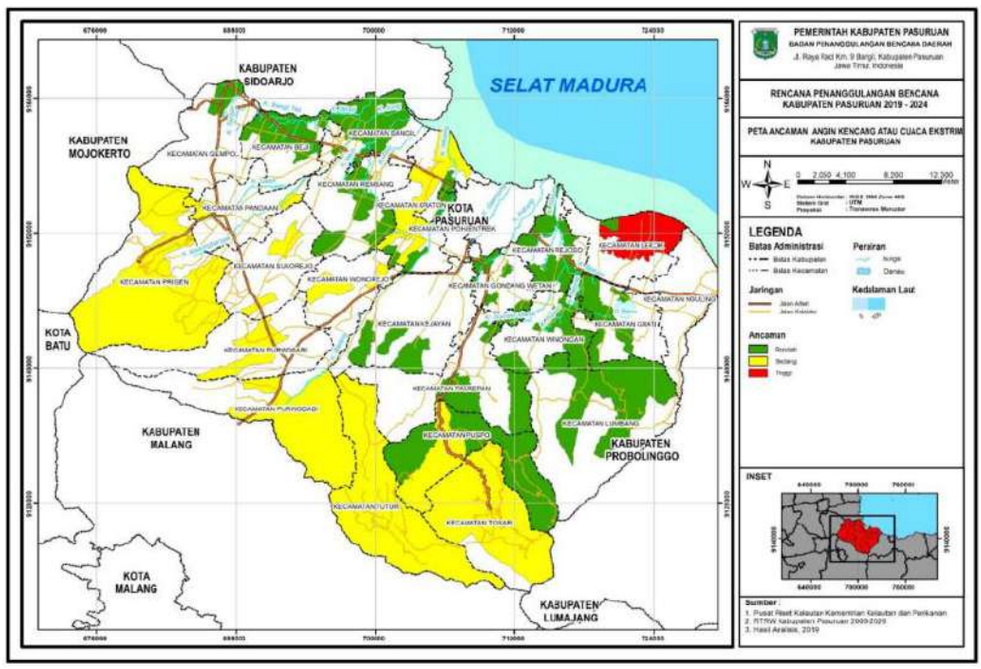

Gambar 2.8 Peta Ancaman Angina tau Cuaca Ekstrim Kabupaten Pasuruan
Sumber: RPB Kabupaten Pasuruan,

5. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan

Berpotensi terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Pasuruan yang merupakan kawasan hutan dan semak belukar diantaranya beberapa yang merupakan Kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi pengelolanya adalah Perhutani, Kawasan Cagar Alam (CA) Gunung Baung, Cagar Alam Gunung Abang, Taman Wisata Alam Tretes, Kawasan Hutan/Pegunungan di R. Soeryo, Kawasan Pegunungan Arjuna Welirang dan Penanggungan (Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen dan Kecamatan Gempol).

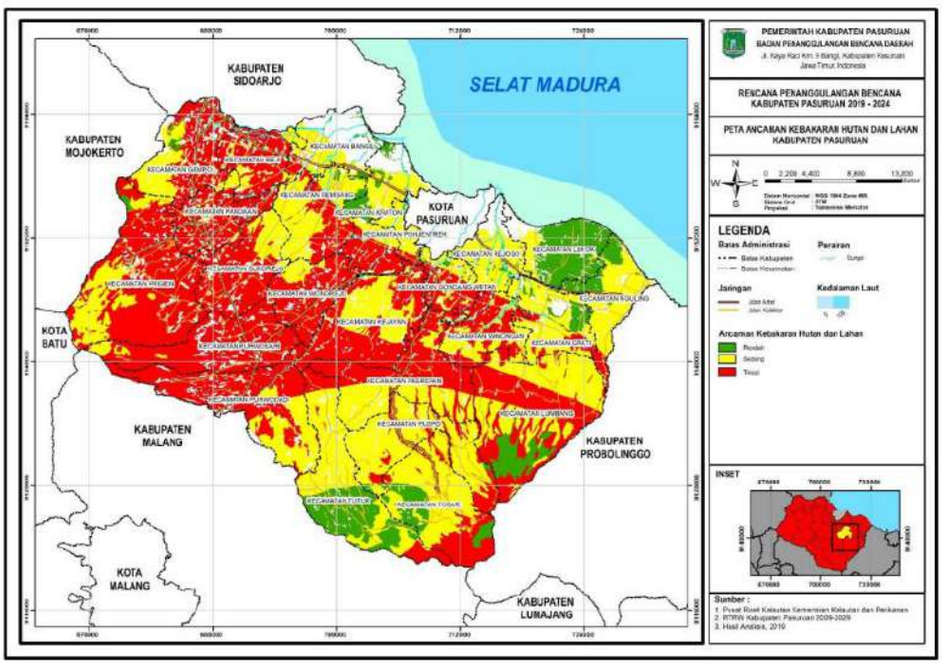

Gambar 2.9 Peta Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Pasuruan
Sumber: RPB Kabupaten Pasuruan,

6. Kekeringan

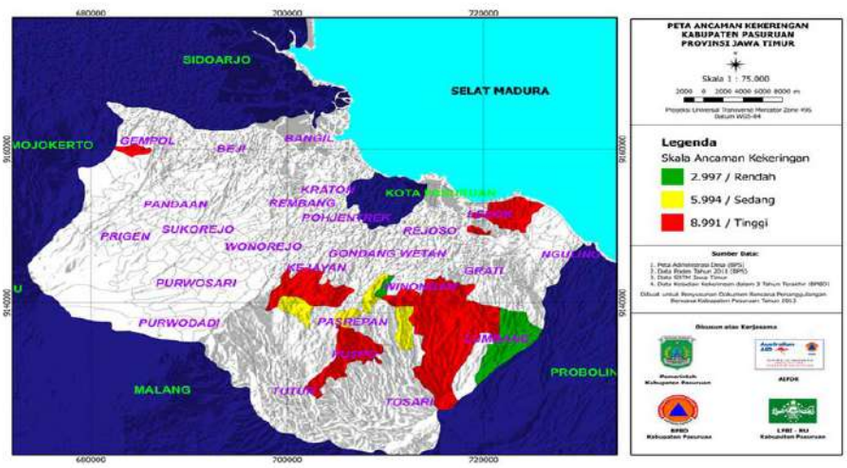

Gambar 2.10 Peta Ancaman Kekeringan Kabupaten Pasuruan
Sumber: Hasil Pemetaan Ancaman, 2013

Ancaman kekeringan yang terjadi di Kabupaten Pasuruan terbagi atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

a. Ancaman kekeringan tinggi, berpotensi terjadi di beberapa desa berikut ini: Kecamatan Lumbang (Desa Kronto, Desa Pancur, Desa Karang Asem, Desa Cukurguling, Desa Lumbang, Desa Bulukandang, Desa Karangjati dan Desa Watulumbung), Kecamatan Kejayan (Desa Ambal-Ambil, Desa Klangrong, Desa Oro-Oro Pule, Desa Lorokan, Desa Kedungpengaron dan Desa Benerwojo), Kecamatan Lekok (Desa Pasinan, Desa Wates, Desa Semedusari dan Desa Branang), Kecamatan Winongan (Desa Kedungrejo, Desa Umbulan, Desa Jeladri, Desa Sumberejo dan Desa Sruwi), Kecamatan Puspo (Desa Palangsari, Desa Puspo dan Desa Jimbaran), Kecamatan Gempol (Desa Bulusari), Kecamatan Grati (Desa Karanglo);
b. Ancaman kekeringan sedang terjadi di Kecamatan Pasrepan (Desa Sapulante, Desa Mangguan, Desa Petung, Desa Sibon, Desa Lemahbang dan Desa Tambakrejo);
c. Ancaman kekeringan rendah terjadi di Kecamatan Lumbang (Desa Banjarimbo dan Desa Welulang) dan Kecamatan Winongan (Desa Minggir).

Rekapitulasi kejadian bencana di Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.8
Kejadian Bencana di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

No	Kecamatan	Banjir Genangan	Banjir Bandang	Banjir ROB	Tanah Longsor	Angin Kencang	Pohon Tumbang	Kekering-an	Total
1	Bangil	11	0	0	0	0	11	0	22
2	Beji	12	0	0	0	0	4	0	16
3	Gempol	8	0	0	1	1	9	0	19
4	Gondangwetan	9	0	0	0	2	2	0	13
5	Grati	14	0	0	2	2	2	0	20
6	Kejayan	1	0	0	1	2	6	0	10
7	Kraton	16	0	4	0	3	5	0	28
8	Lekok	1	0	1	0	2	0	1	5
9	Lumbang	0	0	0	2	1	1	1	5
10	Nguling	5	1	1	0	3	5	0	15
11	Pandaan	0	0	0	2	1	5	0	8
12	Pasrepan	1	0	0	3	2	1	1	8
13	Pohjentrek	4	1	0	0	1	1	0	7
14	Prigen	0	0	0	1	0	2	0	3
15	Purwodadi	0	0	0	4	3	2	0	9
16	Purwosari	1	0	0	0	1	1	0	3
17	Puspo	0	0	0	19	2	0	0	21
18	Rejoso	13	0	0	0	3	5	0	21
19	Rembang	0	0	0	0	1	3	0	4
20	Sukorejo	0	0	0	0	3	1	0	4
21	Tosari	0	0	0	55	0	0	0	55
22	Tutur	0	0	0	11	1	1	0	13
23	Winongan	10	0	0	0	2	3	1	16
24	Wonorejo	0	0	0	0	6	1	0	7

No	Kecamatan	Banjir Genangan	Banjir Bandang	Banjir ROB	Tanah Longsor	Angin Kencang	Pohon Tumbang	Kekering-an	Total
TOTAL		106	2	6	101	42	71	4	332

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2022

B. Rawan Bencana Non Alam

Potensi bencana non alam, yaitu kejadian kebakaran baik di area permukiman maupun area industri. Kejadian kebakaran di Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.9
Kejadian Kebakaran di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

No.	Kejadian Kebakaran	
	Kecamatan	Jumlah Kejadian
1	Sukorejo	2
2	Gempol	17
3	Kejayan	3
4	Beji	18
5	Purwosari	5
6	Kraton	15
7	Nguling	1
8	Bangil	31
9	Gondangwetan	1
10	Grati	2
11	Pandaan	7
12	Rembang	12
13	Wonorejo	1
14	Pohjentrek	4
15	Prigen	1
	Jumlah	**120**

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan, 2022

2.1.1.9. Kondisi Demografi

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Kondisi penduduk tidak hanya diperhatikan pada aspek kuantitas namun juga aspek kualitas. Jumlah penduduk yang besar tanpa didukung dengan kualitas akan menimbulkan permasalahan dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Sebagaimana ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri (Surat Nomor 050/4014/Bangda Tanggal 16 Agustus 2018 Perihal Penggunaan Data Kependudukan dalam Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah), bahwa untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), diharuskan menggunakan data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

A. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Selama kurun waktu lima tahun (2018–2022) jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan mengalami tren kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan 0,53% setiap tahun. S*ex Ratio* di Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2020 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Pada tahun 2022, jumlah warga negara asing di Kabupaten Pasuruan sebanyak 100 orang.

Tabel 2.10
Jumlah dan Struktur Umur Penduduk di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020-2022

No	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.585.340	1.605.037	1.616.190
	➢ Laki-Laki	794.899	801.798	806.034
	➢ Perempuan	790.441	803.239	810.156
2	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	1.076	1.089	1.096
3	Sex Ratio (L/P) (%)	100,56	99,82	99,49
4	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur			
	➢ 0 - 14 tahun (%)	21,33	22,30	23,21
	➢ 15 – 64 tahun (%)	71,74	70,79	69,94
	➢ Di atas 65 tahun (%)	6,94	6,92	6,85

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2022

Kepadatan Penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah administrasi (kabupaten/kota). Tingkat kepadatan penduduk ini sangat berhubungan erat dengan daya dukung dan daya tampung wilayah. Berdasarkan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2022, kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Pandaan, sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Tosari.

Tabel 2.11
Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020-2022 (Jiwa/Km2)

No	Kecamatan	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Purwodadi	670	682	690
2	Tutur	611	624	632
3	Puspo	463	474	476
4	Lumbang	278	280	282
5	Pasrepan	565	576	583
6	Kejayan	817	830	837

No	Kecamatan	Tahun		
		2020	2021	2022
7	Wonorejo	1.243	1.266	1.279
8	Purwosari	1.393	1.411	1.427
9	Sukorejo	1.487	1.502	1.508
10	Prigen	710	719	723
11	Pandaan	2.515	2.563	2.577
12	Gempol	1.964	1.989	1.994
13	Beji	2.145	2.196	2.217
14	Bangil	1.887	1.878	1.881
15	Rembang	1.536	1.571	1.588
16	Kraton	1.704	1.707	1.720
17	Pohjentrek	2.574	2.611	2.621
18	Gondang Wetan	2.126	2.145	2.163
19	Winongan	980	982	983
20	Grati	1.573	1.568	1.579
21	Nguling	1.443	1.460	1.466
22	Lekok	1.613	1.642	1.656
23	Rejoso	1.268	1.284	1.298
24	Tosari	190	190	188
	Total	**1.076**	**1.089**	**1.090**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2022 Diolah

B. Laju Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasuruan cenderung menunjukkan tren penurunan selama tahun 2020 sampai dengan 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa program pengendalian penduduk sudah berhasil mengendalikan jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan.

Grafik 2.11 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2022
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Pasuruan, 2022

C. Dinamika Penduduk

Dinamika Penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Pada tahun

2022, penduduk yang masuk lebih banyak daripada penduduk yang keluar dan kelahiran lebih tinggi daripada kematian.

Tabel 2.12
Dinamika Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Jiwa)

Bulan	Keluar	Masuk	Kelahiran	Kematian
Januari	928	1.015	4.895	1.624
Februari	776	742	3.626	1.214
Maret	801	874	3.071	1.245
April	563	680	3.018	1.262
Mei	638	605	2.480	732
Juni	1.046	960	4.696	1.447
Juli	873	827	3.892	1.236
Agustus	936	1.017	4.540	1.306
September	830	799	3.864	1.336
Oktober	778	780	3.282	1.260
November	960	974	3.704	1.540
Desember	978	873	3.804	1.615
Total	**10.107**	**10.146**	**44.872**	**15.817**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2022

D. Distrbusi atau Persebaran Penduduk

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah. Persebaran penduduk Kabupaten Pasuruan dari tahun 2020 sampai 2022 pada 24 Kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Gempol yaitu sekitar 8 persen lebih dari total seluruh penduduk di Kabupaten Pasuruan. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Tosari karena kurang dari 1,2 persen seluruh penduduk tinggal di Kecamatan Tosari.

Tabel 2.13
Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2022 (Jiwa)

No	Kecamatan	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Purwodadi	68.624	69.838	70.675
2	Tutur	52.753	53.829	54.524
3	Puspo	27.003	27.680	27.778
4	Lumbang	34.957	35.140	35.405
5	Pasrepan	50.847	51.796	52.435

No	Kecamatan	Tahun		
		2020	2021	2022
6	Kejayan	64.653	65.656	66.228
7	Wonorejo	58.774	59.899	60.499
8	Purwosari	83.417	84.474	85.446
9	Sukorejo	86.494	87.384	87.711
10	Prigen	86.506	87.654	88.086
11	Pandaan	108.836	110.886	111.488
12	Gempol	127.477	129.132	129.451
13	Beji	85.585	87.602	88.460
14	Bangil	84.159	83.767	83.873
15	Rembang	65.292	66.771	67.530
16	Kraton	86.502	86.636	87.287
17	Pohjentrek	30.574	31.021	31.139
18	Gondang Wetan	55.805	56.297	56.771
19	Winongan	45.069	45.162	45.204
20	Grati	79.890	79.627	80.164
21	Nguling	61.453	62.187	62.468
22	Lekok	75.111	76.483	77.126
23	Rejoso	46.908	47.503	48.009
24	Tosari	18.651	18.613	18.433
	Total	**1.585.340**	**1.605.037**	**1.616.190**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2022

E. Ketenagakerjaan dan Komposisi Penduduk

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai 2022. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja selalu mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai 2022. Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas berbanding lurus dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun jumlah penduduk yang mengganggur meningkat pada tahun 2022, akan tetapi tingkat pengangguran terbuka terus mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai 2022. Hal tersebut dikarenakan jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pengangguran.

Tabel 2.14
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2022

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	Tahun		
			2020	2021	2022
1	Angkatan Kerja	Jiwa	868.795	893.726	916.175

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	Tahun		
			2020	2021	2022
	➢ Bekerja	Jiwa	814.614	839.861	862.062
	➢ Pengangguran	Jiwa	54.181	53.865	54.113
2	Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	415.115	401.053	389.023
	➢ Sekolah	Jiwa	78.845	80.310	70.415
	➢ Mengurus Rumah Tangga	Jiwa	269.789	247.535	258.013
	➢ Lainnya	Jiwa	66.481	73.208	60.595
3	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	Jiwa	1.283.910	1.294.779	1.305.198
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,67	69,03	70,19
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,24	6,03	5,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

Tabel 2.15
Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020-2022 (Jiwa)

No	Pekerjaan	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Belum/Tidak Bekerja	362.718	366.672	378.282
2	Mengurus Rumah Tangga	224.028	230.025	238.608
3	Pelajar/Mahasiswa	248.897	235.356	224.234
4	PNS/TNI/Polri/Pensiunan	17.287	16.834	16.664
5	Petani/Peternak/Nelayan	194.169	189.977	189.391
6	Buruh Tani/Ternak/Nelayan	20.639	20.114	20.111
7	Perdagangan/Industri/Kontruksi/Transportasi	1.893	1.862	1.814
8	Buruh Harian Lepas	8.968	8.948	9.122
9	Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honorer	346.074	351.171	357.574
10	Guru/Dosen	11.611	11.896	12.306
11	Pembantu Rumah Tangga	700	638	622
12	Tukang Batu/Kayu	2.227	2.149	2.184
13	Pedagang/Wiraswasta	157.962	157.972	159.497
14	Kepala/Perangkat Desa	1.184	1.186	1.152
15	Lainnya	1.398	7.123	4.629

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2022, Diolah

Berdasarkan tabel 2.14 dapat diketahui bahwa komposisi penduduk di Kabupaten Pasuruan selama tahun 2020-2022 jika dilihat dari pekerjaan, paling banyak bekerja sebagai Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honorer. Hal tersebut dikarenakan banyaknya perusahan di Kabupaten Pasuruan sehingga sebagian besar

penduduknya memilih untuk bekerja sebagai Karyawan Swasta. Sedangkan jenis pekerjaan yang paling sedikit dilakukan oleh Penduduk di Kabupaten Pasuruan adalah Pembantu Rumah Tangga.

Komposisi penduduk di Kabupaten Pasuruan selama tahun 2020-2022 jika dilihat dari tingkat pendidikan, paling banyak yang masih Tamat SD/sederajat sedangkan yang paling sedikit adalah S2/S3. Jika dilihat dari kontribusinya, penduduk yang belum tamat SD/sederajat, tamat SD/sederajat dan tamat SLTP/sederajat mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai 2022 sedangkan pada penduduk yang tamat SLTA/sederajat, D1/D2/D3, D4/S1 dan S2/S3 mengalami peningkatan.

Tabel 2.16
Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020-2022

No	Pendidikan	2020		2021		2022	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Tidak/belum sekolah	291.829	18,41	324.914	20,28	341.313	21,12
2	Belum tamat SD/sederajat	285.313	18,00	244.233	15,25	235.317	14,56
3	Tamat SD/sederajat	508.829	32,10	505.584	31,56	501.397	31,02
4	Tamat SLTP/sederajat	217.236	13,70	217.145	13,55	216.089	13,37
5	Tamat SLTA/sederajat	238.060	15,02	260.185	16,24	269.151	16,65
6	D1/D2/D3	9.028	0,57	9.614	0,60	9.871	0,61
7	D4/S1	33.457	2,11	38.552	2,41	41.085	2,54
8	S2/S3	1.588	0,10	1.825	0,11	1.967	0,12
	Total	**1.585.340**	**100,00**	**1.602.052**	**100,00**	**1.616.190**	**100**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2022, Diolah

Komposisi penduduk di Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2022 jika dilihat dari agama yang dianut, sebagian besar menganut agama Islam sedangkan yang paling sedikit menganut agama Konghuchu.

Tabel 2.17
Komposisi Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020-2022

No	Agama dan Kepercayaan	2020		2021		2022	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Islam	1.560.134	98,410	1.580.238	98,455	1.591.629	98,48
2	Kristen	7.100	0,448	6.974	0,435	6.883	0,43
3	Katholik	2.494	0,157	2.430	0,151	2.402	0,15
4	Hindu	15.185	0,958	14.991	0,934	14.891	0,92
5	Budha	404	0,025	367	0,023	351	0,02
6	Konghuchu	13	0,001	11	0,001	11	0,00
7	Kepercayaan	10	0,001	26	0,002	23	0,00

No	Agama dan Kepercayaan	2020		2021		2022	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
	Total	**1.585.340**	**100**	**1.605.037**	**100**	**1.616.190**	**100**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2022, Diolah

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Pasuruan.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertumbuhan PDRB, dalam hal ini adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB menunjukkan nilai produksi barang dan jasa di suatu wilayah, terdiri dari 17 lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2022 beserta perbandingannya angka Jawa Timur dan Nasional sebagaimana gambar 2.2.1.

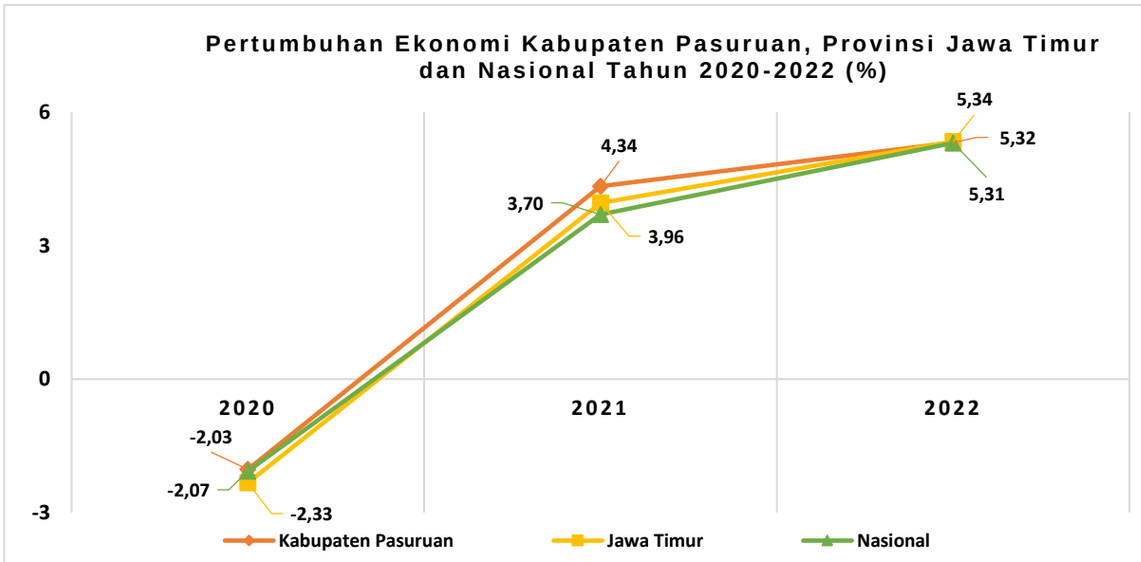

Gambar 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Selama tiga tahun terakhir (2020-2022), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan secara stabil mengalami peningkatan. Dalam

periode tersebut pertumbuhan ekonomi selalu di atas angka Jawa Timur (kecuali tahun 2020 selisih 0,01%) dan angka Nasional. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 secara menyeluruh, baik tingkat nasional maupun daerah, sempat mengalami kontraksi (pertumbuhan minus) akibat pandemi *covid-19,* namun kembali pulih secara perlahan mulai tahun 2021.

Berdasarkan data PDRB yang ada, lapangan usaha yang menjadi basis pembentuk struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan, secara konsisten memberikan kontribusi tertinggi terhadap volume PRDB ADHB, 5 (lima) terbesar yaitu : (1) Industri Pengolahan ; (2) Konstruksi ; (3) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ; (4) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Namun demikian, kelima lapangan usaha tersebut tidak secara konsisten pula memberikan kontribusi yang juga tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Lapangan usaha yang menunjukkan angka pertumbuhan tertinggi tahun 2022, yaitu : (1) Transportasi dan Pergudangan (14,19%) ; (2) Jasa Lainnya (11,78%) ; dan (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10,40%) ; (4) Pengadaan Listrik dan Gas (8,26%) ; (5) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (6,98%).

Berdasarkan kondisi tersebut, maka fokus utama ditujukan pada lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap volume PDRB dan pertumbuhan ekonomi, yaitu : Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Kedua lapangan usaha tersebut memiliki potensi yang dapat berkembang secara berkelanjutan.

Tabel 2.2.1.
Kontribusi Lapangan Usaha Terhadadap Volume dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.

No	Kontributor Tertinggi Volume PDRB ADHB Tahun 2022		Kontributor Tertinggi Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2022	
	Lapangan Usaha	%	Lapangan Usaha	%
1	Industri Pengolahan	60,42	Transportasi dan Pergudangan	14,19
2	Konstruksi	11,08	Jasa Lainnya	11,78
3	**Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**	**9,85**	**Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**	**10,40**
4	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,01	Pengadaan Listrik dan Gas	8,26
5	**Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**	**3,58**	**Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**	**6,98**

Sumber : BPS Kabupaten Pasuruan, 2022, diolah.

B. Inflasi

Inflasi merupakan perubahan indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen diperoleh melalui survey dilaksanakan oleh BPS setiap bulan terhadap sejumlah harga barang/jasa yang yang dikonsumsi masyarakat. Laju Inflasi perlu dilakukan pengendalian karena berdampak pada tingkat daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Survey BPS di Jawa Timur hanya dilakukan di 8 (delapan) Kabupaten/Kota, yaitu: (1) Kabupaten Jember ; (2) Kabupaten Banyuwangi; (3) Kabupaten Sumenep ; (4) Kota Kediri ; (5) Kota Malang ; (6) Kota Probolinggo ; (7) Kota Madiun ; dan Kota (8) Kota Surabaya. Berdasarkan hal tersebut maka dalam menggambarkan inflasi di Kabupaten Pasuruan mengacu pada daerah yang memiliki kemiripan pola konsumsi masyarakat, yaitu Kota Probolinggo.

Perkembangan inflasi dalam periode tahun 2018-2022 Kabupaten Pasuruan/Kota Probolinggo beserta perbandingannya dengan inflasi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana gambar 2.2.2. Secara umum inflasi dapat dikendalikan, namun terjadi lompatan yang tinggi secara menyeluruh terjadi di tahun 2022. Kondisi tersebut dipengaruhi situasi ekonomi global khususnya dampak perang Rusia-Ukraina.

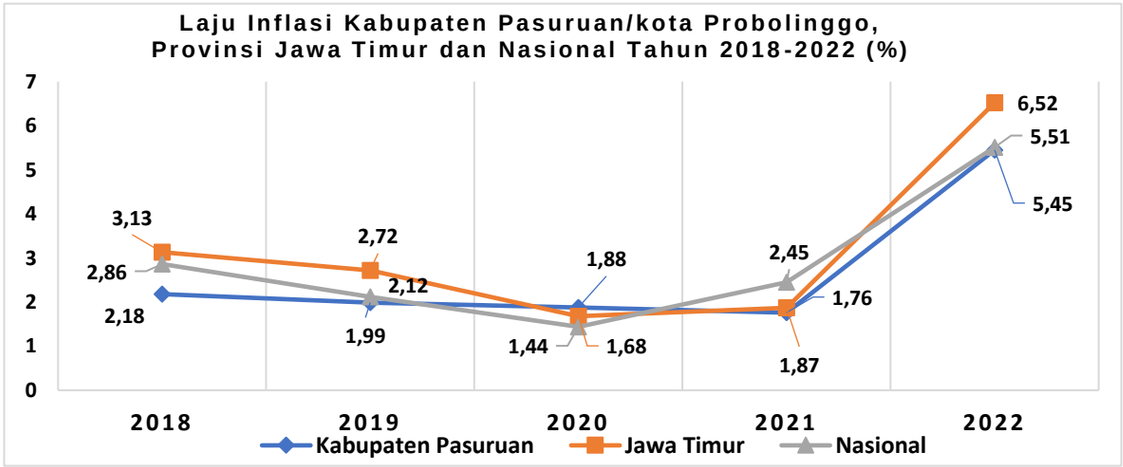

Gambar 2.2.2 Inflasi Kabupaten Pasuruan/Kota Probolinggo, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

C. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan menurut BPS merupakan kondisi ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Pasuruan beserta perbandingannya dengan angka Jawa Timur dan Nasional sebagaimana gambar 2.2.3. Secara umum kondisi kemiskinan di Kabupaten Pasuruan berada di bawah rata-rata Jawa Timur dan Nasional. Namun demikian ada kecenderungan peningkatan akibat dampak pandemi covid-19 yang dimulai tahun 2020. Akan tetapi pada tahun 2022, seiring dengan pulihnya Pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dikarenakan sektor perekonomian yang mulai membaik pasca pandemi. Strategi untuk mengurangi kemiskinan antara lain dengan menurunkan beban pengeluaran melalui perlindungan sosial dan meningkatkan pendapatan melalui produktivitas dan inklusi keuangan.

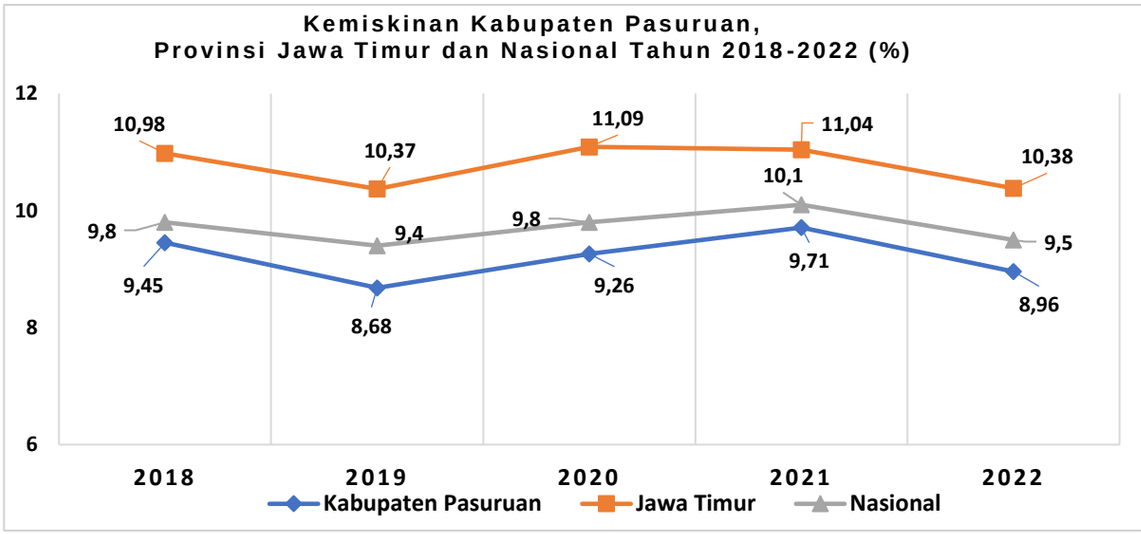

Gambar 2.2.3 Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Profil kemiskinan secara lebih rinci disajikan dengan melengkapi informasi tentang seberapa besar garis kemiskinan, indeks kedalamam, dan indeks keparahan sebagaimana tabel 2.2.2. Dalam periode 2018-2022 secara umum jumlah penduduk miskin mengalami penuruan. Secara kualitas kemiskinan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan kondisi yang lebih baik, yaitu ditunjukkan dengan menurunnya indeks kedalaman dan indeks keparahan. Indeks kedalaman menunjukkan semakin kecilnya jarak dengan garis kemiskinan sehingga mempunyai peluang lebih besar untuk dientaskan dari kemiskinan. Indeks keparahan menunjukkan semakin kecilnya kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin.

Tabel 2.2.2
Profil Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	152,48	141,09	151,43	159,78	148,62
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,45	8,68	9,26	9,7	8,96
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	331.057	335.653	355.299	368.686	394.016
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,5	1,56	1,15	1,17	1,29
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,37	0,43	0,23	0,24	0,29

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

D. Pendapatan Perkapita/PDRB perkapita

Pendapatan perkapita diukur dengan pendekatan PDRB ADHB perkapita adalah PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. Selama kurun waktu 2018-2022, pendapatan perkapita Kabupaten Pasuruan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan perkapita Provinsi Jawa Timur dan Nasional. PDRB perkapita Kabupaten Pasuruan juga selalu mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,23%.

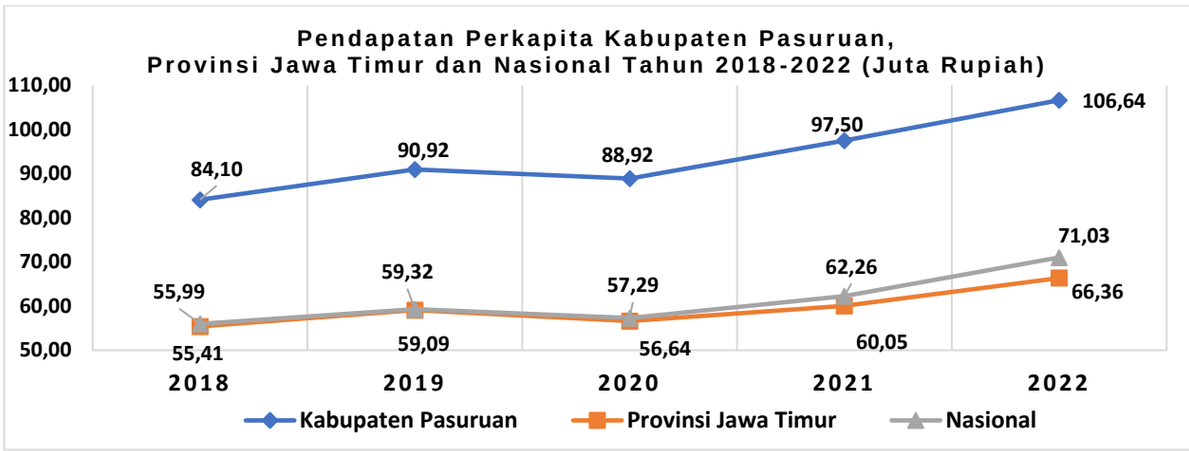

Gambar 2.2.4. Pendapatan/PDRB Perkapita Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

E. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT menggambarkan proporsi jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran. TPT Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022 beserta perbandingannya dengan angka Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat pada gambar 2.2.5.

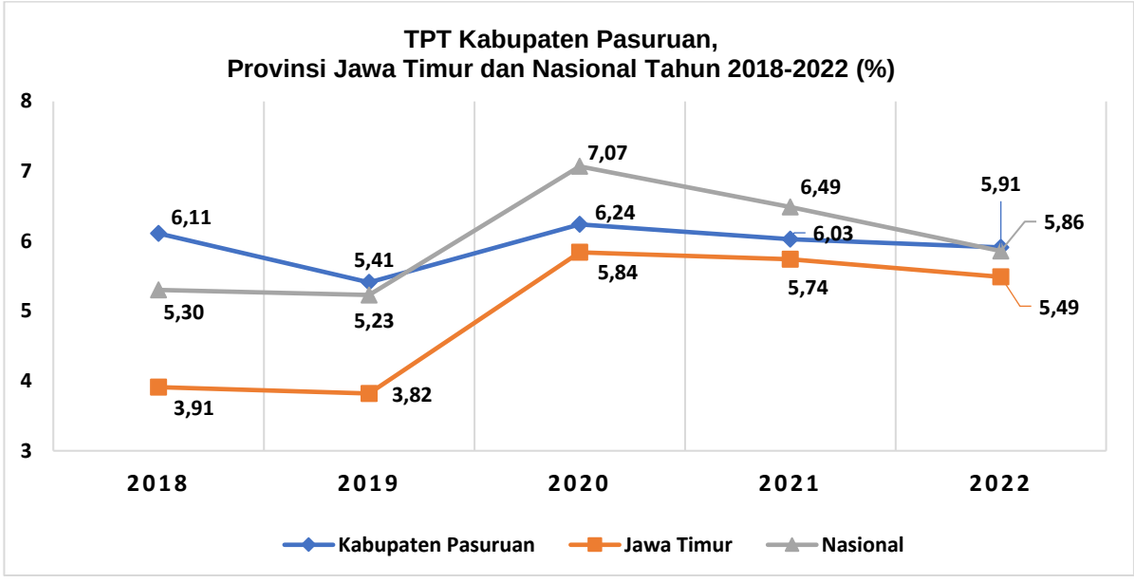

Gambar 2.2.5. TPT Kab. Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Selama tahun 2018-2022, TPT di Kabupaten Pasuruan menunjukkan angka fluktuatif namun secara keseluruhan mengalami perkembangan cukup baik, yaitu menunjukkan tren penurunan. Peningkatan terjadi pada saat pandemi covid-19, namun setelahnya kembali terjadi penurunan. Namun demikian posisi TPT Kabupaten Pasuruan dalam konteks kewilayahan tahun 2022 masih berada di atas rata-rata Jawa Timur dan Nasioanl. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagaimana srategi penurunan pengangguran tidak hanya pada lapangam kerja formal, melainkan juga pada sektor informal, antara lain melalui pelatihan kompetensi pencari kerja.

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besaran IPM Kabupaten Pasuruan didukung atas pencapaian komponen IPM di dalamnya, yaitu harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Kondisi capaian masing-masing komponen IPM Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 2.2.3.

Tabel 2.2.3
Perkembangan IPM Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
IPM Kab Pasuruan	67,41	68,29	68,60	68,93	69,68
Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,01	70,17	70,23	70,25	70,55
Angka Harapan Sekolah (Tahun)	12,30	12,31	12,41	12,58	12,76
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,83	7,11	7,40	7,41	7,42
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	9.933	10.381	10.164	10.297	10.726

Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,83% per tahun. Pada tahun 2018 nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasuruan terus meningkat hingga tahun 2022. Dalam periode tersebut, nilai IPM Kabupaten Pasuruan lebih rendah apabila dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Nilai IPM Kabupaten Pasuruan masuk dalam kategori sedang (60 ≤ IPM < 70). Tantangan utama adalah strategis bagaimana melalukan percepatan pertumbuhan IPM, khususnya pada peningkatan rata-rata lama sekolah melalui peningkatan kepesertaan pendidikan kesetaraan (kejar paket A/B/C).

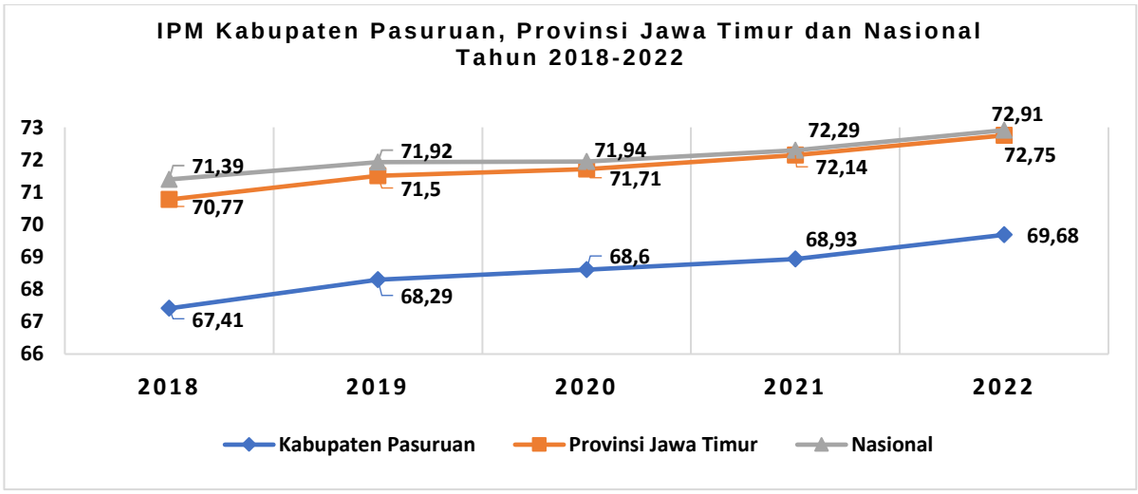

Gambar 2.2.6. IPM Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022
Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

G. Indeks Kesenjangan Wilayah (Indeks Williamson)

Indeks Williamson mengukur seberapa kesenjangan yang ada dalam pembangunan pada suatu wilayah. Pada level Kabupaten, perhitungannya menggunakan data **PDRB perkapita perkecamatan**. Indeks Wiliamson berada pada interval 0 s/d 1. Semakin mendekati

angka nol, menunjukkan kesenjangan wilayah semakin berkurang, demikian sebaliknya. Berdasarkan hasil kajian Bappelitbangda, Indeks Williamson dalam periode tahun 2018-2022 menunjukkan adanya fluktuasi, separuh periode pertama mengalami peningkatan, namun separuh periode berikutnya menunjukkan penurunan.

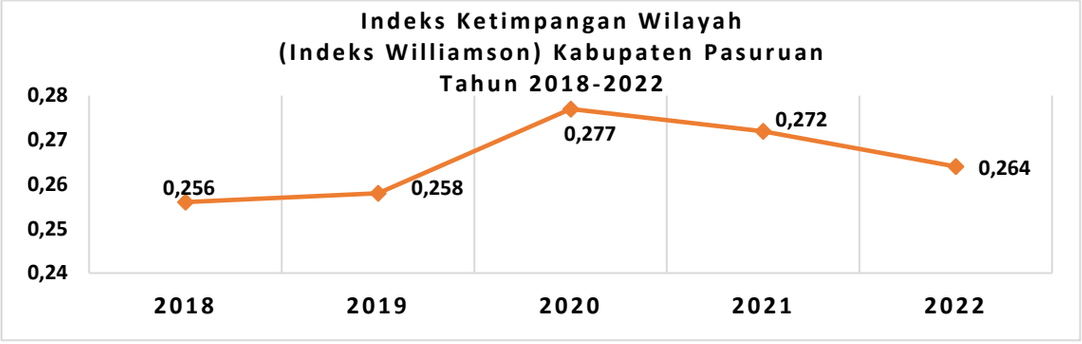

Gambar 2.2.7. Indeks Kesenjangan Wilayah Kab. Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Kajian Indeks Kesenjangan Wilayah Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan kajian Bappelitbangda, terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi kesenjangan wilayah, yaitu: (1) faktor produksi dan pemasaran; (2) faktor aksesibilitas; (3) faktor demografi; (4) faktor fasilitas sosial; dan (5) faktor sumberdaya alam.

Faktor produksi dan pemasaran terdiri dari 8 (delapan) variabel yaitu inovasi, informasi pasar, jaringan pemasaran, dukungan pemerintah, kemitraan dengan pihak lain, skill, akses informasi dan penggunaan teknlogi modern. **Faktor aksesibilitas** terdiri dari 7 (tujuh) variabel yaitu akses menuju sarana pendidikan, akses menuju sarana kesehatan, akses air bersih, kondisi jalan, akses pasar, akses birokrasi, dan akses air bersih. Faktor kedua diberi nama faktor aksesibilitas. **Faktor demografi** terdiri dari 3 (tiga) variabel yaitu keterisolasian geografis, potensi alam desa/kelurahan, serta jenis guna lahan. **Faktor fasilitas sosial** terdiri dari 4 (empat) variabel yaitu kondisi non fisik pendidikan, kondisi non fisik Pendidikan, kondisi fisik kesehatan dan kondisi fisik pendidikan. **Faktor sumberdaya alam** terdiri dari 3 (tiga) variabel yaitu keterisolasian geografis, potensi lahan dan jenis guna lahan.

Distribusi PDRB perkapita perkecamatan, berdasarkan hasil kajian Bappelitbangda sebagaimana gambar 2.2.9.

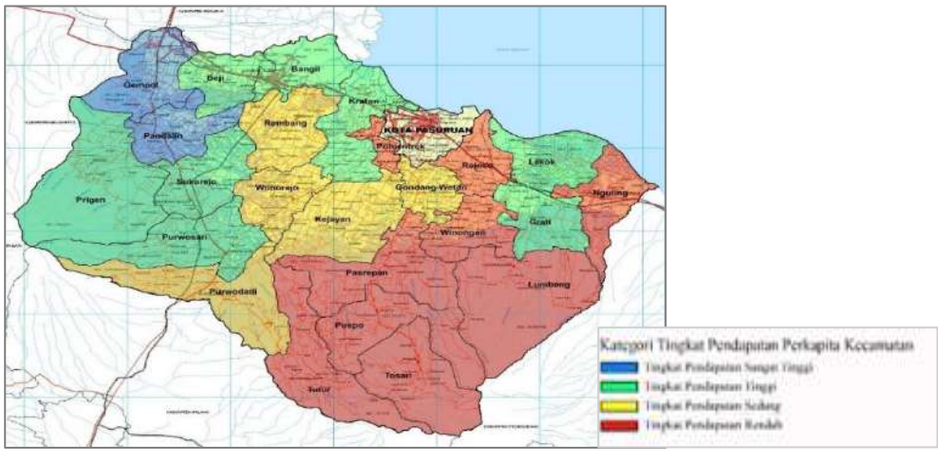

Gambar 2.2.8. Sebaran PDRB perkapita perkecamatan Kab. Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Kajian Indeks Kesenjangan Wilayah Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan

H. Indeks Gini (Kesenjangan Pendapatan)

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan masyarakat suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Secara umum indeks gini Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dan termasuk dalam kategori moderat/sedang (berada pada interval 0,3 – 0,5). Paruh periode pertama mengalami kenaikan, namun paruh periode berikutnya menunjukkan penurunan atau kondisi yang lebih baik. Dalam konteks kewilayahan, indeks gini Kabupaten Pasuruan berada di bawah atau lebih baik dari pada angka Jawa Timur dan Nasional.

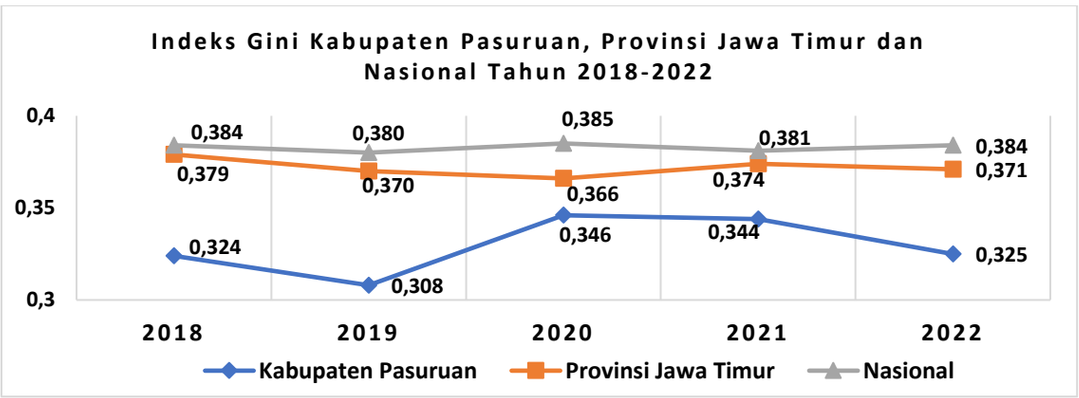

Gambar 2.2.9. Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

I. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan (meliputi 4 komponen : Ekonomi; Sosial; Lingkungan; dan Tata Kelola), indeks RB menjadi ukuran pada komponen Tata Kelola.

Perkembangan indeks RB dalam periode tahun 2018-2022 menunjukkan tren positif atau mengalami peningkatan dengan percepatan yang relatif rendah dan termasuk dalam kategori 'Baik' atau "perlu sedikit perbaikan." Penjelasan lebih detil hasil evalusi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh KemenPAN-RB sebagaimana tabel 2.2.4.

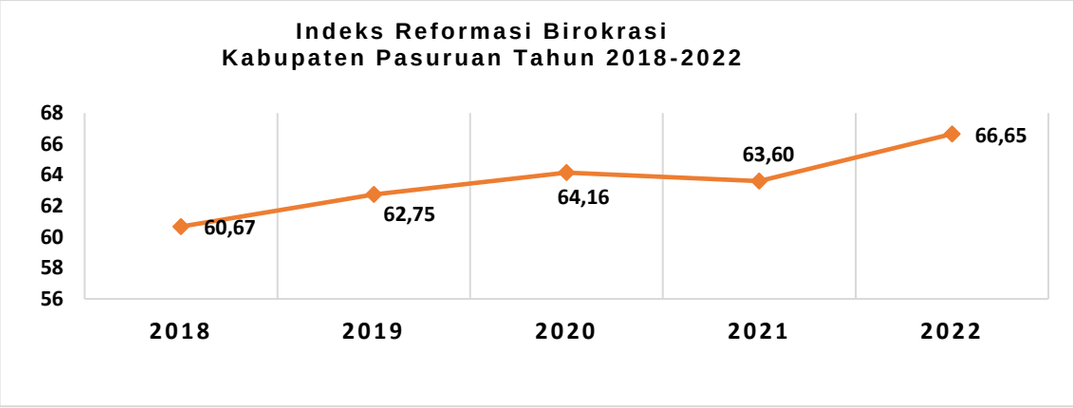

Gambar 2.2.10 Indeks RB Kab. Pasuruan Tahun 2018-2022
Sumber: KemenPAN-RB, 2022

Tabel 2.2.4
Rincian Hasil Evaluasi Indeks RB Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018-2019 dan Tahun 2020-2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2018	2019
A.	**Komponen Pengungkit**			
1	Manajemen perubahan	5	2,40	2,57
2	Penataan peraturan perundang-undangan	5	1,04	1,35
3	Penataan dan penguatan organisasi	6	1,82	1,95
4	Penataan tatalaksana	5	1,95	2,25
5	Penataan sistem manajemen SDM	15	11,98	11,12
6	Penguatan akuntabilitas	6	2,92	2,96
7	Penguatan pengawasan	12	4,26	5,97
8	Peningkatan kualitas pelayanan public	6	2,64	2,83
Total Komponen Pengungkit		**60,00**	**29,01**	**31,00**

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2018	2019
B.	**Komponen Hasil**			
1.	Akuntabilitas Kinerja	14,00	10,17	10,18
2.	Survei internal integritas organisasi	6,00	4,31	4,32
3.	Survei eksternal persepsi korupsi	7,00	6,16	5,85
4.	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5.	Survei eksternal pelayanan publik	10,00	8,02	8,40
Total Komponen Hasil		**40,00**	**31,66**	**31,76**
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		**100,00**	**60,67**	**62,75**

Sumber: KemenPAN-RB, 2020

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai		
			2020	2021	2022
A.	**Komponen Pengungkit**				
	I. Pemenuhan	20,00	10,22	10,39	10,62
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,77	4,52	6,29
	III. Reform	30,00	16,07	16,67	16,70
Total Komponen Pengungkit		**60,00**	**31,07**	**31,58**	**33,61**
B.	**Komponen Hasil**				
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,25	8,07	8,41
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,98	8,55	9,45
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,95	8,37	8,96
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,92	7,03	6,22
Total Komponen Hasil		**40,00**	**33,09**	**32,02**	**33,04**
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		**100,00**	**64,16**	**63,60**	**66,65**

Sumber: KemenPAN-RB, 2022

Komponen penilaian indeks reformasi birokrasi periode 2018-2022 terdapat perbedaan sehingga dibuat ke dalam dua tabel, yaitu tahun 2018-2019 dan tahun 2020-2022. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, komponen yang perlu ditingkatkan pada komponen pengungkit 'hasil antara area perubahan', antara lain peningkatan indeks profesionalitas ASN dan tingkat maruritas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) baik pada level Pemda maupun level perangkat daerah.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Urusan Pendidikan

A. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah atau *mean years school* adalah rata-rata lama belajar siswa sampai lulus sekolah pada suatu jenjang pendidikan dan dinyatakan dalam tahun. Adapun capaian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam gambar 2.2.11.

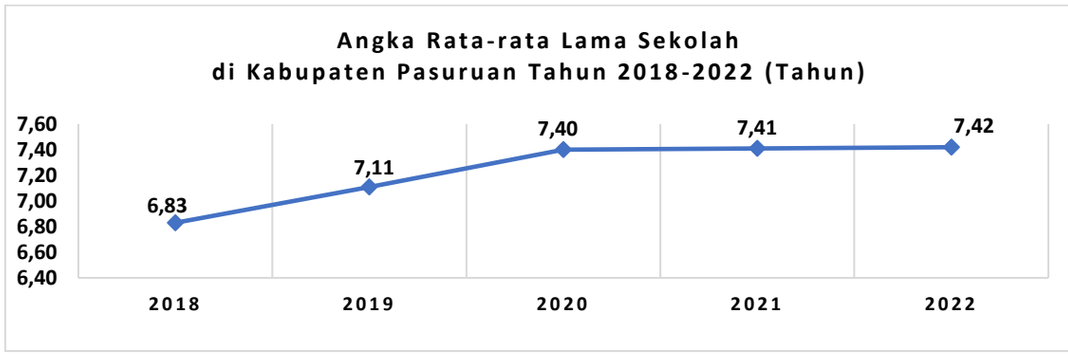

Gambar 2.2.11. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Selama periode lima tahun terakhir (2018-2022) angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasuruan menunjukkan peningkatan meskipun tidak signifikan. Rata-rata penduduk Kabupaten Pasuruan usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah menempuh pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas I). Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan karena kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan.

B. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan diperoleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Adapun capaian Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022 sebagaimana gambar 2.2.12.

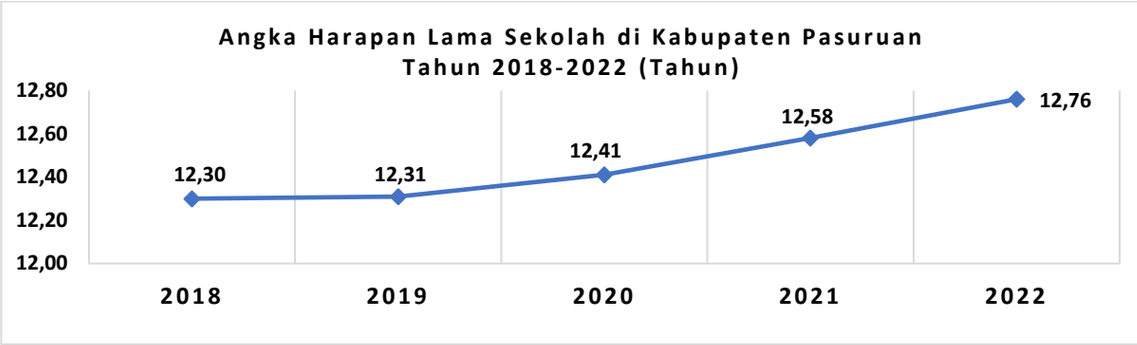

Gambar 2.2.12 Harapan Sekolah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Selama periode 2018 hingga 2022, harapan lama sekolah di Kabupaten Pasuruan mengalami rata-rata peningkatan sebesar 0,92% per tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2022, harapan lama sekolah di Kabupaten Pasuruan telah mencapai 12,76 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA/Sederajat.

2.1.2.2.2. Urusan Kesehatan

A. Angka Harapan Hidup (AHH)

Data AHH Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan.

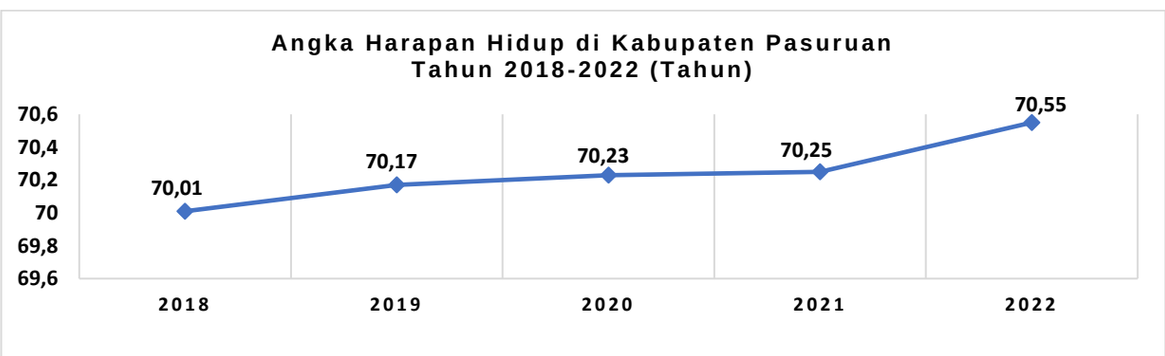

Gambar 2.2.13. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pasuruan cenderung mengalami peningkatan selama periode lima tahun (2018-2022). Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022, rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,19% per tahun atau naik 0,13 tahun per tahunnya. Ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kabupaten Pasuruan.

B. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita dengan gizi buruk di Kabupaten Pasuruan selalu mengalami penurunan selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan telah mampu menekan kasus balita dengan gizi buruk walaupun tetap perlu upaya lebih baik lagi agar nilai cakupan balita dengan gizi buruk di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan yang signifikan dan berdampak pada penurunan angka prevalensi stunting.

Tabel 2.2.5
Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Balita Gizi Buruk	41	40	34	31	30
Jumlah Balita	119.214	118.492	117.832	118.395	117.907
Persentase Balita Gizi Buruk	**0,034**	**0,033**	**0,028**	**0,026**	**0,025**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2022

C. Persentase Balita Gizi Kurang

Balita gizi kurang adalah Balita yang masuk dalam status gizi buruk dengan berat badan tidak sesuai (sangat kurang) dibandingkan dengan usianya. Indikator yang kedua adalah Berat Badan dibandingkan Tinggi badan yang dikelompokkan dalam empat kriteria yaitu kurus sekali/sangat kurus, kurus, normal dan gemuk. Gizi kurang merupakan keadaan kurang gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Balita dikategorikan mengalami gizi kurang apabila berat badannya berada pada rentang Zscore ≥-2.0 s/d Zscore ≤-3.0. Berikut adalah gambaran Persentase Balita Gizi kurang di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022:

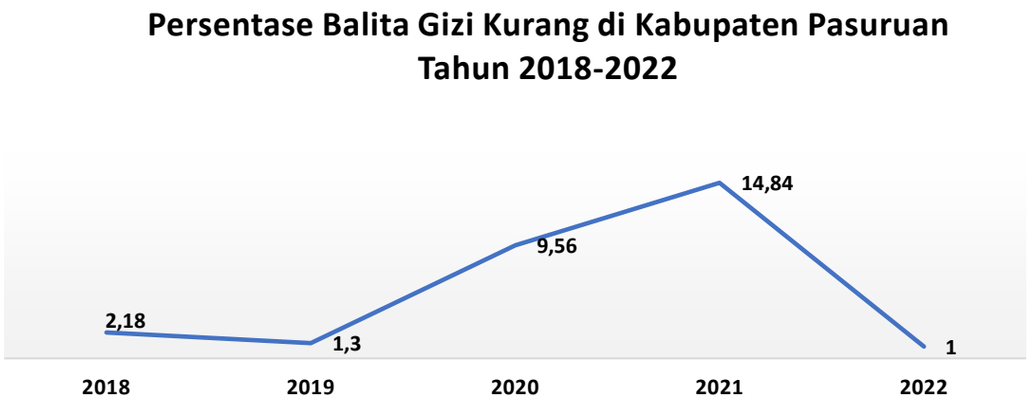

Gambar 2.2.14. Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2022

Berdasarkan gambar diatas dapat diuraikan bahwa ada kenaikan persentase Balita gizi kurang pada tahun 2020 dan kembali naik sebesar 5,28% pada tahun 2021. Kenaikan persentase ini berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi, kebijakan nasional yang ditetapkan di Indonesia untuk memutus mata rantai penularan Covid - 19 saat itu adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan sosial berskala besar mewajibkan masyarakat menjalankan kegiatan atau aktivitas dari rumah membuat seluruh perusahaan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru bagi para karyawan, meliputi para tenaga kerja di rumahkan dengan di bayar penuh, dirumahkan dengan dibayar sebagian, memberhentikan pekerja dalam jangka waktu singkat, dirumahkan (tidak dibayar), pengurangan jam kerja, hingga PHK sebagai langkah akhir yang dapat diambil bagi perusahaan terhadap tenaga kerja. Dampak dari pandemi dapat berpotensi kepada banyaknya keluarga dalam waktu singkat jatuh miskin dan keamanan pangan, keterbatasan akses, ketersediaan dan keterjangkauan bahan makanan mikro, dimana pandemi Covid-19 mengakibatkan pendapatan orang tua menurun sehingga menyebabkan kurangnya asupan nutrisi yang diberikan pada anak. Anak yang mengalami gizi kurang atau malnutrisi sejak dini berakibat pada proses pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikis yang mengalami penurunan fungsi perkembangan saraf dan kognitif, dan peningkatan risiko penyakit kronis di masa dewasa.

Sehingga perlu adanya kebijakan yang mengarah pada intervensi gizi sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengubah aspek gizi pada individu atau populasi. Mulai dari pemberian nutrisi hingga pelaksanaan program pendidikan gizi.

D. Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan strategi baru pembangunan kesehatan. Desa siaga lahir sebagai respon pemerintah terhadap masalah kesehatan di Indonesia yang tak kunjung selesai. Desa siaga sebagai salah satu bentuk reorientasi pelayanan kesehatan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan *top down* menjadi lebih partisipatif dan *bottom up*. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VI II/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa siaga, desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa siaga adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri.Berikut adalah gambaran trend perkembangan Desa Siaga aktif di Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022:

Gambar 2.2.15. Tren Perkembangan Desa Siaga Aktif Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2022

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun ini Kabupaten Pasuruan berhasil mempertahankan prestasinya dalam pembinaan perkembangan Desa Siaga Aktif. Hal ini tentunya perlu ditunjang oleh kemampuan masyarakat dalam menemukan pemecahan masalah Kesehatan yang teroganisir melalui tahapan-tahapan sebagaimana berikut: (1). mengidentifikasi masalah, penyebab rnasalah, dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk

mengatasi masalah, (2). mendiagnosis masalah dan merumuskan alternatif-alternatif pemecahan masalah, (3). menetapkan alternatif pemecahan masalah yang Iayak, merencanakan dan melaksanakannya, serta (4). rnemantau, mengevaluasi dan membina kelestarian upaya-upaya yang telah dilakukan.

2.1.2.2.3. Urusan Ketenagakerjaan

A. Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan

Persentase pencari kerja yang ditempatkan dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2022, persentase Pencari Kerja yang ditempatkan tidak mengalami kenaikan dari tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan industri (tidak terjadi *link and match*) dan peralihan teknologi menuju industri revolusi 4.0 yang berimbas pada tergantikannya tenaga manusia oleh mesin industri.

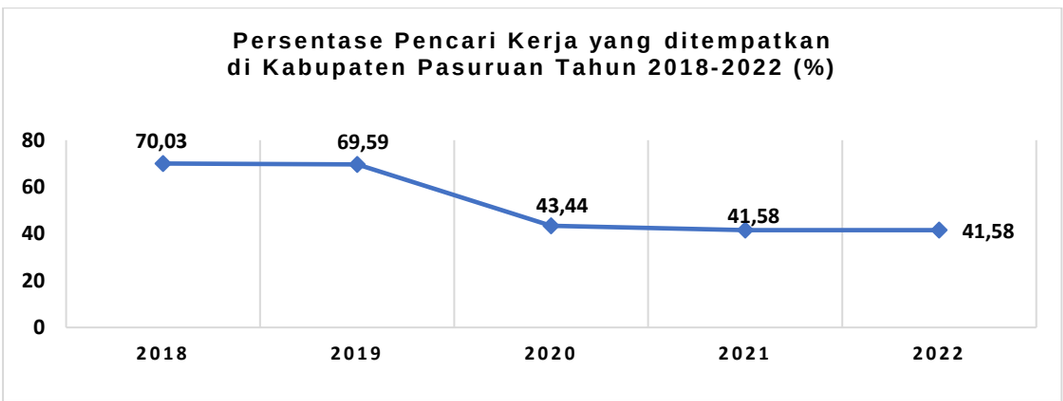

Gambar 2.2.16 Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2022

B. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah angkatan.

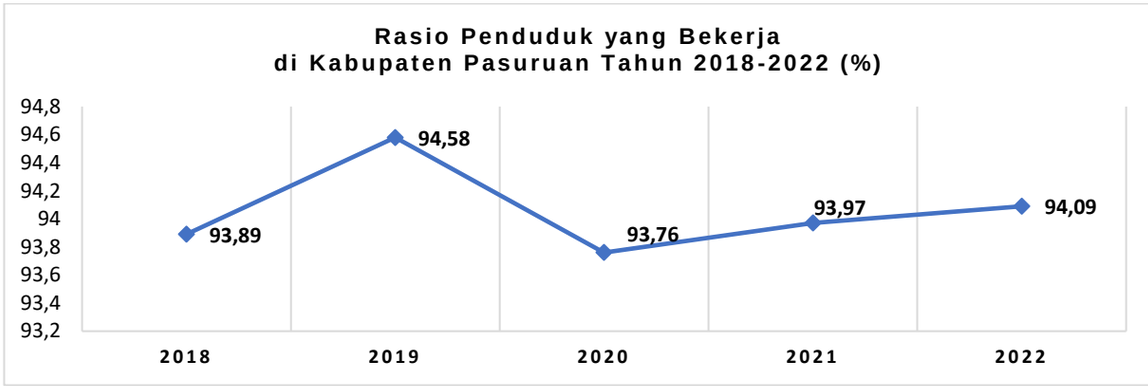

Gambar 2.2.17 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2022, Diolah

Rasio penduduk yang bekerja selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 mengalami tren kenaikan, namun pada tahun 2020 menurun karena adanya pandemi *covid-19* yang mengakibatkan banyaknya lapangan usaha terutama di sektor perindustrian melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Selain itu pada sektor perdagangan juga banyak pedagang yang tidak berdagang karena adanya kebijakan pembatasan sosial. Namun pada tahun 2021 dan 2022, rasio penduduk yang bekerja kembali mengalami peningkatan seiring dengan mulai pulihnya kondisi perekonomian daerah.

C. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Data TPAK Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 cenderung mengalami tren peningkatan.

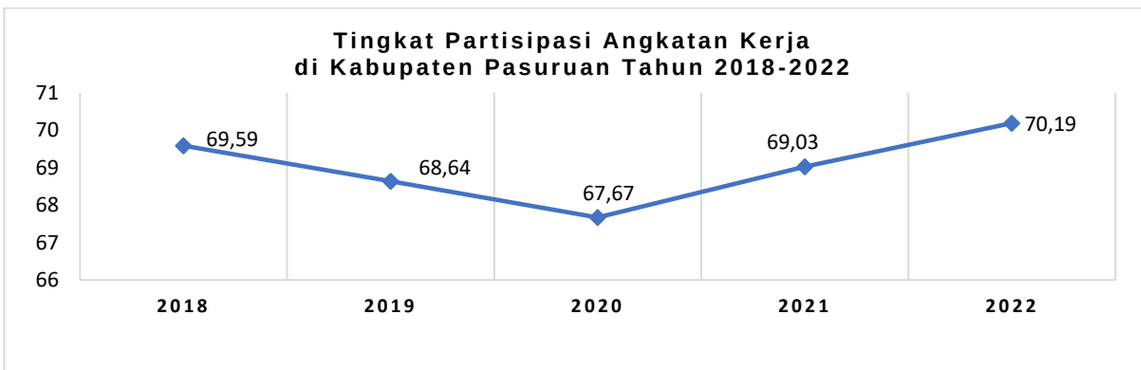

Gambar 2.2.18 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

2.1.2.2.4. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

A. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Indeks Pembangunan Keluarga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. iBangga baru diperkenalkan oleh BKKBN tahun 2020, sehingga perhitungan baru dimulai tahun 2021. Pada tahun 2021 iBangga Kabupaten Pasuruan mencapai 55,15 dan tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan menjadi 55,21. Capaian tersebut masuk dalam kategori 'cukup baik (berkembang)'.

2.1.2.2.5. Urusan Pangan

A. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan pangan yang benar-benar menjadi harapan baik di tingkat konsumsi maupun ketersediaan, serta dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk. Adapun capaian angka skor pola pangan harapan di Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022 sebagaiman gambar 2.2.17.

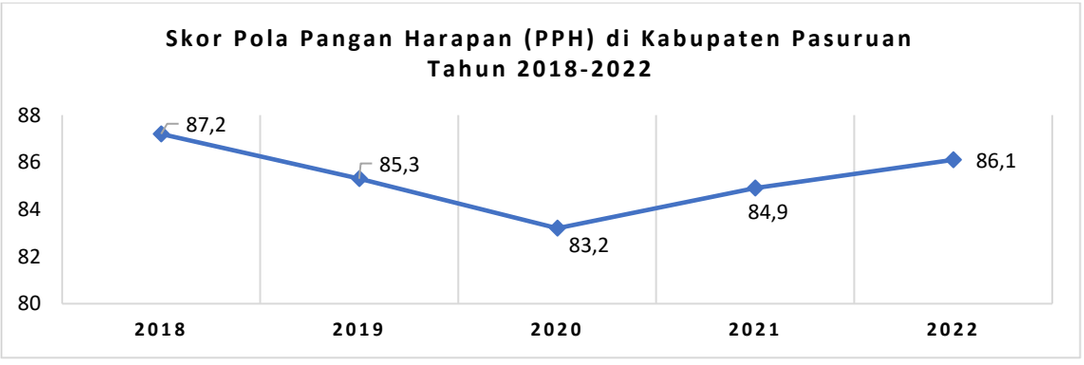

Gambar 2.2.19 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Pasuruan cenderung mengalami tren penurunan dari tahun 2018 sampai 2022. Akan tetapi pada periode

tahun 2020 sampai 2022, capaian PPH mengalami peningkatan yang berarti konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Pasuruan semakin beragam dan bergizi seimbang setelah adanya Pandemi Covid-19 serta berada pada angka 86 (kategori baik) pada tahun 2021 dan 2022.

B. Angka Kecukupan Gizi (AKG)

Angka Kecukupan Gizi (AKG) merupakan suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

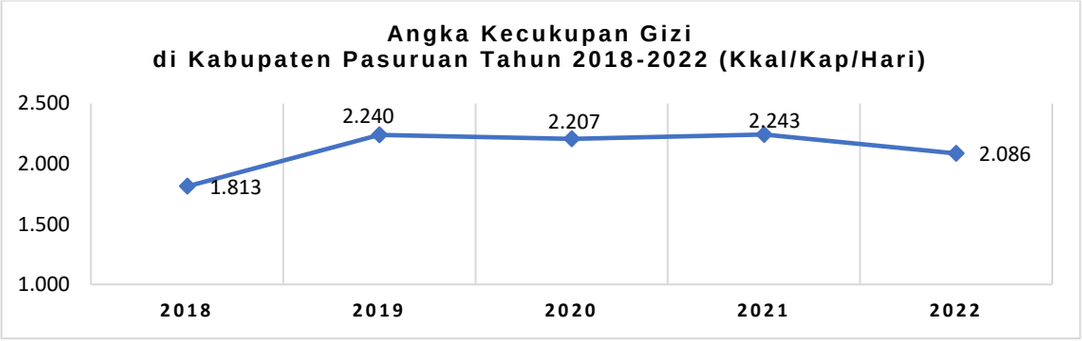

Gambar 2.2.20 Angka Kecukupan Gizi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kabupaten Pasuruan mengalami mengalami tren peningkatan selama tahun 2018-2022, akan tetapi pada tahun 2022 AKG mengalami penurunan dari tahun 2021.

Deversifikasi produk dalam pemenuhan pangan dan gizi melalui pelatihan olahan pangan, bantuan bibit pangan lokal (umbi - umbian), P2L dan sosialisasi B2SA. Distribusi pangan hasil panen di Kabupaten Pasuruan masih surplus sehingga bisa dimanfaatkan daerah sekitar dan luar wilayah Kabupaten Pasuruan.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi di Kabupaten Pasuruan mengalami tren kenaikan dari tahun 2018 sampai 2020. Hal tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan temuan benda cagar budaya. Pada tahun 2021 indikator jumlah karya budaya yang direvitalisasi diganti menjadi 2 indikator yaitu

persentase peningkatan pelestarian dan pengembangan Cagar Budaya dengan capaian 20% serta persentase peningkatan pengelolaan museum dengan capaian 20%. Kemudian pada tahun 2022 diganti lagi menjadi Nilai Pembangunan Kebudayaan dengan capaian 53,19%.

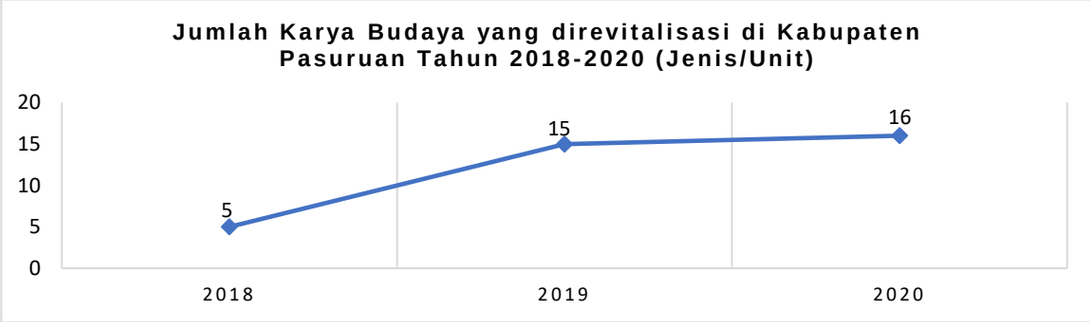

Gambar 2.2.21 Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2020
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2022

Pada tahun 2022, jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) adalah sebagai berikut:

5. MHBN (Manding Hari Batik Nasional) sebanyak 15 orang
6. Pawiyatan Candra Wilwatikta sebanyak 10 orang
7. Ngesti Wedaring Budaya sebanyak 10 orang
8. Kelompok Seni yang dibina sebanyak 128 sanggar seni

B. Jumlah Pemuda dan Atlit Berprestasi

Jumlah atlit berprestasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan. Sedangkan jumlah pemuda berprestasi mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2022. Hal ini disebabkan antara lain belum tersedianya sarana atau media sebagai tempat berekspresi bagi kalangan pemuda yang dapat memberikan iklim positif dalam pembangunan pemuda. Sedangkan jumlah atlet dibina pada selama kurun waktu 2018-2022 juga cenderung mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2018 dan 2020 tidak ada atlit yang dibina, tahun 2019 sebanyak 104 atlit, tahun 2021 sebanyak 414 atlit dan tahun 2022 sebanyak 418 atlit.

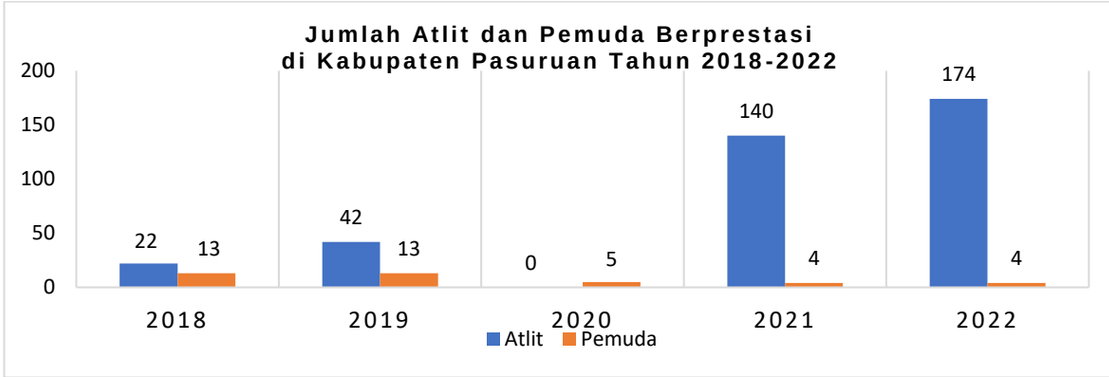

Gambar 2.2.22 Jumlah Atlit dan Pemuda Berprestasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, 2022

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

1. Urusan Pendidikan

Kinerja pelayanan Urusan Pendidikan diukur dengan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) level outcome. Realisasi kinerja dalam periode lima tahun terakhir sebagaimana tabel 2.1.3.1.

Tabel 2.1.3.1.
Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja	SPM/IKK	Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD* (%)	SPM/IKK	n/a	32,45	106,85	52,37	114,79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar* (%)	SPM/IKK	n/a	100	85,52	73,17	97,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama*(%)	SPM/IKK	n/a	62,28	65,52	47,50	92,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam	SPM/IKK	n/a	88,77	100,00	2,30	76,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Indikator Kinerja	SPM/IKK	Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			2018	2019	2020	2021	2022	
	pendidikan kesetaraan* (%)							
5.	Indeks Pendidikan	-	0,569	0,579	0,591	0,596	0,602	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.	Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)	-						
	SD/MI		111,24	112,78	107,87	108,73	109,07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	SMP/MTs		88,69	102,58	102,35	102,11	106,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7.	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)	-						
	SD/MI		99,16	99,43	98,77	98,56	97,49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	SMP/MTs		77,12	83,29	82,28	82,07	81,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8.	Angka Putus Sekolah (Anak)	-						
	SD/MI		-	-	-	-	7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	SMP/MTs		-	-	-	-	7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kesetaraan/PKBM		-	-	-	-	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2023
*Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2019*

Berdasarkan tabel 2.1.3.1 dapat diketahui bahwa capaian kinerja pemenuhan SPM dan IKK sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD menunjukkan tren positif dan sampai dengan tahun 2022 mencapai lebih dari 100%
2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar secara umum menunjukkan tren negatif dan diakhir tahun 2022 masih belum mencapai 100%.
3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama menunjukkan

tren positif dan meningkat cukup signifikan di tahun 2022 meskipun belum mencapai 100%. Hal ini menunjukkan

4. Berdasarkan angka 2 dan 3 menunjukkan bahwa belum seluruh warga negara yang berusia 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun dapat menempuh pendidikan dasar 9 tahun.
5. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan secara umum menunjukkan tren negatif dan sampai dengan tahun 2022 belum mencapai 100%.
6. Indeks pendidikan (sebagai salah satu komponen IPM berdasarkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah berdasarkan survey BPS) menunjukkan peningkatan secara perlahan. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh masih kurangnya partisipasi dalam pendidikan kesetraan sebagaimanan dijelaskan pada angka 5.
7. APK SD/MI dan SMP/MTs secara umum mengalami fluktuasi, namun sampai dengan tahun 2022 telah mencapai lebih dari 100%.
8. APM SD/MI dan SMP/MTs secara umum mengalami fluktuasi dan sampai dengan tahun 2022 masih belum mencapai 100%. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain masih adanya siswa putus sekolah dan tidak melanjutkan dengan alasan ekonomi serta belum efektifnya pemahaman kepada masyarakat terhadap pendidikan dasar formal. Angka partisipasi sekolah juga berpengaruh pada capaian indeks pendidikan khususnya angka harapan lama sekolah.
9. Berdasarkan angka nomor 8 menunjukkan bahwa masih ada anak yang putus sekolah pada tahun pelajaran 2022 s/d 2023.

Berdasarkan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi, Nomor 5676/MPK.A/PR.07.05/2023, tanggal 18 Februari 2023 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan, Kabupaten Pasuruan dihimbau untuk menambahkan Indikator Kinerja Urusan Bidang Pendidikan merujuk pada Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan sekurang- kurangnya meliputi:

Tabel 2.1.3.2.
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2018-2022
Berdasarkan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi, Nomor 5676/MPK.A/PR.07.05/2023

No.	Indikator Kinerja Urusan Bidang Pendidikan	Satuan	Capaian Tahun 2022
1.	Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	89,20
2.	Anak Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	90,63
3.	Anak Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	3,85
4.	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	100
5.	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	87,96
6.	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	86,57
7.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	84,42
8.	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	40,85
9.	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	65,32
10.	Iklim keamanan SD	%	100
11.	Iklim keamanan SMP	%	100
12.	Iklim kebinekaan SD	%	100
13.	Iklim kebinekaan SMP	%	100
14.	Iklim inklusivitas SD	%	100
15.	Iklim inklusivitas SMP	%	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2023

2. Urusan Kesehatan

Kinerja pelayanan Urusan Kesehatan diukur dengan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) level outcme. Realisasi kinerja dalam periode lima tahun terakhir sebagaimana tabel 2.1.3.2.

Tabel 2.1.3.2.
Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja	SPM	IKK	Realisasi / Capaian					Perangkat Daerah
				2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	√	√	93,70	95,09	93,54	100	100,3	Dinas Kesehatan
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (%)	√	√	98,09	99,51	98,6	100	100,23	Dinas Kesehatan
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (%)	√	√	100	105,47	98,25	100	103,15	Dinas Kesehatan
4.	Pelayanan Kesehatan Balita (%)	√	√	86,72	90,63	86,46	97,81	100,5	Dinas Kesehatan
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar (%)	√	√	91,63	75,4	90,67	99,54	99,99	Dinas Kesehatan
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif (%)	√	√	122,44	100,01	73,69	87,26	100,07	Dinas Kesehatan

No.	Indikator Kinerja	SPM	IKK	Realisasi / Capaian					Perangkat Daerah
				2018	2019	2020	2021	2022	
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (%)	√	√	75,07	112,64	99,9	100	94,24	Dinas Kesehatan
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi (%)	√	√	66,28	100,69	68,77	77,79	90,16	Dinas Kesehatan
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (%)	√	√	105,33	104,45	92,81	107,23	109,12	Dinas Kesehatan
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (%)	√	√	33,21	100,07	101,17	98,18	103,56	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis (%)	√	√	87,69	100	92,1	62,05	103	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%)	√	√	87,43	106,69	94,52	108,77	101	Dinas Kesehatan
13	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk		√	n/a	n/a	n/a	0,07	0,07	Dinas Kesehatan
14	Persentase RS Rujukan Tk.Kab/Kot yg terakreditasi (%)		√	0	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
15	Indeks kesehatan	-	-	0,7694	0,7718	0,7728	0,7731	0,7777	Dinas Kesehatan
16	Prevalensi stunting (%)	-	-	30,7	22,5	21,4	18,1	10,83	Dinas Kesehatan
17	Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 KH)	-	-	111,32	83,61	76,34	109,46	78,91	Dinas Kesehatan
18	Angka kematian Bayi (per 1.000 KH)	-	-	5,37	5,33	4,40	4,60	3,38	Dinas Kesehatan

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2023

Berdasarkan tabel 2.1.3.2 menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022, hampir semua SPM dan IKK telah terpenuhi 100%, kecuali pelayanan kesehatan pada usia lanjut dan pelayanan kesehatan penderita hipertensi. Sedangkan IKK lain juga menunjukkan kinerja yang optimal, yaitu rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk sebesar 0,07 dan persentase RS rujukan Tk.Kab/Kota yang terakreditasi telah mencapai 100%.

Selain indikator SPM dan IKK, ada beberapa indikator kinerja yang menjadi isu strategis pada level Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu indeks kesehatan, prevalensi stunting, angka kematian ibu melahirkan (AKI), dan angka kematian bayi (AKB).

Indeks kesehatan merupakan salah satu komponen pembentuk indeks pembangunan manusia, yang diperoleh dari pengolahan umur

harapan hidup berdasarkan hasil survey BPS. Realisasi indeks kesehatan dalam periode 2018-2022 secara konsisten menunjukkan peningkatan atau kondisi yang lebih baik. Sementara itu, baik prevalensi stunting, AKI, maupun AKB dalam periode yang sama juga telah berada pada jalur yang benar, yaitu secara umum menunjukkan penurunan.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum adalah jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Pentingnya penyelenggaraan urusan pekerjaan umum ini telah disadari oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.

Perkembangan capaian indikator kinerja pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Pemerintah Kabupaten disajikan pada tabel 2.1.3.3.

Tabel 2.1.3.3
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja	SPM/IKK	Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	IKK	69,17	71,47	72,10	72,85	73,43	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
2.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota* (%)	SPM/IKK	80,55	85,27	85,79	87,08	86,72	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic* (%)	SPM/IKK	78,85	80,70	82,45	83,28	81,81	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
4	Rasio kepatuhan IMB kab/kota (%)		-	-	100	100	30,93	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
5	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota (%)	IKK	76,00	79,50	81,23	84,73	79,88	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
6	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi* (%)	IKK	-	-	-	-	35	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

No.	Indikator Kinerja	SPM/IKK	Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			2018	2019	2020	2021	2022	
7.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	IKK	100	100	100	100	100	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, 2023
*Keterangan : *Indikator baru dikarenakan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dan tupoksinya*

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan catatan penting sebagai berikut:

a. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi, menunjukkan sedikit peningkatan tiap tahunnya, hingga mencapai sekitar 74% di tahun 2022. Hal ini berarti masih cukup banyak daerah irigasi yang berlum terlayani jaringan irigasi (26%).

b. Persentase penduduk terlayani sanitasi, secara perlahan menunjukkan peningkatan dan hampir mencapai 84%. Hal ini berarti masih ada sekitar 16% penduduk yang belum terlayani sanitasi.

c. Realisasi capaian kinerja tahun 2022 untuk indikator “Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic* (%)” mengalami penurunan sebesar 1,47% yaitu dari 83,28% di tahun 2021 dan 81,81% di tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan sebagai faktor pembagi pada perhitungan jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Selain itu, penurunan disebabkan karena pembagian kewenangan penanganan pembangunan jamban sehat keluarga dan MCK di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selama tahun 2022, kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata ruang dalam rangka mendukung pencapaian layanan pengolahan air limbah domestic yaitu berupa pembangunan IPAL Komunal dan septic komunal dengan menggunakan sumber dana APBD dan DAK 2022.

d. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum, menunjukkan kenaikan secara kontinu, hingga mencapai sekitar 87% atau dengan kata lain belum menjangkau seluruh penduduk atau masih ada 13% penduduk yang belum terlayani air minum.

e. Realisasi capaian kinerja tahun 2022 untuk indikator "Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota* (%)" mengalami penurunan sebesar 0,36% yaitu dari 87,08% di tahun 2021 dan 86,72% di tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan sebagai faktor pembagi pada perhitungan jumlah layanan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum. Selain itu, penurunan tersebut diakibatkan karena adanya penolakan dari masyarakat karena memilih untuk menggunakan air artesis dengan melakukan pengeboran pribadi dan gratis. Selama tahun 2022, kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata ruang dalam rangka mendukung pencapaian akses air minum yaitu berupa peningkatan SPAM jaringan perpipaan dan pembangunan SR (Sambungan Rumah) dengan menggunakan sumber dana APBD dan DAK 2022.

f. Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 69,07% yaitu dari 100% di tahun 2021 dan 30,93% di tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh perubahan sistem ijin bangunan gedung dari IMB menjadi PBG melalui aplikasi SIMBG sehingga diperlukan sosialisasi lebih lanjut tentang perubahan system tersebut kepada masyarakat pemilik bangunan Gedung.

g. Tingkat kemantapan Jalan, menunjukkan cenderung stagnan dan sedikit menurun di tahun 2022 yang mencapai sekitar 80%, berarti masih ada jalan dalam kondisi rusak cukup besar yaitu 20%. Kerusakan jalan antara lain karena masih banyak ruas jalan belum dilengkapi dengan saluran drainase sehingga menyebabkan genangan air pada saat turun hujan.

h. SPM Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 yang merupakan kewenangan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, adalah :

   1) Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum, untuk tahun 2022 memiliki capaian kinerja sebesar 86,72%

2) Persentase penduduk yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik, untuk tahun 2022 memiliki capaian kinerja sebesar 81,81%

Tabel 2.1.3.3.a
Kondisi Jalan di Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022

No.	Kondisi Jalan	Satuan	2019	2020	2021	2022
1	Baik	Km	1.236,650	1.276,650	1.308,240	1.252,111
2	Sedang	Km	604,480	604,480	653,950	597,821
3	Rusak	Km	278,880	235,780	204,780	260,909
4	Rusak Berat	Km	195,880	198,980	148,920	205,049

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari data tabel diatas menunjukkan kondisi jalan mantap (baik dan sedang) secara umum dari tahun ke tahun semakin meningkat hanya pada tahun 2022 mengalami penurunan hal ini disebabkan antara lain :

1. Minimnya saluran drainase sehingga mengakibatkan banyaknya genangan air apabila terjadi curah hujan yang cukup tinggi hal ini bisa mengakibatkan menurunnya kondisi umur rencana aspal jalan.
2. Overtonase (kelebihan beban tonase) kendaraan, Muatan melebihi batas maksmial (tonase) pada kendaraan besar juga menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan.

Beberapa indikator yang mendukung kinerja pelayanan urusan pekerjaan umum dapat disampaikan sebagai berikut:

A. Indeks Ketahanan Air

Indeks Ketahanan Air diformulasikan dari perbandingan volume ketersediaan air baku dengan volume kebutuhan air baku. Volume ketersediaan air baku dihitung dari jumlah volume air tampungan, volume mata air termasuk air yang mengalir pada semua jaringan irigasi.

Berdasarkan gambar 2.1.3.3.1 dapat diketahui bahwa capaian Indeks Ketahanan Air Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022 mengalami tren peningkatan. Kondisi tersebut tentunya akan terus diperbaiki dengan cara menambah volume ketersediaan air terutama tampungan air, membangun embung-embung berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan

Rakyat, serta memperbaiki kondisi mata air yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi.

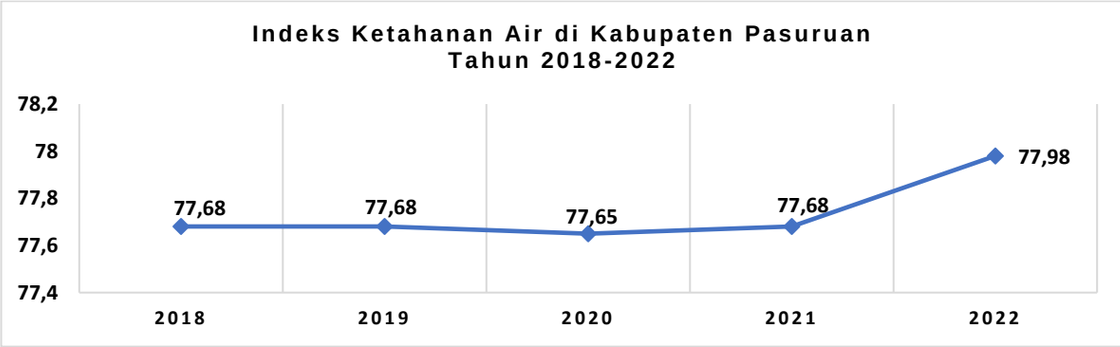

Gambar 2.1.3.3.1. Indeks Ketahanan Air di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas SDA, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Pasuruan, 2022

B. Indeks Aksesibiltas Wilayah

Aksesibilitas wilayah adalah kemampuan atau keadaan suatu wilayah untuk dapat diakses oleh pihak luar baik secara langsung atau tidak langsung. Aksesibilitas tersebut terdiri dari prasarana (sistem jaringan jalan) yang dan beserta ketersediaan sarana untuk melakukan pergerakannya. Formula perhitungan Indeks Aksesibilitas Wilayah adalah panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap dibagi luas wilayah Kabupaten Pasuruan.

Nilai Indeks Aksesbilitas Wilayah Kabupaten Pasuruan tergolong rendah karena kepadatan penduduknya tergolong tinggi (diatas 1.000 jiwa/km2), sehingga minimal Indeks Aksesibilitas Wilayah minimal sebesar 1,5.

Tabel 2.1.3.3.b
Standar Pelayanan Minimal Bidang Jalan di Indonesia

No.	Kepadatan Penduduk/Jiwa	Indeks Aksesibilitas	Keterangan
1	Sangat Tinggi > 5.000	>5	Panjang jalan/luas (km/km2)
2	Tinggi > 1.000	>1,5	
3	Sedang > 500	>0,5	
4	Rendah > 100	>0,5	

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, 2022

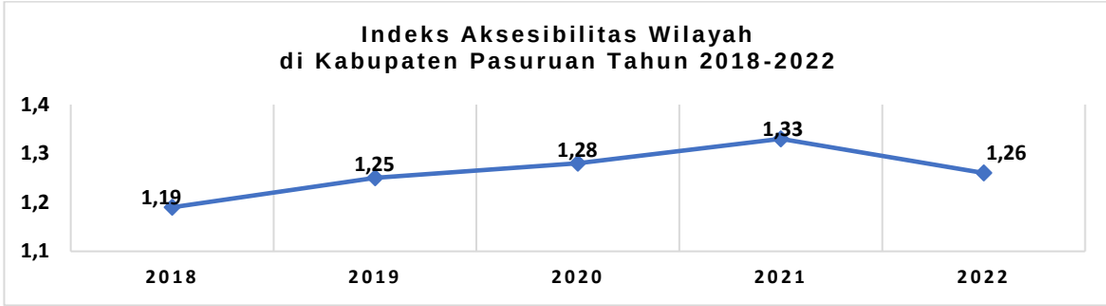

Gambar 2.1.3.3.2. Indeks Aksesibilitas Wilayah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, 2023

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) bagi korban bencana;
2. Fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

Kinerja pelayanan urusan perumahan dan kawasan pemukiman selain diukur dengan indikator SPM, juga dengan indikator kinerja kunci (IKK) level outcome. Capaian indikator SPM dan IKK tersebut sebagaimana tabel 2.1.3.4.

Tabel 2.1.3.4
Capaian Indikator SPM dan IKK
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 – 2022

Jenis Pelayanan	Indikator	SPM/IKK	Capaian					Perangkat Daerah
			2018	2019	2020	2021	2022	
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi (%)	SPM/IKK	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program	Persentase pembangunan dan rehabilitasi relokasi program Kabupaten/Kota (%)	SPM/IKK	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jenis Pelayanan	Indikator	SPM/IKK	Capaian					Perangkat Daerah
			2018	2019	2020	2021	2022	
pemerintah daerah kabupaten								
Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten yang ditangani (%)		IKK	-	3,64	7,67	13,70	14,75	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)		IKK	7,38	7,01	6,50	6,08	5,55	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)		IKK	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, 2022

Berdasarkan tabel 2.1.3.4 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi rumah korban bencana selalu dapat dilakukan terhadap seluruh rumah atau 100%, khusus tahun 2022 terlaksana rehabilitasi sebanyak 419 unit.
2. Pembangunan dan rehabilitasi relokasi capaiannya kosong karena selama periode 5 tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak ada program relokasi penduduk.
3. Persentase kawasan kumuh yang ditangani hingga tahun 2022 adalah 14,75% dengan total luasan yang ditangani sejumlah 80,21 Ha. Namun dalam capaian per tahunnya, untuk tahun 2022 ada penurunan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2021 luas kawasan kumuh yang ditangani mencapai 32,82 Ha sedangkan tahun 2022 hanya 5,7 Ha. Adapun kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mendukung penanganan kawasan kumuh yaitu dengan melakukan pembangunan fisik seperti drainase, jalan lingkungan, tembok penahan tanah, TPS, jamban sehat keluarga, MCK, SR air bersih, rehab RTLH dan redistribusi lahan.
4. Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH realisasi hingga tahun 2022 adalah 5,55 %. Sedangkan capaian per tahunnya ada kenaikan. Di tahun 2021 jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani 1.886 unit dari sumber dana DAU dan DBHCHT,

sedangkan tahun 2022 menangani 2.324 unit rumah tidak layak huni. Hal ini dikarenakan di tahun 2022 penanganan rumah tidak layak huni selain dari sumber dana DAU dan DBHCHT sebesar 1.484 unit, juga ada bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sejumlah 840 unit.

5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU saat ini mencapai 100% atau 145 perumahan (data per Mei 2023), dan terdapat 10 pengembang yang sudah melakukan penyerahan PSU Perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 44 Perumahan masih dalam proses penyerahan. Kegiatan yang dilakukan untuk pemenuhan PSU Perumahan yaitu :
   b. Penetapan SK Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tentang Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan yang di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum dan teknis untuk pengembang dalam pemenuhan PSU Perumahan serta mekanisme Penerbitan Rekomendasi Penyediaan PSU Perumahan untuk pengembang sehingga penyediaan PSU Perumahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   c. Sosialisasi secara rutin kepada pengembang perumahan terkait penyediaan dan penyerahan PSU Perumahan. Kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan pengembang perumahan mengetahui dan memahami tentang ketentuan dan mekanisme penyediaan PSU Perumahan serta Penyerahan PSU Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.
   d. Menyediakan anggaran pemeliharaan pada perumahan yang PSU nya telah diserahkan pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2023 terdapat 2 lokasi perumahan yang mendapat alokasi untuk pemeliharaan jalan dan drainase.
   e. Melakukan pendataan perumahan pada tahun 2023 dengan target mendata seluruh perumahan serta menghitung luas PSU pada masing-masing perumahan sehingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan memiliki data eksisting PSU serta potensi nilai Aset PSU yang akan diserahkan.

f. Kedepannya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan melakukan monitoring pada perumahan terkait kesesuaian siteplan dengan pembangunan di lokasi serta updating rumah yang terbangun sebagai data pengurangan dalam mengurangi backlog perumahan.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Penyelenggaraan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis. Tiga sub urusan yang digunakan sebagai acuan dalam memenuhi SPM pelayanan dasar Trantibumlinmas adalah sub urusan bencana, sub urusan kebakaran serta sub urusan trantibumlinmas. Pelaksanaan SPM secara teknis dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kinerja pelayanan urusan trantibumlinmas diukur dengan indikator kinerja SPM dan IKK outcome. Capaian indikator tersebut sebagaimana tabel 2.1.3.5.

Tabel 2.1.3.5. Capaian Kinerja Urusan Trantibumlinmas

IKK Outcome	SPM/IKK	Capaian					Perangkat Daerah
		2018	2019	2020	2021	2022	
Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota (%)	SPM	94,15	87,30	88,32	99,39	94,34	Satpol PP
% gangguan trantibum yg dpt diselesaikan	SPM/IKK	100	100	100	100	100	Satpol PP
% perda & perkada yg ditegakkan	SPM/IKK	100	100	100	100	100	Satpol PP
Jumlah warga negara yg memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	SPM/IKK	100	100	100	100	100	BPBD
Jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan & kesiapsiagaan thd bencana (%)	SPM/IKK	96,86	81	88,70	99,24	100%	BPBD
Jumlah warga negeri yg memperoleh layanan penyelamatan & evakuasi korban bencana (%)	SPM/IKK	94,15	87,30	88,32	99,39	94,34	Satpol PP

% pelayanan penyelamatan & evakuasi korban kebakaran (%)	SPM/IKK	100	100	100	100	100	Satpol PP
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (satuan waktu)	IKK	-	-	-	-	24,86	Satpol PP

Sumber : Satpol PP dan BPBD Kabupaten Pasuruan, 2023

Indikator SPM dan IKK outcome pada layanan trantibum serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran cenderung mempunyai capaian meningkat dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Sedangkan pada indicator SPM sub urusan bencana, ada beberapa indicator yang tidak bisa dibandingkan capaiannya dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian target yang mengacu pada Kepmendagri 050.5889. Secara umum capaian SPM dan IKK outcome sub urusan bencana menunjukkan kondisi yang lebih baik.

Pada indikator waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran dihitung mulai dari terima laporan jika terjadi kebakaran kemudian berangkat sampai ke tempat tujuan kebakaran. Standar *response time* yang digunakan adalah minimal 15 menit untuk 7,5 Km jarak tempuh dari Kantor Pemadam sampai lokasi kejadian, sedangkan maksimal 30 menit untuk 15 Km Jarak tempuh dari Kantor Pemadam sampai lokasi kejadian.

A. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui kapasitas daerah dalam menghadapi bencana di daerah. Adapun capaian Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022 sebagaimana gambar 2.1.3.5.1. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa capaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola bencana.

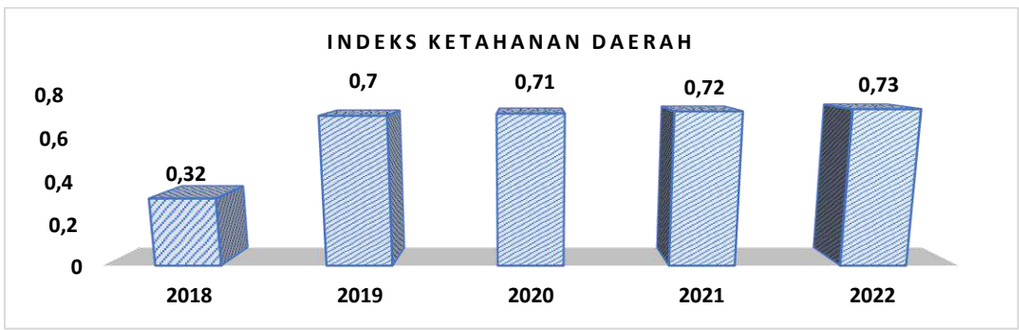

Gambar 2.1.3.5.1. Capaian Indeks Ketahanan Daerah

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2022

B. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana adalah gabungan nilai indeks ancaman, kerentanan, dan kapasitas. hasil dari pengkajian resiko bencana digunakan sebagai dasar untuk upaya pengurangan resiko bencana melalui pengurangan aspek bahaya dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Nilai Indeks Risiko Bencana dikatakan rendah jika nilainya <13, nilai antara 13-144 masuk kategori sedang dan lebih dari 144 masuk kategori tinggi.

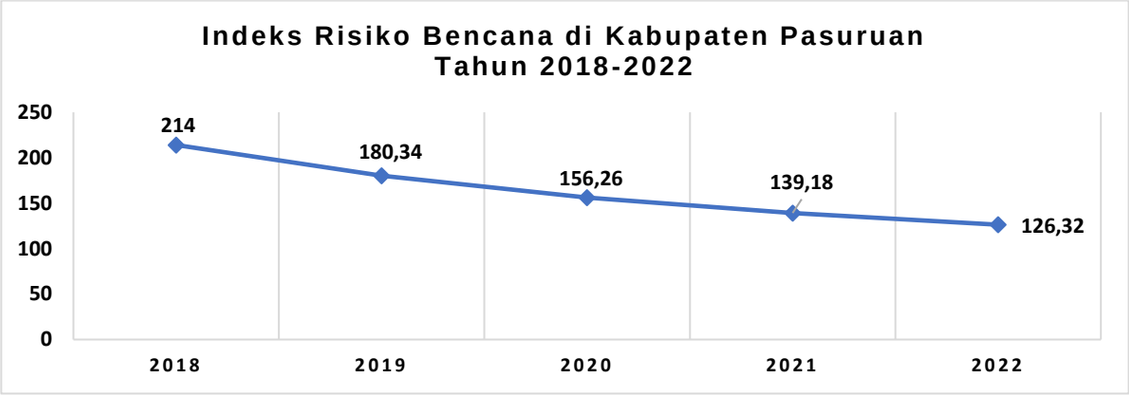

Gambar 2.1.3.5.2. Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2022

Nilai Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Pasuruan selalu mengalami penurunan disetiap tahunnya dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 masuk kategori sedang. Perkembangan jumlah desa tangguh bencana di Kabupaten Pasuruan tahun 2018 sebanyak 5 desa/kelurahan, tahun 2019 sebanyak 6 desa/kelurahan, tahun 2020 sebanyak 10 desa/kelurahan, tahun 2021 sebanyak 14 desa/kelurahan dan pada tahun 2022 sebanyak 18 desa/kelurahan.

6. Urusan Sosial

Sosial merupakan interaksi antar individu, atau kelompok yang menciptakan suatu pola sehingga terjadilah kegiatan yang bersifat umum dan menjadi ciri khas tersendiri. Dengan adanya proses sosial maka pasti akan tercipta suatu permasalahan pula yang menjadi tugas seluruh elemen khususnya pemerintah agar dapat tertangani. Sosial tidak hanya sekedar interaksi melainkan pula berhubungan atau berdampak pada ekonomi, stabilitas keamanan dan lain sebagainya. Maka, sosial bersifat

sangat penting bagi suatu daerah untuk memajukan dan mensejahterakan daerah tersebut.

Kinerja pelayanan urusan sosial diukur dengan indikator SPM dan IKK outcome dengan capaian sebagaimana tabel 2.1.3.6.

Tabel 2.1.3.6.
Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	SPM/IKK	Capaian Kinerja					Perangkat Daerah
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti* (%)	SPM	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
2	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti* (%)	SPM	100	100	100	100	97,50	Dinas Sosial
3	Persentase Warga Negara Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti* (%)	SPM	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
4	Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti* (%)	SPM	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
5	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota***(%)	SPM/IKK	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
6	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pegemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)** (%)	IKK	-	100	100	100	67,8	Dinas Sosial

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, 2022

Sebagian besar SPM tahun 2018-2022 pada urusan sosial sudah mencapai 100% dan hanya capaian SPM pada Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti yang belum mencapai 100%. Sedangkan pada capaian IKK terdapat satu indikator yang menunjukkan tren penurunan pada tahun 2022.

Kinerja pelayanan urusan sosial dapat dilengkapi dengan indikator kinerja persentase PMKS. Persentase PMKS dalam periode tahun 2018-2023 menunjukkan fluktuasi dan secara umum mengalami peningkatan pada akhir tahun 2022.

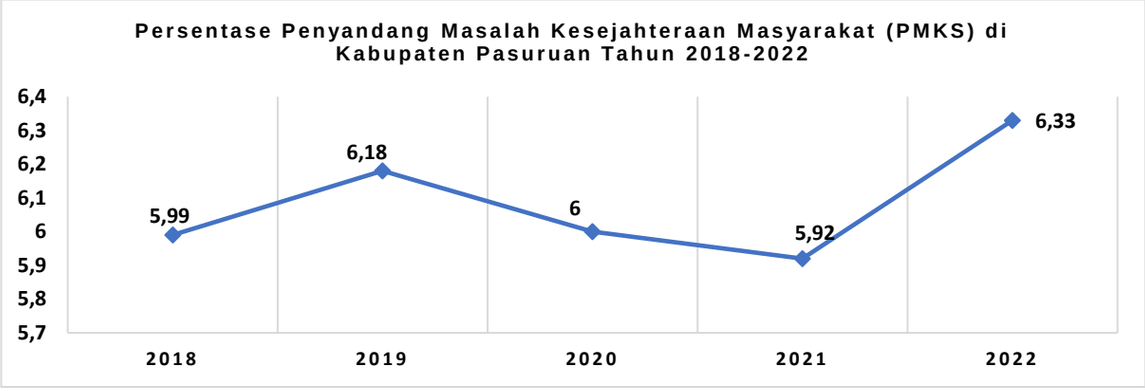

Gambar 2.1.3.6.1.
Persentase PMKS Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, 2023

Dalam rangka untuk meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), d/h PMKS, sejak tahun 2019 telah dibentuk Tim Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) yang dikhususkan untuk penanganan PPKS/PMKS pada kategori anak. Kedepannya untuk PKSAI, Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan kewenangan dan layanan sehingga mampu memberikan dampak positif bagi penurunan PMKS. Adanya stimulan berupa sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) diharapkan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada PPKS/PMKS.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non-Dasar

7. Urusan Ketenagakerjaan

Pelaksanaan pelayanan urusan ketenagakerjaan diukur dengan indikator kinerja kunci (IKK) level outcome, yaitu: (1) Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja; (2) Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi[; (3) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja ; (4) Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan; (5) Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota; dan (6) Persentase Penanganan kasus hubungan

industrial yang diselesaikan/anjuran. Realisasi kinerja layanan urusan ketenagakerjaan dalam periode tahun 2018-2022 sebagaimana tabel 2.1.3.7.

Tabel 2.1.3.7
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	SPM/ IKK	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	IKK	60,50	60,50	41,38	68,75	70,55
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	IKK	52,6	70,03	75	80	93,36
3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp.)	IKK	120.866.200	120.242.100	126.856.300	126.627.800	128.152.480
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	IKK	80	80	80	100	100
5.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (%)	IKK	70,03	70,05	43,44	41,06	40,47
6.	Persentase Penanganan kasus hubungan industrial yang iselesaikan/anjuran (%)	-	75	75	80	80	94

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja, menunjukkan peningkatan namun sampai dengan tahun 2022 masih belum mencapai 100%.
b. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi, menunjukkan tren peningkatan yang relatif signifikan sehingga mencapai hampir 94% di tahun 2022. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Perhitungan indikator ini menggunakan pendekatan pencari kerja yang mengikuti pelatihan dan lulus uji kompetensi.
c. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja, selama periode lima tahun terakhir menunjukkan adanya tren peningkatan. Hal ini antara lain

dipengaruhi kompetensi tenaga kerja seperti yang disampaikan pada huruf b.

d. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), menunjukkan tren peningkatan dan mencapai hasil yang optimal sebesar 100% di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perusahaan telah menerapkan tata kelola kerja yang layak.
e. Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, menunjukkan kecenderungan turun yang cukup signifikan, dari 70-an % hingga menjadi sekitar 40% di tahun 2022. Kondisi tersebut menunjukkan kurangnya tingkat daya saing pencari kerja sehingga belum dapat memenuhi kualifikasi lowongan kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.
f. Persentase Penanganan kasus hubungan industrial yang diselesaikan/anjuran, dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan hingga tahun 2022 mencapai hasil yang tinggi sebesar 94%. Meskipun belum mencapai hasil yang maksimal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha/pemilik/manajemen perusahaan semakin harmonis. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh belum optimalnya fungsi dan peran serikat pekerja/buruh sebagai media komunikasi/perantara antara buruh dengan pengusaha.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diukur dengan indikator kinerja kunci (IKK) outcome, yaitu : (1) Persentase ARG pada belanja langsung APBD; (2) Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota; dan (3) Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan). Capaian indikator tersebut pada periode tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel 2.1.3.8.

Tabel 2.1.3.8.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	SPM/IKK	Realisasi / Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	IKK	n/a	3,16	18,31	18,6	23,05
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (%)	IKK	n/a	100	96,30	100	100
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang/ TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	IKK	n/a	n/a	6,83	3,24	9,75
4.	Indeks Pembangunan Gender*	-	90,41	90,68	90,48	90,89	91,02

*Sumber : *BPS Kabupaten Pasuruan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Kabupaten Pasuruan, 2023*

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Persentase ARG pada belanja langsung APBD, perlahan menunjukkan peningkatan, sehingga belanja APBD semakin responsif gender.
b. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota menunjukkan capaian yang ideal setiap tahun yaitu 100%, kecuali tahun 2020.
c. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO, menunjukkan angka berfluktuasi hingga tahun 2022 mencapai sekitar 9 kejadian per 100.000 perempuan.
d. Indeks Pembangunan Gender, merupakan perbandingan indeks pembangunan manusia (IPM) perempuan dengan IPM laki-laki. Secara perlahan menunjukkan peningkatan, sehingga memberikan gambaran bahwa kualitas SDM perempuan semakin setara dengan SDM laki-laki dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
e. Indeks Pembangunan Gender terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai 2022, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 sehingga banyak penduduk perempuan yang kehilangan pekerjaan. Akan tetapi pada tahun 2021 dan 2022 Indeks Pembangunan Gender kembali kembali mengalami peningkatan setelah mengalami Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak penduduk perempuan yang mendapatkan pekerjaan.

9. Urusan Pangan

Kinerja pelayanan urusan pangan diukur dengan indikator kinerja kunci (IKK) outcome, yaitu Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan), dan indikator pendukung indeks ketahanan pangan dan pola pangan harapan. Capaian IKK outcome periode tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel 2.1.3.9.

Tabel 2.1.3.9.
Capaian IKK outcome Urusan Pangan
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	SPM/IKK	Realisasi / Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan pangan sesuai kebutuhan) (%)	IKK	n/a	253	258	268	270

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa persentase ketersediaan pangan utama (beras, jagung, daging, telur dan ikan) setiap tahun berada di atas 200%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya surplus pangan, karena cadangan pangan yang tersedia melebihi sebesar lebih dari dua kali lipat perkiraan kebutuhan pangan yang dikonsumsi masyarakat.

Kondisi ketahanan pangan di daerah ditunjukkan dengan beberapa indikator lain yaitu indeks ketahanan pangan (IKP) dan skor pola pangan harapan (PPH). Indeks ketahanan pangan mencerminkan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga berupa tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau, atau dikelompokkan ke dalam 3 aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Skor (PPH) mencerminkan Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan gizi baik dalam jumlah maupun mutu. Capaian kedua indikator tersebut disajikan pada gambar 2.1.3.9.1 dan gambar 2.1.3.9.2.

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan terus mengalami penurunan mulai Tahun 2019 sampai tahun 2021. Namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan sehingga mencapai angka 77,40 yang berdasarkan tabel *cut off point* IKP yang di keluarkan oleh Badan Pangan Nasional. Kabupaten Pasuruan termasuk dalam kelompok 6 (skor

>75,68). Hal ini menggambarkan bahwa penyedian/produksi pangan utama (beras, jagung, daging, telur dan ikan) lebih besar dari pada peningkatan kebutuhan masyarakat.

Skor PPH mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2020. Pada capaian tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami peningkatan. Skor PPH tahun 2022 mencapai 85,5 masuk ke dalam kategori 'tinggi' (skor >85). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan/kesadaran masyarakat yang semakin meningkat tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

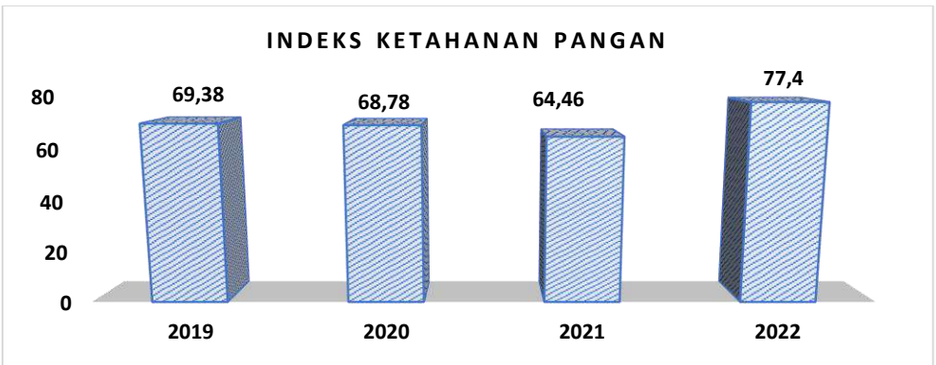

Gambar 2.1.3.9.1.
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, 2023
Keterangan : Data 2018 tidak tersedia

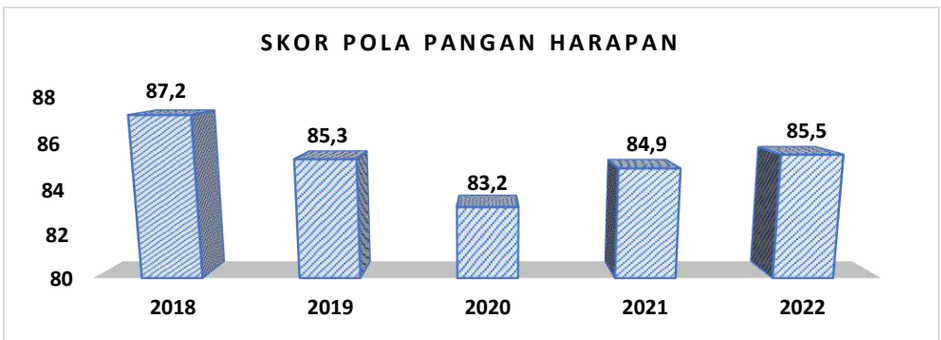

Gambar 2.1.3.9.2.
Pola Pangan Harapan Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, 2023

10. Urusan Pertanahan

Kinerja pelayanan urusan pertanahan diukur dengan Indikator kinerja kunci (IKK) outcome dengan capaian dalam periode 2018-2022 sebagaimana tabel 2.1.3.10. Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum baru ada kegiatan di tahun 2022, yaitu penetapan lahan seluas 4,21 Ha yang untuk pembangunan Embung Ampelsari dan Embung Tempuran.
b. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal, diukur berdasarkan perbandingan luas lahan Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi dengan luas izin lokasi yang diterbitkan. Sampai dengan saat ini data masih belum tersedia/dilakukan perhitungan dan diperlukan koordinasi antar perangkat daerah terkait yaitu Dinas PKP sebagai pelaksana urusan pertanahan dan Dinas PMPTSP sebagai pelaksana urusan penanaman modal.
c. Tersedianya Tanah Obyek Landform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, merupakan perbandingan antara jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha dengan Jumlah penerima tanah obyek landreform. Kegiatan tersebut baru ada di tahun 2022 dan tercapai 100%, yang berarti jumlah target sasaran penerima tanah obyek landreform dapat terealisasi semua.
d. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi, setiap tahun dapat dilaksanakan terhadap seluruh kasus yang terlaporkan atau 100% tertangani.

Tabel 2.1.3.10.1
Capaian IKK Outcome Urusan Pertanahan

Indikator Kinerja	SPM /IKK	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (%)	IKK	0	0	0	0	100%
Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal *(%)	IKK	-	-	-	-	-
Tersedianya Tanah Obyek Landform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absantee (%)	IKK	0	0	0	0	100
Penanganan sengketa tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	IKK	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, 2022

Selain diukur menggunakan indikator kinerja kunci, urusan pertanahan juga diukur menggunakan indikator tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal dengan realisasi 60,85% pada tahun 2022. Indikator tersebut merupakan perbandingan luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya di atas KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) sebesar 406.607 Ha dengan luas kesesuaian KKPR yang diterbitkan sebesar 668.177,88 Ha.

Selain diukur menggunakan indikator kinerja kunci, urusan pertanahan juga diukur menggunakan indikator tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal dengan realisasi 60,85% pada tahun 2022. Indikator tersebut merupakan perbandingan luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya di atas KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) sebesar 406.607 Ha dengan luas kesesuaian KKPR yang diterbitkan sebesar 668.177,88 Ha.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan telah melakukan identifikasi pemetaan pertanahan di Kabupaten Pasuruan dengan 3 (tiga) kriteria yaitu Tanah Kas Desa, Tanah Aset Pemkab, dan Tanah Kosong/ Terlantar sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1.3.10.2
Jumlah Identifikasi Pemetahan Pertanahan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 – 2022

No.	Kecamatan	Identifikasi Pemetaan					
		Tanah Kas Desa		Tanah Aset Pemkab		Tanah Kosong/ Terlantar	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Bangil	68	-	36	183	110	-
2	Beji	96	-	11	33	-	35
3	Gempol	-	85	13	-	109	-
4	Gondang Wetan	-	-	15	-	-	-
5	Grati	-	-	13	-	13	-
6	Kejayan	-	-	10	-	-	-
7	Kraton	256	-	6	-	-	28
8	Lekok	-	-	-	-	-	-
9	Lumbang	-	-	8	-	-	-

No.	Kecamatan	Identifikasi Pemetaan					
		Tanah Kas Desa		Tanah Aset Pemkab		Tanah Kosong/ Terlantar	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
10	Nguling	-	-	3	-	-	-
11	Pandaan	-	112	31	170	102	-
12	Pasrepan	-	-	5	-	-	-
13	Prigen	-	131	12	-	-	-
14	Pohjentrek	-	-	-	-	-	-
15	Purwodadi	-	-	2	-	-	-
16	Purwosari	325	-	26	117	-	40
17	Puspo	-	-	-	9	-	-
18	Rejoso	-	-	1	-	-	-
19	Rembang	-	-	2	2	-	-
20	Sukorejo	-	89	18	-	-	-
21	Tosari	-	-	-	25	-	-
22	Tutur	-	-	5	-	-	-
23	Winongan	-	-	4	-	-	-
24	Wonorejo	-	-	7	-	-	29
Total		**745**	**417**	**228**	**539**	**334**	**132**

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan identifikasi perencanaan pemanfaatan Tanah Kas Desa di Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun 2022 telah mengidentifikasi sebanyak 1.162 aset tanah kas desa di 8 kecamatan. Di tahun 2023 kegiatan identifikasi dilakukan di 2 kecamatan yaitu Purwodadi dan Tutur.
2. Kegiatan identifikasi perencanaan pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun 2022 telah mengidentifikasi 767 KIB tanah aset Pemkab dari 20 kecamatan. Di tahun 2023 kegiatan identifikasi dilakukan di 12 kecamatan dengan target total 350 KIB.
3. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi Tanah Kosong/ Terlantar di Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun 2022 telah

mengidentifikasi 466 bidang tanah terlantar di 8 kecamatan. Di tahun 2023 kegiatan identifikasi dilakukan di 8 kecamatan yaitu Gondangwetan, Grati, Lekok, Lumbang, Nguling, Pasrepan, Puspo dan Tosari.

4. Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga berencana melaksanakan kegiatan identifikasi tanah timbul/ tanah oloran yang dilakukan di 2 kecamatan (Bangil dan Kraton) pada tahun 2023 dan 3 kecamatan (Lekok, Nguling, Rejoso) di tahun 2024. Selain itu, juga akan dilaksanakan kegiatan identifikasi tanah HGU dan EIGENDOM di 4 kecamatan yaitu Grati, Lekok, Nguling dan Rejoso.

11. Urusan Lingkungan Hidup

A. Indikator Kinerja Kunci (Outcome)

Kinerja pelaksanaan urusan lingkungan hidup diukur dengan indikator kinerja kunci (IKK) outcome yaitu : (1) IKLH; (2) Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten; dan (3) Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan thd izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yg diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota. Realisasi indikator tersebut dalam periode tahun 2018-2022 sebagaimana tabel 2.1.3.11.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diperoleh melalui 3 (tiga) komponen indeks meliputi IKA (indeks kualitas air), IKU (indeks kualitas udara), dan IKTL (indeks kualitas tutupan lahan) yang masing-masing memiliki bobot tersendiri, dengan formulasi yaitu IKLH Kab/kota = (0,376 x IKA)+(0,405 x IKU)+(0,219x IKTL).

Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten didapat dari perhitungan total volume sampah yang dapat ditangai dibagi total volume timbulan sampah kabupaten dikali 100%.

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten didapat dari perhitungan Jumlah Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar dibagi jumlah usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan dikali 100%.

Tabel 2.1.3.11.
Capaian IKK Outcome Urusan Lingkungan Hidup

IKK Outcome	Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kab/kota	57,10	57,36	62,547	63,13	59,78
Indeks Kualitas Air (IKA)	*50,00*	*53,73*	*52,14*	*53,57*	*53,17*
Indeks Kualitas Udara (IKU)	*78,83*	*79,00*	*82,22*	*82,96*	*75,18*
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	*43,57*	*43,89*	*44,038*	*42,89*	*42,64*
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	n/a	21,82%	44,06%	73,06%	22,74%
Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan thd izin lingkungan, izin PPLH & PPU LH yg diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota	n/a	70%	55,56%	53,33%	50%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2022

Hasil capaian IKLH menunjukkan trend positif dalam periode 2018-2021, namun menurun di tahun 2022. Nilai IKLH dalam lima tahun terakhir masuk dalam kategori 'Sedang' (berada di interval 50≤ x ≤70). Hal ini merupakan potensi sekaligus tantangan dalam pembangunan lingkungan hidup, utamanya tantangan untuk memelihara kualitas lingkungan hidup sehingga pembangunan tetap bisa dilakukan dengan tetap terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Upaya dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian yang penting dalam kehidupan, salah satu komponen dalam mewujudkan adalah udara agar dapat memberikan dukungan terhadap makhluk hidup secara optimal.

Indeks Kualitas Air tahun 2018-2022 menunjukkan tren fluktuatif yang termasuk kategori 'Sedang'. Angka realisasi IKA tahun 2022 masih cukup jauh dari target akhir renstra di tahun 2023 yaitu 53,59 sehingga menghasilkan capaian atas target akhir Renstra sebesar 99,22%. Nilai IKA Kabupaten Pasuruan sebesar 53,17 termasuk dalam kategori "sedang". Nilai ini memberikan kontribusi sebesar 37,6% terhadap nilai IKLH di tingkat kabupaten/kota. Nilai IKA pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,40 poin dari capaian tahun 2021 yang berarti bahwa secara umum terjadi penurunan kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Faktor yang dapat mempengaruhi penurunan IKA diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mulai berakhirnya masa pandemi COVID-19, aktivitas masyarakat mulai berjalan dengan normal dan kegiatan industri sudah banyak beroperasi mengakibatkan peningkatan timbulan air limbah yang masuk ke sungai;
2. Peningkatan jumlah penduduk, ditambah dengan berkembangnya sektor usaha mikro/kecil di akhir masa pandemi yang tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas pengolahan air limbah, berpotensi meningkatkan beban pencemaran air sungai. Air limbah domestik dari kegiatan perumahan/pemukiman yang tidak diolah memberikan kontribusi paling besar dalam peningkatan cemaran parameter fecal coli.;
3. Pendangkalan/sedimentasi sungai akibat dari pembukaan lahan di wilayah hulu yang menyebabkan peningkatan limpasan air hujan dan *eutrofikasi* yang meningkatkan akumulasi nutrisi seperti fosfat dan nitrat yang masuk ke aliran sungai.

Indeks Kualitas Udara menunjukkan trend positif dan berada di posisi 'Baik'. Realisasi IKU tahun 2022 sebesar 75.18 yang menunjukkan bahwa adanya penurunan dari tahun 2021, nilai tersebut kurang dari target akhir renstra di tahun 2023 yaitu 81,04. Hasil capaian IKU Kabupaten Pasuruan terhadap target akhir Renstra 92,77%. Capaian tersebut belum berhasil karna belum mampu melebihi target capaian ≥ 100%. Target IKU Nasional tahun 2022 sebesar 84,30 dan target IKU Provinsi Jawa Timur sebesar 83,38 dari kedua target tersebut, realisasi nilai IKU Kabupaten Pasuruan tahun 2022 masih dibawah target nasional maupun provinsi. Angka realisasi nilai IKU Kabupaten Pasuruan tahun 2022 jika dibandingkan dengan realiasi nilai IKU Nasional tahun 2022 sebesar 88,05 dan provinsi sebesar 84,28 menunjukkan bahwa IKU Kabupaten Pasuruan ditahun ini juga masih dibawah nilai IKU Nasional dan Provinsi.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penurunan kualitas udara di wilayah Kabupaten Pasuruan antara lain :

1) Aktivitas masyarakat dan mobilitas penduduk yang kembali tinggi di akhir masa pandemic COVID-19 menyebabkan peningkatan volume kendaraan di jalur jalur transportasi;

2) Kegiatan industri yang telah beroperasi secara normal menyebabkan timbulan emisi cerobong dari pabrik dan mengakibatkan peningkatan beban pencemaran udara;
3) Terus berlangsungnya pembangunan fisik yang tidak diikuti dengan laju peningkatan ruang terbuka hijau yang seimbang menyebabkan penurunan kualitas udara di wilayah perkotaan;
4) Faktor teknis terkait penentuan titik pengambilan sampel udara yang belum dilaksanakan secara merata menyebabkan hasil pengukuran kualitas udara belum dapat mewakili kondisi kualitas udara di wilayah Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2018-2021 menunjukkan tren naik tetapi menurun di tahun 2022 dengan range kategori 'Kurang'. Berdasarkan hasil observasi melalui citra satelit, secara umum nilai IKTL masih berpotensi untuk mengalami peningkatan pada tahun 2023. Penurunan capaian nilai IKTL pada tahun ini lebih disebabkan oleh kendala-kendala terkait teknis pelaporan dan verifikasi data tutupan lahan oleh KLHK, dimana sistem yang disediakan belum dapat berfungsi secara optimal, sehingga beberapa kali terjadi error pada website yang menyebabkan data yang telah diinput menjadi hilang. Dari hasil observasi melalui citra satelit, secara umum nilai IKTL masih berpotensi untuk mengalami peningkatan pada tahun 2023 mengingat masih banyak tutupan lahan yang belum masuk dalam inventarisasi dan pemetaan tutupan lahan karena keterbatasan sumber daya manusia (tenaga teknis).

Indikator 'terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota' dalam periode tahun 2018-2021 mengalami tren meningkat, namun tahun 2022 turun cukup signifikan. Sedangkan indikator 'Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan thd izin lingkungan, izin PPLH & PPU LH yg diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota' dalam periode tahun 2018-2022 terjadi kecenderungan penurunan.

Gambaran capaian kinerja urusan lingkungan hidup tersebut, menjadi tantangan dalam pembangunan lingkungan hidup, utamanya tantangan untuk memelihara kualitas lingkungan hidup sehingga pembangunan tetap bisa dilakukan dengan tetap terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tingkat pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diukur dengan indikator kinerja kunci (IKK) outcome dengan realisasi kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir, tahun 2018 s/d 2022, sebagaimana tabel 2.1.3.12.

Tingkat layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam periode tahun 2018-2022 secara garis besar ditunjukkan dengan tingkat kepemilikan masyarakat terhadap dokumen kependudukan dan catatan sipil, yaitu kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), kartu identitas anak (KIA), dan akta kelahiran (AK). Berdasarkan tabel 2.1.3.12 diketahui bahwa kepemilikan dokumen kependudukan tahun 2022 belum semuanya mencapai 100%, namun demikian menunjukkan tren peningkatan. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- Tingkat kepemilikan KK dari keluarga yang wajib memiliki KK menunjukkan peningkatan yang relatif kecil dari tahun 2018 ke tahun 2022 yaitu sebesar 0,17%.
- Kepemilikan KTP, ditunjukkan dengan tingkat perekaman KTP elektronik, mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 5,56%.
- Kepemilikan KIA mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu sebesar 19,19% namun tingkat kepemilikannya terendah dari dokumen kependudukan lainnya.
- Kepemilikan AK terdapat penambahan sebesar 11,23%, namun masih perlu ditingkatkan karena sampai akhir tahun 2022 mencapai 80,63% melalui kegiatan jemput bola.
- Selaian tingkat kepemilikan dokumen kependudukan, layanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil juga diukur dengan tingkat pemanfaatan data kependudukan. Data kependudukan yang memiliki komponen data yang sangat besar dapat dimanfaatkan dalam penentuan kelompok sasaran kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Tingkat pemanfaatan data ditunjukkan oleh seberapa banyak Perangkat Daerah yang menggunakan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama. Sampai dengan tahun 2022 tercatat masih sedikit Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan, yaitu Dinas Sosial dan RSUD Bangil.

Tabel 2.1.3.12
Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase kepemilikan KK	%	98,05	98,05	98,05	98,10	98,22
2.	Perekaman KTP elektronik	%	93,09	98,05	84,94	99,14	98,65
3.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	5,0	5,0	8,53	21,64	24,19
4.	Kepemilikan akta kelahiran	%	69,4	72	87,02	95,48	80,63
5.	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama *	%	0	0	0	3,57	7,27
	Jumlah PD memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	*Unit*	0	0	0	2 (Dinsos, RSUD)	2 (Dinsos, RSUD)

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2023

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan dinilai dari beberapa indikator kinerja pemerintah daerah, antara lain sebagaimana berikut

Tabel 2.1.3.13
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	SPM/IKK	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	IKK	158,54	684,21	0	0	0
2.	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	IKK	0	0,77	1,61	5,16	22,37
3.	Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) mandiri (%)	-	-	-	-	-	16

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan, 2022
*Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2021*

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan sampai tahun 2019, namun setelahnya tidak terjadi penambahan karena sudah tidak ada lagi desa tertinggal.
b. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri, menunjukkan pergerakan/peningkatan setiap tahun dan secara umum terjadi percepatan. Hal ini banyak desa berkembang yang naik status

menjadi desa mandiri. Perkembangan desa mandiri sebagaimana gambar 2.1.3.13.1.

c. Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) mandiri mencapai 16% di tahun 2022, sehingga perlu peningkatan pembinaan BUMDes sehingga dapat memajukan perekonomian desa dengan memanfaatkan potensi desa.

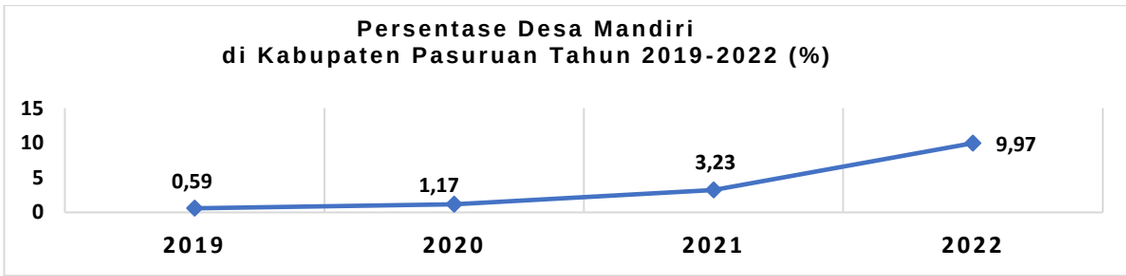

Gambar 2.1.3.13.1 Persentase Desa Mandiri Tahun 2019-2022
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2023

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja pelaksanaan layanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diukur dengan indikator kinerja kunci (IKK) yaitu: (1) TFR (Totak Fertility Rate /Angka Kelahiran Total); (2) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR); dan (3) Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need). Capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan KB sebagaimana tabel 2.1.3.14.

Tabel 2.1.3.14.
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	SPM/IKK	2018	2019	2020	2021	2022
1	Total Fertility Rate (angka kelahiran total) (jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya.)	IKK	1,87	1,84	1.95	2,04	n/a (blm terbit dari BKKBN)
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	IKK	-	75,14	74,91	73,99	73,24
3	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (Unmed Need)	IKK	-	11,16	10,58	11,71	11,16
4	Age Specific Fertility Rate (ASFR/banyaknya kelahiran tiap 1000 perempuan pada kelompok umur (15-19) (per 1000 Perempuan)	-	33,94	28,75	29,80	29,8	n/a (blm terbit dari BKKBN)

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Total Fertility Rate (jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya, secara umum berkisar pada angka 2. Hal ini mengindikasikan anjuran/slogan pengendalian penduduk dan KB "2 anak lebih baik" dapat dikatakan berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
b. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR, menunjukkan sedikit penurunan. Hal ini menunjukkan minat PUS menggunakan alat konstrasepsi KB berkurang. Oleh karena itu program pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) perlu ditingkatkan agar lebih efektif.
c. Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmed need), menunjukkan kondisi yang relatif stabil, yaitu pada kisaran 11% atau dengan kata lain kebutuhan berKB dapat terpenuhi secara kontinu cukup tinggi sebesar 89%
d. Age Specific Fertility Rate (ASFR/banyaknya kelahiran tiap 1000 perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun), ada kecenderungan menurun. Hal ini mengindikasikan laju pertumbuhan penduduk terkendali, karena ASFR berpengaruh terhadap TFR.

15. Urusan Perhubungan

Kinerja pelaksanaan urusan perhubungan dinilai dengan beberapa indikator kinerja dengan capaian sebagaimana tabel 2.1.3.15.

Tabel 2.1.3.15.
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	SPM/ IKK	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio konektivitas kab/kota*** (%)	IKK	-	-	46,15	57,58	39
2.	Kinerja lalu lintas kab/kota*** (%)	IKK	-	-	0,32	0,37	0,36
3.	Persentase Wilayah yang Terkoneksi Sarana Angkutan Umum* (%)	-	-	7,18	7,91	8,20	12,02
4.	Persentase pelaksanaan pelayanan uji KIR berkala*** (%)	-	-	-	97,5	99,6	97,23

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, 2023
*Keterangan : *Indikator baru digunakan tahun 2019*
***Indikator baru digunakan tahun 2022*
****Indikator baru digunakan tahun 2020*

Rasio konektivitas menunjukkan penurunan dengan capaian di akhir tahun 2022 sebesar 39% atau rencana kebutuhan trayek belum

terealisasi 61%. Hal ini menunjukkan trayek angkutan masih sangat minim menjangkau wilayah Kabupaten Pasuruan. Indikator yang menggambarkan kondisi yang hampir sama adalah prosentase wilayah yang terkoneksi sarana angkutan umum.

Kinerja lalu lintas diukur berdasarkan perbandingan volume dengan kapasitas lalu lintas. Apabila nilai ratio tersebut telah mencapai nilai 0.8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Capaian kinerja lalu lintas Kabupaten Pasuruan tahun 2022 sebesar 0,36, yang berarti arus lalu lintas masih jauh dari kapasitas.

Wilayah Kabupaten Pasuruan yang terkoneksi sarana angkutam umum menunjukkan tren sedikit kenaikan dengan capaian yang masih rendah. Hal tersebut dikarenakan berkembangnya pelayanan transportasi online yang memberikan kemudahan dan efisiensi dengan berbagai inovasi jenis pelayanan.

Sementara itu dari aspek keamanan kendaraan (berdasarkan pelayanan uji KIR) menunjukkan kinerja cenderung sedikit menurun. Pelayanan uji kendaraan diukur berdasarkan perbandingan jumlah kendaraan yang melakukan uji berkala dengan jumlah kendaraan yang harus melakukan uji berkala pada tahun berkenaan. Hal ini menunjukkan terdapat penurunan ketepatan waktu masyarakat melakukan uji KIR kendaraan.

16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Peningkatan jumlah koperasi di Kabupaten Pasuruan setiap tahunnya tergolong masih rendah, begitu juga dengan jumlah koperasi yang RAT, dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Peningkatan jumlah usaha mikro yang ber NIB, dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan.

Tabel 2.1.3.16.1
Data Jumlah Koperasi dan Usaha mikro di kabupaten Pasuruan
Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja	Data						
1	Meningkatnya (Persentase) Koperasi yang berkualitas		TB.2017	TB.2018	TB. 2019	TB. 2020	TB 2021	Satuan
		Jumlah Koperasi yang RAT :	285	287	269	184	240	Unit
		Jumlah seluruh Koperasi :	1.067	1.073	1.045	1.083	1.140	Unit
2	Meningkatnya (Persentase) Usaha Mikro yang menjadi wirausaha		2018	2019	2020	2021	2022	
		Jumlah Usaha Mikro yang Ber NIB :	3.276	4.600	6.311	7.125	8.530	Unit
		Jumlah Usaha Mikro Keseluruhan :	268.264	275.112	211.856	242.837	237.352	Unit

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan, 2023

Kinerja pelayanan urusan koperasi dan UKM diukur dengan indikator kinerja kunci (IKK) outcome, yaitu: (1) Meningkatnya (Persentase) Koperasi yang berkualitas dan (2) Meningkatnya (Persentase) Usaha Mikro yang menjadi wirausaha. Capaian kedua indikator tersebut disajikan pada tabel 2.1.3.16.

Tabel 2.1.3.16.2
Capaian Kinerja (IKK outcome) Urusan Koperasi dan UKM
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	SPM/IKK	Realisasi / Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatnya (Persentase) Koperasi yang berkualitas (%)	IKK	26,71	26,75	25,74	16,99	21,05
2.	Meningkatnya (Persentase) Usaha Mikro yang menjadi wirausaha (%)	IKK	1,22	1,67	2,98	2,93	3,59

Sumber : Dinas Koperasi-UKM, 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Koperasi yang berkualitas (berdasarkan RAT, volume usaha dan asset), menunjukkan angka yang fluktuatif dan ada kecenderungan menurun, hal ini antara lain dipengaruhi jumlah koperasi melaksanakan RAT (rapat anggota tahunan), jumlah seluruh koperasi yang bersifat dinamis, baik ada penambahan koperasi baru atau koperasi yang sudah tidak aktif lagi.

b. Usaha Mikro yang menjadi wirausaha, merupakan perbandingan usaha mikro yang ber-NIB (nomor induk berusaha) dengan jumlah seluruh usaha mikro. Secara umum menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut didorong oleh meningkatnya minat masyarakat untuk berusaha secara mandiri dan tersedianya kemudahan permohonan NIB secara online melalui OSS.

Penggambaran koperasi berkualitas dan berkembangnya usaha mikro dapat ditunjukkan dengan peningkatan omzet yang dihasilkan. Perkembangan nilai omzet koperasi dan usaha mikro disajikan pada gambar 2.1.3.16.1, menjukkan adanya tren peningkatan.

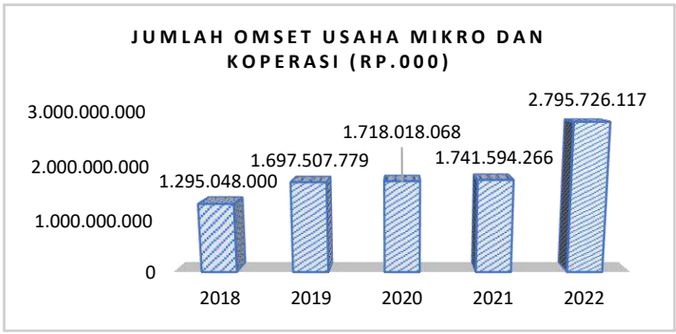

Gambar 2.1.3.16.1. Perkembangan Omset Usaha Mikro dan Koperasi 2018-2022
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan, 2022

Jumlah Koperasi di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 sebanyak 1.040 unit yang terdiri dari koperasi aktif sebanyak 1.027 unit dan koperasi tidak aktif sebanyak 13 unit. Kapasitas permodalan seluruh koperasi di Kabupaten Pasuruan sebesar Rp 5.351.095.532.828,00 yang terdiri dari modal sendiri sebesar Rp 1.403.337.889.114,00 dan modal luar sebesar Rp 3.947.757.643.714,00. Artinya sebagian besar kapasitas permodalan koperasi berasal dari modal luar (73,77%) dan sisanya (26,23%) berasal dari modal sendiri.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kinerja pelayanan urusan kominfo diukur dengan IKK outcome yaitu: (1) Persentase PD yang tehubung dgn akses internet yg disediakan oleh Dinas Kominfo; persentase layanan publik yg diselenggarakan secara online dan terintegrasi; dan (3) persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas. Capaian kinerja tersebut sebagaimana tabel 2.1.3.17.

Tabel 2.1.3.17.
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi Informatika

Indikator Kinerja	SPM/IKK	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
% OPD yang tehubung dgn akses internet yg disediakan oleh Dinas Kominfo	IKK	-	-	55,22	56,92	58,20
% layanan publik yg diselenggarakan secara online & terintegrasi	IKK	-	-	12,66	26,92	38,51
% masyarakat yg menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan & program prioritas pemerintah & pemda kab/kota	IKK	-	-	4,63	25,82	17,12

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, 2023

Indikator persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dihitung dari jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dibagi jumlah OPD. Capaian indikator ini dari tahun 2020 sampai 2021 cenderung sama meskipun angka capaian cenderung naik, hal ini disebabkan terjadi pengurangan jumlah Perangkat Daerah pada tahun 2021.

Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dihitung dari jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi jumlah layanan publik, Capaian indikator ini mengalami trend naik dari tahun 2020 sampai 2022 dengan rincian layanan publik yang ada di Kabupaten Pasuruan sebesar 79 layanan (tahun 2020) yang diselenggarakan secara online sebesar 10 layanan, 26 layanan dengan 7 layanan online (tahun 2021).

Cakupan masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan & program prioritas pemerintah dan pemda kab/kota fluktuasi. Capaian tertinggi tahun 2021 namun tahun 2022 kembali turun dengan capaian 17,12%. Hal ini menunjukkan capaian yang sangat rendah karena informasi publik belum menjangkau masyarakat secara optimal.

Kinerja penyelenggaraan urusan kominfo yang menjadi isu strategis saat ini adalah penyelenggaran SPBE (system pemerintahan berbasis elektonik), sebagai pendorong percepatan perwujudan pemerintahan yang efisien dan efektif. Indeks ini diukur dari 4 variabel,

yaitu domain kebijakan, Tata Kelola, manajemen dan Layanan SPBE. Perkembangan capaian indeks SPBE sebagaimana gambar 2.1.3.16.1.

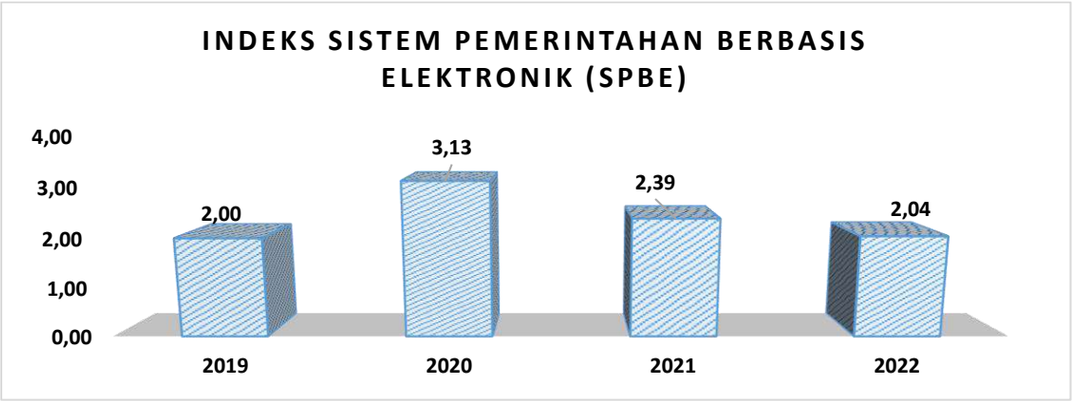

Gambar 2.17.1. Capaian Indeks SPBE Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, 2023

18. Urusan Penanaman Modal

Kinerja pelayanan urusan penanaman modal diukur dengan indikator kinerja kunci (IKK) outcome, yaitu: (1) Persentase peningkatan investasi. Capaian indikator tersebut disajikan pada tabel 2.1.3.18.

Tabel 2.1.3.18.
Capaian Kinerja (IKK outcome) Urusan Penanaman Modal
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	SPM/IKK	Realisasi / Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase peningkatan investasi (%)	IKK	-45,91	96,06	-42,82	-19,51	51,81

Sumber : Buku LKPJ Bupati dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan, 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai investasi baru yang ditanamkan di Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuasi (naik-turun). Kenaikan terbesar terjadi di tahun 2019 dan terendah di tahun 2018. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penanaman investasi sangat bergantung pada kondisi tahun yang berkenaan. Misalnya, pandemi covid-19 yang berakibat pada penurunan investasi berturut-turut di tahun 2020 dan 2021 dan kembali naik saat kondisi kembali normal di tahun 2022. Faktor lain yang mempengaruhi investasi lainnya adalah revisi RTRW yang belum selesai penetapannya, sebagai dasar persetujuan izin pendirian usaha/industri baru. Rincian nilai

investasi baru yang terealisasi pada tahun 2018-2019 sebagaiman gambar berikut.

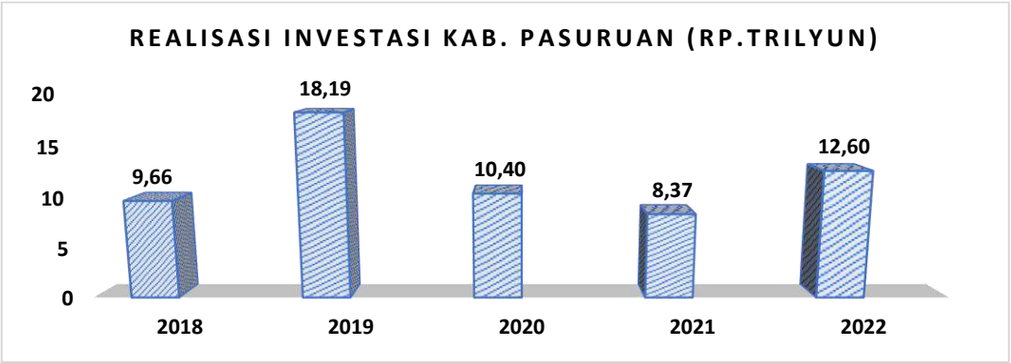

Gambar 2.18.1. Realisasi Investasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

Sumber: Buku LKPJ Bupati dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan, 2023

19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Kinerja pelayanan urusan kepemudaan dan olah raga diukur dengan IKK outcome, yaitu Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan, dan Peningkatan prestasi olahraga. Sesuai dengan regulasi pemuda adalah penduduk usia 16-30 tahun. Capaian indikator tersebut disajikan pada tabel 2.1.3.19.

Tabel 2.1.3.19
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	SPM/IKK	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri* (%)	IKK	-	-	9,05	0,03	0
2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan* (%)	IKK	-	-	9,05	8,31	8,83
3.	Peningkatan prestasi olahraga* (jumlah perolehan medali minimal even nasional)	IKK	-	-	0	15	15

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, 2022
*Keterangan: *Indikator baru digunakan pada tahun 2020*

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, menunjukkan tren menurun yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa jiwa wirausaha di kalangan pemuda perlu ditingkatkan.
2. Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan, sedikit mengalami penurunan, namun dengan capaian yang sangat kecil diperlukan peningkatan edukasi bagi pemuda tentang pentingnya berorganisasi.
3. Jumlah perolehan medali minimal even nasional, dicapai tahun 2021 dan 2022 dengan perolehan yang sama

Jumlah organisasi kepemudaan atau kelompok pemuda yang dibina selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2018 dan 2019 sebanyak 18 organisasi, tahun 2020 dan 2021 sebanyak 20 organisasi kemudian tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan menjadi 22 organisasi. Sedangkan jumlah klub olahraga yang dibina pada tahun 2022 tidak mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu sebanyak 91 klub. Jumlah sarana prasarana olahraga juga mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dimana pada tahun 2018 dan 2019 jumlah sarana prasarana olahraga ada 2 buah, pada tahun 2020 sebanyak 3 buah dan pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 5 buah.

20. Urusan Statistik

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan statistik adalah statistik sektoral, statistik yang dihasilkan oleh perangkat daerah. Kinerja pelayanan urusan statistik diukur dengan IKK outcome yaitu persentase PD yg menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan persentase PD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah. Capaiam indikator tersebut disajikan berupa tabel 2.1.3.20.

Tabel 2.1.3.20. Capaian Kinerja Urusan Statistik

IKK Outcome	SPM/IKK	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase PD yg menggunakan data statistic dlm menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKK	-	-	100	60	59,7
Persantase PD yg menggunakan data statistik dlm melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	IKK	-	-	100	60	61,54

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, 2023

Indikator persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan/evaluasi pembangunan daerah dihitung dari jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan/evaluasi pembangunan daerah dibandingkan jumlah seluruh Perangkat Daerah. Trend capaian kedua indikator tersebut dari tahun 2020 menurun sampai dengan tahun 2022, menunjukkan kurangnya pemahaman/kesadaran perangkat daerah tentang pentingnya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

21. Urusan Persandian

Penyelenggaraan Sistem Elektronik wajib menyediakan Sistem Pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian. Penerapan sistem manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi.

Kinerja pelaksanaan urusan persandian diukur dengan IKK outcome yaitu tingkat keamanan informasi pemerintah. Tingkat keamanan informasi pemerintah, dihitung dari jumlah nilai per area keamanan informasi dibandingkan dengan area penilaian. Capaian Indikator tersebut menunjukkan trend naik dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, sebagaimana tabel 2.1.3.21.

Tabel 2.1.3.21. Capaian Kinerja Urusan Persandian

Indikator Kinerja	SPM/IKK	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	IKK	-	-	40,08	40,08	48,37

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, 2023

22. Urusan Kebudayaan

Kinerja pelayanan urusan kebudayaan diukur dengan IKK outcome yaitu terlestarikannya cagar budaya. Selain itu juga diukur dengan beberapa indikator lainnya. Capaian indikator-indikator tersebut sebagaimana tabel 2.1.3.22.

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi selama tahun 2018 sampai 2021 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 indikator urusan kebudayaan dirubah menjadi Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya dan Persentase Peningkatan Pengelolaan Museum. Kemudian pada tahun 2022 diganti lagi menjadi Nilai Pembangunan Kebudayaan dengan capaian sudah melebihi target yang telah ditentukan.

Tabel 2.1.3.22
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	SPM/IKK	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Terlestarikannya Cagar Budaya (%)	IKK	100	100	100	100	100
2.	Nilai Pembangunan Kebudayaan*	-	-	-	-	-	59,19
3.	Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional (kelompok)	-	420	420	422	422	422

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2023
*Keterangan : *Indikator digunakan mulai tahun 2022*

Pada tahun 2022, cagar budaya yang sudah teregistrasi dan tercatat dan tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Pasuruan antara lain: Kecamatan Gempol sebanyak 102 buah, Kecamatan Winongan sebanyak 10 buah, Kecamatan Purwosari sebanyak 10 buah, Kecamatan Beji sebanyak 50 buah, Kecamatan Pandaan sebanyak 12 buah dan Kecamatan Prigen sebanyak 10 buah. Sedangkan cagar budaya yang sudah ditetapkan antara lain Kecamatan Grati sebanyak 2 buah, Kecamatan Beji sebanyak 1 Buah, Kecamatan Gempol sebanyak 3 buah,

Kecamatan Prigen sebanyak 1 buah, Kecamatan Kraton sebanyak 1 buah dan Kecamatan Bangil sebanyak 1 buah.

23. Urusan Perpustakaan

Kinerja pelaksanaan urusan perpustakaan diukur dengan IKK outcome yaitu: (1) Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat; dan (2) indeks pembangunan literasi masyarakat. Tingkat kegemaran membaca masyarakat dihasilkan dari survey yang menggambarkan perilaku membaca masyarakat. Kegemaran membaca merupakan outcome dari pembangunan literasi masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Nilai Pembangunan literasi masyarakat terdiri dari 7 unsur yaitu: Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi dan Anggota perpustakaan. Capaian kedua indikator tersebut disajikan pada tabel 2.1.3.23.

Tabel 2.1.3.23.
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	SPM/IKK	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat*	IKK	-	-	-	-	57,7
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)*	IKK	-	-	-	8,07	8

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, 2023
*Keterangan : *Indikator baru ditetapkan tahun 2022*

Pada tahun 2022, jumlah perpustakaan di Kabupaten Pasuruan terbagi menjadi 5 Perpustakaan yaitu:

1. Perpustakaan yang mempunyai NPP sebanyak 214 buah
2. Perpustakaan Sekolah sebanyak 821 buah
3. Perpustakaan Umum sebanyak 8 buah yang tersebar di 8 Kecamatan
4. Perpustakaan Desa sebanyak 22 buah yang tersebar di 22 Desa/Kelurahan
5. Perpustakaan Pondok Pesantren sebanyak 235 buah

24. Urusan Kearsipan

Kinerja pelayanan urusan kearsipan diukur dengan IKK outcome dangan capaian sebagaimana tabel 2.1.3.24.

Tabel 2.1.3.24
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	SPM/IKK	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan* (%)	IKK	-	-	89,56	75	75
2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa danbernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat* (%)	IKK	-	-	30,92	0	0,17

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, 2022
*Keterangan : *Indikator baru digunakan pada tahun 2020*

Penyelenggaraan kearsipan dilakukan evaluasi/audit oleh ANRI. Perkembangan hasil audit tersebut disajikan pada gambar 2.1.3.24.1. Capaian kinerja Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan mengalami fluktuasi. Capaian tertinggi di tahun 2020 dan menurun sampai dengan tahun 2022. Salah satu faktor yang mempengaruhi oleh minimnya jumlah tenaga fungsional arsiparis.

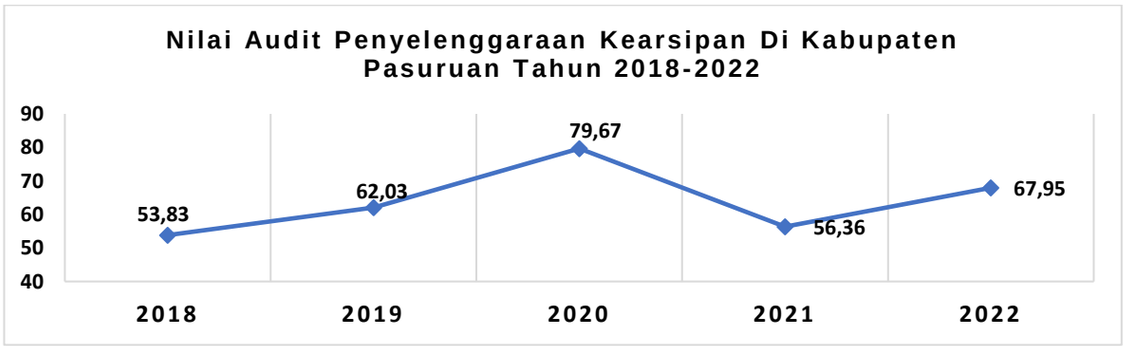

Gambar 2.1.3.24.1. Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, 2023

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sebagaimana Undang-undang 23 tahun 2014 kewenangan Kabupaten hanya untuk urusan Perikanan, sedangkan untuk urusan kelautan merupakan wewenang dari Provinsi dan Pusat. Kinerja pelayanan urusan kelautan dan perikanan diukur dengan indikator kinerja kunci (IKK) outcome yaitu: Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota. Capaian lima tahun terakhir sebagaimana tabel 2.1.3.25.

Tabel 2.1.3.25.
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	SPM/ IKK	Realisasi / Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Produksi Perikanan	IKK					
	- Tangkap (ton)		18.909,14	23.556,90	22.019,90	23.541,40	23.359
	- Budidaya (ton)		21.890,20	19.528,02	20.196,16	20.546,87	20.437,77
	Total tangkap + budidaya (ton)		40.799,34	43.084,92	42.216,06	44.088,27	43.796,77

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan, 2023

Berdasarkan tabel 2.1.3.25 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Capaian perkembangan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019-2022 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2022 produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pasuruan sedikit mengalami penurunan sebesar 0,78% dari tahun 2021. Produksi perikanan tangkap banyak dipengaruhi oleh kondisi perairan sehingga berpengaruh terhadap habitat ikan serta sarana dan keahlian yang dimiliki nelayan.
b. Capaian perkembangan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021 mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2022 produksi perikanan di Kabupaten Pasuruan sedikit mengalami penurunan sebesar 0,53% dari tahun 2021. Penurunan ini diakibatkan dari tingginya harga pakan, kurangnya ketrampilan pelaku usaha perikanan, dan lemahnya akses permodalan.
c. Capaian produksi secara keseluruhan (tangkap dan budidaya) menunjukkan angka yang berfluktuasi, secara bergantian setiap tahun naik dan turun. Nama secara umum dalam periode 2018-2022 menunjukkan tren positif (peningkatan). Kontribusi produksi perikanan tangkap terhadap total produksi dalam periode tersebut

rata-rata sebesar 52%, sedangkan kontribusi produksi perikanan budidaya rata-rata sebesar 48%.

26. Urusan Pariwisata

Kinerja pelayanan urusan pariwisata diukur dengan IKK outcome dengan capaian sebagaiman tabel 2.1.3.26. Secara umum capaian indikator kinerja menunjukkan tren peningkatan atau kondisi yang lebih baik. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya daya tarik destinasi wisata, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, yang pada akhirnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Indikator baru yang dihitung tahun 2022 adalah *Spending of Money in Tourism.* Indikator tersebut menggambarkan besaran perputaran uang yang dibelanjakan oleh Wisatawan yang mengunjungi Destinasi Wisata di kabupaten Pasuruan dengan diukur dari berbagai variable yaitu Penginapan, Objek Wisata, Makan Minum, Oleh-Oleh dan Transportasi yang digunakan oleh Wisatawan selama berwisata di Kabupaten Pasuruan.

Capaian kinerja urusan pariwisata tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.1.3.26.1
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja	SPM/ IKK	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	-	2.533.447	2.687.987	1.246.376	1.358.385	2.600.643
2.	*Spending of Money in Tourism* (Rp)*	-	-	-	-	-	758.385.137.911
3.	Jumlah ODTW yang terstandarisasi** (unit)	-	-	7	4	8	8
4.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan*** (%)	IKK	-	-	-65,93	25,62	17
5.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang dating ke kabupaten/kota*** (%)	IKK	-	-	-53,61	8,98	17
6.	Tingkat hunian akomodasi** (unit)	IKK	-	1.004	1.004	1.230	1.227
7.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (RP)	IKK	5.306.580	5.836.229	5.057.261	5.392.079	6.185.835
8.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD*** (RP)	IKK	-	-	271.053.500	64.646.559	466.741.000

Sumber: Dinas Pariwisata, 2022
*Keterangan: * Indikator baru digunakan tahun 2022 karena ada perubahan cascading di tahun 2022*
*** Indikator baru digunakan tahun 2019 karena ada perubahan indikator*
****Indikator baru digunakan tahun 2020*

Potensi wisata di Kabupaten Pasuruan meliputi obyek Wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata Agro dan Wisata Minat Khusus.

1) Wisata Alam antara lain : Gunung Bromo, Taman Candra Wilwatikta di Pandaan, Air Terjun Kakek Bodho dan Air Terjun Putuk Truno di Prigen, Pemandian Alam Banyubiru di Winongan, Danau Ranu di Grati, Sumber Air Umbulan di Winongan, dan Air Terjun Coban Baung di Purwodadi.
2) Wisata Budaya dan Religi antara lain : Candi Gununggangsir, Candi Belahan, Candi Jawi, Goa Jepang/Inna Tretes, Makam Ki Ageng Penanggungan, Makam Mbah Ratu Ayu di Bangil, Makam Mbah Semendhi di Winongan, Makam Mbah Segoropuro di Rejoso, Pertapaan Abiyoso, dan Pertapaan Indrokilo, serta kawasan Masjid Cheng Ho.
3) Wisata Agro antara lain : Kecamatan Tutur yaitu wisata apel/Agro Krisna, Bunga Krisan dan Paprika, Peternakan Sapi Perah, Jamur, Durian, Wisata Bhakti Alam. Kemudian PG Kedawung di Kecamatan Grati, Mangga klon 21 dan bunga sedap malam di Kecamatan Rembang, serta Kebun Raya LIPI di Kecamatan Purwodadi.
4) Wisata Minat Khusus antara lain : Kecamatan Prigen yaitu Taman Safari Indonesia II, Taman Dayu, Kaliandra, dan Finna Golf & Country Club. Kemudian Bukit Flora di Kecamatan Tutur, Baung Camp di Kecamatan Purwodadi, dan sentra bordir di Kecamatan Bangil.

Tabel 2.1.3.26.2
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018-2022

No.	Sektor Ekonomi Kreatif	Kecamatan	Jumlah
1	Periklanan	Beji, Pandaan, Purwosari, Rembang, Sukorejo	5
2	Arsitektur	Beji, Pandaan Winongan, Bangil	7
3	Pasar Barang Seni	-	0
4	Kriya (kerajinan logam, gerabah, kerajinan kipas, boneka, kaligrafi, kerajinan kayu, batik, tenun, rajut, ukir, anyaman bambu, kulit)	Bangil, Beji, Pohjentrek, Kraton, Gempol, Tutur Gondang Wetan, Grati, Kejayan, Lekok, Lumbang, Nguling, Pandaan, Pasrepan, Prigen, Purwodadi, Purwosari, Puspo,Rembang, Winongan, Wonorejo	463
5	Desain (desain web)	Bangil, Pandaan Prigen, Purwosari	5
6	Fashion (bordir kopyah, mukenah, busana muslim, Bruci, konveksi, tas, dompet, sepatu)	Bangil, Beji, Gempol,Gondang Wetan, Pandaan, Prigen, Rembang	183

No.	Sektor Ekonomi Kreatif	Kecamatan	Jumlah
7	Video, Film dan Fotografi	Bangil, Pohjentrek	4
8	Permainan Interaktif (Interactive Games)	-	0
9	Musik (Orkes Melayu, Rock Dangdut, Band, Electone, Orkes Keroncongan, Oldies, Albanjari, Samroh, Qosidah, Gambus, Karawitan, Campursari)	Bangil, Beji, Gempol, Gondang Wetan, Grati, Kejayan, Kraton, Lumbang, Pandaan, Pasrepan, Pohjentrek, Prigen, Purwodadi, Purwosari, Puspo, Rejoso, Rembang, Tutur, Winongan, Wonorejo, Sukorejo, Tosari	290
10	Seni Pertunjukan (Macapat, Seni Musik Teater, Seni Tradisional, Musik Kontemporer, Tosan Aji (Pusaka), Seni Lukis & Seni Rupa, Drum Band, Sulap Dan Akrobatik)	Beji, Prigen, Purwosari, Sukorejo	299
11	Penerbitan dan Percetakan	Bangil, Beji, Purwosari, Gempol, Gondang Wetan, Grati, Pandaan, Pohjentrek, Purwodadi, Rembang, Tutur, Wonorejo, Sukorejo	21
12	Layanan Komputer dan Piranti Lunak	Bangil, Beji, Pandaan, Purwodadi, Purwosari, Rejoso, Rembang	17
13	Televisi dan Radio	Prigen, Pandaan	3
14	Riset dan Pengembangan	Purwodadi, Tutur	2
15	Kuliner (krupuk, kripik, minuman, pokak, kue, ikan asin, ikan asap, tape, gethuk)	Bangil, Beji, Gempol Gondang wetan, Grati, Kejayan, Lekok Nguling, Pandaan Prigen, Purwodadi, Purwosari, Rejoso, Tutur, Winongan, Wonorejo, Tosari	144
	Total		**1443**

27. Urusan Pertanian

Capaian kinerja urusan pertanian tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.1.3.27
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	SPM/IKK	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	IKK					
	Tanaman Pangan :						
	Padi (Ton/Ha)		6,33	5,94	5,5	5,5	6,03
	Jagung (Ton/Ha)		6,43	6,39	6,39	6,47	6,41
	Kedelai (Ton/Ha)		1,18	1,76	1,85	1,89	1,91
	Tanaman Buah Tahunan Kg/Pohon		278,74	280,11	281,24	282,50	90,17
	Tanaman Sayur (Ton/Ha)		69,99	67,32	67,25	67,50	35,67
	Tanaman Hias Tangkai/m2)		72,44	72,57	72,71	72,73	19,9
2.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular* (%)	IKK	-	-	-	-	49

No	Indikator Kinerja	SPM/IKK	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
3.	Persentase angka kematian (ternak besar)* (%)	-	-	-	-	-	2,5
4.	Persentase angka kematian (ternak kecil)* (%)	-	-	-	-	-	0,21
5.	Persentase angka kematian (ternak unggas)* (%)	-	-	-	-	-	2,25
6	Persentase Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	%	5	0,82	0,99	0,54	1,60

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2022
*Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2022*

Berdasarkan tabel tersbut dapat dijelaskan beberapa catatan sebagai berikut:

a. Produktivitas padi selama kurun waktu 2018-2022 cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan setiap tahun sebesar -1,0%. Produktivitas menurun karena kandungan bahan organik tanah semakin menurun. Penggunaan bahan-bahan kimia yang berlebihan pada tanah justru merusak struktur tanah. Sedangkan Produksi meningkat karena luas panen meningkat dengan adanya IP 400, pembangunan sumur bor dan pembangunan jaringan irigasi tersier.
b. Produktivitas jagung selama kurun waktu 2018-2022 cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan setiap tahun sebesar -0,07%. Dalam rangka meningkatkan produktivitas jagung, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan berbagai upaya diantaranya mendukung program pengembangan jagung hibrida kepada para petani berupa bantuan benih dan pupuk urea bersubsidi melalui anggaran APBN serta kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman sejak dini melalui SL PHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tanaman) yang didukung oleh anggaran APBD Kabupaten. Selain itu bantuan obat-obatan untuk hama penyakit tanaman juga diberikan melalui anggaran APBD Provinsi. Peningkatan produksi jagung juga dilakukan dengan merubah pola tanam di beberapa sentra kedelai beralih ke komoditas jagung seperti Kecamatan Kraton, Pohjentrek, Sukorejo, Wonorejo, Purwosari dan Gempol.

c. Selama tahun 2018-2022, produktivitas kedelai cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan setiap tahun sebesar 14,25%.
d. Produktivitas kentang selama kurun waktu tahun 2018-2022 cenderung mengalami tren penurunan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatan produksi kentang, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan berbagai upaya diantaranya penggunaan benih unggul dan bermutu yang diperoleh dari Pusat Perbenihan Kentang di Kawasan Sentra Kecamatan Tosari serta pemupukan yang berimbang. Selain itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga mendukung harga komoditas kentang dipasaran yang sangat menjajikan atau menguntungkan bagi petani supaya petani lebih antusias berbudidaya kentang dalam skala luasan yang cukup besar.
e. Produktivitas paprika mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* sehingga permintaan pasar berkurang. Akan tetapi pada tahun 2021 dan 2022, produktivitas kentang mengalami peningkatan kembali. Produktivitas komoditas paprika di kawasan sentra pengembangan cukup melimpah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah penggunaan benih varietas unggul, penggunaan pupuk yang disalurkan melalui sistem irigasi tetes dan pengendalian OPT sejak dini.
f. Produktivitas buah durian selama kurun waktu tahun 2018-2022 cenderung mengalami tren peningkatan. Beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya produktivitas buah durian antara lain iklim yang mendukung serta pemeliharaan tanaman secara intensif berupa pemangkasan tunas-tunas lateral sehingga memicu tahap pembungaan dan pembuahan. Disamping itu harga komoditas buah durian mempuyai nilai ekonomis yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan komoditas lainnya.
g. Selama kurun waktu tahun 2018-2022, produktivitas komoditas buah mangga juga mengalami tren peningkatan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu penerapan teknologi pembuahan komoditas mangga diluar musim (*offseason*) menggunakan paklobutrazol, penggunaan pupuk organik, pemangkasan bentuk dan pemangkasan produksi serta pengembangan sentra kawasan mangga gadung klon 21 atau mangga alpukat yang dikembangkan

secara kontinyu dan berkelanjutan antara lain berupa bantuan bibit mangga melalui anggaran APBD Kabupaten Pasuruan.

h. Produktivitas buah apel juga mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2018-2022. Peningkatan produksi buah apel disebabkan adanya penerapan teknologi budidaya yang baik dan benar, penggunaan pupuk organik, pengendalian OPT melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) dan Sekolah Lapang Agens Hayati (SL-AH), pemeliharaan tanaman berupa pemangkasan serta pengembangan kawasan sentra Buah Apel. Selanjutnya jugs akan dilakukan upaya *branding* Apel Nongkojajar.

i. Produktivitas bunga sedap malam selama periode tahun 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan. Begitu pula dengan produktivitas bunga krisan juga mengalami peningkatan setiap tahun dikarenakan pengembangan sentra budidaya krisan yang cukup luas dan sangat diminati oleh petani dan prospek pasar yang cukup menjanjikan.

j. Produktivitas tanaman perkebunan secara rinci sebagai berikut:

No	Tanaman Perkebunan	Produktivitas (Kg/Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kopi	713,75	708,98	711,63	713,22	885
2	Kelapa	1.765,37	1.943,92	2.098,21	2.094,93	1.762,83
3	Cengkeh	432,66	436,48	438,73	447,03	402,47
4	Kapuk Randu	262,37	271,73	272,44	282,30	341,01
5	Jambu Mete	726,41	65,82	108,70	113,03	256,11
6	Kenanga	3.438,54	3.328,21	3.275,38	3.224,92	3.090,01
7	Tebu	5.970,87	7.477,03	7.911,54	8.436,12	44.393,48

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, 2022

j. Selama kurun waktu 2018-2022, tebu menjadi tanaman perkebunan dengan rata-rata pertumbuhan produktivitas tertinggi sebesar 115,97 setiap tahunnya. Selanjutnya tanaman perkebunan yang memiliki rata-rata pertumbuhan produktivitas tertinggi setiap tahun secara berturut-turut adalah Jambu Mete sebesar 26,19%, kapuk randu sebesar 7,06%, kopi sebesar 6% dan kelapa sebesar 0,57%. Sedangkan tanaman perkebunan yang mengalami penurunan adalah cengkeh dengan rata-rata pertumbuhan produktivitas setiap tahun sebesar -1,67%, selanjutnya kenanga sebesar -2,71%.

k. Produksi daging selama kurun waktu 2018-2022 cenderung mengalami tren penurunan. Penurunan produksi daging disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat yang berpengaruh pada

permintaan konsumen Hotel dan Restoran. Dampak pandemi *covid-19* memukul segala sektor khususnya ekonomi masyarakat, berpengaruh pada pola konsumsi masyarakat yang pada akhirnya mengurangi konsumsi terhadap produk olahan daging.

l. Selama kurun waktu 2018-2022, produksi telur di Kabupaten Pasuruan cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan produksi telur yang belum optimal dengan adanya peremajaan induk petelur. Namun di tengah pandemi *covid-19* yang melanda, konsumsi telur menjadi andalan masyrakat dalam mencukupi protein hewani.

m. Produksi susu selama kurun waktu 2018-2021 mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya hasil produksi sapi karena pertambahan kelahiran alami dan juga dari program inseminasi buatan yang membuat populasi meningkat. Selain itu juga disebabkan oleh pemberian pakan yang baik seperti konsentrat dan kesadaran peternak untuk membuat kandang yang lebih higienis. Akan tetapi pada tahun 2022, produksi susu mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Penanganan hasil produksi pertanian pasca panen dalam rangka menambah nilai produksi pertanian adalah dengan melalui pelatihan Olahan Pangan tanaman pangan dan hortikultura.

Upaya pemerintah untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan menjaga kesedian pangan salah satunya yaitu dengan dikeluarkannya program perlindungan lahan pertanian pangan berkelajutan (PLP2B). Program tersebut berdasarkan amanat dari UU No 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bahwa LP2B ditetapkan dan diintegrasikan kedalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Penetapan LP2B akan dapat diimplementasikan di tingkat

lapangan apabila kebijakan perlindungan lahan dilengkapi dengan peta spasial LP2B dengan dukungan kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Pasuruan dengan pendampingan dari konsultan Perorangan sebagai pendamping yang sudah menguasai ilmu pemetaan.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga telah menetapkan SK Nomor 521.4/1149/HK/424.013/2022 tentang Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pada SK tersebut ditetapkan total LP2B seluas 34.117,71 Ha. Pada tahun 2022, penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Pasuruan terdapat alih fungsi lahan dan alih fungsi komoditas yaitu alih fungsi komoditas dari apel ke jeruk.

28. Urusan Perdagangan

Kinerja pelayanan urusan perdagangan diukur dengan indikator kinerja kunci (IKK) outcome, yaitu: Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku. Capaian indikator tersebut disajikan pada tabel 2.1.3.30. Berdasarkan tabel tersebut capaian setiap tahun berfluktuasi, hal ini bergantung pada seberapa banyak UUTP yang dilakukan tera setiap tahunnya dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan di awal tahun berkenaan. Berdasarkan perhitungan tersebut maka capaian/realisasi dimungkinkan diperoleh angka lebih dari 100%.

Metode perhitungan tersebut berbeda dengan formulasi yang ditetapkan oleh regulasi, yaitu perbandingan UTTP bertanda tera sah yang berlaku di tahun berkenaan dengan jumlah potensi UTTP yang wajib tera dan tera ulang. Perbedaan tersebut antara lain karena belum dapat diketahui metode/pendekatan untuk mengetahui seberapa besar potensi jumlah UTTP yang wajib tera dan tera ulang.

Tabel 2.1.3.28.
Capaian Kinerja (IKK outcome) Urusan Perdagangan
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	SPM /IKK	Realisasi / Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	IKK	334,86	94,52	75,31	101,01	128,14

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, 2023

Capaian kinerja pelayanan urusan perdagangan dapat diberikan tambahan ilustrasi tentang besaran nilai transaksi perdagangan. Nilai transaksi perdagangan diperoleh dari jumlah uang yang dihasilkan dari seluruh kegiatan transaksi perdagangan selama satu tahun. Perkembangan nilai transaksi perdagangan disajikan dengan gambar 2.1.3.30.1. Nilai transaksi secara umum menunjukkan tren peningkatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain daya beli masyarakat dan intensitas/efektifitas kegiatan promosi produk (barang/jasa) perdagangan khususnya yang dihasilkan usaha/industri kecil.

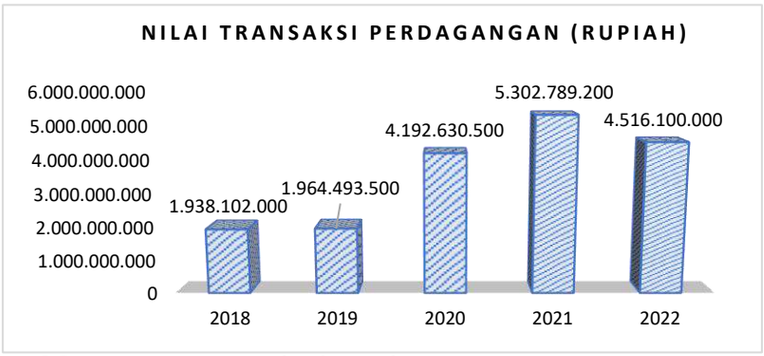

Gambar 2.1.3.28.1
Nilai Transaksi Perdagangan
Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, 2023

29. Urusan Perindustrian

Kinerja pelayanan urusan perindustrian diukur dengan indikator kinerja kunci (IKK) outcome, yaitu: (1) pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota; (2) Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota); dan (3) Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini. Capaian kedua indikator tersebut disajikan pada tabel 2.1.3.29.

Tabel 2.1.3.29.
Capaian Kinerja (IKK outcome) Urusan Perindustrian
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	SPM/IKK	Realisasi / Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kab/Kota (%)	IKK	-	6,64	10,74	2,06	9,88
2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota) (%)	IKK	-	-	-	30	30
3.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	IKK	-	-	100	100	100

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota menunjukan penambahan setiap dengan besaran yang berfluktuasi, namun demikain dalam periode 2018-2022 menunjukkan percepatan.
b. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota) masih sangat rendah dan stagnan yaitu mencapai 30% atau masih berupa naskah akademis.
c. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini menunjukkan capaian maksimal yaitu 100%. Kondisi tersebut menunjukkan telah memenuhi semua kriteria yaitu tersedia informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan 7-12 bulan, informasi produksi dan kapasitas produksi, informasi bahan baku dan bahan penolong, informasi bahan bakar/energi, dan informasi tenaga kerja, serta informasi investasi.

30. Urusan Transmigrasi

Capaian kinerja urusan transmigrasi tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.1.3.30.
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	SPM/IKK	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Termonitor* (%)	-	-	-	-	-	100
2	Jumlah Calon transmigran yang diberangkatkan (orang)	-	4	4	0	0	-
3	Jumlah Calon transmigran yang di berikan penyuluhan (orang)	-	480	480	255	0	-

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2023
*Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2022*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama tahun 2018 sampai 2020 terjadi penurunan jumlah calon transmigran yang diberikan penyuluhan. Sedangkan pada tahun 2021, tidak ada calon transmigran yang diberikan penyuluhan dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. Mulai tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah tidak melaksanakan pemberangkatan transmigrasi sehingga tidak ada capaian calon transmigran yang diberangkatkan. Pada tahun 2022, Pemerintah

Kabupaten Pasuruan menggunakan inndikator baru yaitu Persentase Kawasan Transmigrasi yang Termonitor yang telah mencapai 100%.

2.1.3.4. Fokus Layanan Unsur Pendukung

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan diukur berdasarkan indikator kinerja.

Tabel 2.1.3.31
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat Daerah
Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja	SPM/IKK	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif* (%)	IKK	-	7,65	7,65	6,01	13,44
2.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan* (%)	IKK	-	72,03	83,72	11,50	43,18
3.	Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa* (%)	IKK	-	0	0	12,63	567,38
4	Nilai SAKIP Pemda	-	72,7	75,02	76,3	77,07	77,29
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemda	-	83,83	84,75	83,97	85,77	90,29

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, 2023
*Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2019*

Berdasarkan tabel 2.1.3.31 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif, mengalami peningkatan yang cukup signifikan tetapi capaian masih rendah (13%). Hal ini mengindikasikan proses pengadaan semakin terbuka dan memberi peluang yang cukup besar bagi penyedia jasa untuk ikut berpartisipasi.

b. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan, menunjukkan ada penurunan.
c. Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa menunjukkan peningkatan sangat signifikan karena dibarengi dengan monitoring oleh Pemerintah Pusat
d. Capaian Nilai SAKIP mengalami kenaikan relatif lambat. Oleh karena itu perlu dilakukan inovasi dengan implementasi lebih nyata yang membangun iklim kinerja bagi ASN.
e. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik. IKM cenderung mengalami peningkatan meskipun hanya pada tahun 2020 yang mengalami penurunan. Namun demikian masih tergolong dalam kategori ‘sangat baik’.

Sebagai unsur pendukung pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah pada Bagian Hukum juga mempunyai tugas dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025. Pada tahun 2021 dan 2020, hasil penilaian Ranham di Kabupaten Pasuruan berhasil mendapatkan nilai baik. Akan tetapi pada tahun 2023 periode B04 pada Aksi 2 dan Aksi 7 masih kuning dikarenakan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tidak menyebut spesifik sasaran penerima bantuan hukum. Selain itu juga dikarenakan adanya form yang tidak diberikan kepada Perusahaan.

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam menunjang dan memfasilitasi kinerja wakil rakyat, mulai dari perencanaan, proses administrasi pengaturan persiapan, sampai pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah daerah (eksekutif). Sekretariat DPRD menjadi bagian dari sistem pendukung atau subsistem dalam menentukan sistem kinerja Sekretariat Dewan terintegrasi dengan wakil rakyat.

Tabel 2.1.3.32
Capaian Kinerja Unsur Sekretariat DPRD
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	IKM/SKM Layanan Sekretariat DPRD	Nilai	88,51	72	73	86	87
2.	Persentase Aspirasi Masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi	%	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa IKM/SKM Layanan Sekretariat DPRD cenderung mengalami penurunan dalam tahun 2018-2021 dan kembali meningkat di tahun 2022. Sedangkan Persentase Keluhan Masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi telah mencapai hasil yang diharapkan yaitu mencapai 100%.

2.1.3.5. Fokus Layanan Unsur Penunjang

1. Perencanaan

Capaian kinerja unsur penunjang perencanaan tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagaimana tabel 2.1.3.33. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa selama tahun 2018 sampai 2022 semua capaian indikator kinerja menunjukkan progres peningkatan menuju kondisi ideal yang diharapkan. Namun demikian hal yang perlu menjadi perhatian utama yaitu:

a. Nilai SAKIP perencanaan berdasarkan hasil evaluasi KemenPAN-RB masih ditingkatkan khususnya dalam aspek kualitas dan implementasi. Secara lebih konkrit adalah penyediaan data kinerja yang belum dikelola dengan baik sehingga data kinerja masih belum secara meyakinkan dapat dipertanggungjawabkan.
b. Kualitas perencanaan perangkat daerah masih seluruhnya baik, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain: tenaga fungsional perencana yang ada belum semuanya memiliki sertifikat kompetensi ; sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) yang digunakan secara nasional dalam proses penyusunan perencanaan masih belum sempurna dan belum memenuhi norma-norma umum perencanaan sesuai dengan Permendagri 86/2017.

Tabel 2.1.3.33
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	SPM/IKK	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai SAKIP Perencanaan	-	22,75	23,62	24,02	24,14	24,17
2	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan (%)	-	-	100	100	100	100
3	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang baik (%)	-	-	84	88	94,64	94,54

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2022
*Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2019*

2. Keuangan

Capaian kinerja unsur penunjang keuangan diukur dengan indikator kinerja kunci (IKK) outcome sebagaimana tabel 2.1.3.34 dengan data mulai tahun 2018 sampai dengan 2022.

Tabel 2.1.3.34
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Jumlah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Juta Rupiah	614.302,52	650.889,11	700.151,91	701.197,69	736.238,74
3.	Persentase laporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah	%	100	100	100	100	n/a
4.	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan*	%	-	-	7,02	36,94	8,36
5.	Rasio PAD* (terhadap jumlah APBD nonmigas)	%	-	-	0,48	0,48	22,41
6.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)*	%	-	-	58,68	81,51	86,82
7.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja	%	-	-	84,32	6,26	-5,35

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
	total dalam APBD*						
8.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD*	%	-	-	95,75	5,43	9,75
9.	Manajemen Aset*						
a	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)*	Ya/Tidak	-	-	Ya	Ya	Ya
b	Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)*	Ya/Tidak	-	-	Ya	Ya	Ya
c	Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)*	Ya/Tidak	-	-	Ya	Ya	Ya
d	Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)*	Ya/Tidak	-	-	Ya	Ya	Tidak
10.	Rasio angaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya*	%	-	-	8,18	8,18	9,87

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2022
*Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2020*
n/a = Data belum keluar

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan beberapa catatan khusus sebagai berikut:

a. Opini BPK atas LKPD sampai dengan tahun 2022 mencapai penilaian yang maksimal yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini berarti LKPD yang telah disusun memenuhi kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

b. Jumlah PAD dan rasio PAD terhadap belanja setiap tahun mengalami peningkatan, yang menunjukkan meningkatnya kemandirian daerah.

c. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD selalu menunjukkan angka positif yang berarti realisasi PAD dapat melebihi target yang ditetapkan.

d. Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan tahun 2022 dapat diturunkan cukup besar, sementara Deviasi realisasi

belanja terhadap belanja total dalam APBD tahun 2022 menunjukkan angka negative yang berarti realisasi belanja lebih kecil daripada anggaran belanja. Hal ini mengakibatkan rasio angaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya di tahun 2022 atau sedikit meningkat atau menghasilkan SiLPA lebih besar daripada tahun 2021.

e. Manajemen asset telah dilaksanakan dengan cukup baik dengan memenuhi hampir semua kriteria, kecuali pencantuman nilai asset dalam laporan anggaran.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja pelayanan unsur penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan diukur dengan indikator beserta capaian tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagaimana tabel 2.1.3.35. Berdasarkan tabel tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Proporsi pegawai yang berpendidikan tinggi dan menengah mencapai 96% dan sisanya 4% berpendidikan dasar.
b. Tenaga fungsional mengalami peningkatan, seiring dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat penyederhanaan birokrasi.
c. Tenaga fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi masih sangat rendah, karena adanya proses penyetaraan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional yang tidak mensyaratkan uji/sertifikat kompetensi.

Tabel 2.1.3.35
Capaian Kinerja Unsur Penunjang
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja	SPM/IKK	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)*	IKK					
	a. Pendidikan Tinggi* (%)		-	-	98,46	182,27	66,35
	b. Menengah*(%)		-	-			29,37
	c. Dasar*(%)		-	-			4,28
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)* (%)	IKK	-	-	6,69	6,35	13,11

No.	Indikator Kinerja	SPM/IKK	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)*	IKK	-	-	100	100	43,69
4	Persentase ASN yang lulus ujian tingkat 1, 2 dan penyesuaian ijazah (%)	-	72	72,86	77,08	77,40	77,54
5.	Persentase pelanggaran disiplin (%)	-	0,19	0,18	0,16	0,13	0,13

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan, 2022
*Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2020*

Adapun ultimate outcome yang akan dicapai dalam penyelenggaraan unsur penunjang kepegawaian dan diklat adalah meningkatnya profesionalitas ASN. Indikator yang digunakan adalah Indeks Profesionalitas ASN dengan capaian sebagaimana gambar 2.1.3.35.1. Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara untuk mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator *output* yang bersifat independen. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Pasuruan selama tahun 2020-2022 masih berada pada kategori "Sangat Rendah" dikarenakan masih sedikitnya kompetensi melalui diklat, bimtek dan lain-lain yang merupakan poin pendongkrak Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

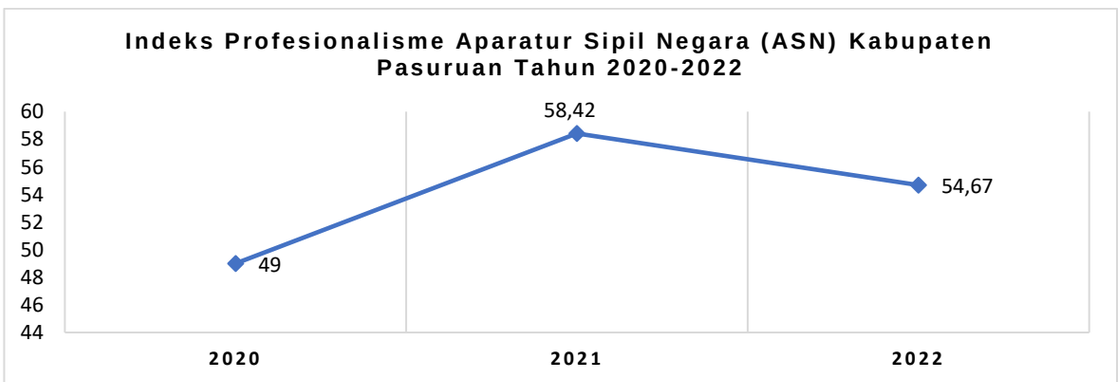

Gambar 2.1.3.35.1 Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2020-2022
Sumber: Badan Kepegawaian Negara, 2022

4. Penelitian dan Pengembangan

Capaian kinerja unsur penunjang penelitian dan pengembangan tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagaimana tabel 2.1.3.36.

Tabel 2.1.3.36
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja	SPM/IKK	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti (%)	-	80	85	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2023

Tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan fungsi penunjang Litbang dinilai dengan indikator kinerja "Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti." Indikator kinerja tersebut menjadi pertimbangan berupa selektivitas dalam penyusunan rencana kegiatan Litbang yang dibutuhkan oleh Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan. Dalam periode tahun 2018-2022, Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan, bahkan selama tiga tahun berturut-turut (2020-2022) telah mencapai 100%.

Selain itu keberhasilan urusan penelitian dan pengembangan dalam menyusun dokumen penelitian juga dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas jumlah Sumber Daya Manusia Peneliti. Jumlah Sumber Daya Manusia Peneliti di Kabupaten Pasuruan sebanyak 2 Orang yang merupakan hasil penyetaraan.

2.1.3.6. Fokus Layanan Unsur Pengawasan

1. Inspektorat

Capaian kinerja layanan unsur pengawasan diukur dengan indikator: (1) Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; (2) Nilai Maturitas SPIP; dan (3) Nilai Kapabilitas APIP. Capaian indikator tersbut dalam periode 2018-2022 disajikan pada tabel 2.1.3.37.

Tabel 2.1.3.37
Capaian Kinerja Layanan Unsur Pengawasan
Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	6,37	7,15	7,39	7,54	16,59
2.	Nilai Maturitas SPIP	n/a	n/a	Level 3	Level 3	Level 3
3.	Nilai Kapabilitas APIP	n/a	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2

*Sumber: * LHE AKIP/ RB KemenPAN-RB*
Ket : Evaluasi AKIP tahun 2022 menggunakan metode baru.
n/a : informasi tdk tersedia dalam LHE KemenPAN-RB

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, menunjukkan progres peningkatan namun secara perlahan, tahun 2022 mengalami peningkatan cukup besar karena terdapat perubahan komponen penilaian evaluasi AKIP dari KemenPAN-RB, yaitu sesuai PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
b. Nilai Maturitas SPIP, menunjukkan kondisi yang stagnan, hal ini menunjukkan bahwa penerapan SPIP level PD belum dilakukan secara luas dan penguatan kebijakan pengawasan internal belum berkembang antara lain terkait dengan penanganan gratifikasi, *whistle blowing system*, dan pembangunan zona integritas.
c. Nilai Kapabilitas APIP, menunjukkan kondisi yang stagnan, hal ini menunjukkan kapabilitas APIP sebagai *quality assurance and consulting* diperlukan peningkatan, namun demikian secara kuantitas juga perlu ditingkatkan karena belum cukup memadai jika dibandingkan volume tugas pengawasan yang harus dilakukan.

2.1.3.7. Fokus Layanan Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Kinerja pelayanan unsur kewilayahan, dalam hal ini Kecamatan, diukur dengan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan persentase hasil penyelanggaraan kecamatan. IKM diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat berdasarkan ketentuan Kementerian PAN-RB, PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Sedangkan indikator persentase hasil penyelanggaraan kecamatan diukur berdasarkan rata-rata capaian indikator program kewilayahan.

Kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan publik menjadi sangat strategis untuk meningkatkan pelayanannya, antara lain melalui penyelenggaraan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). Capaian IKM Kecamatan tahun 20018-2022 disajikan pada tabel 2.1.3.38 (a dan b). Berdasarkan tabel tersebut capaian IKM secara umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Capaian tahun 2022 berada pada interval 85 – 97 masuk dalam kategori sangat baik (berada di interval 81,26 - 100). IKM tertinggi kecamatan Pandaan dan terendah kecamatan Beji. Sedangkan capaian IKM di bawah rata-rata 24 kecamatan (kab) sebanyak 11 kecamatan, yaitu Tutur, Pasrepan, Grati, Nguling, Rejoso, Purwodadi, Purwosari, Wonorejo, Lekok, Gempol, dan Rembang.

Kinerja pelayanan kecamatan dengan indikator persentase hasil penyelenggaraan kecamatan selama periode 2018-2022 dengan rata-rata tertinggi yaitu kecamatan Lumbang dan terendah kecamatan Beji. Sedangkan kinerja kecamatan yang berada di bawah rata-rata 24 kecamatan (kabupaten) sebanyak 6 kecamatan, yaitu Pasrepan, Gondangwetan, Grati, Kejayan, Prigen, dan Beji.

Tabel 2.1.3.38 (a)
Capaian IKM Kecamatan Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	IKM					Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Tosari	-	87,36	88,95	88	89,99	88,58
2	Tutur	-	80,60	81,22	-	-	80,91
3	Puspo	86,93	88,03	84,14	85	87,49	86,32
4	Pasrepan	86,12	85,03	84,14	85	85,96	85,25
5	Lumbang	83	86,80	86,89	91,71	94,84	88,65
6	Winongan	-	86,57	86,91	87	89,43	87,48
7	Gondangwetan	-	85	88,55	89,05	89,89	88,12
8	Grati	80,45	81,58	83,31	88,74	88,35	84,49
9	Nguling	-	80	80	84,97	85.97	81,66
10	Rejoso	-	81,58	83,31	85	91,15	85,26
11	Purwodadi	80,00	83,00	87,03	87	87,50	84,91
12	Purwosari	-	79,03	81,42	85,11	92,91	84,62
13	Sukorejo	86,93	88,03	89,34	89,77	88,62	88,54
14	Wonorejo	-	75	77	89	90,91	82,98

No	Kecamatan	IKM					Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
15	Kejayan	83,33	85	87,28	87,18	89,18	86,39
16	Pohjentrek	-	86,80	86,94	88,33	89,09	87,79
17	Prigen	84,16	87,39	87,28	87,50	91,52	87,57
18	Pandaan	-	86,54	86,76	87,13	97,25	89,42
19	Lekok	-	82,71	81,67	86,68	93,8	86,22
20	Gempol	84,16	85,09	84,25	86,09	88,19	85,56
21	Bangil	83,33	85	87,28	88,02	94,79	87,68
22	Beji	-	87,14	87,25	91,94	85,79	88,03
23	Rembang	baik	baik	baik	85,00	86,53	85,77
24	Kraton		91.5	91.25	82.75	89.43	88,73
	RATA-RATA KABUPATEN PASURUAN						86,29

Sumber : 24 Kecamatan, 2023

Tabel 2.1.3.38 (b)
Capaian Indikator Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan
Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan (%)					Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Tosari	-	98,24	100	100	100	99,56
2	Tutur	-	100	100	96,67	100	99,17
3	Puspo	-	100	100	100	100	100
4	Pasrepan	-	72	100	47,49	100	79,87
5	Lumbang	-	109,72	100	98,32	100	102,01
6	Winongan	-	100	100	98	100	99,50
7	Gondangwetan	-	100	96,67	84,33	98	94,75
8	Grati	-	100	75	102,75	100	94,44
9	Nguling	-	100	100	100	97,5	99,38
10	Rejoso	-	100	100	100	91,25	97,81
11	Purwodadi	-	103,5	100	87,5	100	97,75
12	Purwosari	-	100	100	100	100	100
13	Sukorejo	-	100	100	100	87,33	96,83
14	Wonorejo	-	100	98,04	103,8	100	100,46
15	Kejayan	-	100,46	72,03	100	90,63	90,78
16	Pohjentrek	-	100	100	100	100	100
17	Prigen	-	100	100	83,33	100	95,83
18	Pandaan	-	113,8	100	80,66	100	98,62
19	Lekok	-	100	100	100	97,5	99,38
20	Gempol	-	100	100	100	88,89	97,22
21	Bangil	-	100	100	109,31	91,88	100,30
22	Beji	-	96,33	57,78	58,67	80,33	73,28
23	Rembang	-	100	100	100	100	100

No	Kecamatan	Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan (%)					Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
24	Kraton	-	100	100	95	100	98,75
	RATA-RATA KABUPATEN PASURUAN						96,49

Sumber : 24 Kecamatan, 2023

2.1.3.8. Fokus Layanan Unsur Pemerintahan Umum

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja pelayanan unsur pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel 2.1.3.8 yang menggambarkan realisasi kinerja tahun 2018 s/d tahun 2022.

Tabel 2.1.3.8.1
Realisasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Penurunan Kejadian Ipoleksosbud	%	-	0	∞	350	144
	Jumlah kejadian (kasus) Ipoleksosbud	kasus	0	0	2	9	22
2.	Persentase Kejadian konflik Ipoleksusbud yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	90,91

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, 2022

Pada periode tahun 2018-2022, jumlah kejadian (kasus) yang berkaitan dengan ipoleksosbud menunjukkan peningkatan, kebalikan dari kondisi yang diharapkan yaitu adanya penurunan. Antisipasi pencegahan terjadinya kasus dilakukan melalui forum koordinasi dengan instansi terkait, namun terdapat faktor/kendala yang tidak dapat dikendalikan dan adanya potensi terjadinya kasus. Namun demikian dari sejumlah kasus yang terjadi dapat ditangani dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan/regulasi yang ada. Khusus tahun 2022, kasus yang ditindaklanjuti sebesar 90,91% atau terdapat 2 kasus yang belum dapat diselesaikan: (1) permasalahan pemanfaatan/pengolahan limbah/avalan pabrik yang bernilai ekonomis; dan (2) pelarangan pemasangan penerangan jalan oleh warga di kawasan khusus/tanah milik TNI-AU di Desa Pandean, Kecamatan Rembang.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah menggambarkan kekuatan/keunggulan sumberdaya di suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan. Daya saing yang tinggi diharapkan dapat menjadi daya tarik investasi, baik ekonomi maupun sosial, sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah yaitu kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Aspek daya saing meliputi 4 fokus, yaitu fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas/ infrastrukttur wilayah, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita.

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman dan tembakau. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan sebagainya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 2.1.4.1.

Tabel 2.1.4.1
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp/bln)	Rp/Bulan	919.843	964.049	1.014.043	967.469	1.007.239

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita di Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 2018-2022 cenderung mengalami *tren* kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,80% per tahun. Pada tahun 2021 dikarenakan adanya pandemi *covid-19*, masyarakat mengurangi pengeluaran konsumsi rumah tangga sehingga terjadi penurunan sebesar 4,6% dari tahun 2020. Akan tetapi pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat yang semakin membaik.

Sedangkan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dihitung dengan membandingkan jumlah pengeluaran konsumsi non pangan dengan jumlah seluruh pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita baik makanan maupun non makanan. Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 2.1.4.2.

Tabel 2.1.4.2.
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Pengeluaran Konsumsi non pangan perkapita (%)	%	43,56	46,57	47,82	43,29	43,01

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka, 2020, 2021, 2022

Selama kurun waktu 2018-2022, persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Pasuruan cenderung mengalami *tren* penurunan dikarenakan masyarakat Kabupaten Pasuruan masih mengutamakan kebutuhan pangan sehingga pengeluaran konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Pasuruan lebih tinggi daripada pengeluaran non pangan.

B. Produktivitas Total Daerah.

Pengukuran produktivitas kabupaten wajib dilakukan agar dapat diketahui pencapaian produktivitas sebagai muara dari keseluruhan proses pembangunan di setiap daerah. Produktivitas total daerah diukur dari jumlah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dibagi dengan Jumlah Angkatan Kerja. Produktivitas Total Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 2.1.4.3.

Tabel 2.1.4.3
Produktivitas Total Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Produktivitas total daerah (Rp. Juta/ angkatan kerja)	Rp. Juta/ Angkatan Kerja	157,16	169,46	167,59	175,89	188,45

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka, 2022 Diolah

Produktivitas total daerah di Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu 2018-2022 terus mengalami peningkatan dikarenakan Produk Domestik Bruto atas dasar Harga Berlaku mengalami rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi setiap tahunnya yaitu sebesar 6,24% dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja sebesar 1,47%.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.

Infrastruktur memiliki peran strategis membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik, serta komunikasi dan informasi dalam rangka membuka akses daerah seluas-luasnya. Masukan/*input* yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing infrastruktur antara lain: (1) Ketersediaan infrastruktur transportasi untuk memperlancar arus barang, jasa, manusia dan menjadi penghubung yang efisien antara sumber bahan baku, pusat produksi dan pasar, (2) Ketersediaan listrik yang memadai dan menjadi insentif untuk membangun industri serta memperluas jangkauan pemasaran dan distribusi, (3) Ketersediaan sarana telekomunikasi untuk memudahkan arus informasi dengan lebih luas dan cepat.

A. Sarana Prasarana Transportasi.

Wilayah Kabupaten Pasuruan telah terhubung oleh jalan kabupaten sepanjang 2.315,89 km dan didukung juga oleh adanya pembangunan jalan lingkungan. Selain itu konektivitas/aksesibilitas di wilayah Kabupaten Pasuruan juga didukung oleh jalan nasional sepanjang 86,83 km dan jalan provinsi sepanjang 73,93 km. Guna mendukung aksesibilitas dan konektivitas di wilayah Jawa Timur, Pemerintah telah menetapkan proyek strategis pembangunan jalan tol yang melewati wilayah Kabupaten Pasuruan. Ruas jalan tol yang sudah selesai dibangun dan berfungsi adalah ruas Porong-Gempol, Gempol-

Pandaan dan Gempol-Pasuruan, sedangkan yang masih dalam tahap penyelesaian adalah ruas Pandaan-Malang dan Pasuruan-Probolinggo.

Keberadaan jalan tol ini mendukung perkembangan wilayah, meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas orang, jasa dan barang. Selain pembangunan jalan tol, guna meningkatkan aksesibilitas dan memperlancar arus distribusi orang dan barang, Pemerintah juga berencana untuk membangun lintasan KA *double track* lintas Surabaya-Bangil-Malang-Blitar dan Surabaya-Bangil-Banyuwangi. Sehingga ke depannya stasiun kereta api Bangil bisa menjadi salah satu pusat angkutan barang maupun orang di wilayah Jawa Timur.

B. Jaringan Listrik.

Energi listrik sudah menjadi kebutuhan utama baik individu maupun badan usaha. Pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Jaringan listrik di Kabupaten Pasuruan secara umum disediakan oleh PT. PLN Indonesia dan telah menjangkau ke semua desa/kelurahan. Namun demikian penggunaan sumber energi/listrik lainnya, di beberapa wilayah masyarakat memproduksi secara swadaya, misalnya pemanfaatan biogas di sentra peternakan sapi di kecamatan Tutur dan Puspo.

C. Ketersediaan Air baku.

Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum di Kabupaten Pasuruan didapatkan dari mata air, air tanah dan sumur dangkal. Pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum dilakukan oleh masyarakat sendiri, SPAM perdesaan/HIPPAM dan PDAM. Pengembangan SPAM didukung oleh dana APBD Kabupaten, APBN maupun Hibah APBN/Pamsimas. Pengembangan sistem penyediaan air minum oleh PDAM seringkali terkendala pada ketersediaan sumber air baku karena sumber air yang ada juga dimanfaatkan untuk pengairan irigasi maupun pelayanan SPAM perdesaan.

Pada tahun 2017–2019 Pemerintah Pusat melakukan pembangunan proyek strategis SPAM Regional Umbulan yang menggunakan Mata Air Umbulan (yang terletak di Kecamatan Winongan-

Kabupaten Pasuruan) sebagai sumber air bakunya. Dari proyek SPAM Regional Umbulan ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan, melalui PDAM, mendapatkan jatah sebesar 410 l/dt yang akan digunakan untuk pengembangan pelayanan di Kecamatan Rejoso, Grati, Winongan, Pohjentrek, Kraton, Rembang, Bangil, Beji dan Gempol.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi.

A.. Angka Kriminalitas.

Angka kriminalitas dalam periode tahun 2018-2022 disajikan pada tabel 2.1.4.4. Tabel tersebut menunjukkan angka kasus kriminalitas pada setiap 10.000 penduduk. Angka kriminalitas di Kabupaten Pasuruan secara umum menunjukkan kecenderungan menurun sehingga memberikan dampak positif bagi pengembangan investasi daerah.

Tabel 2.1.4.4.
Angka Kriminalitas di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah tindak kriminal selama 1 th	703	643	513	163	246
2	Jumlah penduduk	1.616.578	1.672.396	1.637.682	1.601.923	1.616.190
3	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	4,35	3,84	3,13	1,02	1,52

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022, Diolah

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia.

A. Rasio penduduk lulusan sarjana dan Rasio ketergantungan

Rasio penduduk lulusan sarjana menggambarkan kualitas penduduk dari aspek pendidikan formal. Semakin tinggi jenjang pendidikan diharapkan semakin tinggi daya saingnya untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja. Sedangkan rasio ketergantungan menggambarkan seberapa besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Tabel 2.1.4.5
Rasio Lulusan S1/S2/S3 dan Rasio Ketergantungan
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,022	0,023	0,024	0,025	0,027
2.	Rasio Ketergantungan	38,59	39,33	40,24	41,61	42,98

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2022 Diolah

Rasio lulusan SI/S2/S3 dari tahun 2018 sampai 2022 selalu mengalami peningkatan yang menunjukkan jumlah lulusan S1/S2/S3 di

Kabupaten Pasuruan selalu bertambah setiap tahunnya. Sedangkan rasio ketergantungan juga mengalami sedikit peningkatan, yang berarti semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif (usia muda dan usia tua). Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk lebih fokus meningkatkan kualitas/kompetensi penduduk usia produktif untuk menekan jumlah pengangguran, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonominya, melalui lapangan kerja formal dan informal.

2.1.5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Berdasarkan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tentang Validasi KLHS P-RPJMD 2018-2023, menetapkan isu prioritas antara lain: Timbulan sampah didaur ulang, Penanganan sampah perkotaan, Akses rumah tangga thd sumber air minum layak, Akses rumah tangga terhadap sanitasi layak, Limbah B3 yang terkelola, Pola pangan harapan dan tingkat konsumsi ikan, Nilai tambah pertanian, Kepesertaan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan, Indeks risiko bencana pada pusat pertumbuhan berisiko tinggi, Kemiskinan menurut jenis kelamin dan umur, Unmet need pelayanan Kesehatan dan Cakupan JKN dan APK SMP/MTs/ Sederajat.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Realisasi Program atau Kegiatan yang Tidak Memenuhi, Telah Memenuhi dan Melebihi Target Kinerja Hasil atau Keluaran yang Direncanakan

Sebagai tolak ukur kinerja pembangunan daerah maka perlu ditetapkan indikator kinerja pembangunan daerah dengan tolak ukur yang sudah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja pembangunan ini perlu dilakukan untuk evaluasi sebagai masukan guna perbaikan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pasuruan. Hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel TC-19. Sedangkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2023, akan disajikan dalam tabel 2.59 di bawah ini.

Tabel 2.59
Jumlah Program/Kegiatan yang Tidak Tercapai, Tercapai dan Melebihi Target

URAIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
Tidak Mencapai Target	60	112
Mencapai Target	177	488
Melebihi Target	36	45
TOTAL	**273**	**645**

Sumber: LKPJ Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

2.2.2. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program atau Kegiatan

2.2.2.1. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program atau Kegiatan

1) Masih banyak daerah di wilayah Kabupaten Pasuruan yang sulit tersentuh jaringan internet sehingga menyulitkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2) Masih kurangnya mobil pelayanan keliling untuk melayani program jemput bola kepada masyarakat;

3) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengakibatkan pembagian personel di lapangan dan di kantor tidak berimbang;
4) Adanya kebijakan atau peraturan baru dari Pemerintah Pusat yang menyebabkan Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dengan kondisi daerah;
5) Masih adanya data yang tidak valid dan belum di update sehingga mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat.

2.2.2.2. Faktor-Faktor Penyebab Tercapainya atau Melebihi Target Kinerja Program atau Kegiatan

1) Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah untuk mensukseskan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2) Adanya perencanaan program atau kegiatan yang terukur sehingga sebagian besar realisasi program atau kegiatan dapat mencapai target yang telah ditentukan;
3) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang Berkualitas;
4) Adanya efisiensi penggunaan anggaran yang telah direalisasi untuk kepentingan publik secara tepat sasaran;
5) Tersedianya peraturan atau kebijakan Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan.

2.2.3. Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program RPJMD dan Kinerja Pembangunan Daerah

1. Angka Pertumbuhan Ekonomi

   Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 mencapai 5,32 persen. Sementara apabila dibandingkan dengan target sebesar 4,23-5,81 persen, maka Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2022 sudah mencapai target. Kondisi tersebut antara lain disebabkan karena sebagian besar program pendukung Angka Pertumbuhan Ekonomi telah tercapai dan melebihi target. Dari 34 program pendukung, ada 12 program yang melebihi target, 17 program yang tercapai dan 5 program yang tidak tercapai.

2. Persentase Penduduk Miskin

   Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 mencapai 8,96 persen. Sementara apabila dibandingkan dengan target sebesar 10,25-10,38 persen, maka Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan tahun 2022 sudah melebihi target. Kondisi tersebut antara lain disebabkan karena sebagian besar program pendukung Persentase Penduduk Miskin telah tercapai dan melebihi target. Dari 17 program pendukung, ada 4 program yang melebihi target, 6 program yang tercapai dan 7 program yang tidak tercapai.

3. Indeks Gini

   Indeks Gini di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 mencapai 0,325 persen. Sementara apabila dibandingkan dengan target sebesar 0,3482 - 0,3473, maka Indeks Gini di Kabupaten Pasuruan tahun 2022 sudah melebihi target. Kondisi tersebut antara lain disebabkan karena sebagian besar program pendukung Indeks Gini telah tercapai dan melebihi target. Dari 17 program pendukung, ada 4 program yang melebihi target, 6 program yang tercapai dan 7 program yang tidak tercapai.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

   Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 mencapai 5,91 persen. Sementara apabila dibandingkan dengan target sebesar 6,08 - 5,91 persen, maka Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pasuruan tahun 2022 sudah melebihi target. Kondisi tersebut antara lain disebabkan karena sebagian besar program pendukung Tingkat Pengangguran Terbuka telah tercapai dan melebihi target. Dari 17 program pendukung, ada 4 program yang melebihi target, 6 program yang tercapai dan 7 program yang tidak tercapai.

5. Indeks Kesalehan Sosial

   Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 mencapai 80,5. Sementara apabila dibandingkan dengan target sebesar 62,6, maka Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Pasuruan tahun 2022 sudah melebihi target. Kondisi tersebut antara lain disebabkan karena capaian dari salah satu program pendukungnya telah melebihi target dan ada 1 program yang mencapai target. Akan

tetapi dari 7 program pendukung Indeks Kesalehan Sosial ternyata masih ada 5 program yang tidak mencapai target.

6. Indeks Williamson

   Indeks Williamson Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 mencapai 0,264. Sementara apabila dibandingkan dengan target sebesar 0,265, maka Indeks Williamson Kabupaten Pasuruan tahun 2022 sudah melebihi target. Kondisi tersebut antara lain disebabkan karena sebagian besar program pendukung Indeks Williamson telah tercapai. Dari 20 program pendukung, ada 1 program yang melebihi target, 11 program yang tercapai dan 8 program yang tidak tercapai.

7. Indeks Reformasi Birokrasi

   Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 mencapai 66,65. Sementara apabila dibandingkan dengan target sebesar 68, maka Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan tahun 2022 belum mencapai target. Kondisi tersebut antara lain disebabkan karena masih banyak program pendukung Indeks Reformasi Birokrasi yang tidak tercapai. Dari 104 program pendukung, ada 23 program yang tidak tercapai, 77 program yang tercapai dan 4 program yang melebihi target.

8. Indeks Pembangunan Manusia

   Indeks Pembangunan Manuasia Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 mencapai 69,68. Sementara apabila dibandingkan dengan target sebesar 68,90 - 70,30, maka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan tahun 2022 sudah mencapai target. Kondisi tersebut antara lain disebabkan karena sebagian besar program pendukung Indeks Pembangunan Manusia telah tercapai dan melebihi target. Dari 37 program pendukung, ada 8 program yang melebihi target, 20 program yang tercapai dan 9 program yang tidak tercapai.

2.2.4. Kebijakan atau Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

1. Angka Pertumbuhan Ekonomi

   Perangkat Daerah akan melaksanakan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mencapai target Program yang dapat menurunkan Angka Pertumbuhan Ekonomi, antara lain:

   1) Mengembangkan generasi muda dan regenerasi petani untuk berpartisipasi dalam pembangunan pertanian sehingga muncul petani milenial melalui program *Youth Enterpreneurship and Employment Support Services* (*YESS*);
   2) Melakukan sosialisasi standarisasi produk perikanan (cara penanganan ikan yang baik, *Good manufacturing practices*/GMP), bimtek pengemasan dan hibah kemasan produk olahan serta bimtek manajemen pemasaran berbasis *online* dan *offline* serta mengadakan temu usaha atau *business matching*;
   3) Menjalin kerja sama dengan lembaga pariwisata HPI (Himpunan Pariwisata Indonesia dan paguyuban Cak Yuk Kabupaten Pasuruan) serta sarana prasarana yang mendukung dan melakukan sosialisasi tentang keberadaan TIC kepada komunitas travel agent dan masyarakat;
   4) Melakukan kajian peta potensi dan peluang investasi daerah dengan menyesuaikan sumber daya finansial;
   5) Melaksanakan Fasilitasi Permodalan melalui melalui Lembaga Pembiayaan Milik Pemerintah atau Perbankan.

2. Persentase Penduduk Miskin

   Perangkat Daerah akan melaksanakan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mencapai target Program yang dapat menurunkan Persentase Penduduk Miskin, antara lain:

   1) Mengoptimalkan Program Percepatan Penganekaragaman sumber daya alam untuk pengembangan pangan;
   2) Optimalisasi peningkatan kualitas ketrampilan Tagana (Taruna Siaga Bencana), dan mendorong upaya-upaya penanganan bencana lintas sektoral secara kolaboratif dan inklusif.;

3) Optimalisasi penyebarluasan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, perantaraan kerja melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja dan bursa kerja dan pelindungan pekerja migran Indonesia;
4) Mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja dengan jaminan kualitas dalam bentuk uji kompetensi.

3. Indeks Kesalehan Sosial

Perangkat Daerah akan melaksanakan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mencapai target Program yang dapat meningkatkan Indeks Kesalehan Sosial, antara lain:

1) Melibatkan atau diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam setiap kegiatan usaha atau ijin-ijin usaha agar tidak terjadi gesekan antara masyarakat dan aparat satuan polisi pamong praja dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran peraturan daerah;
2) Melakukan Koordinasi dan Komunikasi dengan Camat selaku Kepala Wilayah, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat agar dapat memberikan informasi secara cepat sebagai peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi Konflik di masyarakat sehingga setiap ada permasalahan atau kasus dapat terdeteksi dari bawah dan terselesaikan pada tingkat mikro.

4. Indeks Williamson

Perangkat Daerah akan melaksanakan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mencapai target Program yang dapat menurunkan Indeks Williamson, antara lain:

1) Peningkatan nilai IKA dilakukan melalui optimalisasi kebijakan dan upaya-upaya untuk menjaga kualitas air sungai, diantaranya:
   a. Indentifikasi Sumber pencemar secara spesifik pada 9 DAS;
   b. Pembinaan Sumber Pencemar Institusi (Perusahaan) utamanya untuk pengendalian produk detergen yang tinggi kandungan fosfat serta Non Institusi (Masyarakat) utamanya terkait pengelolaan air limbah domestik termasuk BAB di Sungai dengan melibatkan lintas sektor;

c. Pemantauan rutin, insidentil sumber pencemar Institusi dan Non Institusi (utamanya di daerah Prigen, Pandaan, Beji, Gempol, Bangil) dilakukan pada 27 titik;
d. Pertemuan koordinasi dalam rangka penghentian sumber pencemar;
e. Koordinasi Sengketa lingkungan Hidup melalui jalur mediasi maupun jalur Pengadilan;

2) Dalam rangka menurunkan pencemaran udara dari sektor transportasi, perlu pendekatan kebijakan lintas sektor yang mengatur lebih ketat terkait aturan moda transportasi pribadi untuk bisa dikembangkan modal transportasi umum, pengaturan rekayasa lalu lintas untuk pengendalian emisi gas buang kendaraan, kebijakan bahan bakar ramah lingkungan non bahan bakar fosil;
3) Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan nilai IKTL antara lain dengan tetap menjaga luasan kawasan hutan dan kawasan yang memiliki fungsi lindung (lereng >25%, sempadan sungai, danau, dan pantai), melakukan konversi tutupan belukar menjadi tutupan hutan pada kawasan hutan dan kawasan yang memiliki fungsi lindung. Selanjutnya, Kabupaten Pasuruan dapat mendukung peningkatan nilai IKTL dengan menambah luas tutupan Ruang Terbuka Hijau, mendorong program reklamasi pasca tambang dan melakukan reboisasi pada lahan-lahan kritis;
4) Meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana Hidrometeorologi dan cuaca ekstrem;
5) Meningkatkan sinergitas antara Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Kepolisian dan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan khususnya terhadap kendaraan muatan bertonase berat yang melintas;
6) Membuat inovasi pelayanan angkutan sekolah gratis dengan mengenalkan pelayanan angkutan umum yang mudah dan nyaman kepada pelajar.

5. Indeks Reformasi Birokrasi

Perangkat Daerah akan melaksanakan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mencapai target Program yang dapat meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, antara lain:

1) Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikuti Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi baik yang diadakan oleh BPKP Pusat/Pusbin JFA, maupun Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri untuk 1-2 pegawai/Auditor karena terkendala keterbatasan anggaran yang ada pada tahun 2022
2) Meningkatkan efektivitas, disiplin dan pengawasan pegawai serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
3) Mengoptimalkan penggunaan teknologi informatika dalam pelayanan pemerintah, promosi, potensi daerah maupun penyebaran informasi kepada masyarakat dan dunia usaha;
4) Mengoptimalkan pelayanan E KIOS PAK LADI dan pelayanan mobil keliling yang ada untuk pelayanan jemput bola kepada masyarakat daerah terpencil dan penduduk rentan administrasi kependudukan.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Perangkat Daerah akan melaksanakan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mencapai target Program yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, antara lain:

1) Penurunan Stunting;
2) Revitalisasi Gerakan Kembali Belajar dengan sasaran penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan dasar melalui support dana yang didukung oleh pendataan yang akurat dengan melibatkan stakeholder dan OPD terkait;
3) Mengoptimalkan layanan perpustakaan baik Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Keliling;
4) Mengembangkan desa literasi untuk kesejahteraan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
5) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat kurang mampu.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Sasaran pembangunan daerah merupakan kondisi yang ingin diwujudkan dalam pembangunan sebagai penjabaran rumusan tujuan pembangunan daerah yang tersebut dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, dalam hal ini Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Secara operasional sasaran pembangunan daerah dilaksanakan melalui program/kegiatan/subkegiatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan prioritas/strategis. Identifikasi permasalahan prioritas/strategis daerah tahun 2024 berdasarkan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel 2.3.1.

Tabel 2.3.1
Permasalahan Strategis Daerah menurut Sasaran Pembangunan Daerah

No	Sasaran Pembangunan Daerah RPD 2024-2026	Permasalahan Strategis
1	Meningkatnya produksi sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	Masih rendahnya daya saing produk unggulan
2	Meningkatnya Iklim Investasi	Belum optimalnya pengelolaan potensi investasi
		Meningkatnya potensi konflik sosial dampak pemilu dan pilkada serentak
3	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Belum optimalnya cakupan infrastruktur dasar
4	Meningkatnya kualitas lingkungan	Masih rendahnya kualitas air permukaan, udara, dan tutupan lahan
5	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Masih rendahnya rata-rata dan harapan lama sekolah
6	Menurunnya pengangguran	Masih rendahnya kompetensi angkatan kerja
7	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Belum optimalnya pendidikan pranikah
8	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Masih belum terbangunnya sistem informasi ketahanan pangan daerah
9	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Belum optimalnya implementasi SAKIP
		Belum optimalnya penyelenggaraan satu data
10	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Masih rendahnya indeks profesionalitas ASN
11	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya pemanfaatan mal pelayanan public

Sumber : hasil analisis Tim

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah berdasarkan capaian kinerja layanan pada subbab 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum. Permasalahan tersebut terekap sebagaimana tabel 2.3.2.

Tabel 2.3.2
Permasalahan Urusan Pemerintah Daerah

No	Permasalahan
1	**Pendidikan** a) Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) baik SD/MI serta SMP/MTs di tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Capaian APM SD/MI di tahun 2021 adalah 98,56 sedangkan di tahun 2022 mencapai 97,49. Pada APM SMP/MTs juga mengalami penurunan dari 82,07 pada tahun 2021 menjadi 81,96 pada tahun 2022; b) APM SD/MI dan APM SMP/MTs tahun 2022 mengalami penurunan dan belum mencapai 100% yang menunjukkan bahwa Program Wajib Belajar 9 tahun yang menjadi kewenangan Kabupaten Pasuruan masih belum tuntas atau masih terdapat 2,51% anak usia SD (7-12 tahun) dan 18,04% anak usia SMP (13-15 tahun) yang belum berkesempatan mengenyam pendidikan SD/SMP atau tujuan pembangunan berkelanjutan '*no one left behind*' masih terwujud; c) Rata-rata lama sekolah tahun 2022 mencapai 7,42 tahun, yang menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Pasuruan rata-rata masih belum tamat sampai SMP/MTs; d) Masih adanya anak yang putus sekolah sebanyak 16 anak.
2	**Kesehatan** a) Masih terdapat angka kematian ibu pada 2022 yang mencapai 78,91 per 100.000 kelahiran hidup atau 18 kasus kematian ibu; b) Masih terdapat angka kematian bayi pada tahun 2022 yang mencapai 3,38 per 1.000 kelahiran hidup atau 77 kasus kematian bayi; c) Masih terdapat banyak penderita HIV positif yang mencapai 510 orang; d) Terjadi peningkatan yang sangat tinggi pada penderita penyakit TBC tahun 2022 yang mencapai 2.720 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 772 kasus; e) Masih terdapat SPM urusan Kesehatan yang belum mencapai 100% pada tahun 2022 yaitu pada Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut dengan capaian 94,24%, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dengan capain 90,16% dan Pelayanan Kesehatan pada Usia Dasar dengan capaian 99,99%. f) Masih adanya prevalensi stunting tahun 2022 yang mencapai 10,83.
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** a) Capaian penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari tahun 2022 masih 86,74% yang berarti belum seluruh penduduk di Kabupaten Pasuruan yang terpenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-harinya; b) Capaian layanan pengolahan air limbah domestik tahun 2022 masih 81,81% yang berarti belum seluruh penduduk di Kabupaten Pasuruan yang mendapat pelayanan pengolahan air limbah domestik; c) Masih tingginya kejadian bencana banjir yang mencapai 114 kejadian dan bencana kekeringan yang mencapai 4 kejadian pada tahun 2022; d) Indeks Ketahanan Air pada tahun 2022 hanya mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2021 yaitu sebesar 0,30 yang menggambarkan ketersediaan air baku yang ada belum dapat memenuhi secara keseluruhan kebutuhan penduduk Kabupaten Pasuruan; e) Indeks Aksesibilitas Wilayah pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Capaian Indeks Aksesibilitas Wilayah tahun 2022 mencapai 1,26 sedangkan pada tahun 2021 mencapai 1,33; f) Berkurangnya tingkat kemantapan jalan pada tahun 2021 sebesar 84,73 menjadi 79,88% pada tahun 2022.
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** a) Masih rendahnya penanganan Kawasan Kumuh, dimana Persentase kawasan kumuh yang ditangani hingga tahun 2022 adalah 14,75% dengan total luasan

No	Permasalahan
	yang ditangani sejumlah 80,21 Ha. Namun dalam capaian per tahunnya, untuk tahun 2022 ada penurunan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2021 luas kawasan kumuh yang ditangani mencapai 32,82 Ha sedangkan tahun 2022 hanya 5,7 Ha.
5	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat** a) Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten belum mencapai 100%; b) Jumlah warga negeri yang memperoleh layanan penyelamatan & evakuasi korban bencana masih belum mencapai 100%; c) Masih tingginya tingkat kejadian bencana alam di wilayah Kabupaten Pasuruan (banjir, tanah longsor, rawan air/kekeringan, angin kencang dan pohon tumbang) yang mencapai 332 kejadian; d) Masih tingginya kejadian kebakaran baik di area permukiman maupun area industry yang mencapai 120 kejadian pada tahun 2022.
6	**Sosial** a) Masih terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mencapai 6,33% pada tahun 2022; b) Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti masih belum tercapai 100%.
7	**Tenaga Kerja** a) Masih banyaknya penduduk yang menganggur mencapai 54.113 orang; b) Belum semua pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan kerja memiliki/lulus sertifikasi kompetensi karena belum mencapai 100%; c) Masih adanya kasus hubungan industrial yang belum diselesaikan karena belum mencapai 100%.
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** a) Capaian Indeks Pembangunan Keluarga masih dalam kategori “Sedang”; b) Meningkatnya rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang/ TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) dari 3,24 pada tahun 2021 menjadi 9,75 pada tahun 2022; c) Pemahaman dan pengetahuan Masyarakat khususnya masyarakat pedesaan tentang isu kesetaraan gender yang kurang dan juga kurangnya peran dan komitmen pemerintah kabupaten dan pemerintah desa melaksanakan penyusunan dokumen PPRG.
9	**Pangan** Menurunnya Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebesar 2.243 pada tahun 2021 menjadi 2.086 pada tahun 2022.
10	**Pertanahan** Masih adanya luas kebutuhan penetapan persetujuan lokasi yang belum dibangun untuk kepentingan umum.

No	Permasalahan
11	**Lingkungan Hidup** a) Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Pada tahun 2022, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 59,78 sedangkan pada tahun 2021 mencapai 63,13; b) Nilai Indeks Ketahanan Air pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,40 poin dari capaian tahun 2021 yang berarti bahwa secara umum terjadi penurunan kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Pasuruan; c) Capaian nilai Indeks Kualitas Udara pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 7,78 poin dibandingkan tahun 2021; d) Capaian nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2022 sebesar 42,64 termasuk dalam kategori "kurang"; e) Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2022 mencapai 42,64 mengalami penurunan sebanyak 0,25 poin atau setara dengan luas 687,5 Ha jika dibandingkan dengan capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2021 yang mencapai 42,89.
12	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** a) Masih ada penduduk di Kabupaten Pasuruan yang belum memiliki E-KTP, KK dan Akta Kelahiran karena belum mencapai 100%; b) Masih rendahnya capaian Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2022 sebesar 24,19%.
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** a) Masih rendahnya persentase Desa Mandiri di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 yang mencapai 9,97%; b) Belum optimalnya data dari desa/potensi desa, dan kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia, sehingga mempengaruhi proses pengembangan dan pengelolaan potensi desa.
14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** a) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) masih belum mencapai 100%; b) Masih adanya kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (Unmed Need) yang mencapai 11,16%.
15	**Perhubungan** a) Menurunnya rasio konektivitas kabupaten sebesar 57,58% pada tahun 2021 menjadi 39% pada tahun 2022; b) Menurunnya Persentase pelaksanaan pelayanan uji KIR berkala sebesar 99,60% pada tahun 2021 menjadi 97,23% pada tahun 2022.
16	**Komunikasi dan Informatika** a) Capaian Indeks SPBE pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Pada tahun 2022, capaian Indeks SPBE mencapai 2,04 sedangkan pada tahun 2021 mencapai 2,39; b) Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah & pemda kab/kota mengalami panurunan dari 25,82% pada tahun 2021 menjadi 17,12% pada tahun 2022.
17	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** a) Masih rendahnya Persentase koperasi yang berkualitas yang mencapai 21,05%; b) Masih rendahnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha yang mencapai 3,59%.

No	Permasalahan
18	**Penanaman Modal** a) Belum tersedianya kebijakan mengenai Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM); b) Belum memiliki peta potensi investasi karena anggaran belum sesuai kebutuhan dan RTRW belum selesai, sehingga promosi invetasi belum maksimal; c) Belum efektifnya kegiatan promosi dan kerjasama investasi yang dilakukan DPMPTSP sebagai upaya menarik calon investor baik tingkat domestik maupun mancanegara guna meningkatkan investasi dan dapat mendatangkan misi penanaman modal.
19	**Kepemudaan dan Olahraga** a) Capaian Rasio Pemuda Berprestasi pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Pada tahun 2022, capaian Rasio Pemuda Berprestasi mencapai 0,33 sedangkan pada tahun 2021 mencapai 0,40; b) Capaian Rasio Atlit Berprestasi pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Pada tahun 2022, capaian Rasio Atlit Berprestasi mencapai 0,70 sedangkan pada tahun 2021 mencapai 0,41.
20	**Statistik** Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah mengalami penurunan dari 60% pada tahun 2021 menjadi 59,70% pada tahun 2022.
21	**Persandian** Masih rendahnya tingkat keamanan informasi pemerintah yang mencapai 48,37% pada tahun 2022.
22	**Kebudayaan** Tidak adanya peningkatan jumlah kelompok kesenian tradisional dari tahun 2021 sampai 2022 yaitu sebanyak 422 kelompok.
23	**Perpustakaan** a) Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Pada tahun 2022, capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mencapai 8,07 sedangkan pada tahun 2021 mencapai 8; b) Belum seluruh Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang memiliki Perpustakaan karena hanya 8 Kecamatan dan 22 Desa/Kelurahan yang memiliki Perpustakaan.
24	**Kearsipan** Pada tahun 2022 Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan yang ditetapkan oleh ANRI mencapai 67,95 dalam skala 100 atau masuk kategori “cukup,” meskipun mengalami kenaikan dari tahun 2021 yang mencapai 56,36 tetapi belum mencapai target yang ditentukan yaitu 80.

No	Permasalahan
25	**Perikanan** a) Permasalahan Perikanan Tangkap: 1. Semakin menurunnya sumberdaya perikanan (daya dukung sumber daya perikanan); 2. Masih adanya nelayan yg menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan; 3. Nelayan menggantungkan modalnya ke tengkulak/juragan; 4. Rendahnya SDM nelayan sehingga lambatnya dalam mengikuti perubahan dan aturan2 pemerintah; b) Permasalahan Perikanan Budidaya: 1. Permasalahan untuk peningkatan produksi terutama pada komoditas udang yaitu adanya pandemi AHPND sehingga tambak busmetik banyak mengalami gulung tikar sehingga banyak busmetik yg ditutup hal ini mempengaruhi produksi udang di pasuruan; 2. Untuk mendongkrak produksi perlu adanya penyedia sarana bantuan benih dan pakan pada budidaya air tawar terutama komoditas unggulan yaitu lele; 3. Selama ini produksi lele penyumbang terbesar hampir 60% dr total produksi budidaya. c) Permasalahan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan: 1. Terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan; 2. Kurangnya kualitas SDM (pelaku usaha perikanan) dan kelembagaannya terkait pengetahuan, ketrampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi; 3. Terbatasnya akses pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing antara lain mengakses sumber pembiayaan, perlindungan terhadap pasar domestik dan sertifikasi produk; 4. Belum terpenuhinya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil olahan perikanan; 5. Pengelolaan dan penyelenggaran fungsi Tempat Pendaratan Ikan (TPI) kurang optimal; 6. Investasi dibidang usaha kelautan dan perikanan belum maksimal.
26	**Pariwisata** a) Capaian Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Pada tahun 2022, capaian Persentase Meningkatnya Kunjungan Pariwisata mencapai 17% sedangkan pada tahun 2021 mencapai 25,62%; b) Capaian *Spending of Money in Tourism pada* tahun 2022 mencapai Rp 758.385.137.911 sehingga masih belum mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar Rp 787.417.400.000.
27	**Pertanian** Untuk memudahkan perhitungan produktivitas maka indikator kinerja tersebut di detailkan menjadi peningkatan produktivitas tanaman pangan, peningkatan produktivitas tanaman buah, peningkatan produktivitas tanaman sayur, peningkatan produktivitas tanaman hias dan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan. Sasaran kedua didukung oleh Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dan sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.

No	Permasalahan
	Adapun analisis capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebagai berikut : 1) Persentase Peningkatan produktivitas Tanaman Pangan Tanaman pangan yang menjadi prioritas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah tanaman padi dan jagung. Kedua komoditas ini merupakan bahan pangan utama yang dikonsumsi kebanyakan orang Indonesia sehingga ketersediaannya sedemikian penting dan harus ditingkatkan produktivitasnya. Selain kedua komoditas diatas, tanaman kedelai juga merupakan tanaman pangan prioritas nasional. Namun demikian minat petani untuk menanam tanaman kedelai semakin berkurang karena produktivitas kedelai yang rendah dan harga yang kurang menjanjikan. Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan tahun 2022 adalah sebesar 0.60% capaian ini telah melampaui dari target sebesar 0,63% yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 atau sebesar 105,7%. Produktivitas padi pada tahun 2022 sebesar 60,93 kw/ha meningkat dibandingkan tahun 2021 dengan Produktivitas sebesar 60,06 kw/ha, Produktivitas jagung pada tahun 2022 sebesar 65,33 kw/ha meningkat dibandingkan tahun 2021 dengan produktivitas sebesar 64,77 kw/ha Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan Luas panen pada kedua komoditas tersebut. Adanya bantuan benih, bantuan pupuk, bantuan alat mesin pertanian, Sekolah Lapang pengendalian Hama Terpadu, pembangunan jaringan irigasi tersier dan sumur bor merupakan alasan kenaikan produktivitas tanaman pangan yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas. 2) Persentase Peningkatan produktivitas tanaman sayur Kabupaten Pasuruan kaya akan bermacam-macam jenis sayuran. Tetapi saat ini yang menjadi prioritas adalah tanaman kentang dan Paprika. Kedua komoditas ini mempunyai prospek yang bagus untuk dikembangkan di Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2022 peningkatan produktivitasnya ditargetkan sebesar 0,6% terealisasi sebesar 0,59%. Capaian ini masih belum melampaui dari target sebesar 0,6% yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 atau sebesar 98%. produktivitas Kentang pada tahun 2022 sebesar 363,17 kw/ha meningkat dibandingkan tahun 2021 dengan produktivitas sebesar 356,24 kw/ha (101,94%) dan produktivitas Paprika pada tahun 2022 sebesar 324,50 kw/ha meningkat dibandingkan tahun 2021 dengan produktivitas sebesar 318,73 kw/ha (101,81%). Peningkatan produktivitas utamanya didukung oleh peningkatan Luas panen pada kedua komoditas tanaman sayuran. Peningkatan luas panen disebabkan bantuan benih unggul bersertifikat pada tanaman kentang serta penggunaan sistem irigasi tetes (Drip Irrigation) pada tanaman Paprika dan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu yang bersumber dari APBD Kabupaten. 3) Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman buah Komoditas unggulan jenis buah yang dikembangkan dan cocok dengan klimatologi kabupaten Pasuruan adalah mangga, apel dan durian. Ketiga komoditas ini menjadi primadona di pasaran buah-buah lokal karena masing-masing mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Untuk komoditas mangga yang menjadi unggulan adalah mangga gadung klon 21 atau biasa disebut mangga putar. Sedangkan buah durian yang ada di 8 kecamatan sentra masing-masing punya cita rasa yang tidak dimiliki di daerah lain. Adapun buah apel mempunyai lahan yang cukup luas sekaligus mempunyai kualitas yang tidak kalah dengan sentra apel lain di Indonesia dan akan dilakukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis Apel di wilayah Kabupaten Pasuruan untuk melindungi karakteristik khas, kualitas serta memberikan nilai tambah komersial terhadap produk apel di Kabupaten Pasuruan. Persentase peningkatan Produktivitas tanaman buah tahunan tahun 2022 adalah sebesar 0,66%, capaian ini telah melampaui dari target sebesar 0,6% yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 atau sebesar 110%. Produktivitas Apel pada tahun 2022 sebesar 82,31 kg/pohon meningkat dibandingkan tahun 2021 dengan Produktivitas sebesar 82,93 kg/pohon

No	Permasalahan
	(99,25%), Produktivitas Durian pada tahun 2022 sebesar 110,77 kg/pohon meningkat dibandingkan tahun 2021 dengan Produktivitas sebesar 108,30 kg/pohon (102,28%), dan Produktivitas Mangga pada tahun 2022 sebesar 92,95 kg/pohon meningkat dibandingkan tahun 2021 dengan Produktivitas sebesar 91,28 kg/pohon (101,82%). Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan produktivitas pada ketiga komoditas tersebut. Keberhasilan pembuahan diluar musim (Off session) pada tanaman mangga, bantuan bibit mangga dan durian yang bersumber dari APBD kabupaten, bantuan pupuk organik pada tanaman apel serta kestabilan harga durian yang membuat petani durian termotivasi membudidayakan tanaman durian secara intensif merupakan alasan kenaikan produktivitas tanaman buah tahunan. 4) Persentase Peningkatan produktivitas tanaman hias Komoditas andalan untuk tanaman hias di Kabupaten Pasuruan adalah Bunga krisan dan Bunga sedap malam. Pengembangan bunga krisan ada di kecamatan Tutur sedangkan pengembangan bunga sedap malam ada di kecamatan Rembang dan Bangil. Terjadi peningkatan pada indikator Persentase peningkatan produktivitas tanaman hias tahun 2022 dimana terealisasi sebesar 0,64%, Secara umum produktivitas bunga krisan dan bunga sedap malam meningkat namun capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 yaitu sebesar 0,6% atau capaian kinerjanya hanya sebesar 107%. Produktivitas Bunga Krisan pada tahun 2022 sebesar 59,53 tangkai/m2 sedikit ada penurunan dibandingkan tahun 2021 dengan Produktivitas sebesar 61,16 tangkai dan Produktivitas Bunga Sedap Malam pada tahun 2022 sebesar 11,38 tangkai/m2 menurun dibandingkan tahun 2021 dengan Produktivitas sebesar 11,57 tangkai/m2. Adanya anomali iklim salah satunya angin kencang dan curah hujan yang tinggi mempengaruhi produktivitas tanaman hias ditahun 2022. 5) Persentase Peningkatan produktivitas Tanaman Perkebunan Komoditas perkebunan masih berpeluang cukup besar untuk dikembangkan di Kabupaten Pasuruan, terutama komoditas kopi, cengkeh, tebu dan kelapa. Iklim yang sesuai dan ketersediaan lahan perkebunan adalah hal utama yang mendukung pengembangan komoditas ini. Persentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan tahun 2022 dibanding tahun 2021 adalah sebesar 1.12%, capaian ini telah melampaui dari target sebesar 0,6% yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 atau sebesar 187%. produktivitas Kopi pada tahun 2022 sebesar 885,00 kg/ha meningkat dibandingkan tahun 2021 dengan produktivitas sebesar 713,22 kg/ha, produktivitas Cengkeh pada tahun 2022 sebesar 323,39 kg/ha menurun dibandingkan tahun 2021 dengan produktivitas sebesar 447,03 kg/ha. produktivitas Tebu pada tahun 2022 yaitu sebesar 6.551,43 kg/ha meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 8436,11 kg/ha. produktivitas Kelapa pada tahun 2022 sebesar 1.762,83 kg/ha menurun dibandingkan tahun 2021 dengan produktivitas sebesar 2094,93 kg/ha. Penurunan produktivitas di tanaman cengkeh dan Kelapa tersebut disebabkan terutama akibat minimnya peremajaan atau rehabilitasi tanaman rusak karena ditinggalkan petani sebagai dampak rendahnya harga atau minimnya introduksi teknologi sehingga produktivitas tanaman rendah, serta banyak tanaman kelapa yang rentan rusak diserang hama kwangwung (Oryctes rhinoceros) Dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memprioritaskan kegiatan sekolah lapang pengendalian hama terpadu serta bimtek cara budidaya tanaman perkebunan, sarana prasarana pendukung budidaya dan penanganan pasca panen kopi yang dilakukan secara intensif serta peningkatan SDM petani melalui pembinaan dan pelatihan kepada kelompok tani. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten telah memfasilitasi petani hingga memperoleh Top Inovasi 45 Pelayanaan Publik Tahun 2022 Kapiten Pasuruan Getas Juara (Kopi Asli Kabupaten Pasuruan Penggerak ekonomi Petani Kopi Pasuruan Menuju Cita Rasa Internasional), Pemberitahuan Sertifikat Indikasi

No	Permasalahan
	Geografis Kopi Arabika Pasuruan untuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Pasuruan, Apresiasi atas komitmen dan dukungan terhadap program pengembangan kawasan pertanian terstandar - ICARE Tahun 2022-2027, Juara II Stand Terbaik Exspose Pangan Lokal dan Pameran Pembangunan Pertanian Peringatan Hari Pangan Sedunia ke 42 Tahun 2022, Sebagai District Implementation (DIT) Team Terbaik Program Youth Enterpreneurship and Employment Support Services (YESS) Tahun 2022 dan Juara I Kategori Pelaku Usaha Olahan Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Lomba Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.
28	**Perdagangan** a) Capaian Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Pada tahun 2022, capaian Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran mencapai 6,98% sedangkan pada tahun 2021 mencapai 9,08%; b) Capaian Nilai Transaksi Perdagangan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Pada tahun 2022, capaian Nilai Transaksi Perdagangan mencapai 4.751,8 juta rupiah sedangkan pada tahun 2021 mencapai 5.302,8 juta rupiah.
29	**Perindustrian** Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota) pada tahun 2022 tidak mengalami perubahan dari tahun 2021 yaitu 30%.
30	**Transmigrasi** Kuota pemberangkatan Calon Transmigran masih dibatasi dan ditentukan oleh Provinsi Jawa Timur.
31	**Sekretariat Daerah** a) Capaian Nilai Sakip Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 hanya mengalami peningkatan yang sangat sedikit yaitu 0,22 dari tahun 2021; b) Hasil Penilaian Verifikator Pusat terhadap pelaporan Ranham periode B04 tahun 2023 pada aksi 2 dan aksi 3 masih kuning.
32	**Sekretariat DPRD** Belum optimalnya dukungan layanan Sekretariat DPRD terhadap peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsinya yaitu Fungsi Anggaran, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Pengawasan.
33	**Perencanaan** a) Capaian Nilai Sakip Perencanaan pada tahun 2022 hanya mengalami peningkatan yang sangat sedikit yaitu 0,03 dari tahun 2021; b) Capaian Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang baik belum 100%.
34	**Keuangan** Masih tingginya ketergantungan keuangan daerah dengan dana transfer atau belum bisa mandiri dari Pendapatan Asli Daerah.
35	**Kepegawaian** Capaian Indeks profesionalitas ASN pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Pada tahun 2022, capaian Indeks profesionalitas ASN mencapai 54,67 sedangkan pada tahun 2021 mencapai 58,42.
36	**Penelitian dan Pengembangan Daerah** Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia Peneliti sebanyak 2 orang yang merupakan hasil penyetaraan.

No	Permasalahan
37	**Inspektorat** Nilai Maturitas SPIP, menunjukkan kondisi yang stagnan, hal ini menunjukkan bahwa penerapan SPIP level PD belum dilakukan secara luas.
38	**Kecamatan** a) Masih ada Kecamatan yang Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami penurunan pada tahun 2022; b) Masih ada Kecamatan yang Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan mengalami penurunan pada tahun 2022.
39	**Pemerintahan Umum** Menurunnya Persentase kejadian konflik Ipoleksusbud yang ditindaklanjuti yang mencapai 100% pada tahun 2021 menjadi 90,91% pada tahun 2022.

Sumber : hasil analisis Tim

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah tidak bisa terlepas dari kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini untuk menjaga keselarasan kebijakan ekonomi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Arah kebijakan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Kerangka ekonomi daerah didisain dengan menyusun prioritas pembangunan daerah sebagai langkah strategis menghadapi tantangan dan penyelesaian isu strategis tahun 2024. Kunci dari kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah meliputi interaksi antara potensi pendapatan, alokasi belanja, dan prioritas pembangunan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian global tahun 2022 diproyeksi melanjutkan perlambatan, yang dilanjutkan perlambatan pada tahun berikutnya. Proyeksi pada bulan Juli 2022 dirilis International Monetary Foundation (IMF). Perekonomian global pada tahun 2022 secara menyeluruh diestimasi tumbuh melambat 3,2 persen, dibandingkan proyeksi sebelumnya yang sebesar 3,6 persen. Perlambatan proyeksi pertumbuhan bersumber dari penurunan proyeksi untuk Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Perlambatan perekonomian negara-negara itu disebabkan karena diterapkannya perpanjangan lockdown di Tiongkok, pengetatan kondisi keuangan global terkait ekspektasi peningkatan tajam suku bunga oleh bank sentral untuk mengurangi inflasi, serta dampak dari perang di Ukraina. Perekonomian Amerika Serikat diproyeksi mengalami penurunan tajam untuk tahun 2022 dari 3,7 persen menjadi 2,3 persen. Selanjutnya pada 2023 menurun kembali menjadi 1,0 persen. Penurunan tajam untuk proyeksi tersebut dipengaruhi oleh konsumsi swasta yang jauh lebih sedikit, sebagian mencerminkan tergerusnya daya beli rumah tangga yang tergerus, serta dampak dari pengetatan tajam kebijakan moneter. Adapun proyeksi

pertumbuhan ekonomi negara-negara maju dan berkembang dari IMF disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Proyeksi Pertumbuhan Beberapa Negara

Kawasan	2022	2023
Negara Maju		
Amerika Serikat	2,3	1,0
Kawasan Eropa	2,6	1,2
Jerman	1,2	0,8
Inggris	3,2	0,5
Jepang	1,7	1,7
Rusia	-6,0	-3,5
Negara Berkembang		
Tiongkok	3,3	4,6
India	7,4	6,1
ASEAN-5	5,3	5,1
Brazil	1,7	1,1
Meksiko	2,4	1,2
Afrika Selatan	2,3	1,4
Global	3,2	2,9

Sumber: IMF, World Economic Outlook, Juli 2022

Dianamika yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi dunia juga berdampak pada situasi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi yakni sebesar 5,4 persen (YoY). Kondisi ini menunjukkan berlanjutnya pemulihan ekonomi Indonesia dan semakin menguat, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat karena pelonggaran syarat perjalanan. Produk Domestik Bruto riil pada triwulan II tahun 2022 mencapai Rp2.923,7 triliun. Trend pertumbuhan ekonomi Indonesia disajikan pada gambar berikut:

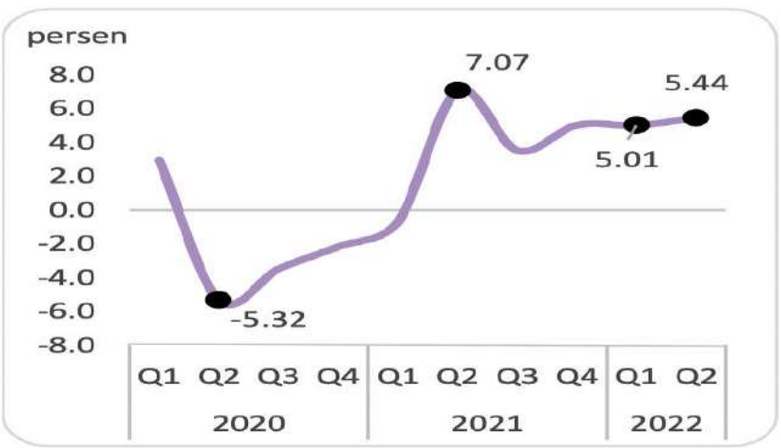

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari sisi pengeluaran, semakin terkendalinya pandemi Covid-19 serta capaian vaksinasi domestik yang tinggi menjadi kunci dari peningkatan mobilitas masyarakat yang mendorong berjalannya aktivitas perekonomian. Kebijakan pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat ini diperkirakan terus berlanjut dan dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Meskipun demikian, inflasi yang terus meningkat persisten dan telah berada di atas target Bank Indonesia (2,0- 4,0) persen sejak Juni berpotensi menurunkan daya beli masyarakat jika tidak segera dikendalikan. Investasi diperkirakan tumbuh positif didorong oleh realisasi PMA dan PMDN yang tinggi. Ekspor dan impor diperkirakan tetap mampu tumbuh tinggi, didorong oleh kenaikan harga komoditas ekspor utama Indonesia. Adapun konsumsi pemerintah diperkirakan terkontraksi, seiring dengan situasi Covid-19 yang semakin terkendali yang memicu penurunan belanja barang dan belanja bantuan sosial. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumlah sektor yang diperkirakan mampu tumbuh tinggi, seperti industri pengolahan, perdagangan serta transportasi dan pergudangan.

Kondisi Ekonomi Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2022 – 2023 dapat dijelaskan bahwa perekonomian Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 masih mencatatkan pertumbuhan yang positif meskipun telah mengalami perlambatan dibandingkan pada saat periode sebelum covid-19. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kabupaten pasuruan meningkat sekitar 5,32 persen, dari sisi ekonomi pengeluaran per kapita rata-rata masyarakat Kabupaten Pasuruan meningkat hingga 4,17 persen kondisi ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, sementara itu arah kebijakan ekonomi daerah tidak terlepas dari kondisi makro ekonomi daerah yang ingin diwujudkan tahun 2024. Kondisi makro direpresentasikan berupa indikator makro ekonomi daerah, yaitu: pertumbuhan ekonomi; indeks gini (kesenjangan pendapatan masyarakat); tingkat pengangguran terbuka; inflasi; dan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan pasca pandemik covid-19 menunjukkan usaha pemulihan yang dapat dikatakan berhasil. Pertumbuhan ekonomi yang sempat terkontraksi tahun 2020 (minus 2,03%), perlahan-lahan kembali normal pada tahun 2021 (4,34%) dan tahun 2022 (5,32%). Berdasarkan asumsi/perkiraan yang ditetapkan

Pemerintah Pusat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2023 diproyeksikan sebesar 5,81% dan tahun 2024 ditargetkan sebesar 5,86%.

Pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 menunjukkan proses yang relatif cepat. Kondisi tersebut berbeda dalam penanganan kemiskinan. Pandemi berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan. Angka kemiskinan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021 (9,70%) dan dapat diturunkan kembali tahun 2022 (8,96%). Seiring dengan ekonomi yang semakin membaik, kemiskinan tahun 2023 diproyeksikan turun menjadi 8,69% dan tahun 2024 ditargetkan 8,42%.

Gambaran kondisi ekonomi makro Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 secara lebih lengkap sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Indikator Makro Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Uraian	Kondisi 2022	Proyeksi 2023	Target 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,32	5,81	5,86
Indeks Gini	0,325	0,319	0,310
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,91	5,86	5,81
Inflasi (%) : - Laju indeks implisit PDRB (inflasi tingkat produsen)	4,32	4-5	4-5
- Inflasi Kota Probolinggo	5,45		
Kemiskinan (%)	8,96	8,69	8,42

Sumber: RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

Penggambaran ekonomi makro daerah tersebut merupakan hasil/asumsi yang diharapkan/ditetapkan dalam pelaksanaan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan untuk tahun 2024 berfokus pada "Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola pemerintahan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah". Arah kebijakan pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam 4 (empat) prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Peningkatan Pelayanan Dasar Masyarakat;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel;
3. Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Lokal; dan

4. Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Pengangguran.

Penetapan arah kebijakan ekonomi/pembangunan Kabupaten Pasuruan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur yang diuraikan pada subbab berikutnya.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Kebijakan Perekonomian Nasional tertuang dalam RKP 2024 dengan Tema RKP 2024 adalah '***Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***". Arah kebijakan tahun 2024 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan trajectory jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045. Adapun Fokus Kebijakan Makro Tahun 2024 adalah :

1. Percepatan Transformasi Ekonomi

   Percepatan transformasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan ekosistem dalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang bernilai tambah tinggi. Upaya percepatan transformasi dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha.

2. Pembangunan Inklusif

   Pembangunan inklusif diarahkan untuk menciptakan peningkatan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah. Upaya pembangunan inklusif dilakukan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

3. Pembangunan Berkelanjutan

   Pembangunan perlu memperhatikan aspek lingkungan untuk mengoptimalkan sumber daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Upaya pembangunan berkelanjutan diarahkan pada pembangunan rendah

karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi.

4. Mewujudkan Stabilitas Ekonomi

   Dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2024, diperlukan stabilitas ekonomi yang mampu menciptakan terjaganya iklim ekonomi yang kondusif serta mengurangi ketidakpastian. Upaya mewujudkan stabilitas ekonomi diarahkan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang aman dan kondusif.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Timur tahun 2024 dalam RKPD Tahun 2024 dengan tema ***"Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif Menuju Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak"***

Seiring landainya penyebaran kasus Covid-19 dan momentum pemulihan ekonomi yang cepat di tahun 2022 semakin memberikan optimisme ekonomi Jawa Timur akan terus tumbuh positif di tahun 2023 dan 2024. Optimisme ini perlu terus dipertahankan dan diakselerasi melalui berbagai upaya penguatan pemulihan ekonomi. Bauran kebijakan transformasi ekonomi yang responsif dan adaptif perlu dirumuskan melalui arah kebijakan ekonomi Jawa Timur di tahun 2024 sebagai berikut:

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi baru.
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah agar harga kebutuhan-kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik produk agro maupun non agro.
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk.
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan
6. Penguatan pemulihan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM

KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi.

7. Akselerasi pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan serta perluasan lapangan pekerjaan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.
8. Menjaga iklim investasi melalui melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi.
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/green economy yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan ramah lingkungan serta inklusif secara sosial.
10. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di pedesaan.

Adapun Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Provinsi Jawa timur dan Kabupaten Pasuruan dapat di lihat pada Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Keterkaitan Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan

No	Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Pasuruan
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata.	Peningkatan pelayanan dasar masyarakat
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan.	Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran

No	Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Pasuruan
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi.	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup	
7	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan prinsip-prinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif.

Struktur keuangan daerah yang tertuang dalam APBD meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan daerah bersumber dari:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah;
3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan;

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya.

Belanja daerah dialokasikan untuk:

1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya;
3) Belanja Tak Terduga.
4) Belanja Transfer

Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Arah kebijakan pendapatan daerah, khususnya dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024 antara lain:

1. Evaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
3. Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
4. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);

5. Pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
6. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
7. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
8. Optimalisasi kinerja BUMD maupun kinerja penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mampu meningkatkan dividen yang diterima;
9. Peningkatan sinergitas, koordinasi dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah dengan instansi terkait;
10. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran dengan menggunakan fasilitas e - commerrce serta kemudahan dalam memperoleh layanan informasi;
11. Pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
12. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
13. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Asumsi yang digunakan dalam penghitungan pendapatan adalah sebagai berikut:

a. Komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dipengaruhi oleh tingkat perekonomian Kabupaten Pasuruan;
b. Perekonomian diasumsikan kembali mulai beranjak normal pada tahun 2024;
c. Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah didasarkan atas asumsi konservatif;
d. Lain-lain pendapatan yang sah juga didasarkan atas proyeksi konservatif, mengalami pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya perekonomian.
e. Secara keseluruhan peningkatan PAD diproyeksikan meningkat sebesar 5 %.

Adapun realisasi, target, dan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2025 sebagaimana Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2025

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun Berjalan (2023)	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
1	**PENDAPATAN**	**3.364.856.320.688,61**	**3.352.368.857.825,30**	**3.515.293.142.871,00**	**3.454.548.548.837,00**	**3.483.043.062.241,00**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**701.199.341.703,47**	**736.238.743.114,30**	**680.598.855.939,00**	**721.944.621.196,00**	**761.113.700.600,00**
1.1.1	Pajak daerah	393.593.785.426,11	452.520.753.582,18	430.439.779.780,00	463.504.992.586,00	508.244.194.056,00
1.1.2	Retribusi daerah	30.094.738.924,33	33.794.826.500,12	40.223.264.159,00	241884780706,00	41.603.712.304,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.777.764.881,00	4.829.702.733,00	4.654.760.005,00	4.654.760.005,00	4.654.760.005,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	272.733.052.472,03	245.093.460.299,00	205.281.051.995,00	11.900.087.899,00	206.611.034.235,00
1.2	**Pendapatan Transfer**	**2.452.634.490.954,14**	**2.567.448.223.132,00**	**2.765.969.308.336,00**	**2.660.704.383.045,00**	**2.665.204.383.045,00**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.175.979.517.096,00	2.316.302.794.650,00	2.438.753.338.000,00	2.438.753.338.000,00	2.438.753.338.000,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	276.654.973.858,14	251.145.428.482,00	327.215.970.336,00	221.951.045.045,00	226.451.045.045,00
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**211.022.488.031,00**	**48.681.891.579,00**	**68.724.978.596,00**	**71.899.544.596,00**	**56.724.978.596,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	27.286.176.486,00	1.892.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan	183.736.311.545,00	46.789.891.579,00	68.724.978.596,00	71.899.544.596,00	56.724.978.596,00

Sumber: BPKPD Kabupaten Pasuruan 2023

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka belanja daerah harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan daerah oleh Pemerintah Daerah serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Belanja daerah diarahkan untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah satu tahun ke depan oleh karena itu penyusunan anggaran belanja daerah harus menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Hal ini mengandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran daerah. Belanja daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja daerah harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Terkait dengan belanja daerah, Permasalahan utama yang dihadapi adalah: (i) masih terbatasnya ruang gerak fiskal yang disebabkan oleh belanja-belanja yang bersifat wajib; (ii) regulasi dan petunjuk teknis pemerintah pusat terkait pengelolaan belanja daerah dengan sumber dana perimbangan relatif berubah ubah dari tahun ke tahun; (iii) masih belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan belanja daerah yang tercermin dari masih lebih rendahnya realisasi terhadap target, terutama untuk belanja modal; (iv) belum optimalnya pelaksanaan sistem pengelolaan belanja daerah; dan (v) masih rendahnya efektivitas dan efesiensi belanja daerah.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan diatas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan belanja daerah secara umum disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun

mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan. Selanjutnya kebijakan belanja daerah juga diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

   Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai melebihi 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan dalam hal pengalokasian Belanja Pegawai di Kabupaten Pasuruan telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu sebesar 1.084.655.107.476 dari Total APBD 3.651.291.784.754;
2. Belanja Daerah untuk pengadaan Barang dan Jasa diarahkan untuk meningkatkan penggunaan produk UMKM, produk dalam negeri, atau penggunaan produk yang mempunyai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25 %, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 208 dan peraturan Presiden nomor 24 Tahun 2018;
3. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Belanja tidak terduga diarahkan guna menyediakan anggaran untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak sesuai karekteristik masing-masing Pemerintah Daerah;
5. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
6. Belanja daerah merupakan belanja Perangkat Daerah yang diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat;

7. Belanja daerah urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar Pendidikan (alokasi anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah) dimana Kabupaten Pasuruan mengalokasikan sebesar 701.440.878.114 dari total APBD , Bidang Kesehatan (anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji) yang dialokasikan sebesar 242.254.928.309 dari total APBD, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja daerah diutamakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian target RPD Kabupaten Pasuruan 2024 – 2026;
8. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional. Program strategis dimaksud antara lain lanjutan pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19 khususnya di sektor pariwisata dan sektor UMKM;
9. Kebijakan dalam upaya penanganan dari OPT pada tanaman pangan dan hortikultura dilakukan sekolah lapang pengendalian hama terpadu, sekolah lapang agensi hayati, sekolah lapang iklim serta gerakan pengendalian (Gerdal) secara serentak terhadap serangan hama penyakit disuatu wilayah, sedangkan untuk tanaman perkebunan dilakukan dengan sekolah lapang pengendalian hama terpadu, mitigasi iklim, Climate Friendly Farming [CFF];
10. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan;
11. Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi urusannya;
12. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

13. Besarnya plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja;
14. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, selanjutnya dituangkan dalam format Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021-2025

No	Uraian		Jumlah			
		Realisasi Tahun (2021)	Realisasi Tahun (2022)	Target Tahun Berjalan (2023)	Proyeksi Tahun (2024)	Proyeksi Tahun (2025)
5	**BELANJA**	**3.273.759.884.343,00**	**3.450.040.247.082,16**	**3.912.826.536.349,00**	**3.651.291.784.754,00**	**3.554.786.298.158,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.228.563.488.253,00**	**2.343.945.791.110,45**	**2.775.916.777.566,00**	**2.692.596.718.121,00**	**2.568.343.594.388,00**
5.1.1	Belanja Pegawai	1.107.837.622.596,00	1.133.803.924.679,00	1.344.049.702.858,00	1.304.286.052.951,00	1.058.155.107.476,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	931.053.246.192,00	1.016.509.247.583,00	1.199.613.117.763,00	993.153.474.882,00	1.345.261.868.752,00
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	156.848.191.841,00	165.372.279.498,45	214.452.606.945,00	387.697.851.480,00	146.976.618.160,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	32.824.427.624,00	28.260.339.350,00	17.801.350.000,00	7.459.338.808,00	17.950.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**376.073.722.205,00**	**476.867.550.144,71**	**481.539.430.790,00**	**281.591.216.400,00**	**339.488.410.194,00**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	70.000.000,00	0,00	10.750.000.000,00	4.800.000.000,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.357.240.550,00	185.360.760.023,40	145.700.341.956,00	48.865.912.167,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	124.218.986.593,00	164.196.619.083,72	138.771.668.985,00	96.948.211.053,00	0,00

No	Uraian		Jumlah			
		Realisasi Tahun (2021)	Realisasi Tahun (2022)	Target Tahun Berjalan (2023)	Proyeksi Tahun (2024)	Proyeksi Tahun (2025)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	118.793.505.162,00	126.174.394.637,59	184.527.819.839,00	130.971.411.180,00	0,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	633.989.900,00	1.135.776.400,00	1.789.600.010,00	5.682.000,00	0,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (BLUD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**33.867.748.961,00**	**11.345.474.996,00**	**38.192.672.300,00**	**40.866.159.361,00**	**44.135.452.110,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**635.254.924.924,00**	**617.881.430.831,00**	**617.177.655.693,00**	**636.237.690.872,00**	**602.818.841.466,00**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	40.361.924.322,00	41.704.880.895,00	47.007.207.368,00	50.459.294.582,00	54.984.790.636,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	594.893.000.602,00	576.176.549.936,00	570.170.448.325,00	585.778.396.290,00	547.834.050.830,00
SURPLUS/DEFISIT		**91.096.436.345,61**	**(97.671.389.256,86)**	**(397.533.393.478,00)**	**(196.743.235.917,00)**	**(71.743.235.916,98)**

Sumber: BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2023

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2022, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah dapat dialokasikan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Kebijakan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 diarahkan sebagai berikut:

1. Proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2024 diasumsikan turun dari Tahun 2023 dikarenakan adanya penurunan SiLPA;
2. Proyeksi alokasi untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.3.256.764.083
3. Kebijakan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan dalam Perda dengan prinsip kehati-hatian;
4. Penguatan pengelolaan dana bergulir; dan
5. Menjaga agar keuangan daerah dan apabila terdapat defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun 2021-2025

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun (2021)	Realisasi Tahun (2022)	Target Tahun Berjalan (2023)	Proyeksi Tahun (2024)	Proyeksi Tahun (2025)
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**					
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	281.149.231.476,43	372.245.667.822,04	400.790.157.561,00	200.000.000.000,00	75.000.000.000,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**					
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	3.256.764.083,00	3.256.764.083,00	3.256.764.083,00

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun (2021)	Realisasi Tahun (2022)	Target Tahun Berjalan (2023)	Proyeksi Tahun (2024)	Proyeksi Tahun (2025)
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		**281.149.231.476,43**	**372.245.667.822,04**	**397.533.393.478,00**	**196.743.235.917,00**	**71.743.235.917,00**
SELISIH LEBIH ANGGARAN TAHUN BERJALAN		**372.245.667.822,04**	**274.574.278.565,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber: BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2023

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Berdasarkan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

Tujuan		Sasaran	
1	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah	1.1.	Meningkatnya produksi sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah
		1.2.	Meningkatnya Iklim Investasi
		1.3.	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastrukstur wilayah
		1.4.	Meningkatnya kualitas lingkungan
2	Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	2.1.	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia
		2.2.	Menurunnya pengangguran
		2.3.	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga
		2.4.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi	3.1.	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
		3.2.	Meningkatnya birokrasi yang kapabel
		3.3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber : RPD Kabupaten Pasuruan Th. 2024-2026

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah tahun 2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2024 sesuai RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 *'Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan'* dan tema pembangunan tahun 2024 *'Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah'* serta identifikasi permasalahan strategis sebagaimana bab 2. Selain itu, tetap menjaga keselarasan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur (RKPD Tahun 2024) sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Timur

Tanggal 5 April 2023 Nomor 050/5871/201.2/2023 tentang Penyelarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2024.

Tabel 4.2.
Keselarasan Arah Kebijakan, Tema Pembangunan,
Permasalahan Strategis-Prioritas Pembangunan Tahun 2024

RPD Tahun 2024-2026 ARAH KEBIJAKAN Tahun 2024 ***Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan***	
RKPD Tahun 2024 Tema Pembangunan ***Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah***	
Permasalahan Strategis Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
Belum optimalnya cakupan infrastruktur dasar	01. Peningkatan pelayanan dasar masyarakat
Masih rendahnya rata-rata dan harapan lama sekolah	
Belum optimalnya implementasi SAKIP	02. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel
Belum optimalnya penyelenggaraan satu data	
Masih rendahnya indeks profesionalitas ASN	
Belum optimalnya pemanfaatan mal pelayanan publik	
Masih rendahnya daya saing produk unggulan	03. Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal
Belum optimalnya pengelolaan potensi investasi	
Meningkatnya potensi konflik sosial dampak pemilu dan pilkada serentak	
Masih rendahnya kualitas air permukaan, udara, dan tutupan lahan	
Masih rendahnya kompetensi angkatan kerja	04. Penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran
Belum optimalnya pendidikan pranikah	
Masih belum terbangunnya sistem informasi ketahanan pangan daerah	

Sumber : Hasil Analisis Tim

Tabel 4.3.
Persandingan Tema Pembangunan
Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Pusat

RKPD Kab. Pasuruan Tahun 2024	RKPD Prov. Jatim Tahun 2024	RKP Tahun 2024
TEMA		
Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif Menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak	Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Sumber: RKPD Kab. Pasuruan, RKPD Jatim, RKP, diolah

Tabel 4.4.
Persandingan/Pemetaan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Pusat

RKPD Kab. Pasuruan Tahun 2024	RKPD Prov. Jatim Tahun 2024	RKP Tahun 2024
PRIORITAS PEMBANGUNAN		
Prioritas pembangunan daerah	**Prioritas pembangunan daerah**	**Arah kebijakan pembangunan nasional**
PPD-1. Peningkatan pelayanan dasar masyarakat	Bhakti – 1 : Jatim Sejahtera. "Mengentaskan kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial"	(01). Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
PPD-2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Bhakti – 2 : Jatim Kerja. "Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi"	(02). Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,
PPD-3. Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal	Bhakti – 3 : Jatim Cerdas dan Sehat. "Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas."	(03). Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
PPD-4. Penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran	Bhakti – 4 : Jatim Akses." Membangun Infrastruktur dalam rangka Pengembangan Wilayah Terpadu dan Keadilan Akses bagi Masyarakat Pesisir dan Desa Terluar"	(04). Penguatan daya saing usaha
	Bhakti – 5 Jatim Berkah. "Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis nilainilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas."	(05). Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
	Bhakti – 6 : Jatim Agro. "Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan."	(06). Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
	Bhakti – 7 : Jatim Berdaya. "Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa."	(07). Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara
	Bhakti – 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."	(08). Pelaksanaan pemilu 2024
	Bhakti – 9 : Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	

Sumber: RKPD Kab. Pasuruan, RKPD Jatim, RKP, diolah

Prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dijabarkan melalui beberapa strategi yang dilaksanakan bersama secara sinergis oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. PPD-1. Peningkatan pelayanan dasar masyarakat, dijabarkan melalui strategi:
   a. Peningkatan kualitas pendidikan formal dan kesetaraan (kejar paket A/B/C), dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
   b. Peningkatan pembinaan keluarga khususnya tentang pangan dan gizi keluarga, dilaksanakan Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
   c. Peningkatan kualitas pelayanan dan SDM kesehatan serta sistem rujukan, dilaksanakan Dinas Kesehatan.
   d. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, serta pengurangan permukiman kumuh, dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
   e. Peningkatan antisipasi timbulnya konflik sosial dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak, dilaksanakan Satpol PP dan Bakesbangpol.
2. PPD-2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, dijabarkan melalui strategi:
   a. Peningkatan penerapan sistem merit, dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
   b. Peningkatan pelayanan publik dan inovasi daerah, dilaksanakan perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik, kecamatan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Bappelitbangda atau sebutan lain.
   c. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah, dilaksanakan Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bappelitbangda atau sebutan lain.
   d. Peningkatan pengelolaan satu data, dilaksanakan Dinas Kominfo, dan Bappelitbangda atau sebutan lain.
   e. Peningkatan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, dilaksanakan Inspektorat.
   f. Peningkatan pelayanan Perkantoran Pemda dan konektifitas pelayanan Bangil sebagai ibukota Kabupaten, dilaksanakan Dinas Perhubungan, Dinas SDA Cipta Karya, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, dan Dinas Lingkungan Hidup

g. Peningkatan Perencanaan SPBE dan penyediaan insfrastruktur teknologi informasi, dilaksanakan Dinas Kominfo.

3. PPD-3. Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal, dijabarkan melalui strategi:
   a. Pengembangan kawasan ekonomi strategis agropolitan dan minapolitan, dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
   b. Pengembangan DTW (Daya Tarik Wisata) dan Kawasan Destinasi Pariwisata, dilaksanakan Dinas Pariwisata.
   c. Pengembangan industri kreatif kriya, kuliner, fashion, dan desain komunikasi visual, dilaksanakan Dinas Pendidikan, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pariwisata.
   d. Iklim investasi yang kondusif, dilaksanakan Dinas PMPT-SP
   e. Pengembangan kawasan industri wilayah timur, dilaksanakan Dinas Perindag, serta Dinas SDA, Citpa Karya, dan Tata Ruang.
   f. Peningkatan infrastruktur dan aksessibilitas wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat dilaksanakan Dinas Perhubungan, Dinas Binas Marga dan Bina Konstruksi, Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
   g. Peningkatan kualitas lingkungan dan meminimalkan dampak kerawanan bencana dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD.
   h. Pengembangan kawasan tematik dan kluster UMK halal, aman dan berkualitas, dilaksanakan Dinas Perindag, Dinas Koperasi-UKM, Dinas Pariwisata, dan DPMPTSP.
4. PPD-4. Penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran, dijabarkan melalui strategi:
   a. Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, dilaksanakan Dinas Sosial.
   b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi-UKM.
   c. Meningkatkan wirausaha ekonomi kreatif, lembaga ekonomi desa, dilaksanakan Dinas Koperasi-UKM dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

d. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja, dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan.
e. Peningkatan peran aktif pemuda, dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga
f. Peningkatan pemberdayaan perempuan, dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
g. Meningkatkan literasi masyarakat, dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dalam rangka mewujudkan secara nyata prioritas pembangunan daerah tahun 2024, ditetapkan beberapa proyek strategis, sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Proyek Strategis Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Proyek Strategis	Progam/Kegiatan/ Subkegiatan	PD Pelaksana
1	Peningkatan pelayanan dasar masyarakat	Peningkatan kualitas dan kuantitas PKBM	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN,	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	
			Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	
			Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	
			Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	
			Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Proyek Strategis	Progam/Kegiatan/ Subkegiatan	PD Pelaksana
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	
			Pembangunan Laboratorium	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	
			Pemeliharaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
			Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	
		Jaminan perlindungan kesehatan masyarakat (UHC) (target 95%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
			Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
		Penambahan ODF (20 desa)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DPKP
			Penyelenggaraan PSU Perumahan	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Proyek Strategis	Progam/Kegiatan/ Subkegiatan	PD Pelaksana
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
		Penurunan prevalensi stunting (target 9,7 %)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pemberdayaan Peerempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP)	
			Program Pembinaan Keluarga berencana	
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perdesaan	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Proyek Strategis	Progam/Kegiatan/ Subkegiatan	PD Pelaksana
			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (Pelatihan KRPL Hidroponik)	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Proyek Strategis	Progam/Kegiatan/ Subkegiatan	PD Pelaksana
				dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
			Kelas Parenting Pencegahan untuk Orang Tua/Wali Murid PAUD	
			TOT Penyiapan Makanan Sehat dan Bergizi bagi Pendidik PAUD	
			Bimtek Kelola Gizi Seimbang Pencegahan Stunting bagi Pendidik PAUD	
			Gerakan Pojok UKS pada Satuan PAUD untuk Membiasakan PHBS	
		Penurunan AKI-AKB (target AKI 77 per 100.000 KH, target AKB 3,2 per 1000 KH)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
2	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Portal satu data	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Disnas Komunikasi dan Informatika
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			Kordinasi, Sinkronisasi, pengumpulan pengolahan analisa diseminasi data Statistik Sektoral	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	
			Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
			Penyelenggaraan sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	
		Pusat pengembangan SDM aparatur	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM
			Pengembangan Kompetensi ASN	
			Pengelolaan Assessment Center	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Proyek Strategis	Progam/Kegiatan/ Subkegiatan	PD Pelaksana
		Pelaksanaan pilkada	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Bakesbang-pol
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	
		Penataan Kota Bangil	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
			Penyelenggaraan Penataan bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kab/Kota	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kab/Kota	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bagunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab / Kota	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Proyek Strategis	Progam/Kegiatan/ Subkegiatan	PD Pelaksana
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Teknis dan dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	
			Normalisasi / Restorasi Sungai	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	
			Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	
			Peningkatan Saluran drainse Lingkungan	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Dinas Perhubungan
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
			Rehabilitasi Jalan	
			Pemeliharaan Berkala Jalan	
			Pemeliharaan Rutin Jalan	
			Pembangunan Jalan	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH
			Pengelolaan Sampah	
			Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Proyek Strategis	Progam/Kegiatan/ Subkegiatan	PD Pelaksana
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
3	Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal	Pembangunan kawasan pariwisata arjuno agro technopark	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
			Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
			Pengembangan Ekosistem Eknomi Kreatif	
			Pengembangan Pendidikan	
			Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			Rekonstruksi jalan	
			Pemeliharaan berkala jalan	
			Pembangunan Jalan	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bagunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Pengelolaan SDA dan bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Proyek Strategis	Progam/Kegiatan/ Subkegiatan	PD Pelaksana
			PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan pedesaan.	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	
			Pendataan potensi dan Pengembangan usaha mikro	
			Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Pembangunan Prasarana Pertanian	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Proyek Strategis	Progam/Kegiatan/ Subkegiatan	PD Pelaksana
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKPD
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Pengamanan Barang Milik Daerah	
			PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**DLH**
			Pengelolaan Sampah	
			Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
			Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	
			PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Dinas Perhubungan**
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	
4	Penanggulang-an kemiskinan dan penurunan pengangguran	Penghapusan kemiskinan ekstrem (target 0%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Proyek Strategis	Progam/Kegiatan/ Subkegiatan	PD Pelaksana
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal / Kesetaraan	
			Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Proyek Strategis	Progam/Kegiatan/ Subkegiatan	PD Pelaksana
			Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	
			Pembangunan Unit Air Baku	
			Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	
			Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	
			Rehabilitasi Unit Air Baku	
			Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Pembangunan Bendung Irigasi	
			Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	
			Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	
			Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
			Rehabilitasi Bendung Irigasi	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	
			Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	
			Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	
			Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Proyek Strategis	Progam/Kegiatan/ Subkegiatan	PD Pelaksana
			Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
			Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
			Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	
			Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Kontijensi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Proyek Strategis	Progam/Kegiatan/ Subkegiatan	PD Pelaksana
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Penyediaan Permakanan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Alat Bantu	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Pemberian Layanan Rujukan	
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	
			Penyediaan Permakanan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Alat Bantu	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Proyek Strategis	Progam/Kegiatan/ Subkegiatan	PD Pelaksana
			Pemberian Layanan Rujukan	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
			Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
			Rujukan Anak-Anak Terlantar	
			Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Makanan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
			Pelayanan Dukungan Psikososial	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama untuk Penyediaan Infrastruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Proyek Strategis	Progam/Kegiatan/ Subkegiatan	PD Pelaksana
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
			Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	
			Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Proyek Strategis	Progam/Kegiatan/ Subkegiatan	PD Pelaksana
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Dnas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	
			Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
			Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Proyek Strategis	Progam/Kegiatan/ Subkegiatan	PD Pelaksana
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	
			Penataan Pendaftaran Penduduk	
			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
			Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	
			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	
			Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	
			Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Pelayanan Pencatatan Sipil	
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
			Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			Penyusunan Profil Kependudukan	
			Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
			Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Proyek Strategis	Progam/Kegiatan/ Subkegiatan	PD Pelaksana
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
			Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Proyek Strategis	Progam/Kegiatan/ Subkegiatan	PD Pelaksana
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
			Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
			Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Ksehatan Hewan
			Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	
			Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	
			Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Proyek Strategis	Progam/Kegiatan/ Subkegiatan	PD Pelaksana
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	

Sumber : RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Secara komprehensif gambaran umum rencana pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024 disajikan berupa grand design sebagaimana infrografis berikut ini:

Gambar 4.1 Grand Design RKPD Kabupaten Pasuruan 1

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2023

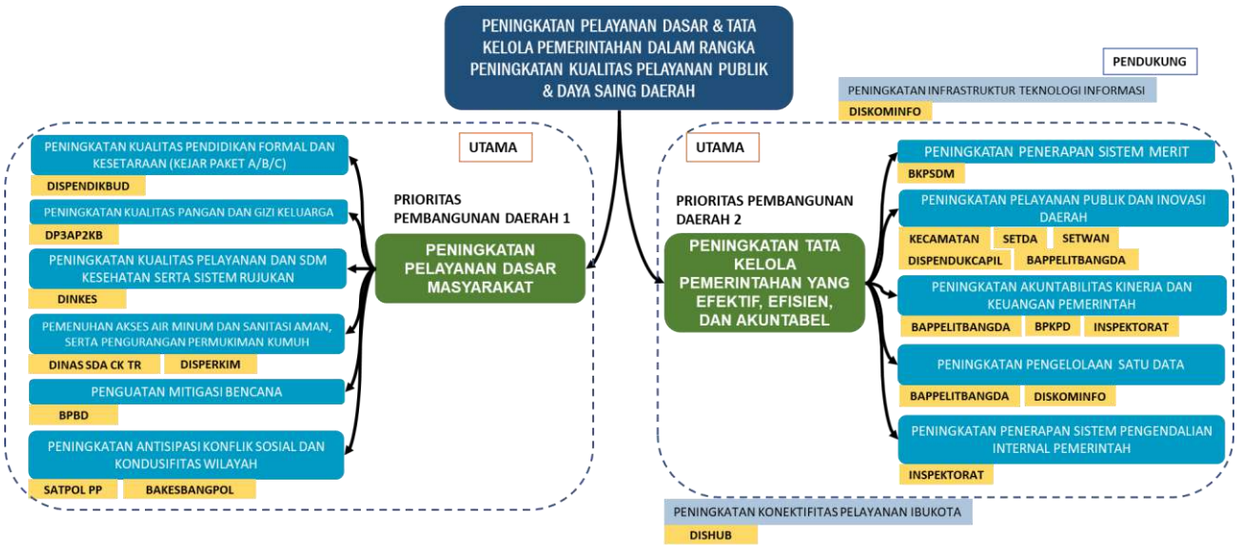

Gambar 4.2 Grand Design RKPD Kabupaten Pasuruan 2

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2023

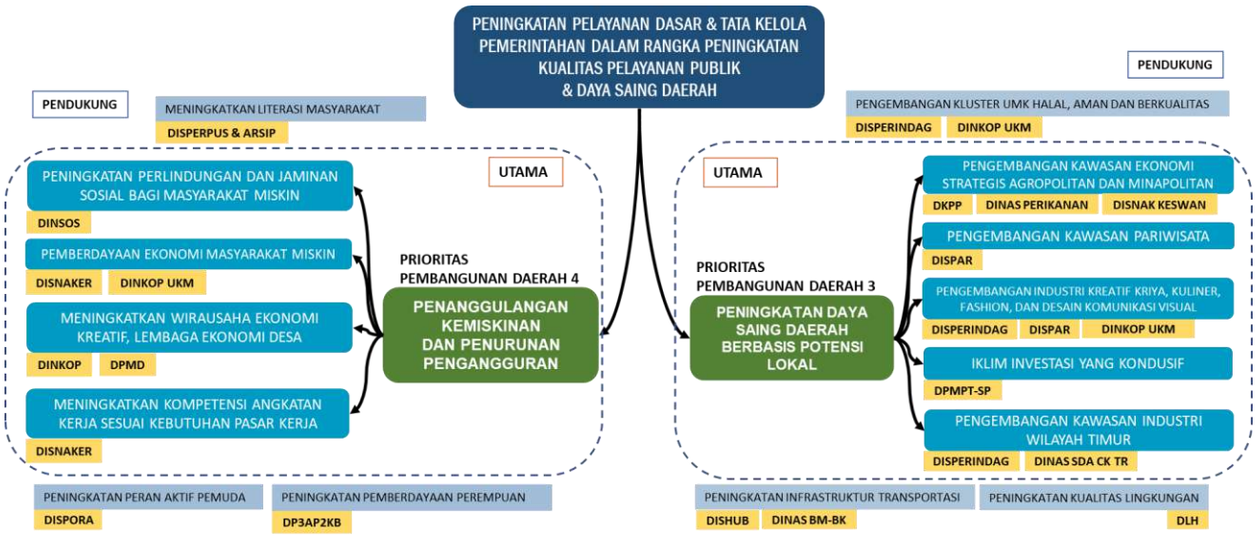

Gambar 4.3 Grand Design RKPD Kabupaten Pasuruan 3

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2023

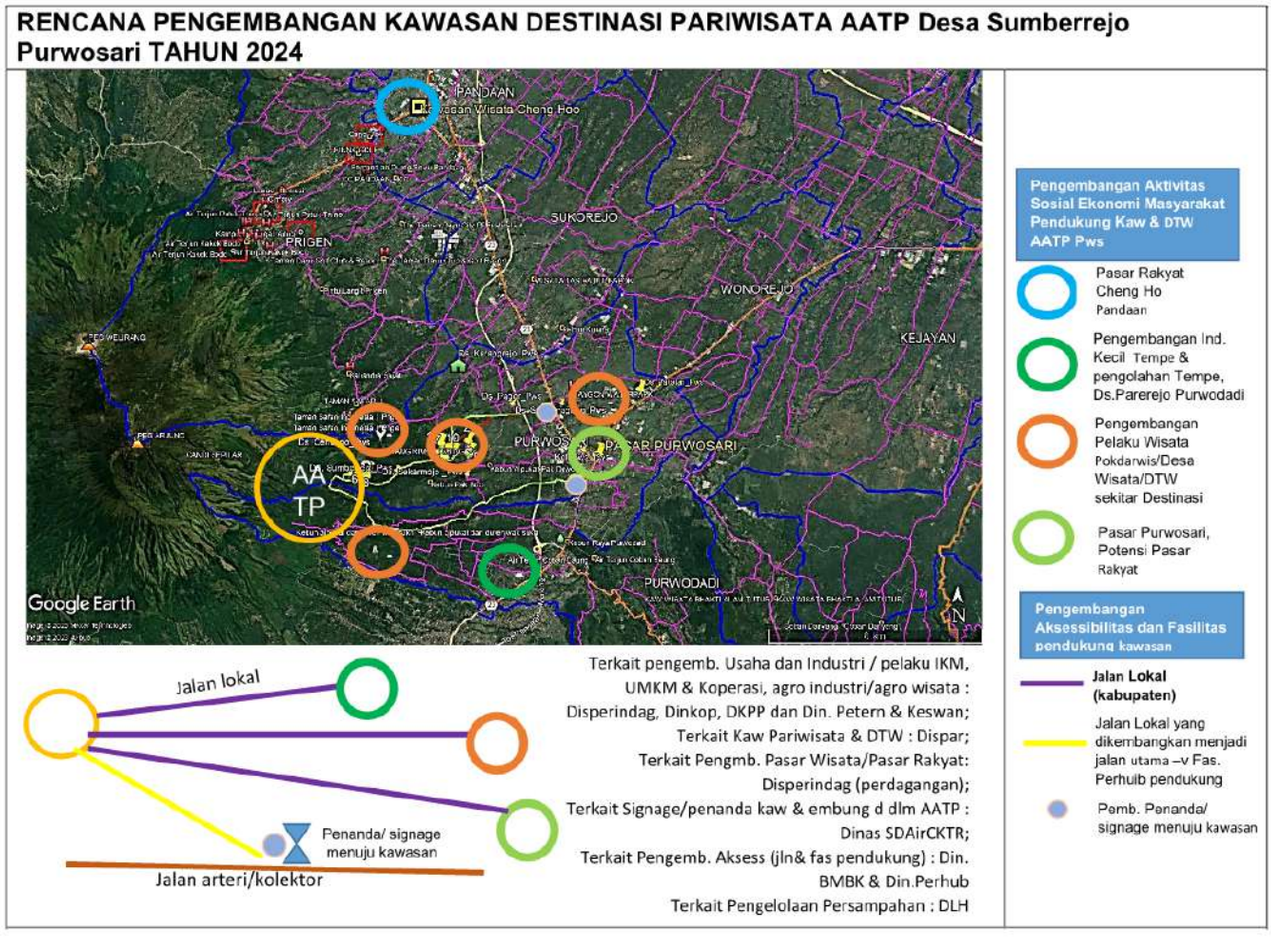

Kejadian wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di pertengahan tahun 2022, menjadi tantangan sekaligus ujian bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Langkah cepat kebijakan dan Tindakan pengobatan dapat meminimalkan kerugian pada peternak yang ternaknya terjangkit. Strategi melibatkan seluruh stage holder dengan instansi vertical, Kepolisian dan TNI dalam penutupan daerah tertular, pencegahan lalu lintas ternak, pengobatan terhadap ternak tertular, pemberian bantuan obat-obatan dan pakan terbukti berhasil mengendalikan penyebaran dan penyembuhan terhadap ternak yang terjangkit. Langkah lanjutan adalah dengan vaksinasi terhadap seluruh ternak, yang menghasilkan wabah melandai dan kejadian semakin sedikit

Langkah-langkah yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam penanganan wabah Penyakit Muut dan Kuku (PMK) adalah sebagai berikut:

I. KEWASPADAAN DINI

1. Membuat Nota Dinas terkait penanganan PMK di Kabupaten Pasuruan;
2. Mesosialisasikan ke Masyarakat untuk melaksanakan Kewaspadaan dini terhadap PMK dilaksanakan berdasar SE Bupati Pasuruan nomer 524.35/944/424.092/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Kewaspadaan Dini PMK;
3. Menetapkan dan membentuk Tim Gugus Tugas Penanganan PMK di Kabupaten Pasuruan berdasarkan SK Bupati Pasuruan No. 524.35/805/424.013/2022 tentang gugus tugas penanganan PMK di Kabupaten Pasuruan;
4. Melakukan pembatasan pemasukan sapi/kerbau dari deerah tertular (Jawa Tengah) dan Jawa Timur (Malang, Blitar dan Sidoarjo);
5. Melakukan tracing dan survaillance berbasis laporan masyarakat dengan melibatkan seluruh petugas lapangan dibidang kesehatan hewan;
6. Melakukan pengawasan secara ketat dan screening terhadap ternak yang akan dijual di Pasar Hewan;
7. Meningkatkan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
8. Menerapkan biosecurity kandang dan lingkungan peternakan dengan tindakan desinfeksi lingkungan serta melakukan kontrol vektor nyamuk, lalat dan caplak;
9. Menyediakan fasilitas posko PMK dan call center untuk kasus PMK di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Call center PMK 081277198131 dan call center Puskeswan 082310880990.

II. VAKSINASI

Vaksinasi terhadap ternak sapi potong dan sapi perah yang belum terkena wabah dan sudah sembuh. Jumlah alokasi dan realisasi vaksinasi PMK sampai dengan 22 Januari 2023 : berjumlah: 94.951 ekor dari target alokasi 144.800 ekor atau 65 %.

III. BANTUAN OBAT-OBATAN

Bantuan obat – obatan dan sarana prasarana pendukung pengendalian PMK dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pasuruan dan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dialokasikan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Pasuruan secara proporsional sesuai dengan populasi hewan rentan dan potensi kebutuhan dapat digunakan untuk ternak yang terinfeksi PMK, ternak yang dalam proses recoveri akibat dari PMK dan ternak sehat setelah vaksinasi untuk meningkatkan imunitas.

IV. BANTUAN PAKAN

Bantuan pakan dari Dinas Peternakan Provinsi sejumlah 564.600 kg yang dialokasikan untuk 11.292 ekor sapi perah di 4 kecamatan.

V. PEMASANGAN EARTAG

Pemasangan eartag berfungsi untuk mengetahui jumlah ternak dan jumlah ternak yang sudah tervaksin, sehingga vaksinasi yang dilakukan benar-benar efektif dan efisien. Jumlah alokasi dan realisasi penandaan eartag sampai dengan 21 Desember 2022: berjumlah 2.698 buah atau 38,69 % dari alokasi 32.600 buah.

VI. MONITORING DAN EVALUASI

Agar pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan wabah PMK dapat terlaksana dan bermanfaat secara maksimal maka;

a) Kepala Dinas melalui Kepala bidang Keswan harus melakukan pencatatan segala aktivitas dan biaya-biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan penanggulangan wabah PMK. Setiap bulan dilakukan pelaporan ke pemerintah Kabupaten Pasuruan seluruh pelaksanaan kegiatan;
b) Agar pengawalan pelaksanaan monev dapat maksimal maka dilibatkan tidak hanya tim internal pemerintah Kabupaten Pasuruan tetapi juga melibatkan tim dari Kejaksaan, Kepolisian dan TNI;
c) Hasil dari monev akan digunakan sebagai alat untuk perbaikan dan pembenahan dalam pelaksanaan selanjutnya.

VII. SUMBER DAYA

Sumberdaya yang digunakan serta dikerahkan untuk pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan wabah PMK, antara lain:

a) SDM

SDM dari PD terkait, Instansi vertikal (instansi penelitian, Kejaksaan, Polisi, TNI), Kelompok Tani, Akademisi (universitas), Perusahaan Swasta dan Personil lain yang termasuk dalm anggota Gugus Tugas PMK;

b) Keuangan

Sumber pendanaan yang digunakan dari: Anggaran dari Pemerintah Daerah (APBD Kabupaten, APBD Provinsi), Anggaran dari pemerintah Pusat (APBN).

Kebijakan Jarak lokasi Peternakan dengan Pemukiman, tergantung jenis dan usaha. Untuk perbibitan unggas minimal 200 m dari pemukiman dengan jarak ideal di 500 m (Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/OT.140/7/2011). Untuk kendang ternak di pemukiman, idealnya berjarak 10 m untuk menghindari bau. Kenyataan dimasyrakat, kandang berdempetan dengan tempat tinggal, tapi mereka tidak terganggu, karena sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Ketersedian Rumah Potong Hewan, UPT RPH Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mengelola 10 RPH. Dari 10 RPH di kabupaten Pasuruan tahun 2022 disembelih 6012 ekor dengan PAD retribusi yang dihasilkan Rp. 150.300.000.

Dalam rangka menyelaraskan dan mendukung Indikator Pembangunan Nasional (RKP), Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan bebrapa kegiatan untuk meningkatkan Nilai Tukar Nelayan, antara lain:

1. Bantuan sarana seperti alat tangkap (jaring, webbing), mesin perahu dan alat bantu alat tangkap;
2. Bantuan peningkatan daya dukung sumberdaya perikanan: rumah ikan, restocking benih ikan, penanaman mangrove;
3. Bantuan peningkatan pendapatan alternatif nelayan;
4. Pengolahan ikan atau rumput laut, olahan mangrove, kerajinan kekerangan;
5. Pembinaan ketrampilan nelayan dan akses permodalan;
6. Layanan rekomendasi BBM solar utk nelayan;
7. Sosialisasi, bimtek atau pelatihan dan pembinaan nelayan.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2024, disusun berdasarkan hasil proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari perencanaan pembangunan tingkat desa (Musrenbang Desa), perencanaan pembangunan tingkat kecamatan (Musrenbang RKPD di Kecamatan), Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten, serta memperhatikan usulan/masukan dari pihak legislatif. Dalam proses musyawarah perencanaan meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, *bottom up* dan *top down*, menghasilkan kesepakatan-kesepakatan tentang rencana program, kegiatan, dan subkegiatan. Rencana kerja berupa daftar rencana program, kegiatan, dan subkegiatan diprioritaskan yang mendukung tema pembangunan daerah tahun 2024, berdasarkan isu strategis daerah, dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 sebesar Rp.3.435.461.154.657,00 dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.75.000.000.000,00, sedangkan proyeksi belanja sebesar Rp.3.507.204.390.574,00 dengan proyeksi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.3.256.764.083,00.

Alokasi belanja tahun 2024 terdiri dari (a) belanja operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial; (b) belanja modal; (c) belanja tidak terduga; dan (d) belanja transfer.

Rincian proyeksi belanja Kabupaten Pasuruan tahun 2024, sebagai berikut :

a.	Belanja Operasi	Rp	2.529.102.897.715,00
	- Belanja Pegawai	Rp	1.083.655.107.476,00
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.281.521.172.079,00
	- Belanja Hibah	Rp	146.976.618.160,00
	- Belanja Bantuan Sosial	Rp	16.950.000.000,00
b.	Belanja Modal	Rp	338.941.988.086,00
c.	Belanja Tidak Terduga	Rp	40.866.159.361,00
d.	Belanja Transfer	Rp	598.293.345.412,00

Rincian belanja berdasarkan bidang urusan pemerintahan, program, kegiatan, dan subkegiatan disajikan pada Tabel 5.1.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Kinerja pemerintahan daerah diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU meliputi indikator kinerja Tujuan dan Sasaran RPD. IKD meliputi inidkator kinerja kunci (IKK) pada level *outcome* berdasarkan bidang urusan penyelenggaran pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penentuan target IKU tahun 2024 berdasarkan pada capaian tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023. Hal ini untuk menunjukkan bahwa penentuan target 2024 bersifat progresif dan selalu ingin mewujudkan kondisi yang lebih baik. Pada tahapan awal pelaksanaan RPD tahun 2024-2026, target tahun 2024 mengacu angka yang sama dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD. Pada beberapa indikator makro mempertimbangkan target yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi Jawa Timur. Capaian, proyeksi, dan target IKU Kabupaten Pasuruan tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagaimana Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Capaian, Proyeksi, dan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2024

No.	IKU	Satuan	Capaian 2022	Proyeksi 2023	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,32	5,81	5,86
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,96	8,69	8,42
3	Indeks Pembangunan Manusia	-	69,68	70,25	70,82
4	Indeks Gini	-	0,325	0,319	0,310
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,91	5,86	5,81
6	Pendapatan Perkapita	Ribu Rupiah	10.726	10.938	11.154

No.	IKU	Satuan	Capaian 2022	Proyeksi 2023	Target 2024
7	Indeks Reformasi Birokrasi	-	66,65 (B)	67,56 (B)	68,04 (B)
8	Indeks Wiliamson	-	0,264	0,258	0,251
9	Nilai PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)	Juta Rupiah	5.806.218,8	5.957.711,8	5.971.224,9
10	Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (ADHK)	Juta Rupiah	68.682.592,6	70.031.504,5	72.486.250,1
11	Nilai Investasi Daerah	Milyar Rupiah	12.600	8.790,47	9.300
12	Indeks Infrastruktur Wilayah	-	11,565	11,69	47,2675
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	59,78	61,142	62,504
14	Indeks Risiko Bencana	-	126,32	125,91	125,5
15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	90,94	91,11	91,22
16	Indeks Pembangunan Keluarga	-	55,21	56,60	57,1
17	Indeks Ketahanan Pangan	-	77,40	78,05	78,39
18	Nilai SAKIP	-	77,29 (BB)	79,28 (BB)	80,30 (A)
19	Opini BPK atas LKPD	-	WTP	WTP	WTP
20	Indeks Profesionalitas ASN	-	54,67	54,72	54,77
21	Indeks SPBE	-	2,04	2,50	2,50
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	90,32	90,35	90,40

Sumber : RPD Kab. Pasuruan 2024-2026

6.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

IKD meliputi indikator kinerja kunci pada urusan penyelanggaran pemerintahan daerah. Penetapan target 2024 mengacu pada dokumen RPD tahun 2024-2026 sebagaimana tabel 6.2.

Tabel 6.2
Capaian, Proyeksi, dan Target IKD Kabupaten Pasuruan
Tahun 2022-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2022	Proyeksi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah
	Urusan Pendidikan					
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	89,20	89,30	89,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	93,82	94	94,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	83,97	84,10	84,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	12,32	12,50	12,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Urusan Kesehatan					
5	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	0,0696	0,0696	0,0713	Dinas Kesehatan
6	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	%	0,0696	0,0696	0,0713	Dinas Kesehatan
7	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	88,89	88,89	100	Dinas Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2022	Proyeksi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah
8	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	102,63	100	100	Dinas Kesehatan
9	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,23	100	100	Dinas Kesehatan
10	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	103,15	100	100	Dinas Kesehatan
11	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100,50	100	100	Dinas Kesehatan
12	Persentase ana kusia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	Dinas Kesehatan
13	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,07	100	100	Dinas Kesehatan
14	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	94,24	100	100	Dinas Kesehatan
15	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90,16	100	100	Dinas Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2022	Proyeksi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah
16	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	109,13	100	100	Dinas Kesehatan
17	Persentase ODGJ beratyang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	103,55	100	100	Dinas Kesehatan
18	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuaistandar	%	102,65	100	100	Dinas Kesehatan
19	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniHIV sesuai standar	%	100,62	100	100	Dinas Kesehatan
	Uruan PU dan Penataan Ruang					
20	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	73,43	74,21	74,9	Dinas SDA-CITA
21	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	86,72	87,56	88,41	Dinas SDA-CITA

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2022	Proyeksi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah
22	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	81,81	81,82	81,83	Dinas SDA-CITA
23	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	30,93	31,19	31,76	Dinas SDA-CITA
24	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten /Kota	%	79,88	79,89	79,90	Dinas BM-BK
25	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	35	33	35	Dinas BM-BK
26	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	Dinas BM-BK
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
27	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	Dinas Perkim
28	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	14,75	17,51	21,19	Dinas Perkim
29	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	6	5,21	4,87	Dinas Perkim

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2022	Proyeksi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah
30	Jumlah perumahan yang sudah d ilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	Dinas Perkim
	Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
31	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	Satpol PP
32	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	Satpol PP
33	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	BPBD
34	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	BPBD
35	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	BPBD
36	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	97,38	100	100	Satpol PP
37	Waktu tanggap (response	%	100	100	100	Satpol PP

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2022	Proyeksi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah
	time) penanganan kebakaran					
	Urusan Sosial					
38	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pegemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator SPM)	%	67,8	73	78	Dinas Sosial
39	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	%	100	100	100	Dinas Sosial
	Urusan Ketenagakerjaan					
40	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	70,55	70,55	70,55	Disnaker
41	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	93	93,5	94	Disnaker
42	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	128.152.480	128.319.078	128.487.176	Disnaker
43	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala	%	9	9,49	9,58	Disnaker

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2022	Proyeksi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah
	Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)					
44	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	40,48	40,5	41	Disnaker
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
45	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	23,05	23,1	23,1	Dinas P3A-P2KB
46	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,012	0,01	0,008	Dinas P3A-P2KB
47	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	9,76	9,5	9,2	Dinas P3A-P2KB
	Urusan Pangan					
48	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	100,56	100,56	101,56	Dinas KP-Pertanian
	Urusan Pertanahan					
49	Persentase penetapan tanah	%	100	100	100	Dinas Perkim

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2022	Proyeksi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah
	untuk pembangunan fasilitas umum					
50	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Ha	0	2,113	4,8	Dinas Perkim
51	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	m2	100	671,802	1.000,21	Dinas Perkim
52	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Sengketa	0	3	3	Dinas Perkim
	Urusan Lingkungan Hidup					
53	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	22,74	35	45	Dinas LH
54	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	50	51	52	Dinas LH
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
55	Perekaman KTP elektronik	%	98,65	98,73	98,82	Dispenduk-capil

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2022	Proyeksi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah
56	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	24,19	30	35	Dispenduk-capil
57	Kepemilikan akta kelahiran	%	80,63	85	87,5	Dispenduk-capil
58	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	7,27	9,09	10,1	Dispenduk-capil
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
59	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	0	142	132	Dinas PMD
60	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	22,37	25,35	28,79	Dinas PMD
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
61	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,04	2	1,98	Dinas P3A-P2KB
62	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	73,24	73,5	73,7	Dinas P3A-P2KB
63	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	13,25	13	12,8	Dinas P3A-P2KB
	Urusan Perhubungan					

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2022	Proyeksi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah
64	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	39	39	42	Dishub
65	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	0,36	0,35	0,35	Dishub
	Urusan Komunikasi dan Informatika					
66	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	58	64	70	Dinas Kominfo
67	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	35	36	38	Dinas Kominfo
68	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	17,16	20,4	21,7	Dinas Kominfo
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
69	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	21,05	21,93	22,81	Dinas Koperasi UKM
70	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	0,16	0,17	0,18	Dinas Koperasi UKM

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2022	Proyeksi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah
	Urusan Penanaman Modal					
71	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	51,8	1	1,01	Dinas PMPT-SP
	Urusan Pemuda dan Olah raga					
72	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0	0,04	0,013	Dispora
73	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	8,83	8,9	9	Dispora
74	Peningkatan prestasi olahraga	%	15	20	20	Dispora
	Urusan Statistik					
75	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	61,54	61,54	62	Dinas Kominfo
76	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	61,54	61,54	62	Dinas Kominfo
	Urusan Persandian					
77	Tingkat keamanan	%	48,37	56,26	62,02	Dinas Kominfo

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2022	Proyeksi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah
	informasi pemerintah					
	Urusan Kebudayaan					
78	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	7,52	7,60	7,70	Dinas P dan K
	Urusan Perpustakaan					
79	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	57,7	84,50	85	Dinas Perpusip
80	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	8	8,50	8,60	Dinas Perpusip
	Urusan Kearsipan					
81	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	-	75	75	78	Dinas Perpusip
82	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-	0,17	0,19	0,2	Dinas Perpusip
	Urusan Kelautan dan Perikanan					

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2022	Proyeksi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah
83	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	44.041,87	44.064,37	44.339,52	Dinas Perikanan
	Tangkap	Ton	23.604,10	23.642,50	23.713,43	
	Budidaya	Ton	20.437,77	20.421,87	20.626,09	
	Urusan Pariwisata					
84	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	17	19	20	Dinas Pariwisata
85	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	17	19	20	Dinas Pariwisata
86	Tingkat hunian akomodasi	Rp	200.000	210.000	220.500	Dinas Pariwisata
87	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Rp	n/a	3.384.025	3.722.427	Dinas Pariwisata
88	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rp	350.000.000	375.000.000	425.000.000	Dinas Pariwisata
	Urusan Pertanian					
89	Produktivitas pertanian per hektar per tahun					Dinas KP-Pertanian
	Tanaman Pangan :					
	Padi	Ton/Ha	6,03	6,03	6,0722	
	Jagung	Ton/Ha	6,41	6,41	6,46	
	Kedelai	Ton/Ha	1,91	1,91	1,92	

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2022	Proyeksi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah
	Tanaman Buah Tahunan	Kg/Pohon	90,17	90,17	90,8	
	Tanaman Sayur	Ton/Ha	35,67	35,9	36,13	
	Tanaman Hias	Tangkai/m2	19,9	20,04	20,18	
90	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	2	2	2	Dinas Peternakan - Keswan
	Urusan Perdagangan					
91	Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	129,42	92,27	92,73	Dinas Perindag
	Urusan Perindustrian					
92	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	9,88	9,89	9,9	Dinas Perindag
93	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	%	30	30	30	Dinas Perindag
94	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	Dinas Perindag

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2022	Proyeksi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah
	Unsur Pendukung : Sekretariat Daerah					
95	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	Setda
6	Persentase jumlah pengadaan yangdilakukan dengan metode kompetitif	%	13,44	15	17	Setda
97	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	43,18	50	55	Setda
98	Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	567,38	5	10	Setda
	Unsur Penunjang : Kepegawaian					
99	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%				BKPSDM
	a. Pendidikan Tinggi	%	66,35	66,5	66,65	
	b. Menengah	%	29,37	29,38	29,39	
	c. Dasar	%	4,28	4,27	4,26	

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2022	Proyeksi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah
100	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	13,11	13,12	13,13	BKPSDM
101	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	43,69	43,74	43,79	BKPSDM
	Unsur Penunjang : Keuangan					
102	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	8,36	8,36	9,17	BPKPD
103	Rasio PAD thd Belanja	%	22,41	22,41	20,04	BPKPD
104	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	86,82	86,82	77,08	BPKPD
105	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-5,3516	-5,3516	-7,85	BPKPD
106	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	9,75	9,75	1,5	BPKPD
107	Manajemen Aset	-	2.731.023	2.731.023	2.790.105	BPKPD
	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	-	a	Ya	Ya	
	Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	-	Ya	Ya	Ya	
	Apakah ada proses	-	Ya	Ya	Ya	

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2022	Proyeksi 2023	Target 2024	Perangkat Daerah
	inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)					
	Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	-	Tidak	Tidak	Tidak	
108	Rasio angaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	9,87	9,87	1,98	BPKPD
	Unsur Pengawasan					
109	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	Level3	Level 3	Level 3	Inspektorat
110	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	Level2	Level 3	Level 3	Inspektorat

Sumber : RPD Kab Pasuruan 2024-2026

BAB VII
P E N U T U P

RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024 merupakan tahapan rencana pembangunan tahunan, yaitu sebagai penjabaran tahun pertama RKP Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Oleh karena itu agar tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD dapat terwujud, maka ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan RKPD:

1. Keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pembangunan sangat diperlukan untuk mewujudkan target pembangunan daerah;
2. Pemerintah Daerah bersama seluruh Perangkat Daerah (PD), berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 secara sinergis dan terintegrasi dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha, berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penetapan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024, selanjutnya menjadi pedoman dalam rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Penetapan Renja PD tahun 2024 paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan RKPD;
2. Penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024, melalui pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD untuk mendapatkan kesepakatan;
3. Perubahan-perubahan asumsi, khususnya dalam penambahan potensi pendapatan daerah dalam pembahasan KUA/PPAS, tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD.

WAKIL BUPATI PASURUAN,

KH. MUJIB IMRON, SH,MH.

Tabel 5
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			**1.126.352.036.789,00**		**1.218.672.503.189,00**
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.124.352.036.789,00		1.211.349.603.189,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.124.352.036.789,00		1.211.349.603.189,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	870.636.965.954,00	100 %	870.636.965.954,00
1	01	01	201		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase bahan/data penyusunan. laporan capaian kinerja. evaluasi program kegiatan dan anggaran yang disiapkan	100 %	2.160.000.000,00	100 %	2.160.000.000,00
1	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	660.000.000,00	13 Dokumen	660.000.000,00
1	01	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00
1	01	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	200.000.000,00	2 Dokumen	200.000.000,00
1	01	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	200.000.000,00	2 Dokumen	200.000.000,00
1	01	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00
1	01	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	600.000.000,00	12 Laporan	600.000.000,00
1	01	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	300.000.000,00	4 Laporan	300.000.000,00
1	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dikelola secara tertib	100 %	860.931.965.954,00	100 %	860.931.965.954,00
1	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5647 Orang/bulan	751.956.576.689,00	5647 Orang/bulan	751.956.576.689,00
1	01	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	60.000.000.000,00	12 Dokumen	60.000.000.000,00
1	01	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00
1	01	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00
1	01	01	202	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	100.000.000,00
1	01	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase data/bahan administrasi barang milik daerah perangkat daerah yang disiapkan	100 %	300.000.000,00	100 %	300.000.000,00
1	01	01	203	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	86 Laporan	200.000.000,00	86 Laporan	200.000.000,00
1	01	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan	100.000.000,00	15 Laporan	100.000.000,00
1	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase data/bahan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disiapkan	100 %	3.175.000.000,00	100 %	3.175.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	01	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	125 Paket	100.000.000,00	125 Paket	100.000.000,00
1	01	01	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	100.000.000,00	10 Dokumen	100.000.000,00
1	01	01	205	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	100.000.000,00	5 Dokumen	100.000.000,00
1	01	01	205	05	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	100.000.000,00	10 Dokumen	100.000.000,00
1	01	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	150.000.000,00	30 Orang	150.000.000,00
1	01	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	300.000.000,00	30 Orang	300.000.000,00
1	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase bahan/data pengelolaan adminstrasi umum perangkat daerah yang disiapkan	100 %	1.150.000.000,00	100 %	1.150.000.000,00
1	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	50.000.000,00	40 Paket	50.000.000,00
1	01	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	250 Paket	200.000.000,00	250 Paket	200.000.000,00
1	01	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	100.000.000,00	18 Paket	100.000.000,00
1	01	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	41 Paket	150.000.000,00	41 Paket	150.000.000,00
1	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	180000 Paket	150.000.000,00	180000 Paket	150.000.000,00
1	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	650.000.000,00	12 Laporan	650.000.000,00
1	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah penunjang perangkat daerah yang direalisasikan	100 %	1.110.000.000,00	100 %	1.110.000.000,00
1	01	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	300.000.000,00	1 Unit	300.000.000,00
1	01	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	100.000.000,00	100 Unit	100.000.000,00
1	01	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00
1	01	01	207	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00
1	01	01	207	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00
1	01	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	160.000.000,00	8 Unit	160.000.000,00
1	01	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	150.000.000,00	40 Unit	150.000.000,00
1	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan	100 %	800.000.000,00	100 %	800.000.000,00
1	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan	900.000.000,00	8 Laporan	900.000.000,00
1	01	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	350.000.000,00	10 Laporan	350.000.000,00
1	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang perangkat daerah yang dipelihara	100%	1.010.000.000,00	100%	1.010.000.000,00
1	01	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	750.000.000,00	12 Unit	750.000.000,00
1	01	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit	100.000.000,00	100 Unit	100.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	01	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100.000.000,00	100 Unit	100.000.000,00
1	01	01	209	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	100.000.000,00	2 Unit	100.000.000,00
1	01	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	100.000.000,00	50 Unit	100.000.000,00
1	01	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	1.000.000.000,00	40 Unit	1.000.000.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka kelulusan warga belajar kesetaraan	3500 Warga Belajar	77.779.300.000,00	4000 Warga Belajar	79.479.300.000,00
						Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	92.6%	21.801.766.500,00	92.7%	22.751.766.500,00
						Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	100 %	25.037.166.400,00	100 %	28.951.107.536,00
						Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	100 %	40.000.000.000,00	100 %	50.000.000.000,00
						Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100 %	149.974.895.831,00	100 %	152.235.954.695,00
						Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	96,00 %	54.598.397.769,00	96.1%	55.098.397.769,00
1	01	02	201		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94.1%	175.012.062.231,00	94.2%	182.048.406.115,00
1	01	02	201	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	600.000.000,00	3 Ruang	2.800.000.000,00
1	01	02	201	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	500.000.000,00	2 Ruang	1.250.000.000,00
1	01	02	201	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	1.595.017.170,00	5 Ruang	2.500.000.000,00
1	01	02	201	06	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	25 Unit	6.322.475.805,00	25 Unit	3.000.000.000,00
1	01	02	201	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	89 Ruang	5.150.000.000,00	89 Ruang	12.750.000.000,00
1	01	02	201	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	861.343.884,00	6 Ruang	1.500.000.000,00
1	01	02	201	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	300.000.000,00	2 Ruang	400.000.000,00
1	01	02	201	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	288.941.136,00	2 Ruang	2.250.000.000,00
1	01	02	201	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Unit	295.435.136,00	2 Unit	3.000.000.000,00
1	01	02	201	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	4 Paket	200.000.000,00	4 Paket	1.500.000.000,00
1	01	02	201	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	19 Paket	2.375.000.000,00	19 Paket	2.625.000.000,00
1	01	02	201	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	723 Satuan Pendidikan	265.073.100,00	723 Satuan Pendidikan	2.500.000.000,00
1	01	02	201	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	723 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	723 Satuan Pendidikan	600.000.000,00
1	01	02	201	25	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	846.620.000,00	250 Peserta Didik	2.500.000.000,00
1	01	02	201	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1500 Orang	386.644.000,00	1500 Orang	300.000.000,00
1	01	02	201	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	63 Satuan Pendidikan	668.350.000,00	63 Satuan Pendidikan	950.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	01	02	201	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	657 Satuan Pendidikan	125.745.060.000,00	657 Satuan Pendidikan	125.745.060.000,00
1	01	02	201	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	200 Orang	84.035.600,00	200 Orang	300.000.000,00
1	01	02	201	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang	500.000.000,00	2 Ruang	5.250.000.000,00
1	01	02	201	32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	400.000.000,00	2 Ruang	1.000.000.000,00
1	01	02	202		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	84.2%	96.848.397.769,00	84.3%	107.498.397.769,00
1	01	02	202	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	250.000.000,00	1 Ruang	2.000.000.000,00
1	01	02	202	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	500.000.000,00	2 Ruang	800.000.000,00
1	01	02	202	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	750.000.000,00	3 Ruang	1.400.000.000,00
1	01	02	202	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	750.000.000,00	3 Ruang	1.400.000.000,00
1	01	02	202	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	953.986.892,00	2 Ruang	750.000.000,00
1	01	02	202	07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	2 Ruang	600.000.000,00	2 Ruang	400.000.000,00
1	01	02	202	11	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	600.000.000,00	2 Unit	400.000.000,00
1	01	02	202	12	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	16 Unit	1.384.862.384,00	16 Unit	2.100.000.000,00
1	01	02	202	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	4.636.963.497,00	25 Ruang	8.700.000.000,00
1	01	02	202	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	1.000.000.000,00	5 Ruang	1.200.000.000,00
1	01	02	202	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	450.000.000,00	3 Ruang	1.200.000.000,00
1	01	02	202	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	450.000.000,00	3 Ruang	1.200.000.000,00
1	01	02	202	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	450.000.000,00	3 Ruang	1.200.000.000,00
1	01	02	202	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	200.000.000,00	2 Ruang	600.000.000,00
1	01	02	202	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	600.000.000,00
1	01	02	202	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	641.902.096,00	10 Unit	2.250.000.000,00
1	01	02	202	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	500.000.000,00	10 Paket	1.000.000.000,00
1	01	02	202	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	150.000.000,00
1	01	02	202	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10 Paket	625.000.000,00	10 Paket	1.500.000.000,00
1	01	02	202	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	36000 Peserta Didik	185.943.100,00	36000 Peserta Didik	2.500.000.000,00
1	01	02	202	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	158 Satuan Pendidikan	10.615.800,00	158 Satuan Pendidikan	600.000.000,00
1	01	02	202	38	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	250.000.000,00	100 Peserta Didik	2.500.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	01	02	202	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	484.724.000,00	100 Orang	300.000.000,00
1	01	02	202	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	94 Satuan Pendidikan	1.642.400.000,00	94 Satuan Pendidikan	1.950.000.000,00
1	01	02	202	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	63 Satuan Pendidikan	34.577.000.000,00	63 Satuan Pendidikan	34.577.000.000,00
1	01	02	202	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100 Orang	75.000.000,00	100 Orang	250.000.000,00
1	01	02	202	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	400.000.000,00	2 Ruang	600.000.000,00
1	01	02	202	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	800.000.000,00	4 Ruang	600.000.000,00
1	01	02	203		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	89.4%	21.801.766.500,00	89.5%	22.751.766.500,00
1	01	02	203	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	825.000.000,00	6 Unit	2.100.000.000,00
1	01	02	203	02	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10 Unit	600.000.000,00	10 Unit	900.000.000,00
1	01	02	203	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	43 Unit	2.450.000.000,00	43 Unit	5.250.000.000,00
1	01	02	203	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	250.000.000,00	5 Unit	500.000.000,00
1	01	02	203	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	8 Unit	250.000.000,00	8 Unit	500.000.000,00
1	01	02	203	06	Pemeliharaan Rutin Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	8 Unit	400.000.000,00	8 Unit	500.000.000,00
1	01	02	203	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	9 Paket	199.966.500,00	9 Paket	199.966.500,00
1	01	02	203	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	50 Paket	285.000.000,00	50 Paket	285.000.000,00
1	01	02	203	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	37856 Peserta Didik	11.356.800.000,00	37856 Peserta Didik	11.356.800.000,00
1	01	02	203	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	679 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	679 Satuan Pendidikan	200.000.000,00
1	01	02	203	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	75 Satuan Pendidikan	1.020.000.000,00	75 Satuan Pendidikan	27.000.000.000,00
1	01	02	203	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	439 Satuan Pendidikan	3.715.000.000,00	439 Satuan Pendidikan	5.500.000.000,00
1	01	02	203	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	400 Orang	300.000.000,00	400 Orang	300.000.000,00
1	01	02	204		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	12.6%	77.779.300.000,00	12.7%	79.479.300.000,00
1	01	02	204	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	150.000.000,00	1 Unit	600.000.000,00
1	01	02	204	02	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 Unit	120.000.000,00	2 Unit	120.000.000,00
1	01	02	204	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	60 Unit	3.000.000.000,00	60 Unit	7.500.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	01	02	204	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	525.000.000,00	15 Unit	700.000.000,00
1	01	02	204	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	4 Paket	120.000.000,00	4 Paket	120.000.000,00
1	01	02	204	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	30 Paket	225.000.000,00	30 Paket	250.000.000,00
1	01	02	204	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	3500 Peserta Didik	12.000.000.000,00	3500 Peserta Didik	13.000.000.000,00
1	01	02	204	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	675 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	675 Satuan Pendidikan	200.000.000,00
1	01	02	204	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	290 Orang	1.082.500.000,00	290 Orang	1.200.000.000,00
1	01	02	204	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2887 Satuan Pendidikan	28.600.000.000,00	2887 Satuan Pendidikan	30.000.000.000,00
1	01	02	204	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	3842 Satuan Pendidikan	31.749.600.000,00	3842 Satuan Pendidikan	33.000.000.000,00
1	01	02	204	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100 Orang	26.000.000,00	100 Orang	26.000.000,00
1	01	02	204	22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	25 Satuan Pendidikan	31.200.000,00	25 Satuan Pendidikan	31.200.000,00
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum satuan pendidikan	100 %	950.000.000,00	100 %	1.550.000.000,00
1	01	03	201		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase kurikulum muatan lokal satuan pendidikan dasar yang ditetapkan	100 %	775.000.000,00	100 %	1.100.000.000,00
1	01	03	201	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	9 Dokumen	2.000.000,00	9 Dokumen	150.000.000,00
1	01	03	201	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	9 Dokumen	1.000.000,00	9 Dokumen	150.000.000,00
1	01	03	201	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	125 Orang	1.000.000,00	125 Orang	250.000.000,00
1	01	03	202		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase kurikulum muatan lokal satuan pendidikan PAUD dan PNF yang ditetapkan	100 %	175.000.000,00	100 %	450.000.000,00
1	01	03	202	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	35 Dokumen	1.000.000,00	35 Dokumen	1.000.000,00
1	01	03	202	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	50 Dokumen	1.000.000,00	50 Dokumen	1.000.000,00
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang memperoleh peningkatan kompetensi di seluruh tingkatan (SD.SMP. dan Nonformal/ Kesetaraan) yang terpenuhi	95.95%	2.661.019.000,00	97.6%	9.579.671.640,00
1	01	04	201		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi (Bintek. diklat. workshop. pembinaan)	95.95%	2.661.019.000,00	95.95%	9.579.671.640,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	01	04	201	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	246 Dokumen	1.932.500.000,00	246 Dokumen	1.932.500.000,00
1	01	04	201	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	15 Laporan	732.500.000,00	15 Laporan	732.500.000,00
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan PAUD dan pendidikan nonformal/ kesetaraan yang memiliki izin	100 %	100.000.000,00	100 %	100.000.000,00
1	01	05	201		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase usul penerbitan izin Pendidikan Dasar yang diselesaikan	100 %	100.000.000,00	100 %	100.000.000,00
1	01	05	201	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	51 Dokumen	100.000.000,00	51 Dokumen	100.000.000,00
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase pengembangan guru bahasa dan sastra yang memperoleh peningkatan kompetensi	100 %	1.000.000,00	100 %	140.000.000,00
1	01	06	201		Pembinaan. Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pembinaan. Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokum en	1.000.000,00	3 Dokum en	140.000.000,00
1	01	06	201	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	3 Dokumen	1.000.000,00	3 Dokumen	20.000.000,00
					DINAS KESEHATAN			**470.303.510.018,00**		**482.061.097.770,00**
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			470.303.510.018,00		482.061.097.770,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			470.303.510.018,00		482.061.097.770,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintahan	100%	137.002.793.871.00	100%	140.427.863.718,00
1	02	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan. penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	334.796.180.00	100%	343.166.085,00
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	213.000.000.00	5 Dokumen	218.325.000,00
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	121.796.180.00	3 Laporan	124.841.085,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	95%	134.172.266.593.00	95%	134.172.266.593.00
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.585 Orang/bulan	129.672.266.593.00	1.585 Orang/bulan	129.672.266.593.00
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	4.500.000.000.00	12 Dokumen	4.500.000.000.00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah	90%	700.000.000.00	90%	717.500.000,00
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	120.000.000.00	1 Paket	123.000.000,00
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000.00	1 Paket	51.250.000,00
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100.000.000.00	2 Paket	102.500.000,00
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	430.000.000.00	12 Laporan	440.750.000,00
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	230.000.000.00	100%	235.750.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	5.000.000.00	1 Unit	20.000.000,00
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	60.000.000.00	6 Unit	61.500.000,00
1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	165.000.000.00	1 Unit	154.250.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	90%	775.731.098.00	90%	795.124.375,00
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	215.731.098.00	12 Laporan	221.124.375,00
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	560.000.000.00	12 Laporan	574.000.000,00
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	80%	790.000.000.00	80%	809.750.000,00
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	450.000.000.00	25 Unit	461.250.000,00
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	190.000.000.00	1 Unit	194.750.000,00
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	150.000.000.00	12 Unit	153.750.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan Standarat Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan	100%	221.740.454.661.00	100%	186.386.821.818.00
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	70%		70%	
						Persentase UHC (universal Health coverage)	96%		97%	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Faskes Sesuai Standar	70%	39.552.357.207.00	70%	39.516.166.137,00
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	6 Unit	9.400.000.000.00	6 Unit	9.635.000.000,00
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana . Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	1.400.000.000.00	1 Unit	1.435.000.000,00
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	1.000.000.000.00	2 Unit	1.025.000.000,00
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	24 Unit	6.002.209.407.00	24 Unit	6.152.264.642,00
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	40 Unit	550.000.000.00	40 Unit	563.750.000,00
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat. Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	33 Paket	8.429.197.364.00	33 Paket	8.639.927.298,00
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	33 Paket	11.620.950.436.00	33 Paket	10.886.474.197,00
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	18 Unit	1.050.000.000.00	18 Unit	1.076.250.000,00
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	34 Unit	100.000.000.00	34 Unit	102.500.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan sesuai standar	100%	179.726.171.454.00	100%	184.219.325.741,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25093 Orang	768.168.000.00	25093 Orang	787.372.200,00
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23939 Orang	649.200.000.00	23939 Orang	649.200.000.00
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	93875 Orang	434.630.000.00	93875 Orang	434.630.000.00
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1114578 Orang	792.180.000.00	1114578 Orang	792.180.000.00
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	402655 Orang	665.000.000.00	402655 Orang	665.000.000.00
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	3155 Orang	575.000.000.00	3155 Orang	575.000.000.00
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	32864 Orang	826.370.000.00	32864 Orang	826.370.000.00
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	653.000.000.00	12 Dokumen	669.325.000,00
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	117.000.000.00	4 Dokumen	119.925.000,00
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	667.955.000.00	4 Dokumen	684.653.875,00
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	335.920.000.00	4 Dokumen	344.318.000,00
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	120 Orang	228.640.000.00	120 Orang	228.640.000.00
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	5 Dokumen	186.960.000.00	5 Dokumen	186.960.000.00
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dokumen	100.000.000.00	12 Dokumen	100.000.000.00
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	725.920.000.00	12 Dokumen	725.920.000.00
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	158.507.738.794.00	12 Dokumen	158.507.738.794.00
1	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	12 Unit	510.000.000.00	12 Unit	522.750.000,00
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dokumen	973.619.660.00	4 Dokumen	973.619.660.00
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	33 Unit	517.640.000.00	33 Unit	428.081.000,00
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan	150.000.000.00	4 Laporan	150.000.000.00
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan. Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	600.000.000.00	1 Unit	615.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C. D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang sudah berizin	100%	2.461.926.000.00	100%	2.461.926.000.00
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	33 Unit	1.961.926.000.00	33 Unit	1.961.926.000.00
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	9 Dokumen	500.000.000.00	9 Dokumen	500.000.000.00
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDMK sesuai kompetensi jabatan	80%	2.786.215.500.00	80%	1.886.215.500.00
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pendayagunaan SDM Kesehatan (Tenaga Kesehatan) di Puskesmas	95%	1.886.215.500.00	95%	1.886.215.500.00
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	133 Orang	1.836.215.500.00	133 Orang	1.836.215.500.00
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Dokumen	50.000.000.00	4 Dokumen	50.000.000.00
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan	90%	900.000.000.00	90%	900.000.000.00
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	21 Orang	900.000.000.00	21 Orang	900.000.000.00
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Farmasi. Alkes dan Makmin yang memenuhi standar	80%	578.018.000.00	80%	592.468.450,00
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Sarana Farmasi. Alkes dan Makmin yang memenuhi Standart	100%	150.000.000.00	100%	153.750.000,00
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan. dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan. dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12 Dokumen	150.000.000.00	12 Dokumen	153.750.000,00
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase P-IRT yang telah mendapatkan ijin edar	100%	428.018.000.00	100%	438.718.450,00
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70 Dokumen	428.018.000.00	70 Dokumen	438.718.450,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif	25%	960.509.000.00	25%	984.521.725,00
1	02	05	2.01		Advokasi. Pemberdayaan. Kemitraan. Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kemitraan ormas dalam bidang kesehatan	80%	354.775.000.00	80%	363.644.375,00
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan. Advokasi. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan. Advokasi. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	354.775.000.00	12 Dokumen	363.644.375,00
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PHBS Rumah Tangga Sehat	65%	157.824.000.00	65%	161.769.600,00
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	9 Dokumen	157.824.000.00	9 Dokumen	161.769.600,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Balita yang dibina	100%	447.910.000.00	100%	459.107.750,00
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10 Dokumen	447.910.000.00	10 Dokumen	459.107.750,00
					UOBF PUSKESMAS			105.926.920.386,00		108.575.093.396,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			105.926.920.386,00		108.575.093.396,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			105.926.920.386,00		108.575.093.396,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (UOBF Puskesmas)	100%	105.338.997.086,00	100%	107.972.472.013,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tawaran cakupan Persentas Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan (Puskesmas UOBF)	100%	105.338.997.086,00	100%	107.972.472.013,00
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25093 Orang	1.143.505.600,00	25093 Orang	1.172.093.240,00
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24047 Orang	482.269.800,00	24047 Orang	494.326.545,00
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	93860 Orang	650.754.620,00	93860 Orang	667.023.486,00
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	217968 Orang	610.392.000,00	217968 Orang	625.651.800,00
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1112308 Orang	482.130.000,00	1112308 Orang	494.183.250,00
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	190933 Orang	480.305.000,00	190933 Orang	492.312.625,00
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	402655 Orang	577.780.500,00	402655 Orang	592.225.013,00
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26695 Orang	532.019.900,00	26695 Orang	545.320.398,00
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	32864 Orang	307.410.000,00	32864 Orang	315.095.250,00
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3155 Orang	583.468.600,00	3155 Orang	598.055.315,00
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19818 Orang	286.870.000,00	19818 Orang	294.041.750,00
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	33 Dokumen	418.803.000,00	33 Dokumen	429.273.075,00
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	1.151.025.000,00	12 Dokumen	1.179.800.625,00
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	890.987.000,00	12 Dokumen	913.261.675,00
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	921.383.000,00	12 Dokumen	944.417.575,00
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans kesehatan	33 Dokumen	385.803.000,00	33 Dokumen	395.448.075,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1.329.794.380,00	12 Dokumen	1.363.039.240,00
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (33 Puskesmas)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	33 Dokumen	75.074.111.596,00	33 Dokumen	76.950.964.386,00
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	33 Dokumen	18.448.185.090,00	33 Dokumen	18.909.389.717,00
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4282 Orang	340.873.000,00	4282 Orang	349.394.825,00
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	242 Orang	241.126.000,00	242 Orang	247.154.150,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif	100%	587.923.300,00	100%	602.621.383,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Balita yang dibina	100%	587.923.300,00	100%	602.621.383,00
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	33 Dokumen	587.923.300,00	33 Dokumen	602.621.383,00
					UPTD LABKESDA			1.308.598.600,00		1.341.313.565,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.308.598.600,00		1.341.313.565,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.308.598.600,00		1.341.313.565,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (UPTD Labkesda)	100%	1.308.598.600,00	100%	1.341.313.565,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan Standart Pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan (UPT labkesda)	100%	1.308.598.600,00	100%	1.341.313.565,00
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1.308.598.600,00	12 Dokumen	1.341.313.565,00
					RSUD BANGIL			**212.400.000.000.00**		**219.450.000.000.00**
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			62.400.000.000.00		64.450.000.000.00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			62.400.000.000.00		64.450.000.000.00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan SPM Rumah Sakit (RSUD Bangil)	78%	62.400.000.000.00	79%	64.450.000.000.00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar (RSUD Bangil)	100%	62.400.000.000.00	100%	64.450.000.000.00
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	12.000.000.000.00	1 Unit	12.000.000.000.00
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	12.000.000.000.00	1 Unit	12.000.000.000.00
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	10.000.000.000.00	1 Unit	10.000.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1.000.000.000.00	1 Unit	1.000.000.000.00
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	12.000.000.000.00	1 Unit	12.000.000.000.00
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat. Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	5.000.000.000.00	1 Paket	6.000.000.000.00
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	10.000.000.000.00	1 Paket	11.000.000.000.00
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	400.000.000.00	1 Unit	450.000.000.00
X					-			150.000.000.000.00		155.000.000.000.00
X	XX				-			150.000.000.000.00		155.000.000.000.00
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemanfaatan Rumah Sakit Bangil	100%	150.000.000.000.00	100%	155.000.000.000.00
X	XX	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BOR Rumah Sakit (RSUD Bangil)	55%	150.000.000.000.00	56%	155.000.000.000.00
X	XX	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	150.000.000.000.00	1 Unit Kerja	155.000.000.000.00
TOTAL								**212.400.000.000.00**		**219.450.000.000.00**
					RSUD GRATI			**65.700.000.000.00**		**71.500.000.000.00**
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			30.700.000.000.00		33.500.000.000.00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			30.700.000.000.00		33.500.000.000.00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Rumah Sakit (RSUD Grati)	98%	30.700.000.000.00	98%	33.500.000.000.00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar (RSUD Grati)	100%	30.700.000.000.00	100%	33.500.000.000.00
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	500.000.000.00	1 Unit	500.000.000.00
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	16.500.000.000.00	1 Unit	12.000.000.000.00
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	250.000.000.00	1 Unit	250.000.000.00
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000.00	1 Unit	500.000.000.00
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	6.000.000.000.00	2 Unit	12.000.000.000.00
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat. Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	2.700.000.000.00	1 Paket	3.500.000.000.00
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	4.000.000.000.00	1 Paket	4.500.000.000.00
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	5 Unit	250.000.000.00	5 Unit	250.000.000.00
X					-			35.000.000.000.00		38.000.000.000.00
X	XX				-			35.000.000.000.00		38.000.000.000.00
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemanfaatan Rumah Sakit Grati	100%	35.000.000.000.00	100%	38.000.000.000.00
X	XX	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BOR Rumah Sakit (RSUD Grati)	78%	35.000.000.000.00	79%	38.000.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
X	XX	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	35.000.000.000.00	1 Unit Kerja	38.000.000.000.00
					DINAS SUMBER DAYA AIR. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG			**138.875.462.402.00**		**142.876.462.402.00**
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			138.875.462.402.00		142.876.462.402.00
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			138.875.462.402.00		142.876.462.402.00
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perangkat Daerah dengan Baik	100%	22.105.470.857.00	100%	22.316.470.857.00
1	03	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen rencana. anggaran dan evaluasi	100%	50.000.000.00	100%	60.000.000.00
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.000.000.00	5 Laporan	60.000.000.00
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	15.512.970.857.00	100%	15.532.970.857.00
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	11.472.450.857.00	120 Orang/bulan	11.482.450.857.00
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	163 Dokumen	4.040.520.000.00	163 Dokumen	4.050.520.000.00
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yang akurat dan sesuai dengan ketentuan	100%	16.000.000.00	100%	26.000.000.00
1	03	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	16.000.000.00	4 Dokumen	26.000.000.00
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	50.000.000.00	100%	60.000.000.00
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50.000.000.00	50 Orang	60.000.000.00
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	493.500.000.00	100%	533.500.000.00
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	99.500.000.00	3 Paket	109.500.000.00
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	90.000.000.00	2 Paket	100.000.000.00
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	12.000.000.00	100 Laporan	22.000.000.00
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	292.000.000.00	70 Laporan	302.000.000.00
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	3.925.000.000.00	100%	3.975.000.000.00
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	400.000.000.00	1 Unit	410.000.000.00
1	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	3.000.000.000.00	1 Unit	3.010.000.000.00
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	200.000.000.00	100 Unit	210.000.000.00
1	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	325.000.000.00	30 Unit	345.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang opersional kantor yang tersedia	100%	490.000.000.00	100%	511.000.000.00
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	33 Laporan	149.000.000.00	33 Laporan	159.000.000.00
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	63.000.000.00	2 Laporan	64.000.000.00
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	278.000.000.00	15 Laporan	288.000.000.00
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	1.568.000.000.00	100%	1.618.000.000.00
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	75.000.000.00	2 Unit	85.000.000.00
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	283.000.000.00	50 Unit	293.000.000.00
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8 Unit	730.000.000.00	8 Unit	740.000.000.00
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	400.000.000.00	3 Unit	410.000.000.00
1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	80.000.000.00	50 Unit	90.000.000.00
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	63.09 Nilai	16.173.000.000.00	64.69 Nilai	16.663.000.000.00
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran irigasi sungai yang tertangani	8.84%	8.598.000.000.00	8.93%	8.768.000.000.00
1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	58.000.000.00	1 Dokumen	68.000.000.00
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	400.000.000.00	1 Unit	410.000.000.00
1	03	02	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	1 KM	400.000.000.00	1 KM	410.000.000.00
1	03	02	2.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	1 KM	3.200.000.000.00	1 KM	3.210.000.000.00
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	40 KM	4.000.000.000.00	40 KM	4.100.000.000.00
1	03	02	2.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	145.000.000.00	4 Dokumen	155.000.000.00
1	03	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	145.000.000.00	24 Orang	155.000.000.00
1	03	02	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	250.000.000.00	20 Orang	260.000.000.00
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	72.97%	7.575.000.000.00	74.94%	7.895.000.000.00
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	2 Dokumen	500.000.000.00	2 Dokumen	510.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	12 KM	6.000.000.000.00	12 KM	6.100.000.000.00
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	7.5 KM	1.000.000.000.00	7.5 KM	1.200.000.000.00
1	03	02	2.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	373 DI	75.000.000.00	373 DI	85.000.000.00
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	88.41%	32.950.000.000.00	89.25%	33.470.000.000.00
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	88.41%	32.950.000.000.00	89.25%	33.470.000.000.00
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	10 Dokumen	400.000.000.00	10 Dokumen	410.000.000.00
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	9 Dokumen	50.000.000.00	9 Dokumen	60.000.000.00
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	15000 SR	32.500.000.000.00	15000 SR	33.000.000.000.00
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	12.93%	3.900.000.000.00	13.23%	4.120.000.000.00
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sampah yang Terkelola dengan Baik di Perkotaan	12.93%	3.900.000.000.00	13.23%	4.120.000.000.00
1	03	04	2.01	01	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi. dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	50.000.000.00	2 Dokumen	60.000.000.00
1	03	04	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	50.000.000.00	2 Dokumen	60.000.000.00
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1300 Rumah Tangga	3.800.000.000.00	1300 Rumah Tangga	4.000.000.000.00
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi/air limbah domestik (layak dan aman)	81.83%	1.550.000.000.00	81.84%	1.670.000.000.00
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi/Air Limbah Domestik (Layak & Aman)	81.83%	1.550.000.000.00	81.84%	1.670.000.000.00
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	300.000.000.00	2 Dokumen	310.000.000.00
1	03	05	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	2 Dokumen	50.000.000.00	2 Dokumen	60.000.000.00
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	200 Rumah Tangga	1.200.000.000.00	200 Rumah Tangga	1.300.000.000.00
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pembangunan Gedung yang Sesuai Dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku	60.73%	59.000.000.000.00	65.73%	61.320.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	60.73%	59.000.000.000.00	65.73%	61.320.000.000.00
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG). Pendataan Bangunan Gedung. serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). peran Tim Profesi Ahli (TPA). Pendataan Bangunan Gedung. serta Implementasi SIMBG	176 Dokumen	450.000.000.00	176 Dokumen	460.000.000.00
1	03	08	2.01	02	Perencanaan. Pembangunan. Pengawasan. dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan. Pembangunan. Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	53.000.000.000.00	10 Dokumen	55.000.000.000.00
1	03	08	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	50.000.000.00	4 Dokumen	60.000.000.00
1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi. Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi. Renovasi dan Ubahsuai	1 Unit	3.500.000.000.00	1 Unit	3.600.000.000.00
1	03	08	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	3 Unit	2.000.000.000.00	3 Unit	2.200.000.000.00
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Mantap	100%	741.991.545.00	100%	751.991.545.00
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis yang di RTBL kan	100%	741.991.545.00	100%	751.991.545.00
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	2 Dokumen	741.991.545.00	2 Dokumen	751.991.545.00
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Perizinan berusaha yang diproses	92%	2.455.000.000.00	94%	2.565.000.000.00
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase rencana RTRW / RRTR yang ditetapkan	100%	820.000.000.00	100%	860.000.000.00
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi. Evaluasi. Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi. Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000.00	1 Dokumen	60.000.000.00
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi. Evaluasi. Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi. Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	650.000.000.00	1 Dokumen	660.000.000.00
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	4 Dokumen	50.000.000.00	4 Dokumen	60.000.000.00
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	70.000.000.00	1 Dokumen	80.000.000.00
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Tata Ruang yang disusun	100%	660.000.000.00	100%	690.000.000.00
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	10 Dokumen	145.000.000.00	10 Dokumen	155.000.000.00
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	12 Dokumen	485.000.000.00	12 Dokumen	495.000.000.00
1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	2 Dokumen	30.000.000.00	2 Dokumen	40.000.000.00
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan ruang untuk investasi daerah dan Pembangunan Daerah	40%	800.000.000.00	45%	820.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	60 Dokumen	750.000.000.00	60 Dokumen	760.000.000.00
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	50.000.000.00	1 Dokumen	60.000.000.00
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti	100%	175.000.000.00	100%	195.000.000.00
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	4 Dokumen	50.000.000.00	4 Dokumen	60.000.000.00
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12 Dokumen	125.000.000.00	12 Dokumen	135.000.000.00
TOTAL								**138.875.462.402.00**		**142.876.462.402.00**
					DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI			**133.104.404.173.00**		**141.091.728.423.00**
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			133.104.404.173.00		141.091.728.423.00
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			133.104.404.173.00		141.091.728.423.00
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD Yang Baik/Sesuai Regulasi	100%	10.741.212.440.00	100%	11.385.685.186.00
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan tercukupinya administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	7.289.333.990.00	12 Bulan	7.726.694.029.00
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	686 Orang/bulan	5.730.994.623.00	686 Orang/bulan	6.074.854.300.00
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.558.339.367.00	12 Dokumen	1.651.839.729.00
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Tercukupinya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	567.429.865.00	12 Bulan	601.475.657.00
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	166.957.018.00	1 Paket	176.974.439.00
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	46.284.847.00	1 Paket	49.061.938.00
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	49.950.000.00	12 Laporan	52.947.000.00
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	304.238.000.00	24 Laporan	322.492.280.00
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksanakannya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai rencana	100%	423.480.540.00	100%	448.889.372.00
1	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	423.480.540.00	20 Unit	448.889.372.00
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Tercukupinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	1.157.276.380.00	12 Bulan	1.226.712.963.00
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	891.081.530.00	12 Laporan	944.546.422.00
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	266.194.850.00	12 Laporan	282.166.541.00
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksanakannya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai rencana	100%	1.303.691.665.00	100%	1.381.913.165.00
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	713.894.830.00	10 Unit	756.728.520.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	501.098.400.00	5 Unit	531.164.304.00
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	88.698.435.00	25 Unit	94.020.341.00
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang Drainase yang telah dibangun	15.37%	14.402.621.654.00	16.25%	15.266.778.953.00
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sistem Drainase yang dibangun	38.200 Meter	14.402.621.654.00	40.500 Meter	15.266.778.953.00
1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	9000 M	14.402.621.654.00	9000 M	15.266.778.953.00
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan yang dilakukan penanganan	6.16%	107.610.570.015.00	6.53%	114.068.264.216.00
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dilakukan penanganan	142.59 Km	107.610.570.015.00	151.14 Km	114.068.264.216.00
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana. Kebijakan. dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis. Kajian Kebijakan. Bantuan Teknis. Bimbingan Teknis. Pengelolaan Pengendalian	285 Dokumen	1.176.580.500.00	285 Dokumen	1.247.175.330.00
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	68 KM	54.241.163.490.00	68 KM	57.495.633.299.00
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	38 KM	30.066.059.940.00	38 KM	31.870.023.536.00
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	23 KM	18.263.442.625.00	23 KM	19.360.309.183.00
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	4800 M	3.863.323.460.00	4800 M	4.095.122.868.00
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemenuhan penyedia jasa konstruksi yang berkompetensi	100%	350.000.064.00	100%	371.000.068.00
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi sesuai rencana	100%	350.000.064.00	100%	371.000.068.00
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	100 Orang	350.000.064.00	100 Orang	371.000.068.00
TOTAL								**133.104.404.173.00**		**141.091.728.423.00**
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			**82.773.561.037.00**		**81.773.561.037.00**
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			65.808.961.037.00		64.808.961.037.00
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			75.000.000.00		75.000.000.00
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang baik atau sesuai regulasi	100%	75.000.000.00	100%	75.000.000.00
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	75.000.000.00	100%	75.000.000.00
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	75.000.000.00	18 Laporan	75.000.000.00
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			65.733.961.037.00		64.733.961.037.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang baik atau sesuai regulasi	100%	8.983.461.037.00	100%	8.983.461.037.00
1	04	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan pada dokumen rencana. anggaran dan evaluasi	100%	50.000.000.00	100%	50.000.000.00
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	27.000.000.00	9 Dokumen	27.000.000.00
1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	23.000.000.00	2 Dokumen	23.000.000.00
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	5.658.811.037.00	100%	5.658.811.037.00
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	5.658.811.037.00	42 Orang/bulan	5.658.811.037.00
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	127.750.000.00	100%	127.750.000.00
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	27.750.000.00	4 Orang	27.750.000.00
1	04	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	100.000.000.00	50 Orang	100.000.000.00
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	701.700.000.00	100%	701.700.000.00
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	10.500.000.00	25 Paket	10.500.000.00
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	29.000.000.00	30 Paket	29.000.000.00
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	49 Paket	82.200.000.00	49 Paket	82.200.000.00
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	35.000.000.00	20 Paket	35.000.000.00
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.000.000.00	12 Laporan	40.000.000.00
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	505.000.000.00	50 Laporan	505.000.000.00
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	100%	600.000.000.00	100%	600.000.000.00
1	04	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	250.000.000.00	1 Unit	250.000.000.00
1	04	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	350.000.000.00	20 Unit	350.000.000.00
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	1.164.700.000.00	100%	1.164.700.000.00
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	4.200.000.00	2 Laporan	4.200.000.00
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	370.000.000.00	36 Laporan	370.000.000.00
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	790.500.000.00	10 Laporan	790.500.000.00
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah kondisi baik	100%	680.500.000.00	100%	680.500.000.00
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	500.000.000.00	34 Unit	500.000.000.00
1	04	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	70 Unit	6.100.000.00	70 Unit	6.100.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	58 Unit	99.900.000.00	58 Unit	99.900.000.00
1	04	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	58 Unit	74.500.000.00	58 Unit	74.500.000.00
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase tercapainya pengembangan perumahan	100%	4.825.000.000.00	100%	4.825.000.000.00
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah korban bencana yang disediakan dan direhab atau di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	2 Dokumen	150.000.000.00	2 Dokumen	150.000.000.00
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100.000.000.00	2 Dokumen	100.000.000.00
1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	4 Dokumen	50.000.000.00	4 Dokumen	50.000.000.00
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP yang dilakukan	1 Kali	150.000.000.00	1 Kali	150.000.000.00
1	04	02	2.02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	50 Orang	150.000.000.00	50 Orang	150.000.000.00
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Luas Pembangunan dan Rehabilitasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	4.375.000.000.00	100%	4.375.000.000.00
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	375.000.000.00	15 Unit Rumah	375.000.000.00
1	04	02	2.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2.000.000.000.00	2 Dokumen	2.000.000.000.00
1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit Rumah	2.000.000.000.00	5 Unit Rumah	2.000.000.000.00
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan	3 Dokumen	100.000.000.00	3 Dokumen	100.000.000.00
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3 Laporan	100.000.000.00	3 Laporan	100.000.000.00
1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah izin SKGB yang diterbitkan	5 Dokumen	50.000.000.00	5 Dokumen	50.000.000.00
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	22.82%	35.800.000.000.00	28.34%	35.800.000.000.00
						Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang direhab	51.71%		55.23%	
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah rekomendasi permohonan izin yang sesuai dengan RP2KP	1 Dokumen	500.000.000.00	1 Dokumen	500.000.000.00
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	4 Dokumen	400.000.000.00	4 Dokumen	400.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah kawasan kumuh yang dikendalikan	5 Titik	200.000.000.00	5 Titik	200.000.000.00
1	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	3 Laporan	100.000.000.00	3 Laporan	100.000.000.00
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara tuntas	124.11 Ha	35.100.000.000.00	154.11 Ha	35.100.000.000.00
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1500 Unit Rumah	24.700.000.000.00	1500 Unit Rumah	24.700.000.000.00
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	20 Ha	10.000.000.000.00	20 Ha	10.000.000.000.00
1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	4 Dokumen	200.000.000.00	4 Dokumen	200.000.000.00
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penyediaan PSU di Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.95%	16.125.500.000.00	7.9%	15.125.500.000.00
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU Perumahan yang diselenggarakan	10 Lokasi	16.125.500.000.00	10 Lokasi	15.125.500.000.00
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen	200.000.000.00	5 Dokumen	200.000.000.00
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	5 Lokasi	15.425.500.000.00	5 Lokasi	14.425.500.000.00
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum Perumahan	5 Laporan	200.000.000.00	5 Laporan	200.000.000.00
1	04	05	2.01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	5 Laporan	300.000.000.00	5 Laporan	300.000.000.00
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			**41.277.830.089.00**		**41.277.830.089.00**
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			41.277.830.089.00		41.277.830.089.00
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			41.277.830.089.00		41.277.830.089.00
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	10.168.164.189.00	100%	10.168.164.189.00
1	05	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan. anggaran dan laporan akuntabilitas	100%	71.140.000.00	100%	71.140.000.00
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	65.740.000.00	6 Dokumen	65.740.000.00
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.400.000.00	1 Laporan	5.400.000.00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan yang disusun	100%	8.286.525.389.00	100%	8.286.525.389.00
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	868 Orang/bulan	8.286.525.389.00	868 Orang/bulan	8.286.525.389.00
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100%	199.750.000.00	100%	199.750.000.00
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	199.750.000.00	1 Paket	199.750.000.00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	335.767.100.00	100%	335.767.100.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	36.403.000.00	14 Paket	36.403.000.00
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.917.000.00	1 Paket	3.917.000.00
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	94.390.100.00	1 Paket	94.390.100.00
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.296.000.00	1 Paket	19.296.000.00
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	17.500.000.00	12 Dokumen	17.500.000.00
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	19.261.000.00	12 Laporan	19.261.000.00
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	145.000.000.00	12 Laporan	145.000.000.00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa perkantoran	100%	623.198.000.00	100%	623.198.000.00
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	218.340.000.00	12 Laporan	218.340.000.00
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	225.098.000.00	12 Laporan	225.098.000.00
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	179.760.000.00	12 Laporan	179.760.000.00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset kantor yang layak fungsi	100%	651.783.700.00	100%	651.783.700.00
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 Unit	534.604.700.00	67 Unit	534.604.700.00
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	97.179.000.00	102 Unit	97.179.000.00
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000.00	1 Unit	20.000.000.00
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	22.914.150.300.00	100%	22.914.150.300.00
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Tibum Tranmas	100%	10.325.374.300.00	100%	10.325.374.300.00
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli. Pengamanan. dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli. Pengamanan. dan Pengawalan	120 Kasus	2.365.848.600.00	120 Kasus	2.365.848.600.00
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	79 Kasus	37.052.100.00	79 Kasus	37.052.100.00
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	14 Dokumen	329.575.700.00	14 Dokumen	329.575.700.00
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65 Dokumen	7.347.232.700.00	65 Dokumen	7.347.232.700.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1665 Orang	245.665.200.00	1665 Orang	245.665.200.00
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	100%	12.547.995.000.00	100%	12.547.995.000.00
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	112 Laporan	6.601.328.560.00	112 Laporan	6.601.328.560.00
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	86.660.000.00	12 Laporan	86.660.000.00
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	132 Laporan	5.860.006.440.00	132 Laporan	5.860.006.440.00
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas PPNS	100%	40.781.000.00	100%	40.781.000.00
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3 Laporan	40.781.000.00	3 Laporan	40.781.000.00
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	8.195.515.600.00	100%	8.195.515.600.00
1	05	04	2.01		Pencegahan. Pengendalian. Pemadaman. Penyelamatan. dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran	100%	7.914.103.600.00	100%	7.914.103.600.00
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	130 Dokumen	1.523.402.600.00	130 Dokumen	1.523.402.600.00
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	135 Laporan	96.395.000.00	135 Laporan	96.395.000.00
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan. Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	399 Unit	6.294.306.000.00	399 Unit	6.294.306.000.00
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	281.412.000.00	100%	281.412.000.00
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	720 Orang	208.654.000.00	720 Orang	208.654.000.00
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 Desa/Kelurahan	72.758.000.00	5 Desa/Kelurahan	72.758.000.00
TOTAL								**41.277.830.089.00**		**41.277.830.089.00**
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			**6.115.213.303.00**		**10.898.966.233.00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.115.213.303.00		10.898.966.233.00
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6.115.213.303.00		10.898.966.233.00
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen/Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang baik atau Sesuai Regulasi	100%	3.694.570.303.00	100%	5.681.557.656.00
1	05	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Rencana. Anggaran dan Evaluasi	100%	16.666.667.00	100%	52.500.000.00
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	16.666.667.00	1 Laporan	52.500.000.00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	2.079.041.636.00	100%	2.234.873.168.00
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/bulan	1.723.887.215.00	156 Orang/bulan	1.810.081.576.00
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	345.154.421.00	12 Dokumen	362.412.142.00
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.000.000.00	12 Dokumen	62.379.450.00
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang Akurat dan Sesuai Ketentuan	100%	98.495.000.00	100%	173.759.250.00
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	65.000.000.00	60 Paket	68.250.000.00
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	33.495.000.00	31 Orang	105.509.250.00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah	100%	218.806.000.00	100%	472.821.300.00
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	8.000.000.00	15 Paket	26.250.000.00
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46 Paket	14.000.000.00	46 Paket	18.900.000.00
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	75 Paket	17.500.000.00	75 Paket	36.750.000.00
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	12.306.000.00	15 Paket	12.921.300.00
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12.000.000.00	12 Dokumen	84.000.000.00
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	55.000.000.00	12 Laporan	84.000.000.00
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	100.000.000.00	60 Laporan	210.000.000.00
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi	100%	725.000.000.00	100%	1.840.000.000.00
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	900.000.000,00	0 Unit	0,00
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	550.000.000.00	4 Unit	1.500.000.000.00
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	100.000.000.00	10 Unit	100.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	75.000.000.00	10 Unit	40.000.000.00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Operasional Kantor yang Tersedia	100%	46.561.000.00	100%	49.198.622.00
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan	4.746.000.00	14 Laporan	4.983.300.00
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	41.815.000.00	48 Laporan	44.215.322.00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	100%	510.000.000.00	100%	858.405.316.00
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	470.000.000.00	22 Unit	561.965.296.00
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000.00	1 Unit	230.000.000.00
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit	25.000.000.00	70 Unit	66.440.020.00
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Layanan Penanggulangan Bencana yang Berkualitas	100%	2.420.643.000.00	100%	5.217.408.577.00
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Rawan Bencana yang Tersampaikan	83 Kegiatan	657.110.000.00	83 Kegiatan	1.837.500.000.00
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	3320 Orang	657.110.000.00	3320 Orang	1.837.500.000.00
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	1.295.783.000.00	100%	2.539.908.577.00
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	840 Orang	115.844.000.00	840 Orang	861.000.000.00
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	582.028.000.00	12 Dokumen	525.000.000.00
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara. Keluarga. maupun Petugas	13 Unit	19.950.000.00	13 Unit	87.570.891.00
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	2.320.000.00	1 Dokumen	2.728.688.00
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 Kawasan	229.388.000.00	4 Kawasan	325.500.000.00
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang	12.082.000.00	30 Orang	11.508.998.00
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	0 Dokumen	0.00	1 Dokumen	210.000.000.00
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1000 Orang	194.079.000.00	1000 Orang	367.500.000.00
1	05	03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	100.000.000.00	1 Dokumen	105.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	05	03	2.02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20 Keluarga	40.092.000.00	20 Keluarga	44.100.000.00
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	300.000.000.00	100%	525.000.000.00
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	5.000.000.00	1 Laporan	15.750.000.00
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	10 Dokumen	65.000.000.00	10 Dokumen	126.000.000.00
1	05	03	2.03	03	Pencarian. Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan. Ditolong. dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1000 Orang	65.000.000.00	1000 Orang	52.500.000.00
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Orang	150.000.000.00	200 Orang	262.500.000.00
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	10.000.000.00	1 Laporan	52.500.000.00
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	5.000.000.00	1 Dokumen	15.750.000.00
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	9 Laporan	167.750.000.00	9 Laporan	315.000.000.00
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	36.500.000.00	1 Dokumen	31.500.000.00
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	14.125.000.00	1 Dokumen	63.000.000.00
1	05	03	2.04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	14.125.000.00	1 Dokumen	15.750.000.00
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	12.000.000.00	1 Dokumen	21.000.000.00
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	36.500.000.00	1 Laporan	78.750.000.00
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	54.500.000.00	1 Dokumen	105.000.000.00
TOTAL								**6.115.213.303.00**		**10.898.966.233.00**
					DINAS SOSIAL			**23.816.074.095.00**		**25.006.877.800.00**
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			23.816.074.095.00		25.006.877.800.00
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			23.816.074.095.00		25.006.877.800.00
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	7.300.027.091.00	100%	7.665.028.446.00
1	06	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana. anggaran dan evaluasi	100%	114.494.000.00	100%	120.218.700.00
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	32.200.000.00	6 Dokumen	33.810.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	5.000.000.00	4 Dokumen	5.250.000.00
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	5.000.000.00	4 Dokumen	5.250.000.00
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	5.000.000.00	4 Dokumen	5.250.000.00
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	5.000.000.00	4 Dokumen	5.250.000.00
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	25.000.000.00	1 Laporan	26.250.000.00
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	37.294.000.00	1 Laporan	39.158.700.00
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat pertanggungjawabkan	100%	4.241.460.587.00	100%	4.453.533.616.00
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/bulan	3.619.083.587.00	300 Orang/bulan	3.800.037.766.00
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	324 Dokumen	574.377.000.00	324 Dokumen	603.095.850.00
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	23.000.000.00	2 Laporan	24.150.000.00
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 Laporan	25.000.000.00	36 Laporan	26.250.000.00
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100%	44.450.000.00	100%	46.672.500.00
1	06	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	11.200.000.00	5 Dokumen	11.760.000.00
1	06	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.750.000.00	1 Dokumen	1.837.500.00
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	21.000.000.00	12 Laporan	22.050.000.00
1	06	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	50 Dokumen	10.500.000.00	50 Dokumen	11.025.000.00
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	275.345.000.00	100%	289.112.250.00
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	7.500.000.00	1 Paket	7.875.000.00
1	06	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	6.720.000.00	4 Dokumen	7.056.000.00
1	06	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	4.500.000.00	4 Dokumen	4.725.000.00
1	06	01	2.05	05	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	6.625.000.00	4 Dokumen	6.956.250.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	250.000.000.00	25 Orang	262.500.000.00
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	425.867.574.00	100%	447.160.953.00
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.000.000.00	2 Paket	3.150.000.00
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	47.956.514.00	10 Paket	50.354.340.00
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	33.881.980.00	10 Paket	35.576.079.00
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	65.997.580.00	30 Laporan	69.297.459.00
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	150.531.500.00	72 Laporan	158.058.075.00
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	4.500.000.00	5 Dokumen	4.725.000.00
1	06	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	120.000.000.00	1 Dokumen	126.000.000.00
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	1.025.200.000.00	100%	1.076.460.000.00
1	06	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	350.000.000.00	2 Unit	367.500.000.00
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	420.000.000.00	4 Unit	441.000.000.00
1	06	01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	8 Unit	3.000.000.00	8 Unit	3.150.000.00
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	164.000.000.00	35 Unit	172.200.000.00
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.200.000.00	1 Unit	3.360.000.00
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.000.000.00	1 Unit	63.000.000.00
1	06	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	25.000.000.00	3 Unit	26.250.000.00
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang opersional kantor yang tersedia	100%	308.999.000.00	100%	324.448.950.00
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	7.000.000.00	1000 Laporan	7.350.000.00
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	156.999.000.00	36 Laporan	164.848.950.00
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	49.840.000.00	10 Laporan	52.332.000.00
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	95.160.000.00	12 Laporan	99.918.000.00
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	864.210.930.00	100%	907.421.477.00
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	263.740.000.00	20 Unit	276.927.000.00
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	380.000.000.00	16 Unit	399.000.000.00
1	06	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	32.000.000.00	1 Unit	33.600.000.00
1	06	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	175.000.000.00	1 Unit	183.750.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	13.470.930.00	1 Unit	14.144.477.00
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskinyang diberdayakan	100%	2.180.000.000.00	100%	2.289.000.000.00
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Keluarga miskin yang mendapatkan manfaat	100%	300.000.000.00	100%	315.000.000.00
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	290 Keluarga	225.000.000.00	290 Keluarga	236.250.000.00
1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Keluarga	75.000.000.00	25 Keluarga	78.750.000.00
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumbangan yang tersalurkan	100%	50.000.000.00	100%	52.500.000.00
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4 Dokumen	50.000.000.00	4 Dokumen	52.500.000.00
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Orang yang mendapatkan Pelayanan	100%	1.830.000.000.00	100%	1.921.500.000.00
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	350.000.000.00	24 Orang	367.500.000.00
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	450.000.000.00	24 Orang	472.500.000.00
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	365 Keluarga	150.000.000.00	365 Keluarga	157.500.000.00
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Lembaga	875.000.000.00	12 Lembaga	918.750.000.00
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Sertifikat	5.000.000.00	15 Sertifikat	5.250.000.00
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi	100%	1.964.202.160.00	100%	2.062.412.268.00
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi	100%	1.534.469.470.00	100%	1.611.192.944.00
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2405 Orang	1.012.050.000.00	2405 Orang	1.062.652.500.00
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	240 Orang	49.500.000.00	240 Orang	51.975.000.00
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	27.008.640.00	15 Orang	28.359.072.00
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	26.260.000.00	20 Orang	27.573.000.00
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual. dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang	24.349.830.00	280 Orang	25.567.322.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	315 Orang	63.025.000.00	315 Orang	66.176.250.00
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan. Akta Kelahiran. Surat Nikah. dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan. Akta Kelahiran. Surat Nikah. dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	31.770.000.00	100 Orang	33.358.500.00
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	17.870.000.00	50 Orang	18.763.500.00
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	365 Orang	197.193.000.00	365 Orang	207.052.650.00
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	4.774.000.00	60 Orang	5.012.700.00
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	1.834.000.00	60 Orang	1.925.700.00
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	78.835.000.00	75 Orang	82.776.750.00
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase pemerlu yang mendapatkan Pelayanan rehabilitasi sosial	100%	429.732.690.00	100%	451.219.324.00
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	9.976.000.00	24 Orang	10.474.800.00
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	4.774.000.00	60 Orang	5.012.700.00
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	37.152.000.00	24 Orang	39.009.600.00
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	7.200.000.00	24 Orang	7.560.000.00
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	122.800.000.00	24 Orang	128.940.000.00
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	3.000.000.00	24 Orang	3.150.000.00
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual. dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	50.000.000.00	75 Orang	52.500.000.00
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	51.092.690.00	75 Orang	53.647.324.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan. Akta Kelahiran. Surat Nikah. dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan. Kartu Tanda Penduduk. Akta Kelahiran. Surat Nikah. dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	23.827.500.00	75 Orang	25.018.875.00
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	15.000.000.00	75 Orang	15.750.000.00
1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	32.472.600.00	75 Orang	34.096.230.00
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	34.800.000.00	75 Orang	36.540.000.00
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	37.000.000.00	30 Orang	38.850.000.00
1	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	30 Dokumen	637.900.00	30 Dokumen	669.795.00
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima bantuan sosial sesuai data DTKS	100%	10.596.344.844.00	100%	11.126.162.086.00
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang Valid	100%	10.596.344.844.00	100%	11.126.162.086.00
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1 Orang	1.000.000.00	1 Orang	1.050.000.00
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	86571 Keluarga	212.000.000.00	86571 Keluarga	222.600.000.00
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	86571 Keluarga	10.382.344.844.00	86571 Keluarga	10.901.462.086.00
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	1.000.000.00	1 Orang	1.050.000.00
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan	100%	1.325.000.000.00	100%	1.391.250.000.00
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan	100%	750.000.000.00	100%	787.500.000.00
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	250.000.000.00	1500 Orang	262.500.000.00
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000.00	100 Orang	105.000.000.00
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Unit	250.000.000.00	100 Unit	262.500.000.00
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	50.000.000.00	100 Orang	52.500.000.00
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000.00	100 Orang	105.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan Kegiatan di kampung Bencana	100%	575.000.000.00	100%	603.750.000.00
1	06	06	2.02	01	Koordinasi. Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi. Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	225.000.000.00	3 Kampung	236.250.000.00
1	06	06	2.02	02	Koordinasi. Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi. Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	350.000.000.00	100 Orang	367.500.000.00
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dikelola sesuai dengan standart	100%	450.500.000.00	100%	473.025.000.00
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100%	450.500.000.00	100%	473.025.000.00
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	11 Dokumen	50.000.000.00	11 Dokumen	52.500.000.00
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	11 Makam	300.000.000.00	11 Makam	315.000.000.00
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	100.500.000.00	12 Laporan	105.525.000.00
TOTAL								**23.816.074.095.00**		**25.006.877.800.00**
					DINAS KETENAGAKERJAAN			**16.590.024.201.00**		**17.090.024.201.00**
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			16.590.024.201.00		17.090.024.201.00
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			16.590.024.201.00		17.090.024.201.00
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	80%	10.150.000.000.00	80%	10.150.000.000.00
2	07	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	150.000.000.00	5 Laporan	150.000.000.00
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	150.000.000.00	5 Laporan	150.000.000.00
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	4 Laporan	6.800.000.000.00	4 Laporan	6.800.000.000.00
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	5.500.000.000.00	12 Orang/bulan	5.500.000.000.00
2	07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.200.000.000.00	12 Dokumen	1.200.000.000.00
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	100.000.000.00	12 Dokumen	100.000.000.00
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	81%	450.000.000.00	82%	450.000.000.00
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000.00	1 Paket	50.000.000.00
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.000.000.00	1 Paket	100.000.000.00
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	100.000.000.00	4 Laporan	100.000.000.00
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	200.000.000.00	10 Laporan	200.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	1 Unit	570.000.000.00	1 Unit	570.000.000.00
2	07	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	200.000.000.00	1 Unit	200.000.000.00
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	70.000.000.00	20 Unit	70.000.000.00
2	07	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	20.000.000.00	1 Unit	20.000.000.00
2	07	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	280.000.000.00	1 Unit	280.000.000.00
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang opersional kantor yang tersedia	70.5%	1.270.000.000.00	71%	1.270.000.000.00
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	950.000.000.00	12 Laporan	950.000.000.00
2	07	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	100.000.000.00	5 Laporan	100.000.000.00
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	220.000.000.00	4 Laporan	220.000.000.00
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	70.5%	910.000.000.00	71%	910.000.000.00
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	480.000.000.00	8 Unit	480.000.000.00
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	45.000.000.00	20 Unit	45.000.000.00
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	185.000.000.00	1 Unit	185.000.000.00
2	07	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000.00	1 Unit	200.000.000.00
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	50%	3.520.024.201.00	50%	4.020.024.201.00
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan berbasis Kompetensi	600 Peserta	3.125.024.201.00	600 Peserta	3.625.024.201.00
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	480 Orang	2.850.024.201.00	480 Orang	3.350.024.201.00
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	5 Lembaga	75.000.000.00	5 Lembaga	75.000.000.00
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Unit	200.000.000.00	1 Unit	200.000.000.00
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Pembinaan Lembaga LPK Swasta	30%	125.000.000.00	30%	125.000.000.00
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 Lembaga	125.000.000.00	5 Lembaga	125.000.000.00
2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	100%	115.000.000.00	100%	115.000.000.00
2	07	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 Perizinan	115.000.000.00	5 Perizinan	115.000.000.00
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	50%	125.000.000.00	50%	125.000.000.00
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	5 Perusahaan	125.000.000.00	5 Perusahaan	125.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang memperoleh Konsultasi Produktivitas Kerja	50%	30.000.000.00	50%	30.000.000.00
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4 Dokumen	30.000.000.00	4 Dokumen	30.000.000.00
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan formal	50%	1.700.000.000.00	50%	1.700.000.000.00
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	60%	830.000.000.00	60%	830.000.000.00
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	500 Orang	150.000.000.00	500 Orang	150.000.000.00
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	200.000.000.00	500 Orang	200.000.000.00
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	20 Orang	180.000.000.00	20 Orang	180.000.000.00
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	60 Orang	300.000.000.00	60 Orang	300.000.000.00
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Informasi Pasar Kerja	60%	520.000.000.00	60%	520.000.000.00
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	4 Dokumen	70.000.000.00	4 Dokumen	70.000.000.00
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1000 Orang	125.000.000.00	1000 Orang	125.000.000.00
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	500 Orang	325.000.000.00	500 Orang	325.000.000.00
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Perlindungan PMI (PMI Pra dan Purna Penempatan) di Daerah)	80%	250.000.000.00	80%	250.000.000.00
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	10 Orang	250.000.000.00	10 Orang	250.000.000.00
2	07	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perusahaan Pengguna TKA	20 Koordinasi	100.000.000.00	20 Koordinasi	100.000.000.00
2	07	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring dan evaluasi Kepada Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	100 Perusahaan	100.000.000.00	100 Perusahaan	100.000.000.00
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB. LKS Bipartit. Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	62%	1.220.000.000.00	62%	1.220.000.000.00
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan terdaftar yang Melaksanakan Pengesahan PP yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLPK Online	75 Kasus	440.000.000.00	75 Kasus	440.000.000.00
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	30 Perusahaan	150.000.000.00	30 Perusahaan	150.000.000.00
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	10 Perusahaan	120.000.000.00	10 Perusahaan	120.000.000.00
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB. Struktur Skala Upah. dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Laporan	170.000.000.00	10 Laporan	170.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	50 Kasus	780.000.000.00	50 Kasus	780.000.000.00
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja. dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	130.000.000.00	20 Perkara	130.000.000.00
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja. dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	25 Perkara	115.000.000.00	25 Perkara	115.000.000.00
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha. Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	110.000.000.00	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	110.000.000.00
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	10 Lembaga	425.000.000.00	10 Lembaga	425.000.000.00
TOTAL								**16.590.024.201.00**		**17.090.024.201.00**
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			**29.805.316.849.00**		**29.805.316.849.00**
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			29.805.316.849.00		29.805.316.849.00
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			8.592.906.102.00		8.592.906.102.00
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	7.190.406.102.00	100%	7.190.406.102.00
2	08	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana. anggaran. dan evaluasi	100%	122.000.000.00	100%	122.000.000.00
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	100.000.000.00	3 Dokumen	100.000.000.00
2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	22.000.000.00	2 Laporan	22.000.000.00
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	5.785.106.102.00	100%	5.785.106.102.00
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	4.112.846.502.00	23 Orang/bulan	4.112.846.502.00
2	08	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.578.759.600.00	12 Dokumen	1.578.759.600.00
2	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	93.500.000.00	12 Dokumen	93.500.000.00
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	11.000.000.00	100%	11.000.000.00
2	08	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	11.000.000.00	1 Orang	11.000.000.00
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	199.100.000.00	100%	199.100.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65 Paket	60.500.000.00	65 Paket	60.500.000.00
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	28.600.000.00	17 Paket	28.600.000.00
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Laporan	110.000.000.00	44 Laporan	110.000.000.00
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	92.000.000.00	100%	92.000.000.00
2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	15.000.000.00	2 Unit	15.000.000.00
2	08	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	22.000.000.00	1 Unit	22.000.000.00
2	08	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	55.000.000.00	2 Unit	55.000.000.00
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang opersional kantor yang tersedia	100%	717.200.000.00	100%	717.200.000.00
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	715.000.000.00	36 Laporan	715.000.000.00
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.200.000.00	12 Laporan	2.200.000.00
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	264.000.000.00	100%	264.000.000.00
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	165.000.000.00	11 Unit	165.000.000.00
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	22.000.000.00	1 Unit	22.000.000.00
2	08	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	77.000.000.00	2 Unit	77.000.000.00
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender	23.1%	572.000.000.00	23.15%	572.000.000.00
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	100%	352.000.000.00	100%	352.000.000.00
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	44.000.000.00	6 Dokumen	44.000.000.00
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Dokumen	44.000.000.00	55 Dokumen	44.000.000.00
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Perangkat Daerah	44.000.000.00	55 Perangkat Daerah	44.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Perangkat Daerah	220.000.000.00	55 Perangkat Daerah	220.000.000.00
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi masyarakat perempuan yang mendapat pelatihan	100%	220.000.000.00	100%	220.000.000.00
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	220.000.000.00	10 Dokumen	220.000.000.00
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan. termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	9.76%	176.000.000.00	9.5%	176.000.000.00
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100%	66.000.000.00	100%	66.000.000.00
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	66.000.000.00	2 Dokumen	66.000.000.00
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang terstandarisasi	30 Layanan	110.000.000.00	40 Layanan	110.000.000.00
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	30 Orang	22.000.000.00	30 Orang	22.000.000.00
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Layanan	88.000.000.00	30 Layanan	88.000.000.00
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase terpenuhinya hak anak di kabupaten	100%	462.000.000.00	100%	462.000.000.00
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anggota gugus tugas peserta rakor kelembagaan PHA	100%	132.000.000.00	100%	132.000.000.00
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Dokumen	132.000.000.00	30 Dokumen	132.000.000.00
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100%	330.000.000.00	100%	330.000.000.00
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	330.000.000.00	24 Dokumen	330.000.000.00
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	192.500.000.00	100%	192.500.000.00
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan yang melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak	100%	22.000.000.00	100%	22.000.000.00
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	22.000.000.00	2 Dokumen	22.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan bagi anak korban kekerasan yang terstandarisasi	80 Layanan	165.000.000.00	85 Layanan	165.000.000.00
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	132.000.000.00	80 Orang	132.000.000.00
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Layanan	33.000.000.00	80 Layanan	33.000.000.00
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 Layanan	5.500.000.00	1 Layanan	5.500.000.00
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.500.000.00	1 Dokumen	5.500.000.00
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			**46.695.282.375.00**		**64.491.805.724.00**
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.163.061.887.00		4.267.584.019.00
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			1.163.061.887.00		4.267.584.019.00
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	50.000.000.00	100%	50.000.000.00
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2%	50.000.000.00	2%	50.000.000.00
2	09	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	50.000.000.00	3 Orang	50.000.000.00
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Pemanfaatan Infrastruktur Pangan	80.05%	199.014.354.00	80.1%	2.596.817.224.00
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Infrastruktur Pangan	5%	199.014.354.00	5%	2.596.817.224.00
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	1 Unit	25.000.000.00	1 Unit	734.400.000.00
2	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	1 Unit	25.000.000.00	1 Unit	122.400.000.00
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	25.000.000.00	1 Unit	1.591.200.000.00
2	09	02	2.01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	1 Dokumen	124.014.354.00	1 Dokumen	148.817.224.00
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86.5	759.657.885.00	87	1.435.499.218.00
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rasio Ketersediaan Pangan	2.58	303.834.480.00	2.58	533.397.696.00
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12 Laporan	27.146.280.00	12 Laporan	32.575.536.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	6 Unit	26.688.200.00	6 Unit	32.025.840.00
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	3 Unit	250.000.000.00	3 Unit	468.796.320.00
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86.5	455.823.405.00	87	902.101.522.00
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	5.823.405.00	1 Dokumen	6.988.086.00
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	8 Laporan	450.000.000.00	8 Laporan	895.113.436.00
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa/kelurahan rawan pangan yang tertangani	6%	86.799.552.00	8.1%	104.159.462.00
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa rawan pangan yang dibina	3 Desa	86.799.552.00	3 Desa	104.159.462.00
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan. Pengelolaan. dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan. Pengelolaan. dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	86.799.552.00	3 Dokumen	104.159.462.00
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	100%	67.590.096.00	100%	81.108.115.00
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sample bahan Pangan Segar yang diawasi	100%	67.590.096.00	100%	81.108.115.00
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	15 Dokumen	67.590.096.00	15 Dokumen	81.108.115.00
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP			**37.143.314.761.00**		**37.143.314.761.00**
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			37.143.314.761.00		37.143.314.761.00
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			37.143.314.761.00		37.143.314.761.00
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	12.411.049.768.00	100%	12.411.049.768.00
2	11	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana. anggaran dan evaluasi	100%	240.256.100.00	100%	240.256.100.00
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	107.238.000.00	3 Dokumen	107.238.000.00
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	28.036.000.00	2 Dokumen	28.036.000.00
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	10.988.000.00	2 Dokumen	10.988.000.00
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.985.000.00	2 Dokumen	5.985.000.00
2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	5.988.000.00	2 Dokumen	5.988.000.00
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	26.093.700.00	4 Laporan	26.093.700.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	55.927.400.00	3 Laporan	55.927.400.00
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	9.913.069.318.00	100%	9.913.069.318.00
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	8.676.690.317.00	80 Orang/bulan	8.676.690.317.00
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	1.191.683.601.00	36 Dokumen	1.191.683.601.00
2	11	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen	5.129.800.00	6 Dokumen	5.129.800.00
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	20.000.000.00	19 Laporan	20.000.000.00
2	11	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	19.565.600.00	2 Dokumen	19.565.600.00
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yang akurat dan sesuai dengan ketentuan	100%	12.297.000.00	100%	12.297.000.00
2	11	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7 Dokumen	2.297.000.00	7 Dokumen	2.297.000.00
2	11	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	10.000.000.00	8 Dokumen	10.000.000.00
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	50.200.000.00	100%	50.200.000.00
2	11	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	355 Unit	10.200.000.00	355 Unit	10.200.000.00
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	40.000.000.00	20 Orang	40.000.000.00
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	1.013.345.425.00	100%	1.013.345.425.00
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 Paket	10.000.000.00	48 Paket	10.000.000.00
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	482.999.985.00	6 Paket	482.999.985.00
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8.000.000.00	8 Paket	8.000.000.00
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	56.925.540.00	9 Paket	56.925.540.00
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	77.619.900.00	12 Paket	77.619.900.00
2	11	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	8.472.000.00	6 Paket	8.472.000.00
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000.00	12 Laporan	20.000.000.00
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	349.328.000.00	12 Laporan	349.328.000.00
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	103.061.000.00	100%	103.061.000.00
2	11	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	25.000.000.00	1 Unit	25.000.000.00
2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	25.000.000.00	1 Unit	25.000.000.00
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	3.061.000.00	10 Unit	3.061.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	25.000.000.00	5 Unit	25.000.000.00
2	11	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 Unit	25.000.000.00	18 Unit	25.000.000.00
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	394.433.225.00	100%	394.433.225.00
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	318.301.825.00	48 Laporan	318.301.825.00
2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	76.131.400.00	5 Laporan	76.131.400.00
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	684.387.700.00	100%	684.387.700.00
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	413.311.200.00	6 Unit	413.311.200.00
2	11	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	1.050.000.00	12 Unit	1.050.000.00
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	33.851.500.00	8 Unit	33.851.500.00
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	202.125.000.00	2 Unit	202.125.000.00
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	34.050.000.00	2 Unit	34.050.000.00
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas	44.44%	864.980.500.00	66.67%	864.980.500.00
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	59.32%	184.262.300.00	62.71%	184.262.300.00
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	100.000.000.00	2 Dokumen	100.000.000.00
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	84.262.300.00	1 Dokumen	84.262.300.00
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase efektivitas KLHS dalam upaya perlindungan lingkungan hidup	20%	680.718.200.00	66.67%	680.718.200.00
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	376.494.516	1 Dokumen	264.380.760
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	680.718.200.00	1 Dokumen	680.718.200.00
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase meningkatnya luasan lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis	40%	2.231.192.540.00	50%	2.231.192.540.00
						Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air dan udara	55%		60%	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah. air. udara dan laut	100%	1.508.998.840.00	100%	1.508.998.840.00
						Persentase sektor dokumen inventarisasi GRK yang dilaksanakan	40%		80%	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah. Air. Udara. dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah. Air. Udara. dan Laut	119 Dokumen	305.169.300.00	119 Dokumen	305.169.300.00
2	11	03	2.01	02	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	95.058.800.00	2 Dokumen	95.058.800.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji. Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1204 Dokumen	1.108.770.740.00	1204 Dokumen	1.108.770.740.00
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	5%	373.570.700.00	6%	373.570.700.00
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	50 Laporan	200.000.000.00	50 Laporan	200.000.000.00
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	4 Titik	173.570.700.00	4 Titik	173.570.700.00
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	23%	348.623.000.00	29%	348.623.000.00
2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 Dokumen	50.000.000.00	1 Dokumen	50.000.000.00
2	11	03	2.03	03	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1 Dokumen	50.000.000.00	1 Dokumen	50.000.000.00
2	11	03	2.03	04	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	12 Dokumen	198.623.000.00	12 Dokumen	198.623.000.00
2	11	03	2.03	05	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1 Dokumen	50.000.000.00	1 Dokumen	50.000.000.00
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan luasan RTH publik (minimal 20% wilayah perkotaan di Kab. Pasuruan)	8.8%	3.483.753.153.00	9.35%	3.483.753.153.00
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan luasan RTH publik dalam satu tahun	12.5%	3.483.753.153.00	17.65%	3.483.753.153.00
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	154.849.000.00	1 Dokumen	154.849.000.00
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	800 Ha	3.328.904.153.00	800 Ha	3.328.904.153.00
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pendampingan/Pembinaan/Sosialisasi pengelolaan B3 dan LB3 di Wilayah Kabupaten Pasuruan	33%	467.088.350.00	67%	467.088.350.00
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase pemenuhan pesyaratan teknis penyimpanan Limbah B3	100%	303.155.950.00	100%	303.155.950.00
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	30 Dokumen	261.616.300.00	30 Dokumen	261.616.300.00
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	30 Laporan	41.539.650.00	30 Laporan	41.539.650.00
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pengumpulan Limbah B3 di Wilayah Kabupaten	100%	163.932.400.00	100%	163.932.400.00
2	11	05	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	13.932.400.00	1 Dokumen	13.932.400.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan. Pemanfaatan. Pengolahan. dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan. Pemanfaatan. Pengolahan. dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	3 Dokumen	150.000.000.00	3 Dokumen	150.000.000.00
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan. Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	53%	818.430.000.00	47%	818.430.000.00
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan	15.3%	818.430.000.00	16.38%	818.430.000.00
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis. Persetujuan Lingkungan. dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	45 Dokumen	506.535.000.00	45 Dokumen	506.535.000.00
2	11	06	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis. Persetujuan Lingkungan. dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	5 Orang	19.537.300.00	5 Orang	19.537.300.00
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup. Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan. Persetujuan Lingkungan. Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15 Laporan	275.052.000.00	15 Laporan	275.052.000.00
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	15 Dokumen	17.305.700.00	15 Dokumen	17.305.700.00
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA). KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA	25%	63.284.900.00	33%	63.284.900.00
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA. Kearifan Lokal. Pengetahuan Tradisional. dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang diakui	1 Lembaga	30.000.000.00	1 Lembaga	30.000.000.00
2	11	07	2.01	01	Koordinasi. Sinkronisasi. Penyediaan Data. dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	8 Dokumen	30.000.000.00	8 Dokumen	30.000.000.00
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal. Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas	2 Lembaga	33.284.900.00	3 Lembaga	33.284.900.00
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan. Kemitraan. Pendampingan. dan Penguatan Kelembagaan MHA. Kearifan Lokal. Pengetahuan Tradisional. dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA. Kearifan Lokal. Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan. Kemitraan. Pendampingan dan Penguatan	2 Dokumen	33.284.900.00	2 Dokumen	33.284.900.00
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN. PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga Sekolah. Perusahaan. Ponpes. Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	5.16%	371.482.500.00	7.54%	371.482.500.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan. Pelatihan. dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	88 Lembaga	371.482.500.00	95 Lembaga	371.482.500.00
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen	371.482.500.00	4 Dokumen	371.482.500.00
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	2.8%	93.210.700.00	3.17%	93.210.700.00
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH sesuai standar	4.58%	93.210.700.00	4.93%	93.210.700.00
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4 Entitas	93.210.700.00	4 Entitas	93.210.700.00
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Meningkatnya ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH Kabupaten	100%	120.449.700.00	100%	120.449.700.00
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten yang diselesaikan	100%	120.449.700.00	100%	120.449.700.00
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	15 Dokumen	95.824.160.00	15 Dokumen	95.824.160.00
2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi. Penyelesaian Sengketa. dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi. Penyelesaian Sengketa. dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	15 Dokumen	24.625.540.00	15 Dokumen	24.625.540.00
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase capaian pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	79.3%	16.218.392.650.00	78%	16.218.392.650.00
						Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA	32.1%		43.7%	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase capaian penanganan sampah	22.8%	16.218.392.650.00	30.6%	16.218.392.650.00
						Persentase capaian pengurangan sampah;	22.2%		23.4%	
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	2 Dokumen	5.318.200.00	2 Dokumen	5.318.200.00
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan. Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan. Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 Laporan	1.377.672.500.00	1 Laporan	1.377.672.500.00
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan. Pengumpulan. Pengangkutan. Pengolahan. dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah. Dikumpulkan. Diangkut. Diolah. Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	97.778 Ton	14.015.857.750.00	97.778 Ton	14.015.857.750.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat. Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	33 Kelompok	380.927.700.00	33 Kelompok	380.927.700.00
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat. Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	53.581.600.00	1 Dokumen	53.581.600.00
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan. Pengumpulan. Pengangkutan. Pengolahan. dan Pemrosesan Akhir	18 Unit	385.034.900.00	18 Unit	385.034.900.00
TOTAL								**37.143.314.761.00**		**37.143.314.761.00**
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			**12.711.763.820.00**		**16.769.794.940.00**
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			12.711.763.820.00		16.769.794.940.00
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			12.711.763.820.00		16.769.794.940.00
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81.20	11.519.336.135.00	81.40	14.609.794.940.00
2	12	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	175.557.700.00	100%	329.794.940.00
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.997.000.00	2 Dokumen	50.000.000.00
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	154.560.700.00	1 Laporan	179.794.940.00
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan	100%	8.230.403.000.00	100%	9.240.000.000.00
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	6.435.963.000.00	50 Orang/bulan	7.200.000.000.00
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	1.694.480.000.00	2 Dokumen	1.920.000.000.00
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	99.960.000.00	12 Dokumen	120.000.000.00
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	1.210.935.813.00	100%	505.000.000.00
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	661.338.000.00	15 Paket	1.830.000.000.00
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	114.559.160.00	5 Paket	125.000.000.00
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25.947.480.00	2 Paket	35.000.000.00
2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	74.361.173.00	1 Paket	85.000.000.00
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.810.000.00	12 Laporan	50.000.000.00
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	293.920.000.00	12 Laporan	335.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	958.476.080.00	100%	1.315.000.000.00
2	12	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	240.000.000.00	1 Unit	350.000.000.00
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	60.000.000.00	10 Unit	65.000.000.00
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	658.476.080.00	20 Unit	900.000.000.00
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan Jasa Penunjang yang dilaksanakan	100%	432.240.803.00	100%	455.700.000.00
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	40.780.000.00	12 Laporan	50.000.000.00
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	386.810.803.00	12 Laporan	400.000.000.00
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.650.000.00	12 Laporan	5.700.000.00
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang yang dilaksanakan	100%	511.722.739.00	100%	725.000.000.00
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	315.998.239.00	15 Unit	360.000.000.00
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	95.724.500.00	35 Unit	125.000.000.00
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	100.000.000.00	6 Unit	240.000.000.00
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	93%	482.871.200.00	94%	895.000.000.00
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan Kepemilikan Dokumen pendaftaran Kependudukan	100%	64.996.200.00	100%	180.000.000.00
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pendataan bagi WNI yang tidak beridentitas (OTI)	200 Orang	75.000.000.00	200 Orang	90.000.000.00
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	64.996.200.00	12 Laporan	90.000.000.00
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%	291.875.000.00	100%	450.000.000.00
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El. Formulir. dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El. Formulir. dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	291.875.000.00	1 Paket	450.000.000.00
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	0	0.00	100%	100.000.000.00
2	12	02	2.03	01	Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten / Kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	0	0.00	1 Laporan	100.000.000.00
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%	126.000.000.00	100%	165.000.000.00
2	12	02	2.04	02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	12 Laporan	126.000.000.00	12 Laporan	165.000.000.00
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Akta kelahiran	85%	318.252.625.00	87.5%	630.000.000.00
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Akta kelahiran	95%	99.552.625.00	96%	220.000.000.00
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	10.000 Dokumen	99.552.625.00	10.000 Dokumen	135.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	12	03	2.01	07	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El. Formulir. dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Penggandaan Formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk. ribbon KTP	1 Paket	79.000.000.00	1 Paket	85.000.000.00
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Capaiaan kepemilikan dokumen pencatatan sipil secara keliling	100%	299.816.500.00	100%	325.000.000.00
2	12	03	2.02	03	Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten / Kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	0	0.00	1 Laporan	100.000.000.00
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	24 Kecamatan	99.316.500.00	24 Kecamatan	105.000.000.00
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	200 Peserta	150.000.000.00	200 Peserta	165.000.000.00
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Capaiaan kepemilikan dokumen pencatatan sipil secara keliling	100%	50.500.000.00	100%	55.000.000.00
2	12	03	2.03	02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan	300 Desa	50.500.000.00	300 Desa	55.000.000.00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penyediaan database kependudukan dan pencapil di tingkat Kabupaten	100%	270.504.060.00	100%	800.000.000.00
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Penyajian Database kependudukan	24 Kecamatan	18.298.000.00	24 Kecamatan	180.000.000.00
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	18.298.000.00	12 Dokumen	60.000.000.00
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen kerja sama pemanfaatan Data Kependudukan	0	0.00	15 Lembaga	120.000.000.00
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase meningkatnya Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	252.206.060.00	100%	445.000.000.00
2	12	04	2.03	01	Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten / Kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	0	0.00	1 Laporan	75.000.000.00
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	241.329.900.00	12 Laporan	260.000.000.00
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	10.876.160.00	12 Dokumen	55.000.000.00
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi terait PIAK	300 Peserta	50.000.000.00	300 Peserta	55.000.000.00
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase laporan Penyelenggaraan Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	150.000.000.00	100%	175.000.000.00
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	450 Peserta	150.000.000.00	450 Peserta	175.000.000.00
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersedian Data Base yang terkalisifikasi	100%	120.799.800.00	100%	275.000.000.00
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Ketersedian Data Base yang terklasifikasi	100%	120.799.800.00	100%	275.000.000.00
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	330 desa e-kios PAK LADI	23.225.000.00	330 desa e-kios PAK LADI	100.000.000.00
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Paket	97.574.800.00	1 Paket	175.000.000.00
TOTAL								**12.711.763.820.00**		**16.769.794.940.00**
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			**17.965.006.934.00**		**28.491.122.526.80**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.890.381.484.00		28.371.722.526.80
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			17.890.381.484.00		28.371.722.526.80
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	87%	5.875.963.036.00	90%	6.979.653.010.00
2	13	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan pada dokumen rencana. anggaran dan evaluasi	100%	37.374.480.00	100%	59.799.168.00
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	37.374.480.00	12 Dokumen	59.799.168.00
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabakan	100%	5.255.730.896.00	100%	5.781.303.986.00
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	4.882.590.896.00	33 Orang/bulan	5.370.849.986.00
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	277.200.000.00	2 Dokumen	304.920.000.00
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	95.940.000.00	1 Dokumen	105.534.000.00
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	0	0.00	100%	150.000.000.00
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0.00	45 Orang	150.000.000.00
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	100%	227.773.510.00	100%	420.415.216.00
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.514.000.00	2 Paket	50.000.000.00
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0.00	1 Paket	10.000.000.00
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	77.292.510.00	7 Paket	123.668.016.00
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	73.967.000.00	2 Paket	118.347.200.00
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	74.625.450.00	24 Laporan	119.400.000.00
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	74.000.000.00	24 Laporan	118.400.000.00
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	58.949.550.00	100%	94.319.280.00
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	58.949.550.00	3 Laporan	94.319.280.00
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	100%	296.134.600.00	100%	473.815.360.00
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	250.545.500.00	17 Unit	400.872.800.00
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	81 Unit	45.589.100.00	81 Unit	72.942.560.00
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa memiliki sarana prasarana yang memadai	22%	15.000.000.00	29%	55.000.000.00
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitasi sarana prasarana	100 Desa	15.000.000.00	100 Desa	55.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	78 Unit	15.000.000.00	78 Unit	55.000.000.00
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang membentuk Kerjasama antar Desa dan atau dengan Pihak Ketiga	78.89%	25.000.000.00	79.47%	30.000.000.00
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Desa yang mendapat fasilitasi kerjasama	78.89%	25.000.000.00	79.47%	30.000.000.00
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	18 Dokumen	25.000.000.00	18 Dokumen	30.000.000.00
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa yang melaksanakan tata kelola dengan baik	100%	10.174.418.448.00	100%	18.427.069.516.80
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang mendapat dan atau melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa	100%	10.174.418.448.00	100%	18.427.069.516.80
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2 Dokumen	20.000.000.00	2 Dokumen	32.000.000.00
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	24 Dokumen	9.999.800.00	24 Dokumen	15.999.680.00
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	40.000.000.00	3 Dokumen	64.000.000.00
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	3976 Orang	9.200.377.648.00	3976 Orang	14.720.604.236.80
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	188.041.000.00	1 Dokumen	300.865.600.00
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	15 Laporan	200.000.000.00	15 Laporan	1.000.000.000.00
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	20.000.000.00	1 Dokumen	32.000.000.00
2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	4 Dokumen	30.000.000.00	4 Dokumen	48.000.000.00
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	200.000.000.00	1 Dokumen	320.000.000.00
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1023 Orang	20.000.000.00	1023 Orang	1.500.000.000.00
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	30 Desa	216.000.000.00	30 Desa	345.600.000.00
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	30.000.000.00	3 Dokumen	48.000.000.00
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa yang meningkat volume usahanya (Lembaga Ekonomi Desa/Pasar Desa/KUB/UMKM dan atau pemanfaatan TTG)	7.04%	1.800.000.000.00	14.08%	2.880.000.000.00
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memiliki pasar desa dan atau desa yang memanfaatkan TTG	7.04%	1.800.000.000.00	14.08%	2.880.000.000.00
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	300.000.000.00	2 Dokumen	480.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	65.000.000.00	2 Lembaga	104.000.000.00
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dokumen	70.000.000.00	2 Dokumen	112.000.000.00
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	24 Laporan	11.000.000.00	24 Laporan	17.600.000.00
2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman. Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman. Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	4.000.000.00	1 Dokumen	6.400.000.00
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1.350.000.000.00	1 Dokumen	2.160.000.000.00
TOTAL								**17.965.006.934.00**		**28.491.122.526.80**
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			**74.777.500.000.00**		**85.149.570.000.00**
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			21.212.410.747.00		21.212.410.747.00
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kecamatan yang melakukan updating SIGA	100%	842.050.000.00	100%	842.050.000.00
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen GDPK Kabupaten Pasuruan	1 Dokumen	187.000.000.00	1 Dokumen	187.000.000.00
2	14	02	2.01	09	Advokasi. Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS. Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi. Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS. Jalur Nonformal dan Informal	5 Satuan Pendidikan	110.000.000.00	5 Satuan Pendidikan	110.000.000.00
2	14	02	2.01	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	5 Organisasi	77.000.000.00	5 Organisasi	77.000.000.00
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melakukan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	100%	655.050.000.00	100%	655.050.000.00
2	14	02	2.02	01	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	1 Laporan	0.00	1 Laporan	0.00
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	39 Unit	44.000.000.00	39 Unit	44.000.000.00
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	77.682.000.00	12 Laporan	77.682.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	24 Laporan	380.908.000.00	24 Laporan	380.908.000.00
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	24 Dokumen	152.460.000.00	24 Dokumen	152.460.000.00
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR)	73.5%	9.724.109.747.00	73.7%	9.724.109.747.00
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kecamatan yang Melakukan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	100%	1.619.271.415.00	100%	1.619.271.415.00
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	145.200.000.00	5 Organisasi	145.200.000.00
2	14	03	2.01	02	Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	12 Dokumen	132.000.000.00	12 Dokumen	132.000.000.00
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	181.500.000.00	3 Dokumen	181.500.000.00
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam). Rapat Koordinasi Desa (Rakordes). dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam). Rapat Koordinasi Desa (Rakordes). dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	377.520.000.00	1 Laporan	377.520.000.00
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana)	24 Laporan	686.251.415.00	24 Laporan	686.251.415.00
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	96.800.000.00	1 Laporan	96.800.000.00
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase penunjang Tenaga PKB/PLKB	100%	2.153.800.000.00	100%	2.153.800.000.00
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2753 Orang	2.153.800.000.00	2753 Orang	2.153.800.000.00
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Penerima Alat dan Obat Kontrasepsi	100%	5.071.038.332.00	100%	5.071.038.332.00
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	49 Laporan	63.161.758.00	49 Laporan	63.161.758.00
2	14	03	2.03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	35 Orang	100.000.000.00	35 Orang	100.000.000.00
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	750 Orang	2.785.635.259.00	750 Orang	2.785.635.259.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	14	03	2.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	2 Laporan	20.000.000.00	2 Laporan	20.000.000.00
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	3 Unit	1.818.795.315.00	3 Unit	1.818.795.315.00
2	14	03	2.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	45 Orang	150.000.000.00	45 Orang	150.000.000.00
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	12 Laporan	44.000.000.00	12 Laporan	44.000.000.00
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	30 Orang	50.000.000.00	30 Orang	50.000.000.00
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase kecamatan yang melaksanakan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	100%	880.000.000.00	100%	880.000.000.00
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	39 Kampung	880.000.000.00	39 Kampung	880.000.000.00
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan Pembinaan Keluarga aktif melaporkan	58%	10.646.251.000.00	58.15%	10.646.251.000.00
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kecamatan Pelaksana Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	100%	10.602.251.000.00	100%	10.602.251.000.00
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Unit	435.600.000.00	20 Unit	435.600.000.00
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3711 Orang	9.429.651.000.00	3711 Orang	9.429.651.000.00
2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Kelompok	22.000.000.00	2 Kelompok	22.000.000.00
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	24 Laporan	550.000.000.00	24 Laporan	550.000.000.00
2	14	04	2.01	10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	3 Dokumen	55.000.000.00	3 Dokumen	55.000.000.00
2	14	04	2.01	12	Sosialisasi IPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	50 Orang	110.000.000.00	50 Orang	110.000.000.00
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kecamatan Pelaksana Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	100%	44.000.000.00	100%	44.000.000.00
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	12 Laporan	44.000.000.00	12 Laporan	44.000.000.00
TOTAL								**29.805.316.849.00**		**29.805.316.849.00**
					DINAS PERHUBUNGAN			**74.777.500.000.00**		**85.149.570.000.00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			74.777.500.000.00		85.149.570.000.00
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			74.777.500.000.00		85.149.570.000.00
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	46.040.000.000.00	100%	55.735.000.000.00
2	15	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	9 Dokumen	121.000.000.00	9 Dokumen	160.000.000.00
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.000.000.00	2 Dokumen	30.000.000.00
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	40.000.000.00	7 Laporan	55.000.000.00
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	65.000.000.00	2 Laporan	75.000.000.00
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	12 Laporan	11.675.000.000.00	12 Laporan	12.665.000.000.00
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	9.800.000.000.00	81 Orang/bulan	10.600.000.000.00
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.700.000.000.00	12 Dokumen	1.850.000.000.00
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	160.000.000.00	12 Dokumen	180.000.000.00
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000.00	1 Laporan	15.000.000.00
2	15	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	250 Dokumen	5.000.000.00	250 Dokumen	10.000.000.00
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.000.000.00	12 Laporan	10.000.000.00
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	69.500.000.00	100%	85.500.000.00
2	15	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.500.000.00	1 Dokumen	3.000.000.00
2	15	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.500.000.00	1 Dokumen	55.000.000.00
2	15	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	5.000.000.00	4 Laporan	10.500.000.00
2	15	01	2.03	04	Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.000.000.00	2 Laporan	7.000.000.00
2	15	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5.000.000.00	4 Laporan	7.000.000.00
2	15	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	500.000.00	4 Laporan	1.000.000.00
2	15	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	1.000.000.00	12 Dokumen	2.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	12 Laporan	343.000.000.00	12 Laporan	813.500.000.00
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	150.000.000.00	1 Paket	150.000.000.00
2	15	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.000.000.00	12 Dokumen	5.000.000.00
2	15	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	1.000.000.00	4 Dokumen	5.500.000.00
2	15	01	2.05	05	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	15.000.000.00	4 Dokumen	20.000.000.00
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	100.000.000.00	50 Orang	500.000.000.00
2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	25.000.000.00	50 Orang	33.000.000.00
2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50.000.000.00	50 Orang	100.000.000.00
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyedia Jasa Layanan Umum Kantor	11 Kegiatan	390.000.000.00	11 Kegiatan	667.000.000.00
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.000.000.00	12 Paket	70.000.000.00
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	10.000.000.00	12 Paket	39.000.000.00
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.000.000.00	12 Paket	43.000.000.00
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000.00	12 Paket	60.000.000.00
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.000.000.00	12 Dokumen	55.000.000.00
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000.00	12 Laporan	90.000.000.00
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000.00	12 Laporan	310.000.000.00
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	85.000.000.00	12 Laporan	2.590.000.000.00
2	15	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	10.000.000.00	2 Unit	340.000.000.00
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	10.000.000.00	2 Unit	55.000.000.00
2	15	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	10.000.000.00	1 Unit	1.400.000.000.00
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	15.000.000.00	15 Unit	170.000.000.00
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	10.000.000.00	20 Unit	55.000.000.00
2	15	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000.00	1 Unit	340.000.000.00
2	15	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	10.000.000.00	20 Unit	170.000.000.00
2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	10.000.000.00	5 Unit	60.000.000.00
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Laporan	32.002.500.000.00	12 Laporan	36.533.000.000.00
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500.000.00	12 Laporan	11.000.000.00
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.000.000.000.00	12 Laporan	36.500.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.000.000.00	4 Laporan	22.000.000.00
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	12 Laporan	1.354.000.000.00	12 Laporan	2.221.000.000.00
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	1.300.000.000.00	40 Unit	1.440.000.000.00
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	30.000.000.00	40 Unit	340.000.000.00
2	15	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	200 Unit	5.000.000.00	200 Unit	17.000.000.00
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	2.000.000.00	10 Unit	34.000.000.00
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	5.000.000.00	7 Unit	230.000.000.00
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit	10.000.000.00	80 Unit	110.000.000.00
2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	2.000.000.00	20 Unit	50.000.000.00
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum	56%	28.737.500.000.00	61%	29.414.570.000.00
						Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang tersedia	72%		75%	
						Persentase prasarana jalan yang tersedia	65%		65%	
						Persentase kendaraan yang diuji	90%		92%	
						Persentase terlaksananya audit inspeksi keselamatan LLAJ	60%		67%	
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Transportasi	5 Dokumen	1.845.000.000.00	4 Dokumen	2.919.000.000.00
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1.025.000.000.00	4 Dokumen	1.225.000.000.00
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000.00	1 Dokumen	44.000.000.00
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3 Laporan	800.000.000.00	3 Laporan	1.650.000.000.00
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan dan Perlengkapan Jalan yang Terpasang dan Terpelihara	8.010 Unit	16.800.000.000.00	8.115 Unit	16.380.000.000.00
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit	0.00	5 Unit	200.000.000.00
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	800 Unit	13.500.000.000.00	800 Unit	14.100.000.000.00
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0 Unit	0.00	10 Unit	100.000.000.00
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7200 Unit	3.300.000.000.00	7200 Unit	1.980.000.000.00
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Laporan Pengelolaan Terminal	12 Laporan	257.000.000.00	12 Laporan	380.000.000.00
2	15	02	2.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	50.000.000.00	1 Dokumen	55.000.000.00
2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	2 Unit	30.000.000.00	2 Unit	55.000.000.00
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	10 Unit	27.000.000.00	10 Unit	135.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	150.000.000.00	3 Unit	135.000.000.00
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Wilayah yang diselenggarakan parkir	170 wilayah	6.020.000.000.00	170 wilayah	6.545.000.000.00
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	6.000.000.000.00	12 Dokumen	6.490.000.000.00
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	20.000.000.00	12 Laporan	55.000.000.00
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Lulus Uji	94%	1.627.000.000.00	95%	1.309.220.000.00
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3 Unit	600.000.000.00	3 Unit	165.000.000.00
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	40.000.000.00	2 Orang	36.500.000.00
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	7500 Unit	237.000.000.00	7500 Unit	264.000.000.00
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	16400 Dokumen	480.000.000.00	16400 Dokumen	550.000.000.00
2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	25.000.000.00	1 Laporan	35.000.000.00
2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	20.000.000.00	1 Laporan	220.000.00
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1 Unit	200.000.000.00	1 Unit	220.000.000.00
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	10.000.000.00	4 Laporan	27.500.000.00
2	15	02	2.05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	5.000.000.00	1 Laporan	5.500.000.00
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	10.000.000.00	4 Laporan	5.500.000.00
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan	12 Kegiatan	615.000.000.00	12 Kegiatan	564.300.000.00
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	20.000.000.00	12 Laporan	50.000.000.00
2	15	02	2.06	02	Pengadaan. Pemasangan. Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan. Pemasangan. Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 Unit	150.000.000.00	50 Unit	18.000.000.00
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	15.000.000.00	3 Dokumen	25.500.000.00
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	350.000.000.00	12 Laporan	380.000.000.00
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	80.000.000.00	4 Laporan	90.800.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Andalalin yang Ditetapkan	22 Dokumen	261.500.000.00	22 Dokumen	288.550.000.00
2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	2 Dokumen	10.000.000.00	2 Dokumen	11.000.000.00
2	15	02	2.07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	40.000.000.00	3 Orang	44.000.000.00
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	18 Laporan	55.000.000.00	18 Laporan	60.500.000.00
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 Laporan	156.500.000.00	12 Laporan	173.050.000.00
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Keselamatan LLAJ	7 Dokumen	72.000.000.00	7 Dokumen	88.500.000.00
2	15	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	15.000.000.00	2 Orang	20.000.000.00
2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	12.000.000.00	2 Laporan	15.000.000.00
2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Terminal	3 Laporan	10.000.000.00	3 Laporan	15.000.000.00
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2 Laporan	5.000.000.00	2 Laporan	5.500.000.00
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Laporan	30.000.000.00	4 Laporan	33.000.000.00
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Angkutan Umum yang Tersedia	30%	820.000.000.00	32%	370.000.000.00
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	195 Unit	810.000.000.00	195 Unit	350.000.000.00
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	10.000.000.00	12 Laporan	20.000.000.00
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek Perkotaan yang ditetapkan	1 Trayek	115.000.000.00	1 Trayek	115.000.000.00
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80.000.000.00	1 Dokumen	50.000.000.00
2	15	02	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000.00	1 Dokumen	20.000.000.00
2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000.00	1 Dokumen	45.000.000.00
2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	1 Trayek	110.000.000.00	1 Trayek	145.000.000.00
2	15	02	2.12	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000.00	1 Dokumen	120.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	15	02	2.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	10.000.000.00	3 Dokumen	25.000.000.00
2	15	02	2.13		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Operasi Angkutan Taksi	1 Wilayah	60.000.000.00	1 Wilayah	105.000.000.00
2	15	02	2.13	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000.00	1 Dokumen	85.000.000.00
2	15	02	2.13	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000.00	1 Dokumen	20.000.000.00
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek yang Diterbitkan	55 Izin	40.000.000.00	55 Izin	70.000.000.00
2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Laporan	30.000.000.00	12 Laporan	40.000.000.00
2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	10.000.000.00	12 Laporan	30.000.000.00
2	15	02	2.15		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Diterbitkan	1 Izin	35.000.000.00	1 Izin	50.000.000.00
2	15	02	2.15	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	10.000.000.00	12 Laporan	15.000.000.00
2	15	02	2.15	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	25.000.000.00	4 Laporan	35.000.000.00
2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tarif Kelas Ekonomi yang ditetapkan untuk Angkutan Orang Dalam Trayek	1 Dokumen	60.000.000.00	1 Dokumen	85.000.000.00
2	15	02	2.16	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000.00	1 Dokumen	15.000.000.00
TOTAL								**74.777.500.000.00**		**85.149.570.000.00**
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			**11.063.850.894.00**		**17.968.701.853.00**
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.063.850.894.00		17.968.701.853.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			10.307.592.276.00		15.608.701.853.00
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi perangkat daerah yang baik/sesuai regulasi	83.5%	5.261.447.301.00	84%	5.991.010.078.00
2	16	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen rencana. anggaran dan evaluasi	83.5%	15.855.000.00	84%	140.500.000.00
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Dokumen	15.855.000.00	100 Dokumen	16.000.000.00
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000.00	1 Dokumen	10.000.000.00
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000.00	3 Dokumen	15.000.000.00
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000.00	1 Dokumen	7.000.000.00
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000.00	2 Dokumen	7.500.000.00
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0.00	5 Laporan	5.000.000.00
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.500.000.00	4 Laporan	80.000.000.00
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	4.249.284.938.00	100%	4.501.064.938.00
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	4.001.064.938.00	28 Orang/bulan	4.201.064.938.00
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	248.220.000.00	12 Dokumen	300.000.000.00
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	0%	0.00	100%	50.000.000.00
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0.00	5 Orang	50.000.000.00
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum perangkat daerah	50%	238.841.500.00	75%	328.000.000.00
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5.037.000.00	15 Paket	7.000.000.00
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	7.650.000.00	15 Paket	10.000.000.00
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	39.550.500.00	15 Paket	50.000.000.00
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	4.044.000.00	8 Paket	6.000.000.00
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	3.780.000.00	100 Laporan	5.000.000.00
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	178.780.000.00	150 Laporan	250.000.000.00
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	40%	22.726.140.00	50%	67.726.140.00
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	22.726.140.00	20 Unit	32.726.140.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25.000.000.00	3 Unit	35.000.000.00
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	391.555.723.00	100%	430.000.000.00
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	222.115.723.00	12 Laporan	250.000.000.00
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	169.440.000.00	12 Laporan	180.000.000.00
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	80%	343.184.000.00	80%	473.719.000.00
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	329.149.000.00	6 Unit	429.149.000.00
2	16	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	5.000.000.00	10 Unit	20.000.000.00
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	4.285.000.00	15 Unit	12.285.000.00
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	9.750.000.00	13 Unit	12.285.000.00
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Jumlah Masyarakat Penerima Informasi	10%	2.493.022.100.00	10%	3.146.470.500.00
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat Menerima Informasi	10%	2.493.022.100.00	10%	3.146.470.500.00
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 Dokumen	31.100.000.00	4 Dokumen	40.000.000.00
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	60 Dokumen	549.051.100.00	60 Dokumen	749.051.100.00
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	128 Dokumen	756.281.400.00	128 Dokumen	849.201.400.00
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	80 Dokumen	327.915.500.00	80 Dokumen	608.218.000.00
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen	828.674.100.00	12 Dokumen	900.000.000.00
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	NIlai Tata Kelola SPBE	Terkelola Level	2.553.122.875.00	Terkelola Level	6.471.221.275.00
						Persentase akses internet yang disediakan dan terintegrasi oleh Dinas Kominfo	56.92%		56.92%	
						Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	12.66%		12.66%	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan Ruang Server pemerintah	56.92%	2.039.238.275.00	56.92%	5.259.238.275.00
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Domain	60.817.500.00	80 Domain	80.817.500.00
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	55 Unit	1.978.420.775.00	55 Unit	5.178.420.775.00
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Pemerintah yang terintegrasi	12.66%	513.884.600.00	12.66%	1.211.983.000.00
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	10 Unit	282.129.600.00	10 Unit	718.784.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	8.385.000.00	1 Dokumen	127.933.000.00
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	185.780.000.00	1 Dokumen	317.676.000.00
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	10 Dokumen	37.590.000.00	10 Dokumen	47.590.000.00
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			**9.360.994.855.00**		**10.294.543.980.00**
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.360.994.855.00		10.294.543.980.00
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH			9.360.994.855.00		10.294.543.980.00
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen/Laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	5.807.514.355.00	100%	6.388.715.430.00
2	17	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan pada dokumen rencana. anggaran dan evaluasi	100%	101.696.800.00	100%	111.866.480.00
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	79.223.000.00	7 Dokumen	87.145.300.00
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	22.473.800.00	7 Laporan	24.721.180.00
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	4.772.095.509.00	100%	5.249.305.060.00
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/bulan	4.465.435.509.00	350 Orang/bulan	4.911.979.060.00
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	225.480.000.00	12 Dokumen	248.028.000.00
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	180 Dokumen	81.180.000.00	180 Dokumen	89.298.000.00
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	499.401.346.00	100%	549.791.480.00
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.912.000.00	1 Paket	32.903.200.00
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14.949.680.00	1 Paket	16.444.648.00
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.245.666.00	1 Paket	64.070.232.00
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.994.000.00	1 Paket	16.943.400.00
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	19.000.000.00	14 Dokumen	20.900.000.00
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	16.500.000.00	10 Laporan	18.150.000.00
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	345.800.000.00	125 Laporan	380.380.000.00
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	150.657.000.00	100%	165.722.700.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	150.657.000.00	25 Unit	165.722.700.00
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	47.973.600.00	100%	52.770.600.00
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	47.973.600.00	48 Laporan	52.770.600.00
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	235.690.100.00	100%	259.259.110.00
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	182.414.100.00	19 Unit	200.655.510.00
2	17	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	34 Unit	4.222.000.00	34 Unit	4.644.200.00
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	49.054.000.00	57 Unit	53.959.400.00
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/ USP yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP). dan atau izin operasional	65%	75.020.000.00	69.57%	82.522.000.00
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam (IUSP). Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (unit usaha)	130 Unit Usaha	75.020.000.00	160 Unit Usaha	82.522.000.00
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	60 Unit Usaha	75.020.000.00	60 Unit Usaha	82.522.000.00
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang tertib Kelembagaannya	28.24%	101.352.200.00	30.16%	111.487.420.00
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	30.74%	101.352.200.00	32.66%	111.487.420.00
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan. Kesehatan. Kemandirian. Ketangguhan. serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan. Kesehatan. Kemandirian. Ketangguhan. serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Unit Usaha	61.352.200.00	65 Unit Usaha	67.487.420.00
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	160 Unit Usaha	40.000.000.00	160 Unit Usaha	44.000.000.00
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi dengan Kategori Sehat	24.72%	124.980.000.00	26.74%	134.478.000.00
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	25.23%	124.980.000.00	27.25%	134.478.000.00
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	275 Unit Usaha	124.980.000.00	275 Unit Usaha	134.478.000.00
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM yang bersertifikat SKKNI	14.89%	203.756.200.00	15.85%	224.131.820.00
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang memahami pengetahuan Perkoperasian	19.21%	203.756.200.00	20.17%	224.131.820.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	305 Orang	203.756.200.00	305 Orang	224.131.820.00
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat akses Pembiayaan dan akses Pasar	28.57%	1.285.152.100.00	29.33%	1.413.667.310.00
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang meningkat akses Pasar dan Pembiayaan	55 Unit Usaha	1.285.152.100.00	65 Unit Usaha	1.413.667.310.00
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas. Nilai Tambah. Akses Pasar. Akses Pembiayaan. Penguatan Kelembagaan. Penataan Manajemen. Standarisasi. dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif. Bernilai Tambah. Memiliki Akses Pasar. Akses Pembiayaan. Penguatan Kelembagaan. Penataan Manajemen. Standarisasi. dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Unit Usaha	1.285.152.100.00	110 Unit Usaha	1.413.667.310.00
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMK yang meningkat kualitas Produknya (Terstandarisasi) dan atau terbentuknya jaringan kemitraan	35%	1.763.220.000.00	40%	1.939.542.000.00
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perizinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat kualitas Produknya. jaringan kemitraannya dan terstandarisasi Produknya	280 Unit Usaha	1.763.220.000.00	320 Unit Usaha	1.939.542.000.00
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Dokumen	546.688.000.00	1 Dokumen	601.356.800.00
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	125 Unit Usaha	217.332.000.00	125 Unit Usaha	239.065.200.00
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	490 Unit Usaha	999.200.000.00	490 Unit Usaha	1.099.120.000.00
TOTAL								**9.360.994.855.00**		**10.294.543.980.00**
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			**10.838.981.604.00**		**14.223.430.884.00**
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.838.981.604.00		14.223.430.884.00
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			10.838.981.604.00		14.223.430.884.00
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen /Laporan administrasi Perangkat Daerah yang Baik/Sesuai Regulasi	80%	6.971.451.564.00	80%	7.668.196.720.00
2	18	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja DPMPTSP	15 Dokumen	234.291.330.00	15 Dokumen	257.320.463.00
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	9.531.500.00	12 Dokumen	10.484.650.00
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	160.759.830.00	3 Laporan	176.835.813.00
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	64.000.000.00	4 Laporan	70.000.000.00
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan DPMPTSP	4 Dokumen	5.422.533.600.00	4 Dokumen	5.964.786.960.00
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	378 Orang/bulan	4.839.027.600.00	378 Orang/bulan	5.322.930.360.00
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	506.484.000.00	24 Dokumen	557.132.400.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	77.022.000.00	12 Dokumen	84.724.200.00
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian DPMPTSP	2 Dokumen	256.713.600.00	2 Dokumen	282.384.960.00
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	179.759.800.00	5 Orang	197.735.780.00
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	58 Orang	76.953.800.00	58 Orang	84.649.180.00
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum DPMPTSP	4 Dokumen	295.545.268.00	4 Dokumen	325.099.795.00
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.284.100.00	2 Paket	9.112.510.00
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	87.894.338.00	1 Paket	96.683.772.00
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.691.530.00	1 Paket	44.760.683.00
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.000.000.00	12 Dokumen	3.300.000.00
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	29.357.900.00	12 Laporan	32.293.690.00
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	126.317.400.00	12 Laporan	138.949.140.00
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen jasa penunjang urusan pemerintah daerah	36 Dokumen	480.199.761.00	36 Dokumen	528.219.737.00
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	7.150.000.00	2 Laporan	7.865.000.00
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	451.076.161.00	12 Laporan	496.183.777.00
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	21.973.600.00	2 Laporan	24.170.960.00
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	16 Unit	282.168.005.00	16 Unit	310.384.805.00
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	84.271.000.00	1 Unit	92.698.100.00
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	169.114.735.00	11 Unit	186.026.208.00
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	7.700.000.00	5 Unit	8.470.000.00
2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	21.082.270.00	15 Unit	23.190.497.00
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Kepuasan Investor Terhadap Pengembangan Iklim Penanaman Modal	84 Nilai	450.000.000,00	86 Nilai	1.200.000.000.00
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal	1 Dokumen	150.000.000,00	2 Dokumen	500.000.000.00
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	500.000.000.00
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang disusun dalam Kegiatan Pembuatan Peta Potensi investasi Kabupaten Pasuruan	3 Dokumen	300.000.000,00	3 Dokumen	700.000.000.00
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2 Dokumen	250.000.000,00	2 Dokumen	500.000.000.00
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Baru	60 Perusahaan	2.050.000.000,00	70 Perusahaan	2.700.000.000.00
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Promosi Investasi Daerah Yang Terlaksana	100%	2.050.000.000,00	100%	2.700.000.000.00
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	500.000.000.00
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.000.000.000,00	7 Dokumen	2.200.000.000.00
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Layanan Terpadu yang diberikan Secara Digital	64 Layanan	2.012.666.040.00	65 Layanan	2.213.932.644.00
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemohon Pemenuhan Komitmen dan Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan	8000 Orang	2.012.666.040.00	9000 Orang	2.213.932.644.00
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5500 Pelaku Usaha	1.885.915.790.00	5500 Pelaku Usaha	2.074.507.369.00
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	40 Kegiatan Usaha	110.715.000.00	40 Kegiatan Usaha	121.786.500.00
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	410 Orang	16.035.250.00	410 Orang	17.638.775.00
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha Yang Melakukan LKPM	70 Pelaku Usaha	379.183.200.00	70 Pelaku Usaha	417.101.520.00
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kab. Pasuruan Yang Terlaksana	6 Kegiatan	379.183.200.00	6 Kegiatan	417.101.520.00
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	212 Pelaku Usaha	305.167.500.00	212 Pelaku Usaha	335.684.250.00
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	13 Kegiatan Usaha	74.015.700.00	13 Kegiatan Usaha	81.417.270.00
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	22.000.000.00	100%	24.200.000.00
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Efektifitas Pengolahan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	4 Kegiatan	22.000.000.00	4 Kegiatan	24.200.000.00
2	18	06	2.01	01	Pengolahan. Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah. Dikaji dan Dimanfaatkan	15 Dokumen	22.000.000.00	15 Dokumen	24.200.000.00
TOTAL								**10.838.981.604.00**		**14.223.430.884.00**
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			**14.732.407.918.00**		**16.205.648.711.00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.732.407.918.00		16.205.648.711.00
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			14.732.407.918.00		16.205.648.711.00
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	4.986.644.282.00	100%	5.485.308.711.00
2	19	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indicator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada dokumen rencana. anggaran dan evaluasi	100%	71.384.000.00	100%	78.522.400.00
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25.000.000.00	4 Dokumen	27.500.000.00
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	25.000.000.00	4 Laporan	27.500.000.00
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	21.384.000.00	10 Laporan	23.522.400.00
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	3.953.889.520.00	100%	4.349.278.472.00
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3.200.000.000.00	14 Orang/bulan	3.520.000.000.00
2	19	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	702.974.520.00	12 Dokumen	773.271.972.00
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	95 Dokumen	50.915.000.00	95 Dokumen	56.006.500.00
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	100.000.000.00	100%	110.000.000.00
2	19	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	100.000.000.00	3 Orang	110.000.000.00
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	205.903.166.00	100%	226.493.483.00
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000.00	3 Paket	33.000.000.00
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	15.653.056.00	25 Paket	17.218.362.00
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	147 Paket	11.998.300.00	147 Paket	13.198.130.00
2	19	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	38.928.810.00	12 Laporan	42.821.691.00
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	109.323.000.00	12 Laporan	120.255.300.00
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	20.030.000.00	100%	22.033.000.00
2	19	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	15.000.00	1 Unit	16.500.00
2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	15.000.00	1 Unit	16.500.00
2	19	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000.00	2 Unit	22.000.000.00
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang opersional kantor yang tersedia	100%	291.278.556.00	100%	320.406.412.00
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	253.059.756.00	12 Laporan	278.365.732.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	38.218.800.00	12 Laporan	42.040.680.00
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	344.159.040.00	100%	378.574.944.00
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	253.012.700.00	16 Unit	278.313.970.00
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7.500.000.00	10 Unit	8.250.000.00
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	48.356.040.00	7 Unit	53.191.644.00
2	19	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	35.290.300.00	5 Unit	38.819.330.00
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	100%	1.359.000.000.00	100%	1.494.900.000.00
2	19	02	2.01		Penyadaran. Pemberdayaan. dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota. Wirausaha Muda Pemula. dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Penyadaran. Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	100%	779.000.000.00	100%	856.900.000.00
2	19	02	2.01	01	Koordinasi. Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	60 Orang	69.000.000.00	60 Orang	75.900.000.00
2	19	02	2.01	02	Koordinasi. Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	4000 Orang	400.000.000.00	4000 Orang	440.000.000.00
2	19	02	2.01	03	Koordinasi. Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	3000 Orang	300.000.000.00	3000 Orang	330.000.000.00
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	4 Orang	10.000.000.00	4 Orang	11.000.000.00
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	100%	580.000.000.00	100%	638.000.000.00
2	19	02	2.02	01	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	70 Orang	10.000.000.00	70 Orang	11.000.000.00
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	10 Dokumen	570.000.000.00	10 Dokumen	627.000.000.00
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet berprestasi yang dibina	100%	8.036.763.636.00	100%	8.840.440.000.00
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan	100%	85.000.000.00	100%	93.500.000.00
2	19	03	2.01	01	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	7 Unit	15.000.000.00	7 Unit	16.500.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	19	03	2.01	02	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	4 Dokumen	25.000.000.00	4 Dokumen	27.500.000.00
2	19	03	2.01	03	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	45.000.000.00	3 Unit	49.500.000.00
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	100%	4.588.907.000.00	100%	5.047.797.700.00
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	963.160.000.00	1 Dokumen	1.059.476.000.00
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3.325.747.000.00	2 Dokumen	3.658.321.700.00
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	300 Orang	300.000.000.00	300 Orang	330.000.000.00
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100%	1.710.022.136.00	100%	1.881.024.350.00
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	45 Orang	450.000.000.00	45 Orang	495.000.000.00
2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	2 Pelatda	105.007.136.00	2 Pelatda	115.507.850.00
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	45 Orang	400.000.000.00	45 Orang	440.000.000.00
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	200 Orang	730.015.000.00	200 Orang	803.016.500.00
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	25.000.000.00	1 Dokumen	27.500.000.00
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan	100%	757.834.500.00	100%	833.617.950.00
2	19	03	2.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	50.000.000.00	1 Dokumen	55.000.000.00
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Organisasi	292.834.500.00	2 Organisasi	322.117.950.00
2	19	03	2.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000.00	1 Dokumen	16.500.000.00
2	19	03	2.04	04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	1 Organisasi	400.000.000.00	1 Organisasi	440.000.000.00
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100%	895.000.000.00	100%	984.500.000.00
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan. Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan. Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	5 Dokumen	440.000.000.00	5 Dokumen	484.000.000.00
2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	30 Laporan	15.000.000.00	30 Laporan	16.500.000.00
2	19	03	2.05	03	Penyediaan. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	2 Unit	70.000.000.00	2 Unit	77.000.000.00
2	19	03	2.05	04	Pengembangan Olahraga Wisata. Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata. Tantangan dan Petualangan	5 Dokumen	350.000.000.00	5 Dokumen	385.000.000.00
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	20.000.000.00	1 Dokumen	22.000.000.00
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengurus Organisasi Pramuka Daerah yang Aktif	100%	350.000.000.00	100%	385.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100%	350.000.000.00	100%	385.000.000.00
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	3 Laporan	350.000.000.00	3 Laporan	385.000.000.00
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			41.826.400.00		560.000.000.00
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data yang berbagi pakai	50%	41.826.400.00	80%	560.000.000.00
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang digunakan	50%	41.826.400.00	80%	560.000.000.00
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan. Pengolahan. Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan. Pengolahan. Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	31.403.400.00	4 Dokumen	275.000.000.00
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	150 Orang	0.00	150 Orang	75.000.000.00
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	3 Dokumen	10.423.000.00	3 Dokumen	125.000.000.00
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	1 Orang	0.00	1 Orang	15.000.000.00
2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	0.00	1 Unit	35.000.000.00
2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	80 Dokumen	0.00	80 Dokumen	35.000.000.00
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			714.432.218.00		1.800.000.000.00
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Nilai SMKI	Cukup Baik Level	714.432.218.00	Cukup Baik Level	1.800.000.000.00
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang teramankan	15%	714.432.218.00	20%	1.800.000.000.00
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	3 Perangkat Daerah	714.432.218.00	3 Perangkat Daerah	1.800.000.000.00
TOTAL								**11.063.850.894.00**		**17.968.701.853.00**
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			2.000.000.000,00		7.322.900.000,00
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase obyek kebudayaan yang dikembangkan	100 %	3.604.750.000,00	100 %	4.323.500.000,00
2	22	02	201		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebudayaan yang dikelola	100 %	1.900.000.000,00	100 %	2.350.000.000,00
2	22	02	201	01	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan	2 Objek	330.000.000,00	2 Objek	1.627.500.000,00
2	22	02	201	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga. dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga. dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	85.000.000,00	50 Orang	300.000.000,00
2	22	02	202		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	100 %	1.500.000.000,00	100 %	1.600.000.000,00
2	22	02	202	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	20 Sertifikat	15.000.000,00	20 Sertifikat	50.000.000,00
2	22	02	203		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang dibina	100 %	204.750.000,00	100 %	373.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	22	02	203	01	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan. Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	26.000.000,00	1 Objek	800.000.000,00
2	22	02	203	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga. dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia. Lembaga. dan Pranata Adat yang Dibina	30 Orang	50.000.000,00	30 Orang	550.000.000,00
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pelaku seni yang meningkat kapasitasnya	100 %	850.000.000,00	100 %	1.010.000.000,00
2	22	03	201		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase objek kesenian tradisional yang pelakunya dibina	100 %	850.000.000,00	100 %	1.010.000.000,00
2	22	03	201	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 Orang	150.000.000,00	50 Orang	500.000.000,00
2	22	03	201	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	25 Sertifikat	50.000.000,00	25 Sertifikat	25.000.000,00
2	22	03	201	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	50.000.000,00	10 Lembaga	250.000.000,00
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang dipublikasikan	100 %	102.500.000,00	100 %	166.000.000,00
2	22	04	201		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sejarah lokal yang difasilitasi penetapannya	100 %	102.500.000,00	100 %	166.000.000,00
2	22	04	201	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	100 Orang	102.000.000,00	100 Orang	106.000.000,00
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilidungi	100 %	916.400.000,00	100 %	938.400.000,00
2	22	05	201		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	100 %	666.400.000,00	100 %	666.400.000,00
2	22	05	201	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	2 Objek	145.000.000,00	2 Objek	332.000.000,00
2	22	05	201	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	243.000.000,00	3 Objek	253.000.000,00
2	22	05	202		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola	100 %	250.000.000,00	100 %	222.000.000,00
2	22	05	202	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	150.000.000,00	3 Objek	303.400.000,00
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase obyek budaya yang dimanfaatkan dalam museum	100 %	560.000.000,00	100 %	580.000.000,00
2	22	06	201		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian standardisasi museum	100 %	560.000.000,00	100 %	580.000.000,00
2	22	06	201	01	Pelindungan. Pengembangan. dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan. Pengembangan. dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	2 Unit	140.000.000,00	2 Unit	350.000.000,00
2	22	06	201	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	2 Unit	20.000.000,00	2 Unit	250.000.000,00
2	22	06	201	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	230.000.000,00
2	22	06	201	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	5 Unit	150.000.000,00	5 Unit	500.000.000,00
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP			**7.503.794.256.00**		**9.354.173.682.00**
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.503.794.256.00		9.354.173.682.00
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			1.319.900.500.00		1.278.722.367.00
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Ber-NSP	2.7%	1.284.380.500.00	3.09%	1.148.702.980.00
						Persentase Perpustakaan yang Berbasis Inklusi Sosial	5%		5.5%	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang sesuai Standart	100%	464.573.000.00	100%	651.895.480.00
						Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan	100%		100%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	100%		100%	
						Persentase Perpustakaan yang Dibina dan Dikembangkan	100%		100%	
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	5 Layanan	7.000.000.00	5 Layanan	46.000.000.00
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	5.000.000.00	1 Perpustakaan	105.295.000.00
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	365 Perpustakaan	299.149.000.00	365 Perpustakaan	100.000.000.00
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	10.000.000.00	50 Orang	127.775.000.00
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	8 Layanan	13.424.000.00	8 Layanan	56.250.000.00
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	925 Eksemplar	120.000.000.00	925 Eksemplar	204.251.480.00
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan. Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan. Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	10.000.000.00	12 Dokumen	12.324.000.00
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengembangan Minat Baca	100%	819.807.500.00	100%	496.807.500.00
						Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi	0.23%		0.23%	
						Persentase Literasi Berbasis Inklusi Sosial	5%		5.5%	
2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	40 Lokus	40.000.000.00	40 Lokus	160.858.500.00
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	25.022.000.00	6 Orang	85.022.000.00
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	735.858.500.00	5 Perpustakaan	172.927.000.00
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1 Orang	18.927.000.00	1 Orang	78.000.000.00
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Daerah yang Dilestarikan	20%	35.520.000.00	20%	130.019.387.00
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	10%	23.680.000.00	10%	94.230.000.00
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan. Perawatan. Pelestarian. dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan. Perawatan. Pelestarian. dan Pendaftaran Naskah Kuno	24 Orang	11.840.000.00	24 Orang	47.340.000.00
2	23	03	2.01	02	Pengembangan. Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	10 Eksemplar	11.840.000.00	10 Eksemplar	46.890.000.00
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Koleksi Budaya etnis Nusantara yang ditemukan dan dilestarikan	10%	11.840.000.00	10%	35.789.387.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	10 Eksemplar	11.840.000.00	10 Eksemplar	35.789.387.00
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			6.183.893.756.00		8.075.451.315.00
2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	5.681.157.756.00	100%	7.145.203.315.00
2	24	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	75.478.000.00	100%	133.478.000.00
2	24	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	17.777.000.00	3 Dokumen	45.777.000.00
2	24	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	57.701.000.00	5 Laporan	87.701.000.00
2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	4.151.413.257.00	100%	4.856.109.995.00
2	24	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	3.184.558.737.00	24 Orang/bulan	3.856.109.995.00
2	24	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	966.854.520.00	12 Dokumen	1.000.000.000.00
2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan umum Perangkat Daerah	100%	419.446.280.00	100%	709.115.320.00
2	24	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.766.000.00	4 Paket	35.000.000.00
2	24	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	27.115.320.00	7 Paket	87.115.320.00
2	24	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	84.731.000.00	4 Paket	98.000.000.00
2	24	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	30.018.960.00	3 Paket	41.000.000.00
2	24	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	69.800.000.00	8 Dokumen	78.000.000.00
2	24	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.750.000.00	12 Laporan	35.000.000.00
2	24	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	180.265.000.00	24 Laporan	335.000.000.00
2	24	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah (BMD) yang terealisasi	100%	218.873.930.00	100%	192.000.000.00
2	24	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	47.700.000.00	10 Unit	27.000.000.00
2	24	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	171.173.930.00	10 Unit	165.000.000.00
2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	322.810.489.00	100%	441.500.000.00
2	24	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	322.810.489.00	12 Laporan	441.500.000.00
2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi Baik	100%	493.135.800.00	100%	813.000.000.00
2	24	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	290.098.400.00	24 Unit	323.000.000.00
2	24	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	7.900.000.00	5 Unit	25.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	24	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	45.137.400.00	35 Unit	65.000.000.00
2	24	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000.00	2 Unit	400.000.000.00
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Peningkatan Arsip yang dikelola. dirawat dan dilestarikan	30%	477.658.000.00	35%	643.678.000.00
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Dinamis yang Dikelola dan Dirawat	65%	252.599.000.00	70%	252.599.000.00
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	25000 Berkas	40.549.000.00	25000 Berkas	40.549.000.00
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	28965 Berkas	122.775.000.00	28965 Berkas	122.775.000.00
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Laporan	89.275.000.00	66 Laporan	89.275.000.00
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang Telah dibuatkan sarana bantu temu balik	5%	132.530.000.00	6%	132.530.000.00
2	24	02	2.02	02	Akuisisi. Pengolahan. Preservasi. dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi. Pengolahan. Preservasi dan Akses Arsip Statis	30 Arsip	132.530.000.00	30 Arsip	132.530.000.00
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah arsip yang dimasukan dalam jaringan SIKN melaui JIKN	3%	92.529.000.00	3.3%	258.549.000.00
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi. Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi. Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	30 Pengguna	4.980.000.00	30 Pengguna	35.000.000.00
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	87.549.000.00	12 Laporan	223.549.000.00
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan dan penyelamatan Arsip Daerah	5%	25.078.000.00	5.5%	286.570.000.00
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase tingkat kegiatan pemusnahan arsip sesuai dengan NSPK	3%	4.920.000.00	3%	35.000.000.00
2	24	03	2.01	01	Penilaian. Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian. Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10 Arsip	4.920.000.00	10 Arsip	35.000.000.00
2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase Arsip yang Dievakuasi. Diidentifikasi. dipulihkan dan disimpan Akibat Bencana	1%	10.166.000.00	1.2%	111.840.000.00
2	24	03	2.02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi. Identifikasi. Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	10 Arsip	5.083.000.00	10 Arsip	55.920.000.00
2	24	03	2.02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	10 Arsip	5.083.000.00	10 Arsip	55.920.000.00
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan. dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan/dibubarkan dan pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan NSPK	1%	5.000.000.00	1%	54.730.000.00
2	24	03	2.03	01	Pendataan. Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan. Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	10 Daftar	5.000.000.00	10 Daftar	54.730.000.00
2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan Hilang	3%	4.992.000.00	3%	85.000.000.00
2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	10 Arsip	4.992.000.00	10 Arsip	85.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					DINAS PERIKANAN			**11.161.535.502.00**		**11.161.535.502.00**
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			11.161.535.502.00		11.161.535.502.00
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			11.161.535.502.00		11.161.535.502.00
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	6.251.450.149.00	100%	6.251.450.149.00
3	25	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen rencana. anggaran dan evaluasi	100%	198.661.800.00	100%	198.661.800.00
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	60.260.000.00	15 Dokumen	60.260.000.00
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	138.401.800.00	12 Laporan	138.401.800.00
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	4.518.301.549.00	100%	4.518.301.549.00
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.926.276.437.00	26 Orang/bulan	3.926.276.437.00
3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	517.865.112.00	12 Dokumen	517.865.112.00
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	74.160.000.00	12 Dokumen	74.160.000.00
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	40.000.000.00	100%	40.000.000.00
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	40.000.000.00	8 Orang	40.000.000.00
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	510.539.394.00	100%	510.539.394.00
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.973.000.00	12 Paket	5.973.000.00
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000.00	1 Paket	30.000.000.00
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.000.00	1 Paket	30.000.000.00
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	37.341.294.00	2 Paket	37.341.294.00
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	59.159.100.00	12 Paket	59.159.100.00
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	40.000.000.00	1 Dokumen	40.000.000.00
3	25	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	18.176.000.00	12 Paket	18.176.000.00
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	289.890.000.00	40 Laporan	289.890.000.00
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	267.289.000.00	100%	267.289.000.00
3	25	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	50.000.000.00	1 Unit	50.000.000.00
3	25	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	50.000.000.00	1 Unit	50.000.000.00
3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	15.165.000.00	2 Unit	15.165.000.00
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	52.124.000.00	5 Unit	52.124.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	25	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000.00	1 Unit	50.000.000.00
3	25	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000.00	1 Unit	50.000.000.00
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	159.639.106.00	100%	159.639.106.00
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	101.974.106.00	48 Laporan	101.974.106.00
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	57.665.000.00	5 Laporan	57.665.000.00
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	80%	557.019.300.00	80%	557.019.300.00
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	298.302.200.00	47 Unit	298.302.200.00
3	25	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	2.500.000.00	5 Unit	2.500.000.00
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15.070.100.00	20 Unit	15.070.100.00
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	227.100.000.00	1 Unit	227.100.000.00
3	25	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	14.047.000.00	5 Unit	14.047.000.00
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	0.3%	1.105.154.150.00	0.6%	1.105.154.150.00
						Persentase Produksi Ikan Bernilai Ekonomis	12%		12%	
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase produksi perikanan tangkap di laut	97.75%	557.758.100.00	97.75%	557.758.100.00
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dokumen	71.953.000.00	12 Dokumen	71.953.000.00
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	7 Unit	211.829.400.00	7 Unit	211.829.400.00
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1426 Unit	273.975.700.00	1426 Unit	273.975.700.00
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nelayan yang mendapat pendampingan	5.4%	429.996.000.00	5.4%	429.996.000.00
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	75 Orang	177.536.000.00	75 Orang	177.536.000.00
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	3 Kelompok	26.180.000.00	3 Kelompok	26.180.000.00
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan. Bantuan Pembiayaan. Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan. Bantuan Pembiayaan. Kemitraan Usaha	2 Unit Usaha	226.280.000.00	2 Unit Usaha	226.280.000.00
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Nilai transaksi ikan di TPI	20 Milyar	77.464.000.00	25 Milyar	77.464.000.00
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	36 Layanan	77.464.000.00	36 Layanan	77.464.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan rekomendasi usaha perikanan tangkap	5%	39.936.050.00	5%	39.936.050.00
3	25	03	2.04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	20 Rekomendasi	39.936.050.00	20 Rekomendasi	39.936.050.00
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pengendalian Lahan Perikanan Budidaya	70%	2.575.460.703.00	70%	2.575.460.703.00
						Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	1%		1.5%	
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang terfasilitasi	8%	405.622.550.00	8%	405.622.550.00
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	4 Kelompok	190.142.500.00	4 Kelompok	190.142.500.00
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan. Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan. Teknologi dan Informasi. serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan. Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan. Teknologi dan Informasi. Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	65 Kelompok	215.480.050.00	65 Kelompok	215.480.050.00
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Produktifitas Perikanan Budidaya	4.37%	2.169.838.153.00	4.37%	2.169.838.153.00
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	48.000.000.00	12 Dokumen	48.000.000.00
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	973.296.000.00	5 Unit	973.296.000.00
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit	220.780.000.00	7 Unit	220.780.000.00
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	5 Dokumen	238.462.153.00	5 Dokumen	238.462.153.00
3	25	04	2.04	06	Perencanaan. Pengembangan. Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan. Dikembangkan. Dimanfaatkan dan Dilindungi	100 Ha	188.871.500.00	100 Ha	188.871.500.00
3	25	04	2.04	07	Perencanaan. dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan. dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	80 Orang	500.428.500.00	80 Orang	500.428.500.00
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang aktif	80%	139.210.000.00	82%	139.210.000.00
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase kelompok masyarakat pengawas (pokmas) yang aktif	80%	139.210.000.00	82%	139.210.000.00
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	139.210.000.00	2 Dokumen	139.210.000.00
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produk Olahan Perikanan	5%	1.090.260.500.00	7%	1.090.260.500.00
						Persentase usaha perikanan yang terfasilitasi dan terstandarisasi	10%		13.5%	
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase pelaku usaha perikanan yang terfasiltasi	5.25%	68.937.000.00	5.5%	68.937.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	12 Dokumen	68.937.000.00	12 Dokumen	68.937.000.00
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pengolah dan pemasar perikanan yang terlatih	10%	464.753.000.00	20%	464.753.000.00
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	464.753.000.00	30 Unit Usaha	464.753.000.00
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase produk olahan yang terpromosikan	60%	556.570.500.00	60%	556.570.500.00
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	72120.19 Ton	473.886.500.00	72120.19 Ton	473.886.500.00
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	120 Pelaku Usaha	82.684.000.00	120 Pelaku Usaha	82.684.000.00
					DINAS PARIWISATA			**26.244.115.460.00**		**26.565.865.460.00**
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			26.244.115.460.00		26.565.865.460.00
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			26.244.115.460.00		26.565.865.460.00
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai Regulasi	100%	8.614.115.460.00	100%	8.614.115.460.00
3	26	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	391.000.000.00	100%	391.000.000.00
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	100.000.000.00	4 Dokumen	100.000.000.00
3	26	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000.00	1 Dokumen	10.000.000.00
3	26	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000.00	1 Dokumen	15.000.000.00
3	26	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000.00	1 Dokumen	8.000.000.00
3	26	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000.00	1 Dokumen	8.000.000.00
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	200.000.000.00	2 Laporan	200.000.000.00
3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000.00	1 Laporan	50.000.000.00
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	5.539.464.940.00	100%	5.539.464.940.00
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	4.399.546.000.00	34 Orang/bulan	4.399.546.000.00
3	26	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	1.050.000.000.00	3 Dokumen	1.050.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	26	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5.000.000.00	1 Dokumen	5.000.000.00
3	26	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	64.918.940.00	2 Laporan	64.918.940.00
3	26	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.000.000.00	1 Dokumen	2.000.000.00
3	26	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	10.000.000.00	3 Laporan	10.000.000.00
3	26	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	8.000.000.00	1 Dokumen	8.000.000.00
3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah	100%	29.000.000.00	100%	29.000.000.00
3	26	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.000.000.00	1 Dokumen	3.000.000.00
3	26	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.000.000.00	1 Dokumen	3.000.000.00
3	26	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	3.000.000.00	1 Laporan	3.000.000.00
3	26	01	2.03	04	Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000.00	1 Laporan	5.000.000.00
3	26	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000.00	1 Laporan	10.000.000.00
3	26	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000.00	1 Laporan	5.000.000.00
3	26	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah pendapatan daerah	450.000.000 Rupiah	16.000.000.00	500.000.000 Rupiah	16.000.000.00
3	26	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	3.000.000.00	1 Dokumen	3.000.000.00
3	26	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	5.000.000.00	1 Laporan	5.000.000.00
3	26	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek. Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.000.000.00	1 Dokumen	5.000.000.00
3	26	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	3.000.000.00	1 Dokumen	3.000.000.00
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas SDM kepegawaian	100%	70.500.000.00	100%	70.500.000.00
3	26	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit	30.000.000.00	3 Unit	30.000.000.00
3	26	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	12.500.000.00	1 Paket	12.500.000.00
3	26	01	2.05	05	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3.000.000.00	1 Dokumen	3.000.000.00
3	26	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2 Orang	5.000.000.00	2 Orang	5.000.000.00
3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	20.000.000.00	3 Orang	20.000.000.00
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	983.150.520.00	100%	983.150.520.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000.00	1 Paket	30.000.000.00
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	115.000.000.00	5 Paket	115.000.000.00
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	85.000.000.00	3 Paket	85.000.000.00
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	46 Paket	80.000.000.00	46 Paket	80.000.000.00
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	125.150.520.00	15 Paket	125.150.520.00
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	13.000.000.00	1 Dokumen	13.000.000.00
3	26	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000.00	1 Laporan	100.000.000.00
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	400.000.000.00	3 Laporan	400.000.000.00
3	26	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000.00	1 Dokumen	20.000.000.00
3	26	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	15.000.000.00	1 Dokumen	15.000.000.00
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100%	630.000.000.00	100%	630.000.000.00
3	26	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	50.000.000.00	1 Unit	50.000.000.00
3	26	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	300.000.000.00	1 Unit	300.000.000.00
3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	100.000.000.00	4 Unit	100.000.000.00
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	150.000.000.00	8 Unit	150.000.000.00
3	26	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.000.000.00	1 Unit	25.000.000.00
3	26	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000.00	1 Unit	5.000.000.00
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan kantor yang tersedia	100%	255.000.000.00	100%	255.000.000.00
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	175.000.000.00	4 Laporan	175.000.000.00
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	80.000.000.00	1 Laporan	80.000.000.00
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	700.000.000.00	100%	700.000.000.00
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	400.000.000.00	17 Unit	400.000.000.00
3	26	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	50.000.000.00	3 Unit	50.000.000.00
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	50.000.000.00	10 Unit	50.000.000.00
3	26	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	50.000.000.00	1 Unit	50.000.000.00
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000.00	1 Unit	100.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	26	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000.00	2 Unit	50.000.000.00
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata bersertifikat CHSE	11%	14.330.000.000.00	14%	14.265.000.000.00
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata yang dikelola	8%	280.000.000.00	11%	215.000.000.00
3	26	02	2.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	20.000.000.00	1 Lokasi	20.000.000.00
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000.00	1 Dokumen	50.000.000.00
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan. Berkembang. Pemantapan. Revitalisasi)	3 Lokasi	200.000.000.00	3 Lokasi	135.000.000.00
3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000.00	1 Dokumen	10.000.000.00
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata yang dilaksanakan	11%	250.000.000.00	11%	250.000.000.00
3	26	02	2.02	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000.00	1 Dokumen	20.000.000.00
3	26	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000.00	1 Dokumen	50.000.000.00
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Kawasan	50.000.000.00	1 Kawasan	50.000.000.00
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Unit	50.000.000.00	1 Unit	50.000.000.00
3	26	02	2.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000.00	1 Dokumen	10.000.000.00
3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	50.000.000.00	1 Laporan	50.000.000.00
3	26	02	2.02	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	20.000.000.00	1 Lokasi	20.000.000.00
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata yang dikelola	11%	13.745.000.000.00	14%	13.745.000.000.00
3	26	02	2.03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Lokasi	20.000.000.00	1 Lokasi	20.000.000.00
3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen	500.000.000.00	3 Dokumen	500.000.000.00
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan. Berkembang. Pemantapan. Revitalisasi)	1 Lokasi	100.000.000.00	1 Lokasi	100.000.000.00
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	7 Unit	13.000.000.000.00	7 Unit	13.000.000.000.00
3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	15.000.000.00	2 Dokumen	15.000.000.00
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	100.000.000.00	1 Laporan	100.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	26	02	2.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	10.000.000.00	1 Lokasi	10.000.000.00
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Pariwisata yang memiliki TDUP	20%	55.000.000.00	21%	55.000.000.00
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan	30.000.000.00	1 Laporan	30.000.000.00
3	26	02	2.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	1 Unit Usaha	25.000.000.00	1 Unit Usaha	25.000.000.00
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang meningkat kunjungan wisatanya	30%	1.235.000.000.00	32%	1.281.750.000.00
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik. Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan	30%	1.235.000.000.00	32%	1.281.750.000.00
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak. Elektronik. dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak. Elektronik. dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	300.000.000.00	4 Dokumen	300.000.000.00
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Laporan	600.000.000.00	4 Laporan	630.000.000.00
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	75.000.000.00	1 Dokumen	78.750.000.00
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	250.000.000.00	2 Dokumen	262.500.000.00
3	26	03	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	10.000.000.00	1 Dokumen	10.500.000.00
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang meningkat omsetnya	25%	230.000.000.00	27%	490.000.000.00
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi. Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana ruang Kreatif yang dibangun dan direvitalisasi	0%	0.00	27%	50.000.000.00
3	26	04	2.01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	0 Unit	0.00	5 Unit	50.000.000.00
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi HAKI	25%	230.000.000.00	26%	440.000.000.00
3	26	04	2.02	01	Pengembangan Riset	Jumlah Dokumen Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	0 Dokumen	0.00	2 Dokumen	30.000.000.00
3	26	04	2.02	02	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	0 Dokumen	0.00	1 Dokumen	50.000.000.00
3	26	04	2.02	04	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	1 Unit	100.000.000.00	1 Unit	100.000.000.00
3	26	04	2.02	05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	0 Dokumen	0.00	1 Dokumen	100.000.000.00
3	26	04	2.02	06	Pemberian Insentif	Jumlah Laporan Hasil Pemberian Insentif	1 Laporan	0.00	1 Laporan	30.000.000.00
3	26	04	2.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait. Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	10.000.000.00	1 Dokumen	10.000.000.00
3	26	04	2.02	08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	10.000.000.00	1 Dokumen	10.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	26	04	2.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	100.000.000.00	1 Dokumen	100.000.000.00
3	26	04	2.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	10.000.000.00	1 Dokumen	10.000.000.00
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif bersertifikat	30%	1.835.000.000.00	32%	1.915.000.000.00
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang di fasilitasi pelatihan tingkat dasar	30%	1.755.000.000.00	32%	1.805.000.000.00
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	60 Orang	100.000.000.00	60 Orang	100.000.000.00
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	50 Orang	1.450.000.000.00	50 Orang	1.450.000.000.00
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat. Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat. Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	40 Orang	50.000.000.00	40 Orang	50.000.000.00
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40 Orang	100.000.000.00	40 Orang	100.000.000.00
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi. Produksi. Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi. Produksi. Distribusi Konsumsi. dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	50.000.000.00	1 Laporan	50.000.000.00
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0 Orang	0.00	2 Laporan	50.000.000.00
3	26	05	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	5.000.000.00	1 Dokumen	5.000.000.00
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang di fasilitasi pengembangan kapasitas	25%	80.000.000.00	27%	110.000.000.00
3	26	05	2.02	01	Pelatihan. Bimbingan Teknis. dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan. Bimbingan Teknis. dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	20.000.000.00	50 Orang	50.000.000.00
3	26	05	2.02	02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	1 Laporan	10.000.000.00	1 Laporan	10.000.000.00
3	26	05	2.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	50 Orang	50.000.000.00	50 Orang	50.000.000.00
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			**45.532.220.488.00**		**60.224.221.705.00**
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			45.532.220.488.00		60.224.221.705.00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			45.532.220.488.00		60.224.221.705.00
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	26.282.826.456.00	100%	31.575.391.747.00
3	27	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP	100%	310.000.000.00	100%	372.000.000.00
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	75.000.000.00	2 Dokumen	90.000.000.00
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000.00	1 Dokumen	60.000.000.00
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000.00	1 Dokumen	12.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	75.000.000.00	2 Laporan	90.000.000.00
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	100.000.000.00	4 Laporan	120.000.000.00
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	23.549.789.160.00	100%	28.259.746.992.00
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang/bulan	22.198.313.160.00	144 Orang/bulan	26.637.975.792.00
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38 Dokumen	1.351.476.000.00	38 Dokumen	1.621.771.200.00
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	352.715.406.00	100%	459.258.487.00
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	46.300.139.00	4 Paket	55.560.167.00
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	75.500.000.00	7 Paket	90.600.000.00
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	25.915.267.00	5 Paket	31.098.320.00
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	35.000.000.00	30 Laporan	42.000.000.00
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	170.000.000.00	24 Laporan	240.000.000.00
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	799.390.000.00	100%	959.268.000.00
3	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	550.000.000.00	1 Unit	660.000.000.00
3	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	249.390.000.00	3 Unit	299.268.000.00
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	603.638.670.00	100%	724.366.404.00
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	603.638.670.00	48 Laporan	724.366.404.00
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	667.293.220.00	100%	800.751.864.00
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	212.293.220.00	8 Unit	254.751.864.00
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 Unit	55.000.000.00	73 Unit	66.000.000.00
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000.00	1 Unit	240.000.000.00
3	27	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000.00	2 Unit	240.000.000.00
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan Sarana Pertanian	3.33%	2.326.562.811.00	3.83%	4.298.476.463.00
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase sarana pendukung pertanian yang diawasi	100%	2.326.562.811.00	100%	4.298.476.463.00
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi	10 Laporan	1.300.000.000.00	10 Laporan	3.066.601.090.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	16 Laporan	1.026.562.811.00	16 Laporan	1.231.875.373.00
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana penunjang budidaya pertanian	1.2%	13.851.533.876.00	1.21%	18.629.488.194.00
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Penetapan Pengendalian lahan Pangan berkelanjutan	26.654 Ha	2.847.142.105.00	26.654 Ha	3.687.402.810.00
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	347.142.105.00	1 Dokumen	416.570.526.00
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	5 Laporan	2.500.000.000.00	5 Laporan	3.270.832.284.00
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang terbangun sesuai rencana	100%	11.004.391.771.00	100%	14.942.085.384.00
3	27	03	2.02	01	Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun. Direhabilitasi . dan Dipelihara	5 Unit	1.400.000.000.00	5 Unit	2.723.283.252.00
3	27	03	2.02	03	Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun. Direhabilitasi dan Dipelihara	35 Unit	7.904.555.101.00	35 Unit	10.178.998.128.00
3	27	03	2.02	09	Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun. Direhabilitasi dan Dipelihara	35 Unit	1.699.836.670.00	35 Unit	2.039.804.004.00
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana Pertanian yang ditanggulangi	75%	975.000.000.00	75.5%	1.405.308.487.00
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah KT yang mengikuti sekolah lapang	14 KT	975.000.000.00	14 KT	1.405.308.487.00
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan. Hortikultura. dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan. Hortikultura. dan Perkebunan yang Dikendalikan	10 Ha	820.000.000.00	10 Ha	1.219.308.487.00
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan. Hortikultura. dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan. Hortikultura. dan Perkebunan yang Ditangani	10 Ha	155.000.000.00	10 Ha	186.000.000.00
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi	45%	160.005.950.00	50%	192.007.140.00
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase izin usaha komoditas pertanian yang diterbitkan	100%	160.005.950.00	100%	192.007.140.00
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	24 Dokumen	81.704.150.00	24 Dokumen	98.044.980.00
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	5 Laporan	78.301.800.00	5 Laporan	93.962.160.00
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelembagaan penyuluhan	4%	1.936.291.395.00	8%	4.123.549.674.00
						Persentase peningkatan SDM petani	5%		6%	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelembagaan Kelompok Tani	100%	1.936.291.395.00	100%	4.123.549.674.00
						Persentase peningkatan SDM petani yang terlatih	100%		100%	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	388.884.632.00	5 Unit	466.661.559.00
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Unit	1.047.406.763.00	15 Unit	1.256.888.115.00
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Unit	500.000.000.00	3 Unit	2.400.000.000.00
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			**23.894.088.758.00**		**23.894.088.758.00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			23.894.088.758.00		23.894.088.758.00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			23.894.088.758.00		23.894.088.758.00
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	11.518.657.887.00	100%	11.518.657.887.00
3	27	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana. anggaran dan evaluasi	80%	270.215.000.00	80%	270.215.000.00
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	114.255.500.00	12 Dokumen	114.255.500.00
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	155.959.500.00	12 Laporan	155.959.500.00
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	9.730.282.040.00	100%	9.730.282.040.00
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	8.297.139.000.00	58 Orang/bulan	8.297.139.000.00
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.327.393.040.00	12 Dokumen	1.327.393.040.00
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	105.750.000.00	12 Dokumen	105.750.000.00
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	50.000.000.00	100%	50.000.000.00
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	50.000.000.00	4 Orang	50.000.000.00
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	377.666.000.00	100%	377.666.000.00
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	94.666.000.00	1 Paket	94.666.000.00
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.000.000.00	1 Paket	8.000.000.00
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	65.000.000.00	12 Laporan	65.000.000.00
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	210.000.000.00	12 Laporan	210.000.000.00
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	600.000.000.00	100%	600.000.000.00
3	27	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	400.000.000.00	1 Unit	400.000.000.00
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	50.000.000.00	1 Unit	50.000.000.00
3	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit	150.000.000.00	22 Unit	150.000.000.00
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang opersional kantor yang tersedia	100%	192.348.600.00	100%	192.348.600.00
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	182.346.600.00	12 Laporan	182.346.600.00
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.002.000.00	12 Laporan	10.002.000.00
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	298.146.247.00	100%	298.146.247.00
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	189.155.047.00	50 Unit	189.155.047.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	64.100.000.00	2 Unit	64.100.000.00
3	27	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	44.891.200.00	1 Unit	44.891.200.00
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Sarana Peternakan	5%	2.575.172.700.00	5%	2.575.172.700.00
						Persentase pengembangan Sarana Peternakan	10%		10%	
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan Penggunaan Sarana Peternakan	50%	146.700.000.00	50%	146.700.000.00
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi	20 Laporan	3.700.000.00	20 Laporan	3.700.000.00
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	10 Laporan	143.000.000.00	10 Laporan	143.000.000.00
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan. Tumbuhan. dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis SDG ternak yang dikelola dan Jumlah macam produk SDG ternak yang dimanfaatkan	3 dan 3 Jenis dan macam	1.094.000.000.00	3 dan 3 Jenis dan macam	1.094.000.000.00
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	393.000.000.00	12 Dokumen	393.000.000.00
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	701.000.000.00	3 Dokumen	701.000.000.00
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit ternak yang dihasilkan	20.000 Ekor	140.000.000.00	20.000 Ekor	140.000.000.00
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak. Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak. Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	107.500.000.00	12 Laporan	107.500.000.00
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan. Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan. Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	12 Laporan	32.500.000.00	12 Laporan	32.500.000.00
3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Terlaksananya Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	50%	33.252.700.00	50%	33.252.700.00
3	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	10 Laporan	33.252.700.00	10 Laporan	33.252.700.00
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak. dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pengendalian dan pengawasan benih/bibit ternak dan pakan	20%	651.220.000.00	20%	651.220.000.00
3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	8.000 Ekor	139.241.000.00	8.000 Ekor	139.241.000.00
3	27	02	2.05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	11.000 Ekor	73.659.000.00	11.000 Ekor	73.659.000.00
3	27	02	2.05	04	Penjaminan Peredaran HPT. Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT. Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	4.500 Ton	425.000.000.00	4.500 Ton	425.000.000.00
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT. Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT. Bahan Pakan/Pakan	12 Laporan	13.320.000.00	12 Laporan	13.320.000.00
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2 Paket	510.000.000.00	2 Paket	510.000.000.00
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	434 Ekor	500.000.000.00	434 Ekor	500.000.000.00
3	27	02	2.06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2 Ton	10.000.000.00	2 Ton	10.000.000.00
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana Peternakan	10%	283.263.500.00	10%	283.263.500.00
						Persentase Pengembangan Prasarana Peternakan	5%		5%	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Peternakan	12 Laporan	164.263.500.00	12 Laporan	164.263.500.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	164.263.500.00	12 Laporan	164.263.500.00
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang terbangun	28 Unit	100.000.000.00	28 Unit	100.000.000.00
3	27	03	2.02	09	Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun. Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	100.000.000.00	5 Unit	100.000.000.00
3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah wilayah sumber bibit yang terbina	4 Wilayah	19.000.000.00	4 Wilayah	19.000.000.00
3	27	03	2.03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	12 Laporan	12.000.000.00	12 Laporan	12.000.000.00
3	27	03	2.03	02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	12 Laporan	7.000.000.00	12 Laporan	7.000.000.00
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengawasan Produk Asal Hewan yang ASUH	60%	3.031.043.180.00	62%	3.031.043.180.00
						Persentase Ternak yang dilayani	40%		45%	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Persentase Angka Kematian Ternak (Ternak Besar. Ternak Kecil dan Ternak Unggas)	0.2%; 0.2% dan 2 %	1.365.013.100.00	0.19%; 0.19% dan 1.9%	1.365.013.100.00
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	10 Laporan	1.365.013.100.00	10 Laporan	1.365.013.100.00
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Rekomendasi	100%	53.447.800.00	100%	53.447.800.00
3	27	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	10 Laporan	42.533.000.00	10 Laporan	42.533.000.00
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	120 Laporan	10.914.800.00	120 Laporan	10.914.800.00
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sampel yang dilayani	100%	898.935.000.00	100%	898.935.000.00
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	120 Laporan	2.500.000.00	120 Laporan	2.500.000.00
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1250 Laporan	896.435.000.00	1250 Laporan	896.435.000.00
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang di bina dan Jumlah Rekomendasi/sertifikat PAH yang ASUH	10 dan 12 Unit dan Laporan	453.636.100.00	10 dan 12 Unit dan Laporan	453.636.100.00
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	8 Laporan	160.000.000.00	8 Laporan	160.000.000.00
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	115.463.000.00	12 Laporan	115.463.000.00
3	27	04	2.04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	3 Laporan	120.158.100.00	3 Laporan	120.158.100.00
3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	4 Dokumen	58.015.000.00	4 Dokumen	58.015.000.00
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Ternak sapi yang dipotong dan Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang ditangani	6.000 dan 24 Ekor dan Kasus	260.011.180.00	6.000 dan 24 Ekor dan Kasus	260.011.180.00
3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	12 Laporan	184.097.480.00	12 Laporan	184.097.480.00
3	27	04	2.05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	6 Kasus	75.913.700.00	6 Kasus	75.913.700.00
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Peternakan yang Memiliki Izin Usaha	80%	11.768.250.00	81%	11.768.250.00
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi ijin usaha peternakan yang dikeluarkan	100%	11.768.250.00	100%	11.768.250.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	10 Dokumen	6.941.000.00	10 Dokumen	6.941.000.00
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	4.827.250.00	1 Laporan	4.827.250.00
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok/Unit Usaha yang memiliki Usaha Olahan Ternak	5.92%	6.474.183.241.00	6%	6.474.183.241.00
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pada kelompok tani	15 Kelompok	6.474.183.241.00	15 Kelompok	6.474.183.241.00
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	17 Unit	6.474.183.241.00	17 Unit	6.474.183.241.00
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			**94.713.527.071.00**		**95.995.443.931.00**
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			94.713.527.071.00		95.995.443.931.00
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			30.159.709.330.00		31.241.626.190.00
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang Baik/Sesuai Regulasi	100%	20.627.492.900.00	100%	22.091.626.190.00
3	30	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Dokumen Rencana. Anggaran. dan Evaluasi	100%	170.000.000.00	100%	175.000.000.00
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	170.000.000.00	7 Laporan	175.000.000.00
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang sesuai dengan Ketentuan dan Dapat Dipertanggungjawabkan	100%	16.257.492.900.00	100%	17.396.626.190.00
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/bulan	10.746.932.900.00	82 Orang/bulan	11.821.626.190.00
3	30	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	5.300.000.000.00	24 Dokumen	5.350.000.000.00
3	30	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	175.560.000.00	12 Dokumen	185.000.000.00
3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	35.000.000.00	6 Laporan	40.000.000.00
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang Akurat dan Sesuai Ketentuan	100%	155.000.000.00	100%	160.000.000.00
3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	155.000.000.00	55 Orang	160.000.000.00
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum PD	100%	825.000.000.00	100%	880.000.000.00
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	90.000.000.00	3 Paket	90.000.000.00
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	110.000.000.00	4 Paket	120.000.000.00
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	220.000.000.00	3 Paket	230.000.000.00
3	30	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	80.000.000.00	12 Laporan	90.000.000.00
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	325.000.000.00	150 Laporan	350.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi	100%	1.100.000.000.00	100%	1.250.000.000.00
3	30	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000.00	1 Unit	550.000.000.00
3	30	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	250.000.000.00	50 Unit	300.000.000.00
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	250.000.000.00	10 Unit	300.000.000.00
3	30	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	100.000.000.00	5 Unit	100.000.000.00
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Opersional Kantor yang Tersedia	100%	750.000.000.00	100%	800.000.000.00
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	750.000.000.00	12 Laporan	800.000.000.00
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	100%	1.370.000.000.00	100%	1.430.000.000.00
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	650.000.000.00	80 Unit	700.000.000.00
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	120.000.000.00	45 Unit	130.000.000.00
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	600.000.000.00	3 Unit	600.000.000.00
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Hak Sewa Tempat Pasar dan Pusat Perbelanjaan Yang Menjadi Kewenangan	5.02%	160.000.000.00	5.48%	190.000.000.00
						Persentase Perusahaan Eksportir Yang Terfasilitasi	24.15%		26.57%	
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat. Pusat Perbelanjaan. dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase unit pasar yang terbina	46.66%	150.000.000.00	60%	175.000.000.00
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat. Pusat Perbelanjaan. dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat. Pusat Perbelanjaan. dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	150.000.000.00	1 Dokumen	175.000.000.00
3	30	02	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase perusahaan yang mengajukan penerbitan SKA	10.15%	10.000.000.00	10.63%	15.000.000.00
3	30	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	2290 Dokumen	10.000.000.00	2290 Dokumen	15.000.000.00
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Direvitalisasi	100%	7.237.216.430.00	100%	6.550.000.000.00
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan dan peningkatan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dilaksanakan	46.66%	6.337.216.430.00	66.66%	5.550.000.000.00
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	150 Unit	6.337.216.430.00	150 Unit	5.550.000.000.00
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pedagang yang terbina	6.13%	900.000.000.00	5.7%	1.000.000.000.00
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	50.000.000.00	1 Dokumen	100.000.000.00
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	530 Dokumen	850.000.000.00	530 Dokumen	900.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Jumlah Komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Yang Harganya Stabil	22.22%	240.000.000.00	18.52%	270.000.000.00
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga. dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase komoditi barang pokok dan barang penting yang terpantau	100%	210.000.000.00	100%	240.000.000.00
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	22 Laporan	10.000.000.00	22 Laporan	15.000.000.00
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	200.000.000.00	2 Laporan	225.000.000.00
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan pupuk bersubsidi	100%	30.000.000.00	100%	30.000.000.00
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	30.000.000.00	12 Laporan	30.000.000.00
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai Transaksi Perdagangan	100%	1.145.000.000.00	100%	1.240.000.000.00
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang dilaksanakan	100%	1.145.000.000.00	100%	1.240.000.000.00
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	20 Pelaku Usaha	60.000.000.00	20 Pelaku Usaha	70.000.000.00
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha	650.000.000.00	4 Pelaku Usaha	650.000.000.00
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	78 Pelaku Usaha	300.000.000.00	78 Pelaku Usaha	350.000.000.00
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	75.000.000.00	2 Pelaku Usaha	100.000.000.00
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	20 Pelaku Usaha	60.000.000.00	20 Pelaku Usaha	70.000.000.00
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Layanan Tera Tera Ulang Terhadap Potensi UTTP di Kabupaten	92.73%	450.000.000.00	93.64%	550.000.000.00
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal. Berupa Tera. Tera Ulang. dan Pengawasan	Persentase UTTP yang tertera	91.07%	450.000.000.00	91.96%	550.000.000.00
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal. Berupa Tera. Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur. Alat Takar. Alat Timbang. dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10200 Unit	200.000.000.00	10200 Unit	250.000.000.00
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1050 Orang	250.000.000.00	1050 Orang	300.000.000.00
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Nilai Transaksi Hasil Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100%	300.000.000.00	100%	350.000.000.00
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaksanaan promosi. pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	100%	300.000.000.00	100%	350.000.000.00
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail. Marketplace. Perhotelan dan Jasa Akomodasi	140 UMKM	300.000.000.00	140 UMKM	350.000.000.00
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			64.553.817.741.00		64.753.817.741.00
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			64.553.817.741.00		64.753.817.741.00
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM Kreatif yang Dilatih	100%	64.553.817.741.00	100%	64.753.817.741.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Persentase IKM Unggulan yang Dilatih	100%		100%	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Industri Kreatif yang diselesaikan	100%	64.553.817.741.00	100%	64.753.817.741.00
						Persentase Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Industri Unggulan yang diselesaikan	100%		100%	
3	31	02	2.01	02	Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan. Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan. Pengembangan. Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1.000.000.000.00	1 Dokumen	1.000.000.000.00
3	31	02	2.01	03	Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	6 Dokumen	600.000.000.00	6 Dokumen	700.000.000.00
3	31	02	2.01	04	Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	25 Dokumen	60.253.817.741.00	25 Dokumen	60.253.817.741.00
3	31	02	2.01	05	Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	9 Dokumen	2.700.000.000.00	9 Dokumen	2.800.000.000.00
					DINAS KETENAGAKERJAAN			9.999.650,00		9.999.650,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			9.999.650,00		9.999.650,00
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			9.999.650,00		9.999.650,00
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang termonitor	50%	9.999.650,00	50%	9.999.650,00
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Lokasi Transmigrasi yang Termonitor	5 KK	9.999.650,00	5 KK	9.999.650,00
3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lokasi Transmigrasi yang Termonitor	5 Kawasan	9.999.650,00	5 Kawasan	9.999.650,00
TOTAL								**9.999.650,00**		**9.999.650,00**
					SEKRETARIAT DAERAH			**61.364.854.645.00**		**71.974.179.282.00**
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			61.345.074.445.00		71.951.954.249.00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			61.345.074.445.00		71.951.954.249.00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang Baik/Sesuai Regulasi	100%	37.428.509.403.00	100%	43.417.149.981.00
4	01	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen rencana. anggaran dan evaluasi	100%	295.941.850.00	100%	327.303.007.00
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	150.119.588.00	11 Dokumen	175.018.894.00
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	145.822.262.00	14 Laporan	152.284.113.00
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	20.187.953.802.00	100%	22.688.402.295.00
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	133 Orang/bulan	18.797.469.470.00	133 Orang/bulan	21.120.836.698.00
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	450 Dokumen	1.390.484.332.00	450 Dokumen	1.567.565.597.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	230.889.400.00	100%	278.507.332.00
4	01	01	2.05	05	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	6.093.900.00	10 Dokumen	6.847.107.00
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	100.000.000.00	100 Orang	131.440.001.00
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	124.795.500.00	80 Orang	140.220.224.00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	3.015.914.478.00	100%	3.388.681.758.00
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	131.901.300.00	7 Paket	148.204.301.00
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	297.271.320.00	8 Paket	334.014.303.00
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	256.672.610.00	6 Paket	288.397.346.00
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	198.508.515.00	4 Paket	223.044.168.00
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55 Laporan	1.431.560.733.00	55 Laporan	1.608.501.640.00
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360 Laporan	700.000.000.00	360 Laporan	786.520.000.00
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	1.435.107.520.00	100%	1.612.602.206.00
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	16.586.000.00	2 Unit	18.636.030.00
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	320.656.000.00	5 Unit	360.309.937.00
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	1.068.945.760.00	40 Unit	1.201.161.996.00
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	28.919.760.00	12 Unit	32.494.243.00
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	5.251.267.485.00	100%	6.012.684.149.00
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	90 Laporan	2.143.114.765.00	90 Laporan	2.520.363.751.00
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	297.412.000.00	10 Laporan	334.172.124.00
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	85 Laporan	2.810.740.720.00	85 Laporan	3.158.148.274.00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	2.726.099.475.00	100%	3.063.045.373.00
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	345.200.000.00	4 Unit	387.866.720.00
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	1.984.542.000.00	60 Unit	2.229.831.392.00
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	116.660.675.00	6 Unit	131.079.935.00
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	320 Unit	161.484.800.00	320 Unit	181.444.322.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	250 Unit	118.212.000.00	250 Unit	132.823.004.00
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase kebutuhan operasional KDH/Wakil KDH yang terpenuhi	100%	1.561.751.822.00	100%	1.754.784.351.00
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	273.887.494.00	2 Orang/Bulan	307.739.990.00
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	155.178.000.00	5 Paket	174.358.001.00
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	92.537.952.00	2 Orang	103.975.644.00
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	1.040.148.376.00	2 Orang/Bulan	1.168.710.716.00
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kebutuhan rumah tangga Setda yang terpenuhi	100%	642.323.700.00	100%	721.714.912.00
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	330.190.590.00	1 Paket	371.002.148.00
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	251.121.960.00	1 Paket	282.160.635.00
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	61.011.150.00	1 Paket	68.552.129.00
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase pelaksanaan penyusunan dokumen Evaluasi Kelembagaan dan Anjab ABK/ SKJ/Evjab; Persentase kepatuhan terhadap kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik perangkat daerah; Persentase kesesuaian laporan kinerja perangkat daerah dengan ketentuan	100%	813.527.051.00	100%	2.145.000.000.00
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	271.000.000.00	4 Dokumen	715.000.000.00
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	8 Laporan	271.000.000.00	8 Laporan	715.000.000.00
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7 Dokumen	271.527.051.00	7 Dokumen	715.000.000.00
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terpenuhi	100%	1.267.732.820.00	100%	1.424.424.598.00
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1000 Laporan	886.060.000.00	1000 Laporan	995.577.016.00
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	300 Laporan	167.710.000.00	300 Laporan	188.438.956.00
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1000 Laporan	213.962.820.00	1000 Laporan	240.408.626.00
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase laporan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan. Hukum dan kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana Sesuai Regulasi	100%	21.068.369.386.00	100%	23.672.420.856.00
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	100%	711.837.530.00	100%	799.820.650.00
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	385.843.000.00	2 Dokumen	433.533.195.00
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	249.989.200.00	1 Dokumen	280.887.866.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	76.005.330.00	5 Dokumen	85.399.589.00
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pembinaan Mental Spiritual serta Fasilitasi dan Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Dilaksanakan	100%	19.369.764.776.00	100%	21.763.868.712.00
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	4.859.105.343.00	10 Dokumen	5.459.691.773.00
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial. Transmigrasi. Kesehatan. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	14.325.659.433.00	3 Dokumen	16.096.310.939.00
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga. Pariwisata. Pendidikan. Kebudayaan. Perpustakaan. Kearsipan. Trantibum Linmas	30 Dokumen	185.000.000.00	30 Dokumen	207.866.000.00
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi penyusunan produk hukum daerah. bantuan hukum serta pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum	100%	806.768.680.00	100%	906.485.290.00
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	800 Dokumen	286.889.980.00	800 Dokumen	322.349.582.00
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	249.889.900.00	5 Kasus	280.776.292.00
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	800 Dokumen	269.988.800.00	800 Dokumen	303.359.416.00
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	179.998.400.00	100%	202.246.204.00
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4 Dokumen	130.239.500.00	4 Dokumen	146.337.103.00
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	9.853.000.00	1 Dokumen	11.070.831.00
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5 Laporan	39.905.900.00	5 Laporan	44.838.270.00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian. SDA. Pembangunan dan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang Ditindaklanjuti serta Tersedianya Data Pembangunan yang Terlaksana Sesuai Regulasi	100%	2.848.195.656.00	100%	4.862.383.412.00
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah Terkait Bidang Perekonomian. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	991.817.897.00	100%	1.114.406.692.00
4	01	03	2.01	01	Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	20 Dokumen	258.244.000.00	20 Dokumen	290.162.959.00
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	40 Laporan	148.330.897.00	40 Laporan	166.664.698.00
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	30 Dokumen	585.243.000.00	30 Dokumen	657.579.035.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase kebijakan dan data pembangunan yang disediakan	100%	602.316.124.00	100%	676.762.399.00
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 Dokumen	245.398.190.00	3 Dokumen	275.729.407.00
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	17 Laporan	193.978.094.00	17 Laporan	217.953.787.00
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	19 Laporan	162.939.840.00	19 Laporan	183.079.205.00
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase perumusan kebijakan pengelolaan pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	100%	1.067.861.635.00	100%	2.862.000.001.00
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	175 Dokumen	1.014.371.635.00	175 Dokumen	2.120.000.001.00
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 Dokumen	23.290.000.00	5 Dokumen	265.000.000.00
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	250 Orang	30.200.000.00	250 Orang	477.000.000.00
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan daerah terkait sumber daya alam yang ditindaklanjuti	100%	186.200.000.00	100%	209.214.320.00
4	01	03	2.04	01	Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian. Kehutanan. Kelautan. dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian. Pangan. Kehutanan. Kelautan dan Perikanan. Perdagangan. Perindustrian. KUKM. Penanaman Modal. Tenaga Kerja	40 Dokumen	60.000.000.00	40 Dokumen	67.416.000.00
4	01	03	2.04	03	Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pertanahan	10 Dokumen	126.200.000.00	10 Dokumen	141.798.320.00
X					-			19.780.200.00		22.225.033.00
X	XX				-			19.780.200.00		22.225.033.00
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang Baik/Sesuai Regulasi	100%	19.780.200.00	100%	22.225.033.00
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	19.780.200.00	100%	22.225.033.00
X	XX	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	340 Unit	19.780.200.00	340 Unit	22.225.033.00
					SEKRETARIAT DPRD			**134.609.725.705.00**		**134.609.725.705.00**
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			134.609.725.705.00		134.609.725.705.00
4	02				SEKRETARIAT DPRD			134.609.725.705.00		134.609.725.705.00
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	100%	57.111.428.905.00	100%	57.111.428.905.00
4	02	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan. penganggaran dan evaluasi yang selaras	6 Dokumen	90.000.000.00	6 Dokumen	90.000.000.00
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	55.000.000.00	4 Dokumen	55.000.000.00
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	35.000.000.00	2 Laporan	35.000.000.00
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan yang akurat	100%	5.786.664.002.00	100%	5.786.664.002.00
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.889.114.002.00	26 Orang/bulan	3.889.114.002.00
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.753.550.000.00	12 Dokumen	1.753.550.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	144.000.000.00	12 Dokumen	144.000.000.00
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan BMD dengan baik	2 Dokumen	400.000.000.00	2 Dokumen	400.000.000.00
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	400.000.000.00	2 Dokumen	400.000.000.00
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	100%	3.287.737.200.00	100%	3.287.737.200.00
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	121.501.000.00	12 Paket	121.501.000.00
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.950.650.200.00	12 Paket	1.950.650.200.00
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	235.086.000.00	12 Paket	235.086.000.00
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	265.000.000.00	12 Dokumen	265.000.000.00
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	715.500.000.00	12 Laporan	715.500.000.00
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD	95%	8.128.532.821.00	97%	8.128.532.821.00
4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	2.500.000.000.00	5 Unit	2.500.000.000.00
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	168 Unit	5.628.532.821.00	168 Unit	5.628.532.821.00
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penunjang operasional kantor	100%	869.878.000.00	100%	869.878.000.00
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.000.000.00	12 Laporan	8.000.000.00
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	627.650.000.00	12 Laporan	627.650.000.00
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	234.228.000.00	12 Laporan	234.228.000.00
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	3.783.142.240.00	100%	3.783.142.240.00
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	1.308.236.340.00	24 Unit	1.308.236.340.00
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	110.290.900.00	24 Unit	110.290.900.00
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.820.865.000.00	5 Unit	1.820.865.000.00
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	168 Unit	543.750.000.00	168 Unit	543.750.000.00
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	34.344.089.642.00	100%	34.344.089.642.00
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	33.920.389.642.00	50 Orang/Bulan	33.920.389.642.00
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 Paket	298.700.000.00	150 Paket	298.700.000.00
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	125.000.000.00	50 Orang	125.000.000.00
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya PAW Anggota DPRD	100%	421.385.000.00	100%	421.385.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	2 Dokumen	125.000.000.00	2 Dokumen	125.000.000.00
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2 Laporan	296.385.000.00	2 Laporan	296.385.000.00
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	77.498.296.800.00	95%	77.498.296.800.00
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terpenuhinya layanan pembentukan perda dan peraturan DPRD	12 Dokumen	2.761.560.800.00	12 Dokumen	2.761.560.800.00
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	125.000.000.00	1 Dokumen	125.000.000.00
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	1.706.560.800.00	12 Dokumen	1.706.560.800.00
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	12 Dokumen	780.000.000.00	12 Dokumen	780.000.000.00
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	150.000.000.00	1 Dokumen	150.000.000.00
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase rapat pembahasan anggaran yang terselenggara terhadap jumlah rapat yang terjadwal	100%	2.155.335.000.00	100%	2.155.335.000.00
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	120.000.000.00	1 Dokumen	120.000.000.00
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	135.000.000.00	1 Dokumen	135.000.000.00
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	28 Dokumen	1.500.000.000.00	28 Dokumen	1.500.000.000.00
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	125.000.000.00	1 Dokumen	125.000.000.00
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	275.335.000.00	1 Dokumen	275.335.000.00
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintah	100%	250.000.000.00	100%	250.000.000.00
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	125.000.000.00	1 Dokumen	125.000.000.00
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	125.000.000.00	1 Dokumen	125.000.000.00
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya keterpenuhan layanan peningkatan kapasitas lembaga DPRD	100%	37.668.120.000.00	100%	37.668.120.000.00
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	125.000.000.00	1 Dokumen	125.000.000.00
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	4.668.120.000.00	4 Dokumen	4.668.120.000.00
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah. Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	4.000.000.000.00	12 Dokumen	4.000.000.000.00
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	150 Orang	125.000.000.00	150 Orang	125.000.000.00
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	84 Orang	125.000.000.00	84 Orang	125.000.000.00
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	50 Dokumen	28.500.000.000.00	50 Dokumen	28.500.000.000.00
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	125.000.000.00	1 Dokumen	125.000.000.00
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya layanan dalam hal penyerapan dan perhimpunan aspirasi masyarakat	100%	2.123.550.000.00	100%	2.123.550.000.00
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	50 Dokumen	125.000.000.00	50 Dokumen	125.000.000.00
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya layanan pelaksanaan rapat internal BK	1 Dokumen	125.000.000.00	1 Dokumen	125.000.000.00
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	125.000.000.00	1 Dokumen	125.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	64 Dokumen	32.414.731.000.00	64 Dokumen	32.414.731.000.00
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			**14.795.333.967.00**		**14.405.222.219.00**
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			14.795.333.967.00		14.405.222.219.00
5	01				PERENCANAAN			13.020.333.967.00		12.382.222.219.00
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	8.399.410.019.00	100%	8.361.278.519.00
5	01	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen rencana. anggaran dan evaluasi	100%	450.000.000.00	100%	395.000.000.00
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	200.000.000.00	6 Dokumen	150.000.000.00
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	125.000.000.00	2 Laporan	125.000.000.00
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	125.000.000.00	2 Laporan	120.000.000.00
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	6.193.894.519.00	100%	6.193.894.519.00
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	5.719.016.023.00	37 Orang/bulan	5.719.016.023.00
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	374.918.496.00	12 Dokumen	374.918.496.00
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	99.960.000.00	12 Dokumen	99.960.000.00
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100%	42.000.000.00	100%	42.000.000.00
5	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	42.000.000.00	1 Dokumen	42.000.000.00
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	170.000.000.00	100%	170.000.000.00
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	170.000.000.00	40 Orang	170.000.000.00
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	790.000.000.00	100%	803.000.000.00
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.000.000.00	12 Paket	41.000.000.00
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	65.000.000.00	12 Paket	65.000.000.00
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	100.000.000.00	12 Paket	100.000.000.00
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.000.000.00	12 Dokumen	10.000.000.00
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	500.000.000.00	45 Laporan	587.000.000.00
5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	75.000.000.00	1 Dokumen	0.00
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	150.000.000.00	100%	150.000.000.00
5	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	150.000.000.00	25 Unit	150.000.000.00
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang opersional kantor yang tersedia	100%	195.227.100.00	100%	195.227.100.00
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	171.227.100.00	12 Laporan	171.227.100.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24.000.000.00	12 Laporan	24.000.000.00
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	408.288.400.00	100%	412.156.900.00
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	303.156.900.00	20 Unit	303.156.900.00
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	27.230.000.00	20 Unit	30.000.000.00
5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	83 Unit	77.901.500.00	83 Unit	79.000.000.00
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase IKU dan IKD yang mencapai Target	85%	2.609.353.388.00	90%	2.257.000.000.00
						Tingkat kesalarasan antar bagian dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%		100%	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	2.206.000.000.00	4 Dokumen	1.940.000.000.00
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	300.000.000.00	3 Berita Acara	115.000.000.00
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	56 Berita Acara	250.000.000.00	56 Berita Acara	250.000.000.00
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	539.000.000.00	2 Berita Acara	620.000.000.00
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	6000 Usulan	67.000.000.00	6000 Usulan	55.000.000.00
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	1.050.000.000.00	4 Dokumen	900.000.000.00
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan data gambaran umum daerah yang dapat dianalisis	100%	143.353.388.00	100%	55.000.000.00
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	68.353.388.00	1 Dokumen	55.000.000.00
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	56 Orang	75.000.000.00	56 Orang	0.00
5	01	02	2.03		Pengendalian. Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	100%	210.000.000.00	100%	212.000.000.00
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	6 Laporan	50.000.000.00	6 Laporan	52.000.000.00
5	01	02	2.03	03	Monitoring. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	160.000.000.00	5 Laporan	160.000.000.00
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	50.000.000.00	100%	50.000.000.00
5	01	02	2.04	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000.00	1 Dokumen	50.000.000.00
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat keselarasan Dokrenda dengan Dokren PD Bidang PERSIK	100%	2.011.570.560.00	100%	1.763.943.700.00
						Tingkat keselarasan Dokrenda dengan Dokren PD Bidang PPM	100%		100%	
						Tingkat keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PERSIK	100%		100%	
						Tingkat keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PPM	100%		100%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase PD Bidang PPM yang menindaklanjuti hasil asistensi dan monev	100%	769.999.800.00	100%	723.943.700.00
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	35 Dokumen	108.010.400.00	35 Dokumen	108.010.400.00
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	34 Laporan	55.750.000.00	34 Laporan	55.750.000.00
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	34 Laporan	20.000.000.00	34 Laporan	20.000.000.00
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	34 Laporan	107.172.900.00	34 Laporan	107.172.900.00
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen	174.066.500.00	11 Dokumen	108.010.400.00
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	55.000.000.00	7 Laporan	55.000.000.00
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	10.000.000.00	7 Laporan	20.000.000.00
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	240.000.000.00	7 Laporan	250.000.000.00
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase PD Bidang Perekonomian dan SDA yang menindaklanjuti hasil asistensi dan monev	100%	513.000.000.00	100%	520.000.000.00
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	128.000.000.00	6 Dokumen	125.000.000.00
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	50.000.000.00	5 Laporan	50.000.000.00
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	20.000.000.00	5 Laporan	20.000.000.00
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Laporan	50.000.000.00	5 Laporan	50.000.000.00
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	175.000.000.00	3 Dokumen	175.000.000.00
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	35.000.000.00	3 Laporan	35.000.000.00
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	10.000.000.00	3 Laporan	20.000.000.00
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	45.000.000.00	3 Laporan	45.000.000.00
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang menindaklanjuti hasil asistensi dan monev	100%	728.570.760.00	100%	520.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	200.000.000.00	7 Dokumen	200.000.000.00
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	32.570.760.00	5 Laporan	35.000.000.00
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	20.000.000.00	5 Laporan	20.000.000.00
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan	300.000.000.00	5 Laporan	65.000.000.00
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	120.000.000.00	2 Dokumen	120.000.000.00
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	11.000.000.00	2 Laporan	25.000.000.00
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	10.000.000.00	2 Laporan	20.000.000.00
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	35.000.000.00	2 Laporan	35.000.000.00
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH			**755.335.847.039.00**		**755.158.194.039.00**
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			755.251.383.439.00		755.073.730.439.00
5	02				KEUANGAN			755.251.383.439.00		755.073.730.439.00
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen Administrasi PD yang Baik	95%	74.014.463.331.00	97%	74.014.463.331.00
5	02	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen Rencana. anggaran dan evaluasi	97%	499.524.000.00	100%	499.524.000.00
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	278.872.000.00	12 Dokumen	278.872.000.00
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	220.652.000.00	2 Laporan	220.652.000.00
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	98%	69.412.402.211.00	98%	69.412.402.211.00
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/bulan	67.429.438.211.00	150 Orang/bulan	67.429.438.211.00
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80 Dokumen	1.982.964.000.00	80 Dokumen	1.982.964.000.00
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	494.533.750.00	100%	494.533.750.00
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	494.533.750.00	150 Orang	494.533.750.00
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	1.102.780.500.00	100%	1.102.780.500.00
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	43.984.860.00	10 Paket	43.984.860.00
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	123.884.260.00	50 Paket	123.884.260.00
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	373.301.470.00	50 Paket	373.301.470.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	77.458.230.00	100 Paket	77.458.230.00
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150 Paket	90.074.740.00	150 Paket	90.074.740.00
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	35.577.000.00	25 Laporan	35.577.000.00
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	358.499.940.00	150 Laporan	358.499.940.00
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	989.440.470.00	100%	989.440.470.00
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	300.000.000.00	1 Unit	300.000.000.00
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	600.000.000.00	10 Unit	600.000.000.00
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	89.440.470.00	10 Unit	89.440.470.00
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	98%	477.037.200.00	98%	477.037.200.00
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	450.000.00	5 Laporan	450.000.00
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 Laporan	273.737.200.00	20 Laporan	273.737.200.00
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	2.850.000.00	10 Laporan	2.850.000.00
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	200.000.000.00	50 Laporan	200.000.000.00
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	1.038.745.200.00	100%	1.038.745.200.00
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	84.463.600.00	25 Unit	84.463.600.00
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	714.745.200.00	50 Unit	714.745.200.00
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	24.000.000.00	50 Unit	24.000.000.00
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100.000.000.00	100 Unit	100.000.000.00
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	200.000.000.00	10 Unit	200.000.000.00
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kelengkapan Dokumen LKPD yang Selesai Tepat Waktu	100%	665.094.079.776.00	100%	664.916.426.776.00
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	2.934.204.288.00	100%	2.934.204.288.00
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	321.413.954.00	4 Dokumen	321.413.954.00
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	237.064.536.00	4 Dokumen	237.064.536.00
5	02	02	2.01	03	Koordinasi. Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	140.030.000.00	60 Dokumen	140.030.000.00
5	02	02	2.01	04	Koordinasi. Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	158.381.800.00	60 Dokumen	158.381.800.00
5	02	02	2.01	05	Koordinasi. Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	150.000.000.00	60 Dokumen	150.000.000.00
5	02	02	2.01	06	Koordinasi. Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	150.000.000.00	60 Dokumen	150.000.000.00
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	1.167.196.894.00	2 Dokumen	1.167.196.894.00
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	260.006.054.00	2 Dokumen	260.006.054.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	139.999.980.00	2 Dokumen	139.999.980.00
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase dokumen pendapatan dan belanja daerah yang terselesaikan	100%	1.589.628.705.00	100%	1.589.628.705.00
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	24.2 Dokumen	296.441.349.00	24.2 Dokumen	296.441.349.00
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	300 Laporan	52.748.500.00	300 Laporan	52.748.500.00
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	268 Dokumen	44.885.000.00	268 Dokumen	44.885.000.00
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	10 Dokumen	59.980.000.00	10 Dokumen	59.980.000.00
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	193.250.000.00	100 Orang	193.250.000.00
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	1.073.209.208.00	100%	895.556.208.00
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	114.114.048.00	12 Laporan	114.114.048.00
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset. Kewajiban. Ekuitas. Pendapatan. Belanja. Pembiayaan. Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset. Kewajiban. Ekuitas. Pendapatan. Belanja. Pembiayaan. Pendapatan-LO. dan Beban	4 Dokumen	96.654.840.00	4 Dokumen	96.654.840.00
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	277.000.975.00	7 Laporan	277.000.975.00
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	197.392.350.00	4 Dokumen	19.739.350.00
5	02	02	2.03	07	Koordinasi. Sinkronisasi. dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Dokumen	56.829.820.00	4 Dokumen	56.829.820.00
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	170.486.500.00	1 Dokumen	170.486.500.00
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	160.730.675.00	100 Orang	160.730.675.00
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan kewnangan pengelolaan keuangan daerah	100%	659.497.037.575.00	100%	659.497.037.575.00
5	02	02	2.04	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	323.605.334.00	2 Laporan	323.605.334.00
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	7 Laporan	573.973.552.573.00	7 Laporan	573.973.552.573.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10 Laporan	38.192.672.300.00	10 Laporan	38.192.672.300.00
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	3 Laporan	47.007.207.368.00	3 Laporan	47.007.207.368.00
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penggunaan BMD SKPD yang berstatus	100%	4.210.350.473.00	100%	4.210.350.473.00
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penggunaan BMD SKPD yang berstatus	100%	4.210.350.473.00	100%	4.210.350.473.00
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	112 Dokumen	107.249.938.00	112 Dokumen	107.249.938.00
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	100.000.000.00	12 Dokumen	100.000.000.00
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	832.588.700.00	4 Laporan	832.588.700.00
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	500 Laporan	2.496.525.604.00	500 Laporan	2.496.525.604.00
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	160.000.000.00	12 Laporan	160.000.000.00
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtanganan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtanganan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah	226 Dokumen	317.629.931.00	226 Dokumen	317.629.931.00
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	87.279.400.00	4 Laporan	87.279.400.00
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	109.076.900.00	4 Laporan	109.076.900.00
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan pajak dan retribusi Daerah	1.5%	11.932.489.859.00	2%	11.932.489.859.00
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak	150 Wajib Pajak	11.932.489.859.00	250 Wajib Pajak	11.932.489.859.00
						Peningkatan kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD	1%		1.5%	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	139.999.980.00	2 Dokumen	139.999.980.00
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Dokumen	550.707.018.00	12 Dokumen	550.707.018.00
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 Laporan	600.048.920.00	8 Laporan	600.048.920.00
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	15 Laporan	3.161.596.686.00	15 Laporan	3.161.596.686.00
5	02	04	2.01	06	Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	53 Laporan	368.220.720.00	53 Laporan	368.220.720.00
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	5000 Obyek Pajak	1.807.362.690.00	5000 Obyek Pajak	1.807.362.690.00
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	801.123 Dokumen	810.093.480.00	801.123 Dokumen	810.093.480.00
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	175.665.406.00	2 Layanan	175.665.406.00
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	54 Dokumen	935.165.551.00	54 Dokumen	935.165.551.00
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8990 Dokumen	1.845.071.578.00	8990 Dokumen	1.845.071.578.00
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10 Dokumen	69.999.930.00	10 Dokumen	69.999.930.00
5	02	04	2.01	13	Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	53 Dokumen	1.299.357.400.00	53 Dokumen	1.299.357.400.00
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	169.200.500.00	2 Laporan	169.200.500.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			**17.443.784.738.00**		**22.335.166.590.00**
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			17.443.784.738.00		22.335.166.590.00
5	03				KEPEGAWAIAN			14.363.617.738.00		18.432.930.670.00
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	84%	9.896.524.735.00	84%	11.795.365.670.00
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	7.701.793.913.00	100%	8.759.564.500.00
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	6.928.101.313.00	50 Orang/bulan	7.983.943.000.00
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	665.349.600.00	13 Dokumen	667.278.500.00
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	108.343.000.00	11 Dokumen	108.343.000.00
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	80%	69.357.400.00	80%	130.521.600.00
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	69.357.400.00	80 Orang	130.521.600.00
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	90%	543.674.935.00	90%	682.382.700.00
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	171.228.065.00	4 Paket	188.985.000.00
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	107.845.710.00	4 Paket	118.045.000.00
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	14.601.160.00	12 Laporan	16.552.200.00
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	250.000.000.00	200 Laporan	358.800.500.00
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	60%	778.506.037.00	60%	937.953.870.00
5	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	539.277.960.00	1 Unit	596.000.000.00
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	126.003.870.00	2 Unit	126.003.870.00
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	113.224.207.00	20 Unit	215.950.000.00
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang opersional kantor yang tersedia	90%	315.900.650.00	90%	452.763.000.00
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	238.215.000.00	36 Laporan	338.215.000.00
5	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	77.685.650.00	6 Laporan	114.548.000.00
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	80%	487.291.800.00	80%	832.180.000.00
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	210.186.300.00	34 Unit	395.345.000.00
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	174 Unit	90.865.500.00	174 Unit	250.595.000.00
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	186.240.000.00	1 Unit	186.240.000.00
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai aspek kinerja dan penempatan ASN sesuai formasi dan jabatan	234 Poin	4.467.093.003.00	240.5 Poin	6.637.565.000.00
5	03	02	2.01		Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai sistem informasi pegawai	12 Poin	1.627.678.183.00	13 Poin	1.891.341.000.00
						Nilai pengadaan ASN	39 Poin		39.5 Poin	
						Nilai perencanaan kebutuhan pegawai	36.5 Poin		37.5 Poin	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	38.109.000.00	1 Dokumen	43.436.000.00
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1.307.901.203.00	1 Dokumen	1.378.120.000.00
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	496 Dokumen	59.996.650.00	496 Dokumen	96.880.000.00
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	6 Lembaga	56.675.830.00	6 Lembaga	96.565.000.00
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	139.999.500.00	2 Dokumen	180.000.000.00
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	24.996.000.00	1 Dokumen	96.340.000.00
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Nilai promosi. mutasi dan rotasi pegawai	26.5 Poin	811.962.820.00	27.5 Poin	1.000.340.000.00
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	308.303.200.00	4 Dokumen	397.925.000.00
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	8500 Dokumen	116.999.920.00	8500 Dokumen	133.040.000.00
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	386.659.700.00	4 Dokumen	469.375.000.00
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	11 Poin	1.588.289.800.00	12 Poin	2.784.935.000.00
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	140 Orang	596.148.820.00	140 Orang	624.740.000.00
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	100.000.000.00	1 Dokumen	500.000.000.00
5	03	02	2.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	12 Dokumen	449.896.500.00	12 Dokumen	533.859.000.00
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	4 Dokumen	411.994.600.00	4 Dokumen	963.168.000.00
5	03	02	2.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	160 Orang	30.249.880.00	160 Orang	163.168.000.00
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai penghargaan dan disiplin pegawai	37.5 Poin	439.162.200.00	38.5 Poin	960.949.000.00
						Nilai manajemen kinerja pegawai	71.5 Poin		72.5 Poin	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9656 Dokumen	150.155.300.00	9656 Dokumen	455.556.000.00
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 Orang	146.582.100.00	300 Orang	321.115.000.00
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 Laporan	142.424.800.00	2 Laporan	184.278.000.00
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			3.080.167.000.00		3.902.235.920.00
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			3.080.167.000.00		3.902.235.920.00
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai aspek pengembangan karier dan peningkatan kompetensi pegawai	71.5 Poin	3.080.167.000.00	72.5 Poin	3.902.235.920.00
5	04	02	2.02		Sertifikasi. Kelembagaan. Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Nilai peningkatan kompetensi manajerial	9 Poin	3.080.167.000.00	10 Poin	3.902.235.920.00
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	40 Orang	29.999.800.00	40 Orang	350.000.000.00
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Fungsional. Kepemimpinan. dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Fungsional. Kepemimpinan. dan Prajabatan	2 Laporan	612.410.000.00	2 Laporan	626.345.920.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	04	02	2.02	08	Pembinaan. Pengoordinasian. Fasilitasi. Pemantauan. Evaluasi. dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi. Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi. Pengelolaan Sumber Belajar. dan Kerja Sama. serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Kepemimpinan. dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan. Koordinasi. Fasilitasi. Pemantauan. Evaluasi. dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi. Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi. Pengelolaan Sumber Belajar. dan Kerja Sama	3 Dokumen	2.437.757.200.00	3 Dokumen	2.925.890.000.00
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.775.000.000.00		2.023.000.000.00
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil riset yang diterapkan	100%	1.775.000.000.00	100%	2.023.000.000.00
						Tingkat kematangan inovasi daerah	75%		80%	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Hasil Riset Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	725.000.000.00	100%	800.000.000.00
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	4 Dokumen	725.000.000.00	4 Dokumen	800.000.000.00
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Hasil Riset Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	500.000.000.00	100%	648.000.000.00
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	4 Dokumen	500.000.000.00	4 Dokumen	648.000.000.00
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase peningkatan inovasi	100%	550.000.000.00	100%	575.000.000.00
5	05	02	2.04	01	Penelitian. Pengembangan. dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian. Pengembangan. dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	250.000.000.00	2 Dokumen	250.000.000.00
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	300.000.000.00	3 Laporan	325.000.000.00
					INSPEKTORAT			**14.279.912.870.00**		**18.038.291.151.00**
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			14.279.912.870.00		18.038.291.151.00
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			14.279.912.870.00		18.038.291.151.00
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik / sesuai regulasi	100%	9.505.260.340.00	100%	11.942.825.671.00
6	01	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen rencana. anggaran dan evaluasi	100%	96.022.390.00	100%	246.375.000.00
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	96.022.390.00	4 Laporan	246.375.000.00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	6.588.581.129.00	100%	6.588.581.129.00
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	6.245.831.129.00	40 Orang/bulan	6.245.831.129.00
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	268.830.000.00	13 Dokumen	268.830.000.00
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	73.920.000.00	12 Dokumen	73.920.000.00
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	971.661.712.00	100%	2.135.970.000.00
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	26.239.512.00	1 Paket	0.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	806.713.720.00	50 Orang	1.855.800.000.00
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52 Orang	138.708.480.00	52 Orang	280.170.000.00
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	100%	955.185.190.00	100%	1.055.185.190.00
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	37.915.358.00	2 Paket	37.915.358.00
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	240.310.471.00	8 Paket	240.310.471.00
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	110.195.361.00	2 Paket	110.195.361.00
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.000.000.00	12 Dokumen	10.000.000.00
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	556.764.000.00	75 Laporan	656.764.000.00
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	177.951.510.00	100%	704.852.240.00
6	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	447.782.000.00	0 Unit	0.00
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	36.465.000.00	12 Unit	36.465.000.00
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	107.076.510.00	15 Unit	199.564.080.00
6	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	34.410.000.00	6 Unit	21.041.160.00
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang opersional kantor yang tersedia	100%	187.630.063.00	100%	212.739.512.00
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000.00	12 Laporan	1.500.000.00
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	176.130.063.00	12 Laporan	185.000.000.00
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000.00	1 Laporan	26.239.512.00
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	100%	528.228.346.00	100%	999.122.600.00
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	450.228.346.00	15 Unit	799.122.600.00
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	75.000.000.00	50 Unit	75.000.000.00
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.000.000.00	1 Unit	125.000.000.00
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	89%	4.469.406.820.00	90%	5.098.042.980.00
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga yang telah dilakukan pengawasan	100%	4.343.006.820.00	100%	4.918.042.980.00
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	41.325.000.00	1 Laporan	162.560.000.00
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	90 Laporan	3.413.550.000.00	90 Laporan	3.413.550.000.00
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan	80.075.000.00	6 Laporan	98.000.000.00
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	65 Laporan	70.725.000.00	65 Laporan	74.000.000.00
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	24 Laporan	54.171.350.00	24 Laporan	96.605.000.00
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	620.694.120.00	1 Kesepakatan	935.927.980.00
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen	62.466.350.00	5 Dokumen	137.400.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Permintaan audit keinvestigasian dan Pengaduan Masyarakat yang terlayani/dilakukan pemeriksaan	100%	126.400.000.00	100%	180.000.000.00
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	13.875.000.00	1 Laporan	18.000.000.00
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	112.525.000.00	10 Laporan	162.000.000.00
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai A	54%	305.245.710.00	63%	997.422.500.00
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang tersusun	100%	25.000.000.00	100%	25.000.000.00
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	25.000.000.00	1 Rekomendasi	25.000.000.00
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	100%	305.245.710.00	100%	972.422.500.00
6	01	03	2.02	02	Pendampingan. Asistensi. Verifikasi. dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan. Asistensi. Verifikasi. dan Penilaian Reformasi Birokrasi	55 perangkat daerah	245.116.660.00	55 perangkat daerah	672.422.500.00
6	01	03	2.02	03	Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	30.000.000.00	6 Kegiatan	150.000.000.00
6	01	03	2.02	04	Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 perangkat daerah	30.129.050.00	1 perangkat daerah	150.000.000.00
					KECAMATAN BANGIL			**11.454.650.000.00**		**11.454.650.000.00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN			11.454.650.000.00		11.454.650.000.00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen/ laporan administrasi perangkat daerah yang baik/sesuai regulasi	100%	10.956.000.000.00	100%	10.956.000.000.00
7	01	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi indikator kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan yang konsisten pada dokumen rencana. anggaran dan evaluasi dibagi jumlah indikator kinerja	100%	8.000.000.00	100%	8.000.000.00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.000.000.00	2 Dokumen	4.000.000.00
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.000.000.00	4 Laporan	4.000.000.00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	10.285.000.000.00	100%	10.285.000.000.00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	9.600.000.000.00	65 Orang/bulan	9.600.000.000.00
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	625.000.000.00	12 Dokumen	625.000.000.00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	60.000.000.00	4 Dokumen	60.000.000.00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian	100%	25.000.000.00	100%	25.000.000.00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	15.000.000.00	2 Paket	15.000.000.00
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000.00	2 Orang	10.000.000.00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah	100%	208.000.000.00	100%	208.000.000.00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000.000.00	2 Paket	15.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000.00	2 Paket	10.000.000.00
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0.00	1 Paket	0.00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	35.000.000.00	2 Paket	35.000.000.00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.000.000.00	2 Paket	16.000.000.00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4.000.000.00	3 Dokumen	4.000.000.00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.000.000.00	12 Laporan	8.000.000.00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	120.000.000.00	12 Laporan	120.000.000.00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi	100%	120.000.000.00	100%	120.000.000.00
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0.00	1 Unit	45.000.000.00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	30.000.000.00	3 Unit	30.000.000.00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	45.000.000.00	3 Unit	45.000.000.00
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	350.000.000,00	0 Unit	0.00
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	0 Unit	0.00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	130.000.000.00	100%	130.000.000.00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	130.000.000.00	12 Laporan	130.000.000.00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dengan Kondisi Baik	100%	180.000.000.00	100%	180.000.000.00
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	120.000.000.00	8 Unit	120.000.000.00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	3.000.000.00	2 Unit	3.000.000.00
7	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	7.000.000.00	2 Unit	7.000.000.00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0.00	1 Unit	0.00
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0.00	1 Unit	0.00
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000.00	1 Unit	50.000.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	100%	129.450.000.00	100%	129.450.000.00
						Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.05 Nilai		3.50 Nilai	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	33.750.000.00	100%	33.750.000.00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	33.750.000.00	1 Laporan	33.750.000.00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peresentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (Berdasarkan Perbup PATEN)	100%	95.700.000.00	100%	95.700.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	95.700.000.00	2 Laporan	95.700.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Kelurahan yang aktif	100%	121.700.000.00	100%	121.700.000.00
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif	80%		80%	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil evaluasi pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	28.000.000.00	100%	28.000.000.00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000.00	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000.00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	22.000.000.00	1 Laporan	22.000.000.00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan. dan Kesejateraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	15 Laporan	93.700.000.00	15 Laporan	93.700.000.00
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	19.800.000.00	30 Keluarga	19.800.000.00
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30 Keluarga	18.700.000.00	30 Keluarga	18.700.000.00
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30 Keluarga	19.800.000.00	30 Keluarga	19.800.000.00
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	18.700.000.00	30 Keluarga	18.700.000.00
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	30 Keluarga	16.700.000.00	30 Keluarga	16.700.000.00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum	100%	176.000.000.00	100%	176.000.000.00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%	154.000.000.00	100%	154.000.000.00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	132.000.000.00	15 Laporan	132.000.000.00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	22.000.000.00	1 Laporan	22.000.000.00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang terselenggara	1 Laporan	22.000.000.00	1 Laporan	22.000.000.00
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	22.000.000.00	1 Laporan	22.000.000.00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	44.000.000.00	100%	44.000.000.00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	50 Orang	44.000.000.00	50 Orang	44.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	22.000.000.00	50 Orang	22.000.000.00
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	22.000.000.00	50 Orang	22.000.000.00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang baik	70%	27.500.000.00	80%	27.500.000.00
7	01	06	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi. Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	2 Kegiatan	27.500.000.00	2 Kegiatan	27.500.000.00
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	11.000.000.00	1 Dokumen	11.000.000.00
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0.00	1 Dokumen	0.00
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	16.500.000.00	1 Dokumen	16.500.000.00
					KELURAHAN KIDUL DALEM			880.500.000.00		880.500.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen/ laporan administrasi perangkat daerah yang baik/sesuai regulasi	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Konsistensi indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan yang konsisten pada dokumen rencana. anggaran dan evaluasi dibagi jumlah indikator kinerja	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	275.000.000.00	12 Dokumen	275.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Kelurahan yang aktif	100%	605.500.000.00	100%	605.500.000.00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana serta kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan	11 Laporan	594.500.000.00	11 Laporan	594.500.000.00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000.00	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000.00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	357.500.000.00	3 Unit	357.500.000.00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	231.000.000.00	1 Pokmas / Ormas	231.000.000.00
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	12 Laporan	11.000.000.00	12 Laporan	11.000.000.00
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	11.000.000.00	1 Dokumen	11.000.000.00
					KELURAHAN LATEK			885.500.000.00		885.500.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
						Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.05 Nilai		3.50 Nilai	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	275.000.000.00	12 Dokumen	275.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Kelurahan yang aktif	100%	610.500.000.00	100%	610.500.000.00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana serta kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan	11 Laporan	599.500.000.00	11 Laporan	599.500.000.00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000.00	7 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000.00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	357.500.000.00	3 Unit	357.500.000.00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	231.000.000.00	1 Pokmas / Ormas	231.000.000.00
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	12 Laporan	11.000.000.00	12 Laporan	11.000.000.00
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	11.000.000.00	1 Dokumen	11.000.000.00
					KELURAHAN DERMO			880.500.000.00		880.500.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
						Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.05 Nilai		3.50 Nilai	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	275.000.000.00	12 Dokumen	275.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Kelurahan yang aktif	100%	605.500.000.00	100%	605.500.000.00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana serta kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan	11 Laporan	594.500.000.00	11 Laporan	594.500.000.00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000.00	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000.00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	357.500.000.00	3 Unit	357.500.000.00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	231.000.000.00	1 Pokmas / Ormas	231.000.000.00
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	12 Laporan	11.000.000.00	12 Laporan	11.000.000.00
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	11.000.000.00	1 Dokumen	11.000.000.00
					KELURAHAN KALIREJO			880.500.000.00		880.500.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
						Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.05 Nilai		3.50 Nilai	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	275.000.000.00	12 Dokumen	275.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Kelurahan yang aktif	100%	605.500.000.00	100%	605.500.000.00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana serta kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan	11 Laporan	594.500.000.00	11 Laporan	594.500.000.00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000.00	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000.00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	357.500.000.00	3 Unit	357.500.000.00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	231.000.000.00	1 Pokmas / Ormas	231.000.000.00
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	12 Laporan	11.000.000.00	12 Laporan	11.000.000.00
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	11.000.000.00	1 Dokumen	11.000.000.00
					KELURAHAN KAUMAN			880.500.000.00		880.500.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
						Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.05 Nilai		3.50 Nilai	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	275.000.000.00	12 Dokumen	275.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Kelurahan yang aktif	100%	605.500.000.00	100%	605.500.000.00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana serta kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan	11 Laporan	594.500.000.00	11 Laporan	594.500.000.00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000.00	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000.00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	357.500.000.00	3 Unit	357.500.000.00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	231.000.000.00	1 Pokmas / Ormas	231.000.000.00
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	12 Laporan	11.000.000.00	12 Laporan	11.000.000.00
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	11.000.000.00	1 Dokumen	11.000.000.00
					KELURAHAN POGAR			880.500.000.00		880.500.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
						Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.05 Nilai		3.50 Nilai	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	275.000.000.00	12 Dokumen	275.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Kelurahan yang aktif	100%	605.500.000.00	100%	605.500.000.00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana serta kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan	11 Laporan	594.500.000.00	11 Laporan	594.500.000.00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000.00	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000.00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	357.500.000.00	3 Unit	357.500.000.00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	231.000.000.00	1 Pokmas / Ormas	231.000.000.00
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	12 Laporan	11.000.000.00	12 Laporan	11.000.000.00
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	11.000.000.00	1 Dokumen	11.000.000.00
					KELURAHAN KALIANYAR			880.500.000.00		880.500.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
						Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.05 Nilai		3.50 Nilai	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	275.000.000.00	12 Dokumen	275.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Kelurahan yang aktif	100%	605.500.000.00	100%	605.500.000.00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana serta kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan	11 Laporan	594.500.000.00	11 Laporan	594.500.000.00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000.00	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000.00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	357.500.000.00	3 Unit	357.500.000.00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	231.000.000.00	1 Pokmas / Ormas	231.000.000.00
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	12 Laporan	11.000.000.00	12 Laporan	11.000.000.00
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	11.000.000.00	1 Dokumen	11.000.000.00
					KELURAHAN KERSIKAN			875.500.000.00		875.500.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
						Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.05 Nilai		3.50 Nilai	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	275.000.000.00	12 Dokumen	275.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Kelurahan yang aktif	100%	600.500.000.00	100%	600.500.000.00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana serta kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan	11 Laporan	594.500.000.00	11 Laporan	594.500.000.00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000.00	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000.00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	357.500.000.00	3 Unit	357.500.000.00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	231.000.000.00	1 Pokmas / Ormas	231.000.000.00
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	12 Laporan	11.000.000.00	12 Laporan	11.000.000.00
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	6.000.000.00	1 Dokumen	6.000.000.00
					KELURAHAN KOLURSARI			880.500.000.00		880.500.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
						Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.05 Nilai		3.50 Nilai	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	275.000.000.00	12 Dokumen	275.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Kelurahan yang aktif	100%	605.500.000.00	100%	605.500.000.00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana serta kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan	11 Laporan	594.500.000.00	11 Laporan	594.500.000.00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000.00	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000.00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	357.500.000.00	3 Unit	357.500.000.00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	231.000.000.00	1 Pokmas / Ormas	231.000.000.00
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	12 Laporan	11.000.000.00	12 Laporan	11.000.000.00
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	11.000.000.00	1 Dokumen	11.000.000.00
					KELURAHAN GEMPENG			880.500.000.00		880.500.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
						Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.05 Nilai		3.50 Nilai	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	275.000.000.00	12 Dokumen	275.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Kelurahan yang aktif	100%	605.500.000.00	100%	605.500.000.00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana serta kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan	11 Laporan	594.500.000.00	11 Laporan	594.500.000.00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000.00	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000.00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	357.500.000.00	3 Unit	357.500.000.00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	231.000.000.00	1 Pokmas / Ormas	231.000.000.00
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	12 Laporan	11.000.000.00	12 Laporan	11.000.000.00
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	11.000.000.00	1 Dokumen	11.000.000.00
					KELURAHAN BENDOMUNGAL			880.500.000.00		880.500.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
						Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.05 Nilai		3.50 Nilai	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	275.000.000.00	12 Dokumen	275.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Kelurahan yang aktif	100%	605.500.000.00	100%	605.500.000.00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana serta kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan	11 Laporan	594.500.000.00	11 Laporan	594.500.000.00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000.00	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000.00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	357.500.000.00	3 Unit	357.500.000.00
7	01	03	2.02		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	231.000.000.00	1 Pokmas / Ormas	231.000.000.00
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	12 Laporan	11.000.000.00	12 Laporan	11.000.000.00
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	11.000.000.00	1 Dokumen	11.000.000.00
					KECAMATAN BEJI			**4.348.426.921.00**		**4.348.426.921.00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7					UNSUR KEWILAYAHAN			4.348.426.921.00		4.348.426.921.00
7	01				KECAMATAN			3.999.926.921.00		3.999.926.921.00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi PD yang baik atau sesuai regulasi	100%	3.999.926.921.00	100%	3.999.926.921.00
7	01	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan pada dok rencana. anggaran. dan evaluasi	100%	150.000.00	100%	150.000.00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	150.000.00	12 Laporan	150.000.00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung jawabkan	100%	3.556.443.920.00	100%	3.556.443.920.00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/bulan	3.040.173.920.00	280 Orang/bulan	3.040.173.920.00
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	475.350.000.00	36 Dokumen	475.350.000.00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	40.920.000.00	12 Dokumen	40.920.000.00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kepegawaian yang sesuai ketentuan	100%	16.000.000.00	100%	16.000.000.00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	10.000.000	0 Paket	0.00
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	16.000.000.00	1 Orang	16.000.000.00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Umum PD	100%	196.826.260.00	100%	196.826.260.00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.543.600.00	12 Paket	8.543.600.00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.409.000.00	12 Paket	8.409.000.00
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	7.308.960.00	12 Paket	7.308.960.00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	14.185.700.00	30 Paket	14.185.700.00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12.315.000.00	4 Paket	12.315.000.00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.564.000.00	12 Dokumen	3.564.000.00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	70.000.000.00	12 Laporan	70.000.000.00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	65.000.000.00	12 Laporan	65.000.000.00
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	7.500.000.00	1 Dokumen	7.500.000.00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	35.000.000.00	100%	35.000.000.00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	15.000.000.00	1 Unit	15.000.000.00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	6.000.000.00	2 Unit	6.000.000.00
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.500.000.00	1 Unit	6.500.000.00
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.500.000.00	1 Unit	7.500.000.00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	82.154.341.00	100%	82.154.341.00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 Laporan	67.154.341.00	96 Laporan	67.154.341.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000.00	12 Laporan	15.000.000.00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	100%	113.352.400.00	100%	113.352.400.00
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	55.852.400.00	8 Unit	55.852.400.00
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	12.500.000.00	10 Unit	12.500.000.00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	20.000.000.00	12 Unit	20.000.000.00
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	25.000.000.00	6 Unit	25.000.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	95.000.000.00	100%	95.000.000.00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	50.000.000.00	100%	50.000.000.00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	25.000.000.00	4 Laporan	25.000.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	25.000.000.00	1 Dokumen	25.000.000.00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN)	100%	40.000.000.00	100%	40.000.000.00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	40.000.000.00	12 Laporan	40.000.000.00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Realisasi PBB-P2	100%	5.000.000.00	100%	5.000.000.00
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	5 Laporan	5.000.000.00	5 Laporan	5.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat Kelurahan yang aktif	100%	86.000.000.00	100%	86.000.000.00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Pemberdayaan Desa	100%	26.000.000.00	100%	26.000.000.00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000.00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.000.000.00	1 Laporan	15.000.000.00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kapasitas lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	100%	25.000.000.00	100%	25.000.000.00
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000.00
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	10.000.000.00	1 Laporan	10.000.000.00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	28 Keluarga	35.000.000.00	28 Keluarga	35.000.000.00
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10 Keluarga	10.000.000.00	10 Keluarga	10.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10 Keluarga	15.000.000.00	10 Keluarga	15.000.000.00
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	8 Keluarga	10.000.000.00	8 Keluarga	10.000.000.00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum	100%	66.000.000.00	100%	66.000.000.00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindak lanjuti ke instansi terkait	100%	60.000.000.00	100%	60.000.000.00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	40.000.000.00	2 Laporan	40.000.000.00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	20.000.000.00	2 Laporan	20.000.000.00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	4 Laporan	6.000.000.00	4 Laporan	6.000.000.00
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	6.000.000.00	4 Laporan	6.000.000.00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	42.500.000.00	100%	42.500.000.00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	35 Orang	42.500.000.00	60 Orang	42.500.000.00
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	15.000.000.00	30 Orang	15.000.000.00
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45 Orang	20.000.000.00	45 Orang	20.000.000.00
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7 Laporan	7.500.000.00	7 Laporan	7.500.000.00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	59.000.000.00	100%	59.000.000.00
7	01	06	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti	100%	59.000.000.00	100%	59.000.000.00
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	20.000.000.00	12 Dokumen	20.000.000.00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	7.500.000.00	1 Dokumen	7.500.000.00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	3.000.000.00	12 Dokumen	3.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	6.500.000.00	2 Dokumen	6.500.000.00
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	2.000.000.00	2 Dokumen	2.000.000.00
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	20.000.000.00	4 Dokumen	20.000.000.00
					KELURAHAN GLANGGANG			817.500.000.00		817.500.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36 Dokumen	275.000.000.00	36 Dokumen	275.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat Kelurahan yang aktif	100%	542.500.000.00	100%	542.500.000.00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	10 Laporan	540.000.000.00	10 Laporan	540.000.000.00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	380.000.000.00	5 Unit	380.000.000.00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	160.000.000.00	2 Pokmas / Ormas	160.000.000.00
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM yang difasilitasi	100%	2.500.000.00	100%	2.500.000.00
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	1.250.000.00	2 Dokumen	1.250.000.00
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	1.250.000.00	2 Dokumen	1.250.000.00
					KELURAHAN PAGAK			817.500.000.00		817.500.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	275.000.000.00	100%	275.000.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36 Dokumen	275.000.000.00	36 Dokumen	275.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat Kelurahan yang aktif	100%	542.500.000.00	100%	542.500.000.00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	10 Laporan	540.000.000.00	10 Laporan	540.000.000.00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	380.000.000.00	5 Unit	380.000.000.00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	160.000.000.00	2 Pokmas / Ormas	160.000.000.00
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM yang difasilitasi	100%	2.500.000.00	100%	2.500.000.00
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	1.250.000.00	2 Dokumen	1.250.000.00
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	1.250.000.00	2 Dokumen	1.250.000.00
					KECAMATAN GEMPOL			**2.882.345.763.00**		**1.098.316.656.00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.882.345.763.00		1.098.316.656.00
7	01				KECAMATAN			2.582.533.763.00		798.504.656.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang baik / sesuai regulas	100%	2.582.533.763.00	100%	798.504.656.00
7	01	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegi atan/subkegiatan pada dok rencana.anggaran.	100%	2.000.000.00	100%	2.000.000.00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.000.000.00	1 Dokumen	1.000.000.00
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000.00	1 Laporan	1.000.000.00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang sesuai dengan Ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	2.186.394.555.00	100%	418.498.496.00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.769.896.059.00	16 Orang/bulan	2.000.000.00
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	374.918.496.00	12 Dokumen	374.918.496.00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	41.580.000.00	4 Dokumen	41.580.000.00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	4.000.000.00	100%	4.000.000.00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2.000.000.00	1 Paket	2.000.000.00
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2.000.000.00	2 Orang	2.000.000.00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum PD	100%	119.727.608.00	100%	103.594.560.00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000.00	1 Paket	2.000.000.00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.925.608.00	1 Paket	1.792.560.00
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.014.000.00	1 Paket	3.014.000.00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000.00	1 Paket	1.000.000.00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.000.000.00	1 Paket	1.000.000.00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.680.000.00	12 Dokumen	4.680.000.00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000.00	12 Laporan	12.000.000.00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	68.108.000.00	12 Laporan	68.108.000.00
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000.00	1 Dokumen	10.000.000.00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	55.000.000.00	100%	55.000.000.00
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	25.000.000.00	1 Unit	25.000.000.00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	25.000.000.00	1 Unit	25.000.000.00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.000.000.00	1 Unit	2.000.000.00
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.000.000.00	1 Unit	3.000.000.00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	89.383.600.00	100%	89.383.600.00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	79.383.600.00	12 Laporan	79.383.600.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000.00	1 Laporan	10.000.000.00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	100%	126.028.000.00	100%	126.028.000.00
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	97.650.000.00	9 Unit	97.650.000.00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	10.750.000.00	28 Unit	10.750.000.00
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17.628.000.00	1 Unit	17.628.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	100%	67.522.000.00	100%	67.522.000.00
						Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.51 indeks	-	3.75 indeks	-
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	36.550.000.00	100%	36.550.000.00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	21.064.000.00	1 Laporan	21.064.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	15.486.000.00	1 Dokumen	15.486.000.00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peresentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (Berdasarkan Perbup PATEN)	100%	15.486.000.00	100%	15.486.000.00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.486.000.00	1 Laporan	15.486.000.00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Realisasi PBB-P2	100%	15.486.000.00	100%	15.486.000.00
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	15.486.000.00	1 Laporan	15.486.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Kelurahan yang aktif	100%	77.430.000.00	100%	77.430.000.00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil evaluasi pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	30.972.000.00	100%	30.972.000.00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	75 Lembaga Kemasyarakatan	15.486.000.00	75 Lembaga Kemasyarakatan	15.486.000.00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.486.000.00	1 Laporan	15.486.000.00
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	1 Laporan	15.486.000.00	1 Laporan	15.486.000.00
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	15.486.000.00	1 Dokumen	15.486.000.00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	75 Keluarga	30.972.000.00	75 Keluarga	30.972.000.00
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	75 Keluarga	15.486.000.00	75 Keluarga	15.486.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	75 Keluarga	15.486.000.00	75 Keluarga	15.486.000.00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum	100%	30.972.000.00	100%	30.972.000.00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%	30.972.000.00	100%	30.972.000.00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.486.000.00	1 Laporan	15.486.000.00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	15.486.000.00	1 Laporan	15.486.000.00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	46.458.000.00	100%	46.458.000.00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	225 Peserta	46.458.000.00	225 Peserta	46.458.000.00
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	15.486.000.00	75 Orang	15.486.000.00
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	15.486.000.00	1 Laporan	15.486.000.00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	15.486.000.00	1 Dokumen	15.486.000.00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintah desa dengan administrasi baik	100%	77.430.000.00	100%	77.430.000.00
7	01	06	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	77.430.000.00	100%	77.430.000.00
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	15.486.000.00	1 Dokumen	15.486.000.00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	15.486.000.00	1 Dokumen	15.486.000.00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	15.486.000.00	1 Dokumen	15.486.000.00
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	15.486.000.00	1 Dokumen	15.486.000.00
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	15.486.000.00	1 Dokumen	15.486.000.00
					KECAMATAN GONDANGWETAN			**5.096.438.520.00**		**5.096.438.520.00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN			5.096.438.520.00		5.096.438.520.00
7	01				KECAMATAN			3.980.156.320.00		3.980.156.320.00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/ laporan administrasi Pemerintah Daerah yang baik/ sesuai regulasi	100 persen	3.980.156.320.00	100 persen	3.980.156.320.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan pada dokumen rencana. anggaran dan evaluasi	100 persen	23.100.000.00	100 persen	23.100.000.00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.500.000.00	1 Dokumen	5.500.000.00
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5.500.000.00	5 Dokumen	5.500.000.00
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.500.000.00	1 Dokumen	5.500.000.00
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.300.000.00	1 Dokumen	3.300.000.00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.300.000.00	1 Laporan	3.300.000.00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabk an	100 persen	3.472.499.500.00	100 persen	3.472.499.500.00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3.000.000.000.00	14 Orang/bulan	3.000.000.000.00
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	420.640.000.00	12 Dokumen	420.640.000.00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	51.859.500.00	12 Dokumen	51.859.500.00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen kepegawaian yang sesuai ketentuan	100 persen	16.500.000.00	100 persen	16.500.000.00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.500.000.00	1 Paket	5.500.000.00
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.500.000.00	1 Dokumen	5.500.000.00
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	5.500.000.00	2 Orang	5.500.000.00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum	100 persen	159.280.000.00	100 persen	159.280.000.00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	5.280.000.00	7 Paket	5.280.000.00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	3.850.000.00	22 Paket	3.850.000.00
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.100.000.00	1 Paket	1.100.000.00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	17.600.000.00	36 Paket	17.600.000.00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	11.000.000.00	8 Paket	11.000.000.00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.750.000.00	1 Dokumen	2.750.000.00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	22.000.000.00	10 Laporan	22.000.000.00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	84.700.000.00	20 Laporan	84.700.000.00
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	11.000.000.00	1 Dokumen	11.000.000.00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95 persen	72.000.000,00	100 persen	79.200.000,00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	22.000.000.00	5 Unit	22.000.000.00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	22.000.000.00	4 Unit	22.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	22.000.000.00	4 Unit	22.000.000.00
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	13.200.000.00	2 Unit	13.200.000.00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Penunjang Nilai)	100 persen	53.350.000.00	100 persen	53.350.000.00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	49.500.000.00	36 Laporan	49.500.000.00
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	3.850.000.00	5 Laporan	3.850.000.00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 persen	170.726.820.00	100 persen	170.726.820.00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	93.500.000.00	12 Unit	93.500.000.00
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	8.800.000.00	5 Unit	8.800.000.00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	11.000.000.00	1 Unit	11.000.000.00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	44.183.040.00	5 Unit	44.183.040.00
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	13.243.780.00	10 Unit	13.243.780.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100 persen		100 persen	
						Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.51 nilai	255.279.200.00	3.75 nilai	255.279.200.00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100 persen	233.279.200.00	100 persen	233.279.200.00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	40.779.200.00	2 Laporan	40.779.200.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Dokumen	192.500.000.00	39 Dokumen	192.500.000.00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase Laporan Pelayanan PATEN yang diselesaikan tepat waktu	100 persen	11.000.000.00	100 persen	11.000.000.00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	11.000.000.00	3 Laporan	11.000.000.00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Realisasi PBB-P2	100 persen	11.000.000.00	100 persen	11.000.000.00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	11.000.000.00	12 Laporan	11.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok kemasyaraktan kelurahan yang aktif	100 Persen	791.153.000.00	100 Persen	791.153.000.00
						Persentase lembaga Kemasyarakatan desa/ Kelurahan yang aktif	100 persen		100 persen	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil evaluasi pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	85 Persen	54.153.000.00	90 Persen	54.153.000.00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.300.000.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.300.000.00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	50.853.000.00	6 Laporan	50.853.000.00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kebutuhan sarpras masyarakat kelurahan yang terpenuhi	85 persen	737.000.000.00	90 persen	737.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Persentase masyarakat kelurahan yang mengikuti pemberdayaan di kelurahan	85 persen	737.000.000.00	90 persen	737.000.000.00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	605.000.000.00	4 Unit	605.000.000.00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	132.000.000.00	6 Pokmas / Ormas	132.000.000.00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan trantibum	85 persen	29.150.000.00	90 persen	29.150.000.00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	80 persen	24.750.000.00	90 persen	24.750.000.00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	13.750.000.00	4 Laporan	13.750.000.00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 Laporan	11.000.000.00	8 Laporan	11.000.000.00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik sosial yang diselesaikan sesuai dengan kewenangan	90 persen	8.800.000.00	95 persen	8.800.000.00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 peserta	8.800.000.00	70 peserta	8.800.000.00
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	8.800.000.00	50 Orang	8.800.000.00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa denganAdministrasi desa yang baik	100 persen	31.900.000.00	100 persen	31.900.000.00
7	01	06	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil fasilitasi. pembinaan. dan pengawasan pemerintah desa yang ditindaklanjuti	100 persen	31.900.000.00	100 persen	31.900.000.00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	8.800.000.00	12 Dokumen	8.800.000.00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	6.600.000.00	12 Dokumen	6.600.000.00
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	19 Dokumen	16.500.000.00	19 Dokumen	16.500.000.00
					KECAMATAN GRATI			**3.958.021.900.00**		**4.812.775.000.00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.958.021.900.00		4.812.775.000.00
7	01				KECAMATAN			3.854.521.900.00		4.623.125.000.00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Baik atau sesuai regulasi	100%	3.854.521.900.00	100%	4.623.125.000.00
7	01	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen pengendalian SAKIP	100%	16.000.000.00	100%	18.000.000.00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.500.000.00	3 Dokumen	3.750.000.00
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.500.000.00	2 Dokumen	2.750.000.00
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.500.000.00	2 Dokumen	3.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2.500.000.00	2 Dokumen	3.000.000.00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.500.000.00	2 Laporan	2.750.000.00
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.500.000.00	2 Laporan	2.750.000.00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan sesuai ketentuan	100%	3.430.000.000.00	100%	3.765.000.000.00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.950.000.000.00	22 Orang/bulan	3.250.000.000.00
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	418.000.000.00	4 Dokumen	450.000.000.00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	62.000.000.00	4 Dokumen	65.000.000.00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	100%	5.000.000.00	100%	5.500.000.00
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.500.000.00	2 Dokumen	2.750.000.00
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	2.500.000.00	5 Laporan	2.750.000.00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kepegawaian yang sesuai ketentuan	100%	28.000.000.00	100%	50.300.000.00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	10.000.000.00	1 Paket	25.000.000.00
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	2.500.000.00	5 Dokumen	2.750.000.00
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.500.000.00	12 Dokumen	2.750.000.00
7	01	01	2.05	05	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 Dokumen	2.500.000.00	16 Dokumen	2.750.000.00
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	5.000.000.00	3 Orang	11.000.000.00
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	5.500.000.00	30 Orang	6.050.000.00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	137.000.000.00	100%	209.000.000.00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000.00	4 Paket	5.750.000.00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.000.000.00	12 Paket	30.000.000.00
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5.000.000.00	4 Paket	12.500.000.00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.000.00	4 Paket	20.000.000.00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.000.000.00	4 Paket	5.750.000.00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	5.000.000.00	365 Dokumen	8.500.000.00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	22.000.000.00	10 Laporan	38.500.000.00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	65.000.000.00	15 Laporan	71.500.000.00
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	15.000.000.00	2 Dokumen	16.500.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	115.000.000.00	100%	308.500.000.00
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	35.000.000.00	1 Unit	110.500.000.00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	25.000.000.00	10 Unit	20.000.000.00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	25.000.000.00	5 Unit	26.500.000.00
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.000.000.00	1 Unit	26.500.000.00
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.000.000.00	2 Unit	125.000.000.00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	55.000.000.00	100%	80.500.000.00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	45.000.000.00	4 Laporan	47.500.000.00
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	5.000.000.00	4 Laporan	13.750.000.00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.000.000.00	12 Laporan	19.250.000.00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	68.521.900.00	100%	186.325.000.00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	25.021.900.00	1 Unit	53.625.000.00
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	10.000.000.00	9 Unit	12.500.000.00
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	6.500.000.00	5 Unit	7.500.000.00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7.000.000.00	10 Unit	7.700.000.00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	10.000.000.00	4 Unit	52.500.000.00
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000.00	2 Unit	52.500.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	56.500.000.00	100%	103.350.000.00
						Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.51 Indeks		3.75 Indeks	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	50.000.000.00	100%	94.000.000.00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	20.000.000.00	5 Laporan	63.000.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	30.000.000.00	4 Dokumen	31.000.000.00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase laporan bulanan PATEN yang diselesaikan tepat waktu (berdasarkan Perbup PATEN)	1 kegiatan	3.500.000.00	1 kegiatan	3.850.000.00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	3.500.000.00	7 Laporan	3.850.000.00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Realisasi PBB-P2	6 laporan	3.000.000.00	6 laporan	5.500.000.00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	3.000.000.00	1 Laporan	5.500.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif	70%	8.000.000.00	75%	23.550.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Persentase kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	100%		75%	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	8 kelompok	83.000.000,00	10 kelompok	91.300.000,00
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	16 Dokumen	3.000.000.00	16 Dokumen	6.050.000.00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5.000.000.00	5 Laporan	17.500.000.00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Ganguangan Trantibum	100%	17.500.000.00	100%	26.250.000.00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%	12.500.000.00	100%	18.250.000.00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	5.500.000.00	2 Laporan	5.750.000.00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	7.000.000.00	3 Laporan	12.500.000.00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Implementasi ketentuan yang ada dalam Perda	1 kegiatan	5.000.000.00	1 kegiatan	8.000.000.00
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	5.000.000.00	1 Laporan	8.000.000.00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	3.000.000.00	100%	7.500.000.00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Tugas Pemerintahan Umum	3 Kegiatan	3.000.000.00	3 Kegiatan	7.500.000.00
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	3.000.000.00	150 Orang	7.500.000.00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintah Desa dengan Administrasi yang Baik	70%	18.500.000.00	75%	29.000.000.00
7	01	06	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang ditindaklanjuti	14 Dokumen	18.500.000.00	14 Dokumen	29.000.000.00
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 Dokumen	3.000.000.00	14 Dokumen	6.500.000.00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 Dokumen	2.000.000.00	14 Dokumen	2.500.000.00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Dokumen	5.000.000.00	14 Dokumen	5.500.000.00
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	14 Dokumen	2.500.000.00	14 Dokumen	3.000.000.00
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 Dokumen	3.000.000.00	4 Dokumen	5.500.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14 Dokumen	3.000.000.00	14 Dokumen	6.000.000.00
					KELURAHAN GRATITUNON			782.500.000.00		782.500.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	82.500.000.00	100%	82.500.000.00
						Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.51 Indeks		3.75 Indeks	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	82.500.000.00		82.500.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	82.500.000.00	4 Dokumen	82.500.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif	70%	700.000.000.00	75%	700.000.000.00
						Persentase kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	100%		75%	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	8 kelompok	700.000.000.00	10 kelompok	700.000.000.00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	450.000.000.00	7 Unit	450.000.000.00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	250.000.000.00	4 Pokmas / Ormas	250.000.000.00
					KECAMATAN KEJAYAN			**4.560.170.591.00**		**4.560.170.591.00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN			4.560.170.591.00		4.560.170.591.00
7	01				KECAMATAN			4.364.865.591.00		4.364.865.591.00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan urusan pemerintahan yang terpenuhi	100%	4.364.865.591.00	100%	4.364.865.591.00
7	01	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dok SAKIP	100%	33.000.000.00	100%	33.000.000.00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	11.000.000.00	1 Dokumen	11.000.000.00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	11.000.000.00	1 Laporan	11.000.000.00
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	11.000.000.00	1 Laporan	11.000.000.00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	3.767.267.791.00	100%	3.767.267.791.00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.077.963.791.00	30 Orang/bulan	3.077.963.791.00
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen	643.566.000.00	25 Dokumen	643.566.000.00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	45.738.000.00	12 Dokumen	45.738.000.00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan adm BMD	100%	6.050.000.00	100%	6.050.000.00
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.050.000.00	1 Laporan	6.050.000.00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	22.000.000.00	100%	22.000.000.00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.500.000.00	1 Paket	5.500.000.00
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.500.000.00	1 Dokumen	5.500.000.00
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	11.000.000.00	2 Orang	11.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	167.797.800.00	100%	167.797.800.00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	5.355.900.00	7 Paket	5.355.900.00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	3.881.900.00	15 Paket	3.881.900.00
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.100.000.00	1 Paket	1.100.000.00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	24.000.000.00	36 Paket	24.000.000.00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8.500.000.00	8 Paket	8.500.000.00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.960.000.00	1 Dokumen	3.960.000.00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	55.000.000.00	100 Laporan	55.000.000.00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	55.000.000.00	12 Laporan	55.000.000.00
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	11.000.000.00	1 Dokumen	11.000.000.00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah		134.500.000.00		134.500.000.00
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	49.500.000.00	1 Unit	49.500.000.00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	22.000.000.00	1 Unit	22.000.000.00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	22.000.000.00	1 Unit	22.000.000.00
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11.000.000.00	1 Unit	11.000.000.00
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	30.000.000.00	4 Unit	30.000.000.00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	100%	58.550.000.00	100%	58.550.000.00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	54.700.000.00	12 Laporan	54.700.000.00
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	3.850.000.00	7 Laporan	3.850.000.00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	100%	175.700.000.00	100%	175.700.000.00
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	97.000.000.00	8 Unit	97.000.000.00
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	11.000.000.00	1 Unit	11.000.000.00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	11.000.000.00	1 Unit	11.000.000.00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.000.000.00	1 Unit	49.000.000.00
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	7.700.000.00	3 Unit	7.700.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen non perijinan yang diselesaikan tepat waktu	100%	62.700.000.00	100%	62.700.000.00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelengaraan Pemerintahan	4 Laporan	40.700.000.00	4 Laporan	40.700.000.00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	40.700.000.00	2 Laporan	40.700.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelayanan PATEN	12 Laporan	11.000.000.00	12 Laporan	11.000.000.00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	11.000.000.00	3 Laporan	11.000.000.00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Realisasi PBB-P2	100%	11.000.000.00	100%	11.000.000.00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	11.000.000.00	12 Laporan	11.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif 2. Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang aktif	100%	62.755.000.00	100%	62.755.000.00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	1 Laporan	62.755.000.00	1 Laporan	62.755.000.00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	20.350.000.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	20.350.000.00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	42.405.000.00	6 Laporan	42.405.000.00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%	25.850.000.00	100%	25.850.000.00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penyelesaian kasus Kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan kecamatan	70%	14.850.000.00	70%	14.850.000.00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4.950.000.00	4 Laporan	4.950.000.00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 Laporan	9.900.000.00	8 Laporan	9.900.000.00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terwujudnya ketertiban dan keteraturan sosial	70%	11.000.000.00	70%	11.000.000.00
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	11.000.000.00	2 Laporan	11.000.000.00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase konflik sosial yang tertangani sesuai dengan kewenangan	100%	11.000.000.00	100%	11.000.000.00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penangan	3 Laporan	11.000.000.00	3 Laporan	11.000.000.00
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	11.000.000.00	50 Orang	11.000.000.00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik 2. Persentase Pemerintahan Desa yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Raperdes APBDes	100%	33.000.000.00	100%	33.000.000.00
7	01	06	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi. Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	100%	33.000.000.00	100%	33.000.000.00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	11.000.000.00	12 Dokumen	11.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	11.000.000.00	12 Dokumen	11.000.000.00
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5 Dokumen	11.000.000.00	5 Dokumen	11.000.000.00
					KELURAHAN KEJAYAN			832.943.650.00		832.943.650.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen non perijinan yang diselesaikan tepat waktu	100%	161.943.650.00	100%	161.943.650.00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelengaraan Pemerintahan	4 Laporan	161.943.650.00	4 Laporan	161.943.650.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	161.943.650.00	12 Dokumen	161.943.650.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif 2. Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang aktif	100%	671.000.000.00	100%	671.000.000.00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	1 Laporan	671.000.000.00	1 Laporan	671.000.000.00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	462.000.000.00	4 Unit	462.000.000.00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	209.000.000.00	10 Pokmas / Ormas	209.000.000.00
					KECAMATAN KRATON			**3.409.294.310.00**		**3.409.294.310.00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.393.644.310.00		3.393.644.310.00
7	01				KECAMATAN			3.252.566.700.00		3.252.566.700.00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Urusan Pemerintahan Yang Terpenuhi	100%	3.252.566.700.00	100%	3.252.566.700.00
7	01	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dok SAKIP	100%	20.010.000.00	100%	20.010.000.00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.00	1 Dokumen	10.000.00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10.000.000.00	1 Laporan	10.000.000.00
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000.00	1 Laporan	10.000.000.00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	2.748.940.000.00	100%	2.748.940.000.00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang/bulan	2.357.298.000.00	224 Orang/bulan	2.357.298.000.00
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	351.360.000.00	1 Dokumen	351.360.000.00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	40.282.000.00	1 Dokumen	40.282.000.00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan adm BMD	100%	5.000.000.00	100%	5.000.000.00
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000.00	1 Laporan	5.000.000.00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	20.000.000.00	100%	20.000.000.00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000.00	1 Paket	5.000.000.00
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000.00	1 Dokumen	5.000.000.00
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000.00	2 Orang	10.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	146.221.760.00	100%	146.221.760.00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.869.000.00	1 Paket	4.869.000.00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.529.000.00	1 Paket	3.529.000.00
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.000.000.00	1 Paket	1.000.000.00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.333.360.00	1 Paket	21.333.360.00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.494.400.00	1 Paket	7.494.400.00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.600.000.00	1 Dokumen	3.600.000.00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.536.000.00	1 Laporan	2.536.000.00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	91.860.000.00	12 Laporan	91.860.000.00
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000.00	1 Dokumen	10.000.000.00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	100%	107.907.000.00	100%	107.907.000.00
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	20.000.000.00	1 Unit	20.000.000.00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	20.000.000.00	3 Unit	20.000.000.00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20.000.000.00	3 Unit	20.000.000.00
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000.00	1 Unit	20.000.000.00
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	27.907.000.00	4 Unit	27.907.000.00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	78.455.840.00	100%	78.455.840.00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	74.955.840.00	12 Laporan	74.955.840.00
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.500.000.00	1 Laporan	3.500.000.00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	100%	126.032.100.00	100%	126.032.100.00
7	01	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	14 Unit	106.032.100.00	14 Unit	106.032.100.00
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	10.000.000.00	3 Unit	10.000.000.00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000.00	1 Unit	10.000.000.00
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.650.000.00	1 Unit	15.650.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen non perijinan yang diselesaikan tepat waktu	100%	43.506.000.00	100%	43.506.000.00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	43.486.000.00	100%	43.486.000.00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	37.072.000.00	2 Laporan	37.072.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	6.414.000.00	2 Dokumen	6.414.000.00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase laporan bulanan PATEN yg diselesaikan tepat waktu	12%	10.000.00	12%	10.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000.00	12 Laporan	10.000.00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Realisasi PBB-P2	100%	10.000.00	100%	10.000.00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	10.000.00	12 Laporan	10.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	35%	29.930.120.00	45%	29.930.120.00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	29.930.120.00	100%	29.930.120.00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	21.218.120.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	21.218.120.00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	8.712.000.00	6 Laporan	8.712.000.00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%	46.141.340.00	100%	46.141.340.00
7	01	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%	46.131.340.00	100%	46.131.340.00
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	29.015.140.00	4 Laporan	29.015.140.00
7	01	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 Laporan	17.116.200.00	8 Laporan	17.116.200.00
7	01	04	7.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase terwujudnya ketertiban dan keteraturan sosial	100%	10.000.00	100%	10.000.00
7	01	04	7.04	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	10.000.00	2 Laporan	10.000.00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik sosial yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	0.00	50 Orang	0.00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase pemerintah desa dengan administrasi baik 2.Persentase Pemerintahan Desa yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Raperdes APBDes	100%	21.500.150.00	100%	21.500.150.00
7	01	06	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitasi. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti	100%	21.500.150.00	100%	21.500.150.00
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	25 Dokumen	10.000.000.00	25 Dokumen	11.000.000.00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25 Dokumen	10.000.000.00	25 Dokumen	11.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25 Dokumen	10.131.914,00	25 Dokumen	11.145.105,00
					KECAMATAN LEKOK			**2.690.909.914,00**		**2.690.909.914,00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.690.909.914,00		2.690.909.914,00
7	01				KECAMATAN			2.690.909.914,00		2.690.909.914,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang baik/sesuai Regulasi	100%	2.504.771.500,00	100%	2.755.248.650,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang sesuai dengan Ketentuan dan dapat dipertanggungjawabk an	100%	2.089.625.100,00	100%	2.298.587.610,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.761.305.100,00	12 Orang/bulan	1.761.305.100,00
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	293.760.000,00	12 Dokumen	293.760.000,00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	34.560.000,00	4 Dokumen	34.560.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	13.000.000,00	100%	14.300.000,00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000,00	1 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	8.000.000,00	2 Orang	8.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah	100%	143.290.400,00	100%	157.619.440,00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.800.000,00	1 Paket	1.800.000,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	1 Paket	25.000.000,00
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1 Paket	1.000.000,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.494.400,00	1 Dokumen	7.494.400,00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.600.000,00	12 Laporan	3.600.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	94.396.000,00	12 Laporan	94.396.000,00
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD yang Terealisasi	100%	85.000.000,00	100%	93.500.000,00
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	45.000.000,00	2 Unit	45.000.000,00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	20.000.000,00	4 Unit	20.000.000,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00	1 Unit	20.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Opersional Kantor yang tersedia	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.000.000,00	12 Laporan	35.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Kondisi Baik	100%	201.012.000,00	100%	201.012.000,00
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	72.156.000,00	5 Unit	72.156.000,00
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Meubelair	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000,00	5 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	72.156.000,00	1 Unit	72.156.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	1 Paket	40.200.000,00	1 Paket	40.200.000,00
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatangedung/kantor	3 Jenis	6.500.000,00	3 Jenis	6.500.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.51 Nilai	63.486.000,00	3.75 Nilai	69.834.600,00
						Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%		100%	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan dengan Instansi Terkait	12 Laporan	43.486.000,00	12 Laporan	47.834.600,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	37.072.000,00	2 Laporan	37.072.000,00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	6.414.000.00	1 Dokumen	6.414.000.00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN)	12 Laporan	10.000.000,00	12 Laporan	10.000.000,00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Realisasi PBB-P2	100%	10.000.000,00	100%	11.000.000,00
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	11.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100%	49.230.000,00	100%	49.230.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjut	100%	49.230.000,00	100%	49.230.000,00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	4 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	5 Lembaga	46.230.000,00	5 Lembaga	46.230.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	100%	33.290.500,00	100%	36.619.550,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan yang ditindaklanjuti ke Instansi Terkait	100%	23.290.500,00	100%	25.619.550,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	7.763.500,00	4 Laporan	7.763.500,00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	15.527.000,00	1 Laporan	15.527.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Terwujudnya ketertiban dan keteraturan sosial	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	2 Laporan	10.000.000,00	2 Laporan	10.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	10.000.000,00	100%	11.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	33 Orang	10.000.000,00	33 Orang	10.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	30.131.914,00	100%	30.131.914,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	30.131.914,00	100%	30.131.914,00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	10.000.000.00	1 Dokumen	10.000.000.00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	10.000.000.00	1 Dokumen	10.000.000.00
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	10131913.5	1 Dokumen	10131913.5
					KECAMATAN LUMBANG			**3.375.867.895.00**		**3.375.867.895.00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.375.867.895.00		3.375.867.895.00
7	01				KECAMATAN			3.181.885.190.00		3.181.885.190.00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	3.181.885.190.00	100%	3.181.885.190.00
7	01	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dok SAKIP	100%	33.000.000.00	100%	33.000.000.00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	11.000.000.00	1 Dokumen	11.000.000.00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	11.000.000.00	1 Laporan	11.000.000.00
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	11.000.000.00	1 Laporan	11.000.000.00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	2.531.980.000.00	100%	2.531.980.000.00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang/bulan	2.099.746.000.00	224 Orang/bulan	2.099.746.000.00
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	386.496.000.00	12 Dokumen	386.496.000.00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	45.738.000.00	12 Dokumen	45.738.000.00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan adm BMD	100%	5.500.000.00	100%	5.500.000.00
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.500.000.00	1 Laporan	5.500.000.00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	22.000.000.00	100%	22.000.000.00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.500.000.00	1 Paket	5.500.000.00
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.500.000.00	1 Dokumen	5.500.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	11.000.000.00	2 Orang	11.000.000.00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	160.843.936.00	100%	160.843.936.00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.355.900.00	1 Paket	5.355.900.00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.881.900.00	1 Paket	3.881.900.00
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.100.000.00	1 Paket	1.100.000.00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.466.696.00	1 Paket	23.466.696.00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.243.840.00	1 Paket	8.243.840.00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.960.000.00	1 Dokumen	3.960.000.00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.789.600.00	12 Laporan	2.789.600.00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	101.046.000.00	12 Laporan	101.046.000.00
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	11.000.000.00	1 Dokumen	11.000.000.00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	146.197.700.00	100%	146.197.700.00
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	49.500.000.00	1 Unit	49.500.000.00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	22.000.000.00	1 Unit	22.000.000.00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	22.000.000.00	1 Unit	22.000.000.00
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	22.000.000.00	1 Unit	22.000.000.00
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	30.697.700.00	4 Unit	30.697.700.00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penunjang Nilai)	100%	86.301.424.00	100%	86.301.424.00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	82.451.424.00	12 Laporan	82.451.424.00
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.850.000.00	1 Laporan	3.850.000.00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	196.062.130.00	100%	196.062.130.00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	116.635.310.00	5 Unit	116.635.310.00
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	11.000.000.00	5 Unit	11.000.000.00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	11.000.000.00	1 Unit	11.000.000.00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.683.040.00	1 Unit	49.683.040.00
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.743.780.00	1 Unit	7.743.780.00
7	01				KECAMATAN			193.982.705.00		193.982.705.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	69.834.600.00	100%	69.834.600.00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	47.834.600.00	100%	47.834.600.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	40.779.200.00	2 Laporan	40.779.200.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	7.055.400.00	1 Dokumen	7.055.400.00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN)	100%	11.000.000.00	100%	11.000.000.00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	11.000.000.00	1 Laporan	11.000.000.00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Realisasi PBB-P2	100%	11.000.000.00	100%	11.000.000.00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	11.000.000.00	12 Laporan	11.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	35%	54.153.000.00	35%	54.153.000.00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	54.153.000.00	100%	54.153.000.00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.300.000.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.300.000.00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	50.853.000.00	6 Laporan	50.853.000.00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	100%	25.850.000.00	100%	25.850.000.00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	70%	14.850.000.00	70%	14.850.000.00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4.950.000.00	4 Laporan	4.950.000.00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 Laporan	9.900.000.00	8 Laporan	9.900.000.00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terwujudnya ketertiban dan keteraturan sosia	100%	11.000.000.00	100%	11.000.000.00
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	11.000.000.00	2 Laporan	11.000.000.00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik sosial yang diselesaikan sesuai kewenangan (Lumbang)	100%	11.000.000.00	100%	11.000.000.00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	125 Orang	11.000.000.00	130 Orang	11.000.000.00
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	11.000.000.00	50 Orang	11.000.000.00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (Lumbang)	100%	33.145.105.00	100%	33.145.105.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	06	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitasi. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti	100%	33.145.105.00	100%	33.145.105.00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	11.000.000.00	12 Dokumen	11.000.000.00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	11.000.000.00	12 Dokumen	11.000.000.00
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11 Dokumen	11.145.105.00	11 Dokumen	11.145.105.00
					KECAMATAN NGULING			**8.996.180.922.00**		**8.996.180.922.00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN			8.996.180.922.00		8.996.180.922.00
7	01				KECAMATAN			8.707.180.922.00		8.707.180.922.00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	100%	8.707.180.922.00	100%	8.707.180.922.00
7	01	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi yang Selaras	12 Bulan	30.213.700.00	12 Bulan	30.213.700.00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	30.213.700.00	12 Laporan	30.213.700.00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.032.217.160.00	100%	8.032.217.160.00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	7.195.603.800.00	20 Orang/bulan	7.195.603.800.00
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	726.726.000.00	12 Dokumen	726.726.000.00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	109.887.360.00	12 Dokumen	109.887.360.00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Dokumen Administrasi Kepegawaian dengan Baik	100%	64.000.000.00	100%	64.000.000.00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	24.000.000.00	6 Paket	24.000.000.00
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	40.000.000.00	12 Orang	40.000.000.00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	336.692.162.00	12 Bulan	336.692.162.00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	10.648.000.00	20 Paket	10.648.000.00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	53.240.000.00	12 Paket	53.240.000.00
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	6.655.000.00	8 Paket	6.655.000.00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	36.149.162.00	20 Paket	36.149.162.00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.000.000.00	12 Laporan	30.000.000.00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	200.000.000.00	20 Laporan	200.000.000.00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	83.057.900.00	100%	83.057.900.00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	30.000.000.00	12 Unit	30.000.000.00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	53.057.900.00	5 Unit	53.057.900.00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi Penunjang Urusan Kantor Pemerintah Daerah	12 Bulan	65.000.000.00	12 Bulan	65.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	65.000.000.00	48 Laporan	65.000.000.00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Yang Dapat Dioperasikan Dalam Kondisi Baik	12 Bulan	96.000.000.00	12 Bulan	96.000.000.00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	55.000.000.00	30 Unit	55.000.000.00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	21.000.000.00	20 Unit	21.000.000.00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000.00	1 Unit	20.000.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	100%	82.000.000.00	100%	82.000.000.00
						Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.51 %		3.75 %	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	72.000.000.00	100%	72.000.000.00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	72.000.000.00	12 Laporan	72.000.000.00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Realisasi PBB-P2	100%	10.000.000.00	100%	10.000.000.00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	10.000.000.00	5 Laporan	10.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan yang aktif	35%	72.000.000.00	35%	72.000.000.00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil evaluasi pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	72.000.000.00	100%	72.000.000.00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	72.000.000.00	12 Laporan	72.000.000.00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum	83%	85.000.000.00	83%	85.000.000.00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%	85.000.000.00	100%	85.000.000.00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25.000.000.00	12 Laporan	25.000.000.00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	60.000.000.00	12 Laporan	60.000.000.00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	50.000.000.00	100%	50.000.000.00
7	01	06	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang ditindaklanjuti	100%	50.000.000.00	100%	50.000.000.00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	15.000.000.00	5 Dokumen	15.000.000.00
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12 Dokumen	20.000.000.00	12 Dokumen	20.000.000.00
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	15.000.000.00	12 Dokumen	15.000.000.00
					KECAMATAN PANDAAN			**5.166.412.447.00**		**6.031.677.615.00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN			5.166.412.447.00		6.031.677.615.00
7	01				KECAMATAN			4.970.490.547.00		5.677.796.315.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen atau laporan administrasi PD yang baik atau sesuai regulasi	100%	4.970.490.547.00	100%	5.677.796.315.00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabk an	100%	4.541.540.405.00	100%	5.064.963.375.00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	4.107.942.159.00	34 Orang/bulan	4.546.236.375.00
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	388.238.246.00	12 Dokumen	468.415.200.00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	45.360.000.00	12 Dokumen	50.311.800.00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kepegawaian yang sesuai ketentuan	100%	25.000.000.00	100%	27.500.000.00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket	10.000.000.00	31 Paket	11.000.000.00
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	15.000.000.00	31 Orang	16.500.000.00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	143.235.600.00	100%	203.500.000.00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.110.000.00	2 Paket	9.350.000.00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.700.600.00	2 Paket	13.200.000.00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.000.000.00	2 Paket	27.500.000.00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.100.000.00	2 Paket	11.000.000.00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4.200.000.00	3 Dokumen	4.950.000.00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.125.000.00	12 Laporan	5.500.000.00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	90.000.000.00	12 Laporan	132.000.000.00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yg terealisasi	100%	52.500.000.00	100%	104.000.000.00
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	20.000.000.00	1 Unit	66.000.000.00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	7.500.000.00	1 Unit	8.000.000.00
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25.000.000.00	2 Unit	30.000.000.00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	83.962.142.00	100%	94.160.000.00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	83.962.142.00	12 Laporan	94.160.000.00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Kondisi baik	80%	124.252.400.00	80%	183.672.940.00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	110.052.400.00	4 Unit	114.508.790.00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000.00	1 Unit	55.000.000.00
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	4.200.000.00	10 Unit	14.164.150.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.50 nilai	23.921.900.00	3.75 nilai	25.314.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	1.013.921.900,00	100%	1.115.314.090,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	13.921.900.00	100%	15.314.000.00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	13.921.900.00	1 Laporan	15.314.000.00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (Berdasarkan Perbup PATEN)	100%	10.000.000.00	100%	11.000.000.00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sarana prasarana PATEN)	1 Laporan	10.000.000.00	1 Laporan	11.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	20%	60.000.000.00	20%	135.500.000.00
						Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	70%	165.000.000,00	75%	181.500.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	70%	20.000.000.00	75%	25.500.000.00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	54 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000.00	54 Lembaga Kemasyarakatan	5.500.000.00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.000.000.00	1 Laporan	20.000.000.00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	100 Keluarga	40.000.000.00	100 Keluarga	110.000.000.00
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	40 Keluarga	40.000.000.00	40 Keluarga	110.000.000.00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum	100%	9.000.000.00	100%	13.467.300.00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	4 laporan	9.000.000.00	4 laporan	13.467.300.00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.000.000.00	1 Laporan	6.867.300.00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	6.000.000.00	2 Laporan	6.600.000.00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	48.000.000.00	100%	83.600.000.00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	200 orang	48.000.000.00	200 orang	83.600.000.00
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	42.000.000.00	1 Orang	77.000.000.00
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2 Laporan	6.000.000.00	2 Laporan	6.600.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	80%	55.000.000.00	85%	96.000.000.00
7	01	06	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	80%	55.000.000.00	85%	96.000.000.00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 Dokumen	30.000.000.00	18 Dokumen	66.000.000.00
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	18 Dokumen	25.000.000.00	18 Dokumen	30.000.000.00
					KELURAHAN JOGOSARI			750.000.000.00		925.000.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.50 nilai	200.000.000.00	3.75 nilai	275.000.000.00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	200.000.000.00	100%	275.000.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	200.000.000.00	1 Dokumen	275.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	70%	550.000.000.00	75%	650.000.000.00
						Persentase kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	20%	165.000.000,00	20%	181.500.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kebutuhan sarpras masyarakat kelurahan yang terpenuhi	50%	550.000.000.00	55%	650.000.000.00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	450.000.000.00	3 Unit	500.000.000.00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000.00	1 Pokmas / Ormas	150.000.000.00
					KELURAHAN PETUNGASRI			750.000.000.00		925.000.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.50 nilai	200.000.000.00	3.75 nilai	275.000.000.00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	200.000.000.00	100%	275.000.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	200.000.000.00	1 Dokumen	275.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	70%	550.000.000.00	75%	650.000.000.00
						Persentase kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	20%	165.000.000,00	20%	181.500.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kebutuhan sarpras masyarakat kelurahan yang terpenuhi	50%	550.000.000.00	55%	650.000.000.00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	450.000.000.00	3 Unit	500.000.000.00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000.00	1 Pokmas / Ormas	150.000.000.00
					KELURAHAN PANDAAN			750.000.000.00		925.000.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.50 nilai	200.000.000.00	3.75 nilai	275.000.000.00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	200.000.000.00	100%	275.000.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	200.000.000.00	1 Dokumen	275.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	70%	550.000.000.00	75%	650.000.000.00
						Persentase kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	20%	165.000.000,00	20%	181.500.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kebutuhan sarpras masyarakat kelurahan yang terpenuhi	50%	550.000.000.00	55%	650.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	450.000.000.00	3 Unit	500.000.000.00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000.00	1 Pokmas / Ormas	150.000.000.00
					KELURAHAN KUTOREJO			750.000.000.00		925.000.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.50 nilai	200.000.000.00	3.75 nilai	275.000.000.00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	200.000.000.00	100%	275.000.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	200.000.000.00	1 Dokumen	275.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	70%	550.000.000.00	75%	650.000.000.00
						Persentase kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	20%	165.000.000,00	20%	181.500.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kebutuhan sarpras masyarakat kelurahan yang terpenuhi	50%	550.000.000.00	55%	650.000.000.00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	450.000.000.00	3 Unit	500.000.000.00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000.00	1 Pokmas / Ormas	150.000.000.00
					KECAMATAN PASREPAN			**2.704.074.886.00**		**2.704.074.886.00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.704.074.886.00		2.704.074.886.00
7	01				KECAMATAN			2.635.574.886.00		2.635.574.886.00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	2.635.574.886.00	100%	2.635.574.886.00
7	01	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dok SAKIP	100%	8.000.000.00	100%	8.000.000.00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.000.000.00	1 Dokumen	3.000.000.00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000.00	1 Laporan	5.000.000.00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	2.305.074.886.00	100%	2.305.074.886.00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.922.272.330.00	14 Orang/bulan	1.922.272.330.00
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	348.242.556.00	48 Dokumen	348.242.556.00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	34.560.000.00	12 Dokumen	34.560.000.00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	2.500.000.00	100%	2.500.000.00
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.500.000.00	1 Laporan	2.500.000.00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	15.000.000.00	100%	15.000.000.00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000.00	1 Paket	5.000.000.00
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	10.000.000.00	5 Orang	10.000.000.00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	86.000.000.00	100%	86.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000.00	1 Paket	5.000.000.00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000.00	1 Paket	25.000.000.00
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.000.000.00	1 Paket	1.000.000.00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.000.000.00	1 Paket	7.000.000.00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.000.000.00	12 Dokumen	3.000.000.00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.000.000.00	12 Laporan	5.000.000.00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	40.000.000.00	12 Laporan	40.000.000.00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	100%	75.000.000.00	100%	75.000.000.00
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	45.000.000.00	1 Unit	45.000.000.00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	30.000.000.00	3 Unit	30.000.000.00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	40.000.000.00	100%	40.000.000.00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	40.000.000.00	48 Laporan	40.000.000.00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	100%	104.000.000.00	100%	104.000.000.00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	85.000.000.00	15 Unit	85.000.000.00
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	4.000.000.00	12 Unit	4.000.000.00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.000.000.00	15 Unit	10.000.000.00
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	5.000.000.00	10 Unit	5.000.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Laporan	29.000.000.00	100 Laporan	29.000.000.00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	29.000.000.00	100%	29.000.000.00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	20.000.000.00	2 Laporan	20.000.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	9.000.000.00	8 Dokumen	9.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat yang terbina dengan Baik	100%	30.000.000.00	100%	30.000.000.00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100%	30.000.000.00	100%	30.000.000.00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	30.000.000.00	12 Laporan	30.000.000.00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase konflik sosial yang tertangani sesuai dengan kewenangan	100%	9.500.000.00	100%	9.500.000.00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%	9.500.000.00	100%	9.500.000.00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	4.500.000.00	12 Laporan	4.500.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	5.000.000.00	12 Laporan	5.000.000.00
					KECAMATAN POHJENTREK			**3.765.023.597.10**		**3.765.023.597.10**
7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.765.023.597.10		3.765.023.597.10
7	01				KECAMATAN			3.511.323.597.10		3.511.323.597.10
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentae Dokumen atau Laporan Administrasi PD yang Baik atau Sesuai Regulasi	100%	3.511.323.597.10	100%	3.511.323.597.10
7	01	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan pada dok rencana. anggaran. dan evaluasi	100%	6.600.000.00	100%	6.600.000.00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.200.000.00	8 Dokumen	2.200.000.00
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.100.000.00	1 Dokumen	1.100.000.00
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.100.000.00	1 Dokumen	1.100.000.00
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.100.000.00	2 Dokumen	1.100.000.00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.100.000.00	4 Laporan	1.100.000.00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabk an	100%	2.926.267.697.10	100%	2.926.267.697.10
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2.387.267.697.10	16 Orang/bulan	2.387.267.697.10
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	495.000.000.00	24 Dokumen	495.000.000.00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	44.000.000.00	60 Dokumen	44.000.000.00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/ dokumen BMD yg Akurat dan sesuai dgn ketentuan	100%	3.300.000.00	100%	3.300.000.00
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.100.000.00	2 Dokumen	1.100.000.00
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	2.200.000.00	4 Laporan	2.200.000.00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	22.000.000.00	100%	22.000.000.00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.500.000.00	1 Paket	5.500.000.00
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	5.500.000.00	4 Dokumen	5.500.000.00
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	11.000.000.00	2 Orang	11.000.000.00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan PD	100%	172.555.900.00	100%	172.555.900.00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.355.900.00	4 Paket	5.355.900.00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.000.000.00	4 Paket	11.000.000.00
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.500.000.00	1 Paket	5.500.000.00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	16.500.000.00	4 Paket	16.500.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	11.000.000.00	4 Paket	11.000.000.00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.500.000.00	12 Laporan	5.500.000.00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	104.500.000.00	24 Laporan	104.500.000.00
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.200.000.00	1 Dokumen	2.200.000.00
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	11.000.000.00	1 Dokumen	11.000.000.00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	154.000.000.00	100%	154.000.000.00
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	55.000.000.00	2 Unit	55.000.000.00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	16.500.000.00	2 Unit	16.500.000.00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	44.000.000.00	5 Unit	44.000.000.00
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11.000.000.00	1 Unit	11.000.000.00
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	27.500.000.00	4 Unit	27.500.000.00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yg tersedia	100%	61.600.000.00	100%	61.600.000.00
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.200.000.00	12 Laporan	13.200.000.00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22.000.000.00	12 Laporan	22.000.000.00
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.200.000.00	12 Laporan	13.200.000.00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.200.000.00	12 Laporan	13.200.000.00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi baik	100%	165.000.000.00	100%	165.000.000.00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.000.000.00	1 Unit	44.000.000.00
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	55.000.000.00	6 Unit	55.000.000.00
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	11.000.000.00	12 Unit	11.000.000.00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	11.000.000.00	12 Unit	11.000.000.00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	33.000.000.00	3 Unit	33.000.000.00
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	11.000.000.00	4 Unit	11.000.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.51 indeks	49.500.000.00	3.75 indeks	49.500.000.00
						Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	49.500.000.00	100%	49.500.000.00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	27.500.000.00	100%	27.500.000.00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	16.500.000.00	1 Laporan	16.500.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	11.000.000.00	12 Dokumen	11.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN)	12 Laporan	11.000.000.00	12 Laporan	11.000.000.00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	11.000.000.00	12 Laporan	11.000.000.00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Realisasi PBB-P2	9 Laporan	11.000.000.00	9 Laporan	11.000.000.00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9 Laporan	11.000.000.00	9 Laporan	11.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif	35%	92.000.000.00	45%	92.000.000.00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	50%	55.000.000.00	60%	55.000.000.00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.500.000.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.500.000.00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	49.500.000.00	4 Laporan	49.500.000.00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Ketahanan Pangan Keluarga yang ditindaklanjuti	3 laporan	37.000.000.00	3 laporan	37.000.000.00
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	15.000.000.00	50 Keluarga	15.000.000.00
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	11.000.000.00	50 Keluarga	11.000.000.00
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	11.000.000.00	50 Keluarga	11.000.000.00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	100%	38.500.000.00	100%	38.500.000.00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%	27.500.000.00	100%	27.500.000.00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	11.000.000.00	12 Laporan	11.000.000.00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	16.500.000.00	12 Laporan	16.500.000.00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang terselenggara	4 Laporan	11.000.000.00	4 Laporan	11.000.000.00
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	11.000.000.00	4 Laporan	11.000.000.00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	11.000.000.00	100%	11.000.000.00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Laporan	11.000.000.00	1 Laporan	11.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	11.000.000.00	50 Orang	11.000.000.00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	77%	62.700.000.00	88%	62.700.000.00
7	01	06	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitasi. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti	90%	62.700.000.00	95%	62.700.000.00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	9.900.000.00	9 Dokumen	9.900.000.00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	8.800.000.00	18 Dokumen	8.800.000.00
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Dokumen	5.500.000.00	9 Dokumen	5.500.000.00
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5 Dokumen	22.000.000.00	5 Dokumen	22.000.000.00
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	9 Dokumen	5.500.000.00	9 Dokumen	5.500.000.00
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Dokumen	5.500.000.00	5 Dokumen	5.500.000.00
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9 Dokumen	5.500.000.00	9 Dokumen	5.500.000.00
					KECAMATAN PRIGEN			**5.097.879.229.00**		**5.097.879.229.00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN			5.092.629.229.00		5.092.629.229.00
7	01				KECAMATAN			4.800.519.229.00		4.800.519.229.00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi PD yang baik atau sesuai Regulasi	100%	4.800.519.229.00	100%	4.800.519.229.00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	4.356.748.641.00	100%	4.356.748.641.00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	3.885.000.000.00	23 Orang/bulan	3.885.000.000,00
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	413.347.641.00	13 Dokumen	413.347.641.00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	58.401.000.00	4 Dokumen	58.401.000.00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	11.781.000.00	100%	11.781.000.00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Paket	3.381.000.00	23 Paket	3.381.000.00
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	8.400.000.00	5 Orang	8.400.000.00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	111.008.730.00	100%	111.008.730.00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.300.000.00	2 Paket	6.300.000.00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	33.399.030.00	6 Paket	33.399.030.00
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.100.000.00	2 Paket	2.100.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	10.500.000.00	6 Paket	10.500.000.00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.159.700.00	2 Dokumen	5.159.700.00
X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.250.000.00	12 Laporan	5.250.000.00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	52.500.000.00	12 Laporan	52.500.000.00
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	1.050.000.00	2 Dokumen	1.050.000.00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	169.716.750.00	100%	169.716.750.00
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	37.390.500.00	1 Unit	37.390.500.00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5.250.000.00	1 Unit	5.250.000.00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	102.532.500.00	5 Unit	102.532.500.00
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.250.000.00	1 Unit	5.250.000.00
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	19.293.750.00	4 Unit	19.293.750.00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jas penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	34.650.000.00	100%	34.650.000.00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan	34.650.000.00	84 Laporan	34.650.000.00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	116.614.108.00	100%	116.614.108.00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	79.206.540.00	2 Unit	79.206.540.00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.250.000.00	5 Unit	5.250.000.00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.500.000.00	1 Unit	10.500.000.00
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	9.057.568.00	5 Unit	9.057.568.00
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	12.600.000.00	2 Unit	12.600.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.00 indeks	150.150.000.00	3.25 indeks	150.150.000.00
						Persentase dokumen atau laporan administrasi PD yang Baik atau Sesuai Regulasi	100%		100%	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	21.000.000.00	100%	21.000.000.00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	21.000.000.00	2 Laporan	21.000.000.00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase laporan bulanan PATEN yang diselesaikan tepat waktu (berdasarkan Perbup PATEN)	100%	126.000.000.00	100%	126.000.000.00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	126.000.000.00	4 Laporan	126.000.000.00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Realisasi PBB-P2	100%	3.150.000.00	100%	3.150.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	3.150.000.00	2 Laporan	3.150.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Kelurahan yang Aktif	100%	75.600.000.00	100%	75.600.000.00
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Yang Aktif	100%		100%	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	10.500.000.00	100%	10.500.000.00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.300.000.00	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.300.000.00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.200.000.00	1 Laporan	4.200.000.00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kebutuhan sarpras masyarakat kelurahan yang terpenuhi	100%	17.850.000.00	100%	17.850.000.00
						Persentase masyarakat kelurahan yang mengikuti pemberdayaan di kelurahan	100%		100%	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	15.750.000.00	1 Lembaga Kemasyarakatan	15.750.000.00
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	2.100.000.00	1 Laporan	2.100.000.00
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Porsentase Laporan Koodinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masy (PPKM)	100%	15.750.000.00	100%	15.750.000.00
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	15.750.000.00	2 Dokumen	15.750.000.00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Porsentase Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	31.500.000.00	100%	31.500.000.00
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	6.300.000.00	50 Keluarga	6.300.000.00
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	6.300.000.00	50 Keluarga	6.300.000.00
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	6.300.000.00	50 Keluarga	6.300.000.00
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50 Keluarga	6.300.000.00	50 Keluarga	6.300.000.00
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	6.300.000.00	50 Keluarga	6.300.000.00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	28.350.000.00	100%	28.350.000.00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%	5.250.000.00	100%	5.250.000.00
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	5.250.000.00	2 Laporan	5.250.000.00
7	01	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Implementasi ketentuan yang ada dalam Perda	100%	23.100.000.00	100%	23.100.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	16.800.000.00	2 Laporan	16.800.000.00
7	01	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	6.300.000.00	2 Laporan	6.300.000.00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sara yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	19.110.000.00	100%	19.110.000.00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	19.110.000.00	100%	19.110.000.00
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	8.610.000.00	50 Orang	8.610.000.00
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	10.500.000.00	50 Orang	10.500.000.00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi desa yang baik	100%	18.900.000.00	100%	18.900.000.00
7	01	06	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitasi. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti	100%	18.900.000.00	100%	18.900.000.00
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	3.150.000.00	1 Dokumen	3.150.000.00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	3.150.000.00	1 Dokumen	3.150.000.00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	3.150.000.00	1 Dokumen	3.150.000.00
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	3.150.000.00	1 Dokumen	3.150.000.00
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	3.150.000.00	1 Dokumen	3.150.000.00
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	3.150.000.00	1 Dokumen	3.150.000.00
					KELURAHAN PECALUKAN			811.544.432.00		811.544.432.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.00 indeks	276.300.908.00	3.25 indeks	276.300.908.00
						Persentase dokumen atau laporan administrasi PD yang Baik atau Sesuai Regulasi	100%		100%	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	276.300.908.00	100%	276.300.908.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	276.300.908.00	12 Dokumen	276.300.908.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Kelurahan yang Aktif	100%	535.243.524.00	100%	535.243.524.00
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Yang Aktif	100%		100%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kebutuhan sarpras masyarakat kelurahan yang terpenuhi	100%	535.243.524.00	100%	535.243.524.00
						Persentase masyarakat kelurahan yang mengikuti pemberdayaan di kelurahan	100%		100%	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	456.168.024.00	5 Unit	456.168.024.00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	79.075.500.00	2 Pokmas / Ormas	79.075.500.00
					KELURAHAN LEDUG			781.809.832.00		781.809.832.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.00 indeks	246.719.332.00	3.25 indeks	246.719.332.00
						Persentase dokumen atau laporan administrasi PD yang Baik atau Sesuai Regulasi	100%		100%	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	246.719.332.00	100%	246.719.332.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	246.719.332.00	12 Dokumen	246.719.332.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Kelurahan yang Aktif	100%	535.090.500.00	100%	535.090.500.00
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Yang Aktif	100%		100%	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kebutuhan sarpras masyarakat kelurahan yang terpenuhi	100%	535.090.500.00	100%	535.090.500.00
						Persentase masyarakat kelurahan yang mengikuti pemberdayaan di kelurahan	100%		100%	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	449.267.700.00	5 Unit	449.267.700.00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	85.822.800.00	2 Pokmas / Ormas	85.822.800.00
					KELURAHAN PRIGEN			769.131.748.00		769.131.748.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.00 indeks	234.519.319.00	3.25 indeks	234.519.319.00
						Persentase dokumen atau laporan administrasi PD yang Baik atau Sesuai Regulasi	100%		100%	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	234.519.319.00	100%	234.519.319.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	234.519.319.00	12 Dokumen	234.519.319.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Kelurahan yang Aktif	100%	534.612.429.00	100%	534.612.429.00
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Yang Aktif	100%		100%	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kebutuhan sarpras masyarakat kelurahan yang terpenuhi	100%	534.612.429.00	100%	534.612.429.00
						Persentase masyarakat kelurahan yang mengikuti pemberdayaan di kelurahan	100%		100%	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	452.988.579.00	5 Unit	452.988.579.00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	81.623.850.00	3 Pokmas / Ormas	81.623.850.00
					KECAMATAN PURWODADI			**3.108.192.316.00**		**3.109.081.204.00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.103.192.316.00		3.104.081.204.00
7	01				KECAMATAN			2.972.692.316.00		2.973.581.204.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen /laporan administrasi Perangkat Daerah yang baikatau sesuai regulasi	100 persen	2.972.692.316.00	100 persen	2.973.581.204.00
7	01	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegi atan/subkegiatan pada dok rencana. anggaran. dan evaluasi	100 persen	5.000.000.00	100 persen	5.000.000.00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	5.000.000.00	12 Laporan	5.000.000.00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabk an	100 persen	2.711.692.316.00	100 persen	2.711.692.316.00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2.271.732.316.00	18 Orang/bulan	2.271.732.316.00
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	399.960.000.00	12 Dokumen	399.960.000.00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	40.000.000.00	12 Dokumen	40.000.000.00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100 persen	5.000.000.00	100 persen	5.000.000.00
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.000.000.00	12 Laporan	5.000.000.00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100 persen	103.000.000.00	100 persen	103.000.000.00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	10.000.000.00	30 Paket	10.000.000.00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	18.000.000.00	30 Paket	18.000.000.00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000.00	4 Paket	10.000.000.00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.000.000.00	12 Laporan	5.000.000.00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000.00	12 Laporan	60.000.000.00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100 persen	20.000.000.00	100 persen	20.000.000.00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10.000.000.00	10 Unit	10.000.000.00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10.000.000.00	3 Unit	10.000.000.00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang opersional kantor yang tersedia	100 persen	28.000.000.00	100 persen	28.888.888.00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.000.000.00	12 Laporan	28.888.888.00
X	XX	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.000.000.00	12 Laporan	5.000.000.00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100 persen	100.000.000.00	100 persen	100.000.000.00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	80.000.000.00	5 Unit	80.000.000.00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.000.000.00	12 Unit	5.000.000.00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000.00	1 Unit	15.000.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100 persen	38.000.000.00	100 persen	38.000.000.00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	3 laporan	38.000.000.00	3 laporan	38.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	28.000.000.00	3 Laporan	28.000.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	10.000.000.00	12 Dokumen	10.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100 persen	30.000.000.00	100 persen	30.000.000.00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100 persen	30.000.000.00	100 persen	30.000.000.00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	30.000.000.00	12 Laporan	30.000.000.00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	100 persen	27.500.000.00	100 persen	27.500.000.00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100 persen	27.500.000.00	100 persen	27.500.000.00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	7.500.000.00	12 Laporan	7.500.000.00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	20.000.000.00	12 Laporan	20.000.000.00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100 persen	10.000.000.00	100 persen	10.000.000.00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 persen	10.000.000.00	100 persen	10.000.000.00
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	10.000.000.00	50 Orang	10.000.000.00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100 persen	25.000.000.00	100 persen	25.000.000.00
7	01	06	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitasi. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti	100 persen	25.000.000.00	100 persen	25.000.000.00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	25.000.000.00	12 Dokumen	25.000.000.00
					KECAMATAN PURWOSARI			**5.491.284.677,00**		**5.491.284.677,00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN			5.491.284.677,00		5.491.284.677,00
7	01				KECAMATAN			5.491.284.677,00		5.491.284.677,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penenuhan Penunjang Urusan Penerintahan	100%	4.729.948.549,00	100%	5.202.943.403,00
7	01	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan DOK SAKIP	100%	10.285.000,00	100%	11.313.500,00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	10.285.000,00	1 Dokumen	11.313.500,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penenuhan Administrasi Keuangan	100%	3.932.789.190,00	100%	4.326.068.109,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang/bulan	3.768.471.190,00	224 Orang/bulan	4.145.318.309,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	204 Dokumen	164.318.000,00	204 Dokumen	180.749.800,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penenuhan Administrasi Umum	100%	111.067.604,00	100%	122.174.364,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	34.837.604,00	22 Paket	38321364.4
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.100.000,00	1 Paket	13.310.000,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	11.495.000,00	8 Paket	12.644.500,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.285.000,00	1 Dokumen	11.313.500,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	42.350.000,00	12 Laporan	46.585.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	53.240.000,00	100%	58.564.000,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	53.240.000,00	3 Unit	58.564.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	23.171.432,00	100%	25.488.575,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 Laporan	23.171.432,00	96 Laporan	25488575.2
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	186.340.000,00	100%	204.974.000,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	137.940.000,00	5 Unit	151.734.000,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	16.940.000,00	10 Unit	18.634.000,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.100.000,00	1 Unit	13.310.000,00
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.420.000,00	2 Unit	2.662.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen penyelenggaran pemerintahan yg tepat waktu	100%	20.570.000,00	100%	22.627.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan yang di koordinasikan dengan instansi terkait	41 Laporan	20.570.000,00	41 Laporan	22.627.000,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	10.285.000,00	2 Laporan	11.313.500,00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Dokumen	10.285.000,00	39 Dokumen	11.313.500,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	40%	1.100.451.451,00	45%	1.210.496.596,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	1 Laporan	10.285.000,00	1 Laporan	11.313.500,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	10.285.000,00	6 Laporan	11.313.500,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguannya Trantibum	100%	30.250.000,00	100%	33.275.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan yang di tindaklanjuti ke instansi terkait	70%	30.250.000,00	70%	33.275.000,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	15.125.000,00	4 Laporan	16.637.500,00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 Laporan	15.125.000,00	8 Laporan	16.637.500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	25.045.000,00	100%	27.549.500,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3 Laporan	25.045.000,00	3 Laporan	27.549.500,00
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	25.045.000,00	50 Orang	27.549.500,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	15.015.000,00	100%	16.516.500,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil fasilitasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa yang di tindak lanjuti	12 Laporan	15.015.000,00	12 Laporan	16.516.500,00
7	01	06	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Laporan	15.015.000,00	12 Laporan	16.516.500,00
					KELURAHAN PURWOSARI			1.090.166.451,00		1199183096.1
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Terbina dengan baik	35%	1.090.166.451,00	35%	1199183096.1
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	3 Laporan	1.199.183.096,00	3 Laporan	1199183096.1
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	423.500.000,00	1 Paket	465.850.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	548.313.920,00	4 Pokmas / Ormas	603.145.312,00
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	118.352.531,00	12 Laporan	130187784.1
					KECAMATAN PUSPO			**2.837.781.335.00**		**2.837.781.335.00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.837.781.335.00		2.837.781.335.00
7	01				KECAMATAN			2.561.781.335.00		2.561.781.335.00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Atau Pelaporan Administrasi PD Yang Baik Atau Sesuai Regulasi	100%	2.561.781.335.00	100%	2.561.781.335.00
7	01	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indicator kinerja program/kegi atan/sub kegiatan pada dokrencana. anggaran. dan evaluasi	100%	14.500.000.00	100%	14.500.000.00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	5.500.000.00	10 Dokumen	5.500.000.00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	3.500.000.00	12 Laporan	3.500.000.00
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	5.500.000.00	10 Laporan	5.500.000.00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung jawabkan	100%	2.138.280.235.00	100%	2.138.280.235.00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196 Orang/bulan	1.745.340.235.00	196 Orang/bulan	1.745.340.235.00
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 Dokumen	351.360.000.00	11 Dokumen	351.360.000.00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	41.580.000.00	12 Dokumen	41.580.000.00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian Yang Akurat Dan Sesuai Ketentuan	100%	10.500.000.00	100%	10.500.000.00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000.00	1 Paket	5.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	5.500.000.00	3 Orang	5.500.000.00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah	100%	162.969.000.00	100%	162.969.000.00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.869.000.00	1 Paket	4.869.000.00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.500.000.00	1 Paket	3.500.000.00
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.500.000.00	1 Paket	2.500.000.00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.000.000.00	1 Paket	33.000.000.00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.000.000.00	1 Paket	12.000.000.00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.600.000.00	12 Dokumen	3.600.000.00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.500.000.00	12 Laporan	3.500.000.00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	100.000.000.00	24 Laporan	100.000.000.00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pesentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terealisasi	100%	67.000.000.00	100%	67.000.000.00
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	45.000.000.00	1 Unit	45.000.000.00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	11.000.000.00	2 Unit	11.000.000.00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	11.000.000.00	2 Unit	11.000.000.00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Operasional Kantor Yang Tersedia	100%	31.000.000.00	100%	31.000.000.00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	31.000.000.00	36 Laporan	31.000.000.00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	100%	137.532.100.00	100%	137.532.100.00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	105.032.100.00	8 Unit	105.032.100.00
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	2.500.000.00	5 Unit	2.500.000.00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000.00	10 Unit	10.000.000.00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000.00	1 Unit	20.000.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tepat Waktu	100%	85.000.000.00	100%	85.000.000.00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pesentase Kegiatan Pemerintahan Yang Ddikoordinasikan Dengan Instansi Terkait	100%	55.000.000.00	100%	55.000.000.00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	25.000.000.00	2 Laporan	25.000.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	30.000.000.00	4 Dokumen	30.000.000.00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan Bulanan PATEN Yang Diselesaikan Tepat Waktu (Berdasarkan Perbup PATEN)	100%	15.000.000.00	100%	15.000.000.00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.000.000.00	1 Laporan	15.000.000.00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Realisasi PBB-P2	100%	15.000.000.00	100%	15.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	15.000.000.00	2 Laporan	15.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Yang Aktif	100%	63.000.000.00	100%	63.000.000.00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti	100%	63.000.000.00	100%	63.000.000.00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000.00	7 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000.00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	48.000.000.00	4 Laporan	48.000.000.00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	48.000.000.00	100%	48.000.000.00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%	10.000.000.00	100%	10.000.000.00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	10.000.000.00	2 Laporan	10.000.000.00
7	01	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terwujudnya ketertiban dan ketentraman sosial	100%	38.000.000.00	100%	38.000.000.00
7	01	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	38.000.000.00	4 Laporan	38.000.000.00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik SARA Yang Diselesaikan Sesuai Kewenangan	100%	35.000.000.00	100%	35.000.000.00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	100%	35.000.000.00	100%	35.000.000.00
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	35.000.000.00	200 Orang	35.000.000.00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pesentase Pemerintahan Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100%	45.000.000.00	100%	45.000.000.00
7	01	06	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Fasilitasi. Pembinaan Dan Pengawasan Peerintah Desa Yang Ditindaklanjuti	100%	45.000.000.00	100%	45.000.000.00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	15.000.000.00	2 Dokumen	15.000.000.00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	15.000.000.00	2 Dokumen	15.000.000.00
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	15.000.000.00	2 Dokumen	15.000.000.00
					KECAMATAN REJOSO			**2.670.265.920.00**		**3.054.228.122.00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.650.265.920.00		3.019.228.122.00
7	01				KECAMATAN			2.589.265.920.00		2.919.228.122.00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/ laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	2.589.265.920.00	100%	2.919.228.122.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan pada dokumen rencana. anggaran. dan evaluasi	100%	2.000.000.00	100%	6.000.000.00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	1.000.000.00	8 Dokumen	3.500.000.00
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.000.000.00	4 Laporan	2.500.000.00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabk an	100%	2.362.349.902.00	100%	2.579.728.122.00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	2.031.728.122.00	15 Orang/bulan	2.234.728.122.00
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	296.061.780.00	12 Dokumen	305.000.000.00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	34.560.000.00	12 Dokumen	40.000.000.00
X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000.00	12 Laporan	35.000.000.00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	12.000.000.00	100%	22.500.000.00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	7.000.000.00	7 Paket	7.500.000.00
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	5.000.000.00	2 Orang	15.000.000.00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	100%	82.600.000.00	100%	104.000.000.00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.500.000.00	4 Paket	2.000.000.00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.000.000.00	4 Paket	21.000.000.00
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1.500.000.00	4 Paket	2.500.000.00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000.00	4 Paket	5.500.000.00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	8.000.000.00	4 Paket	9.000.000.00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.600.000.00	12 Dokumen	4.000.000.00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	48.000.000.00	12 Laporan	60.000.000.00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	100%	20.000.000.00	100%	70.000.000.00
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0.00	1 Unit	35.000.000.00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	10.000.000.00	2 Unit	15.000.000.00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000.00	1 Unit	20.000.000.00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	41.000.000.00	100%	47.000.000.00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	38.000.000.00	12 Laporan	40.000.000.00
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000.00	12 Laporan	7.000.000.00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	69.316.018.00	100%	90.000.000.00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	49.316.018.00	7 Unit	60.000.000.00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	20.000.000.00	10 Unit	30.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	18.000.000.00	100%	30.000.000.00
						Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.51 skor		3.75 skor	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	12.000.000.00	100%	20.000.000.00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	8.000.000.00	1 Laporan	15.000.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	4.000.000.00	1 Dokumen	5.000.000.00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	3.000.000.00	100%	5.000.000.00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.000.000.00	1 Laporan	5.000.000.00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Realisasi PBB-P2	100%	3.000.000.00		5.000.000.00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	3.000.000.00	1 Laporan	5.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif	100%	7.000.000.00	100%	10.000.000.00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100%	7.000.000.00	100%	10.000.000.00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000.00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.000.000.00	1 Laporan	5.000.000.00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	100%	11.000.000.00	100%	15.000.000.00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%	8.000.000.00	100%	10.000.000.00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.000.000.00	1 Laporan	5.000.000.00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	5.000.000.00	1 Laporan	5.000.000.00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan perda dan perkada	100%	3.000.000.00	100%	5.000.000.00
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	3.000.000.00	1 Laporan	5.000.000.00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	10.000.000.00		20.000.000.00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 peserta	10.000.000.00	300 peserta	20.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	10.000.000.00	300 Orang	20.000.000.00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	15.000.000.00	100%	25.000.000.00
7	01	06	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitasi. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti	100%	15.000.000.00	100%	25.000.000.00
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen	3.000.000.00	16 Dokumen	5.000.000.00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	3.000.000.00	16 Dokumen	5.000.000.00
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	16 Dokumen	3.000.000.00	16 Dokumen	5.000.000.00
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	16 Dokumen	3.000.000.00	16 Dokumen	5.000.000.00
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 Dokumen	3.000.000.00	16 Dokumen	5.000.000.00
					KECAMATAN REMBANG			**2.579.533.050.00**		**2.579.533.050.00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.579.533.050.00		2.579.533.050.00
7	01				KECAMATAN			2.463.694.050.00		2.463.694.050.00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	100%	2.463.694.050.00	100%	2.463.694.050.00
7	01	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	4.220.000.00	100%	4.220.000.00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4.220.000.00	12 Laporan	4.220.000.00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Keuangan Kecamatan yang dipenuhi	100 persen	2.064.451.000.00	100 persen	2.064.451.000.00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.772.491.000.00	12 Orang/bulan	1.772.491.000.00
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	253.800.000.00	12 Dokumen	253.800.000.00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	38.160.000.00	12 Dokumen	38.160.000.00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	100 persen	14.466.000.00	100 persen	14.466.000.00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	12.066.000.00	1 Paket	12.066.000.00
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2.400.000.00	2 Orang	2.400.000.00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Umum yang dipenuhi	100 persen	167.784.030.00	100 persen	167.784.030.00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	31.817.500.00	4 Paket	31.817.500.00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	20.166.530.00	4 Paket	20.166.530.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.600.000.00	12 Dokumen	3.600.000.00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	112.200.000.00	4 Laporan	112.200.000.00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD Penunjang Kecamatan yang dilaksanakan	100 persen	49.862.020.00	100 persen	49.862.020.00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	25.045.170.00	8 Unit	25.045.170.00
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	24.816.850.00	8 Unit	24.816.850.00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	100 persen	44.411.200.00	100 persen	44.411.200.00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	44.411.200.00	12 Laporan	44.411.200.00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	118.499.800.00	100 persen	118.499.800.00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	65.702.100.00	6 Unit	65.702.100.00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	13.129.700.00	8 Unit	13.129.700.00
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	39.668.000.00	3 Unit	39.668.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	42.520.000.00	100%	42.520.000.00
						Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.51 indeks		3.75 indeks	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	42.520.000.00	100%	42.520.000.00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	24.520.000.00	12 Laporan	24.520.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	18.000.000.00	12 Dokumen	18.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100%	61.319.000.00	100%	61.319.000.00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	61.319.000.00	100%	61.319.000.00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	61.319.000.00	12 Laporan	61.319.000.00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	100%	12.000.000.00	100%	12.000.000.00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%	12.000.000.00	100%	12.000.000.00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12.000.000.00	12 Laporan	12.000.000.00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 peserta	40.000.000,00	50 peserta	40.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 peserta	40.000.000,00	50 peserta	40.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	110.000.000,00	100%	110.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitasi. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti	100%	110.000.000,00	100%	110.000.000,00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%	110.000.000,00	100%	110.000.000,00
					KECAMATAN SUKOREJO			**2.641.319.135.00**		**2.905.451.049.00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.641.319.135.00		2.905.451.049.00
7	01				KECAMATAN			2.556.405.135.00		2.812.045.649.00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	2.556.405.135.00	100%	2.812.045.649.00
7	01	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegi atan/subkegiatan pada dok rencana. anggaran. dan evaluas	100%	15.000.000.00	100%	16.500.000.00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000.00	1 Dokumen	5.500.000.00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000.00	1 Laporan	5.500.000.00
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000.00	1 Laporan	5.500.000.00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabk an	100%	2.138.280.235.00	100%	2.352.108.259.00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.745.340.235.00	12 Orang/bulan	1.919.874.259.00
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	351.360.000.00	12 Dokumen	386.496.000.00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	41.580.000.00	12 Dokumen	45.738.000.00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	5.000.000.00	5 Dokumen	5.500.000.00
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000.00	1 Laporan	5.500.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	20.000.000.00	100%	22.000.000.00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000.00	1 Paket	5.500.000.00
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000.00	1 Dokumen	5.500.000.00
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000.00	2 Orang	11.000.000.00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	100%	93.028.400.00	100%	102.331.240.00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.869.000.00	1 Paket	5.355.900.00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.529.000.00	1 Paket	3.881.900.00
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.000.000.00	1 Paket	1.100.000.00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000.00	1 Paket	11.000.000.00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.494.400.00	1 Paket	8.243.840.00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.600.000.00	2 Dokumen	3.960.000.00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.536.000.00	12 Laporan	2.789.600.00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000.00	12 Laporan	55.000.000.00
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000.00	1 Dokumen	11.000.000.00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yg terealisasi	100%	70.000.000.00	100%	77.000.000.00
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	20.000.000.00	1 Unit	22.000.000.00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10.000.000.00	1 Unit	11.000.000.00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000.00	1 Unit	11.000.000.00
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000.00	1 Unit	11.000.000.00
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.000.000.00	1 Unit	16.500.000.00
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000.00	1 Unit	5.500.000.00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang opersional kantor yang tersedia	100%	78.455.840.00	100%	86.301.424.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	74.955.840.00	12 Laporan	82.451.424.00
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Laporan	3.500.000.00	9 Laporan	3.850.000.00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	100%	136.640.660.00	100%	150.304.726.00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	79.600.860.00	5 Unit	87.560.946.00
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000.00	5 Unit	11.000.000.00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000.00	5 Unit	11.000.000.00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000.00	1 Unit	33.000.000.00
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	7.039.800.00	5 Unit	7.743.780.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	100%	26.414.000.00	100%	29.055.400.00
						Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.51 %		3.75 %	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	16.414.000.00	100%	18.055.400.00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	10.000.000.00	2 Laporan	11.000.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Dokumen	6.414.000.00	39 Dokumen	7.055.400.00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase laporan bulanan PATEN yang diselesaikan tepat waktu	100%	5.000.000.00	100%	5.500.000.00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	5.000.000.00	2 Laporan	5.500.000.00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Realisasi PBB-P2	100%	5.000.000.00	100%	5.500.000.00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	5.000.000.00	12 Laporan	5.500.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan yang aktif	35%	25.000.000.00	35%	27.500.000.00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil evaluasi pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	25.000.000.00	100%	27.500.000.00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.300.000.00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	22.000.000.00	4 Laporan	24.200.000.00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum	83%	13.500.000.00	83%	14.850.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%	13.500.000.00	100%	14.850.000.00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4.500.000.00	4 Laporan	4.950.000.00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	9.000.000.00	4 Laporan	9.900.000.00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	5.000.000.00	100%	5.500.000.00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	50 Orang	5.000.000.00	50 Orang	5.500.000.00
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-	50 Orang	5.000.000.00	50 Orang	5.500.000.00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	15.000.000.00	100%	16.500.000.00
7	01	06	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang ditindaklanjuti	100%	15.000.000.00	100%	16.500.000.00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	5.000.000.00	12 Dokumen	5.500.000.00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19 Dokumen	5.000.000.00	19 Dokumen	5.500.000.00
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	19 Dokumen	5.000.000.00	19 Dokumen	5.500.000.00
					KECAMATAN TOSARI			**2.481.120.668.00**		**2.481.120.668.00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.481.120.668.00		2.481.120.668.00
7	01				KECAMATAN			2.299.999.668.00		2.299.999.668.00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen atau laporan administrasi PD yg baik atau sesuai regulasi	100%	2.299.999.668.00	100%	2.299.999.668.00
7	01	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegi atan/subkegiatan pada dok rencana. anggaran. dan evaluasi	100%	8.250.000.00	100%	8.250.000.00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.750.000.00	4 Dokumen	2.750.000.00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2.750.000.00	5 Laporan	2.750.000.00
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.750.000.00	4 Laporan	2.750.000.00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabk an	100%	1.949.863.062.00	100%	1.949.863.062.00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang/bulan	1.572.607.062.00	224 Orang/bulan	1.572.607.062.00
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	339.240.000.00	12 Dokumen	339.240.000.00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	38.016.000.00	12 Dokumen	38.016.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100%	2.200.000.00	100%	2.200.000.00
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.200.000.00	12 Laporan	2.200.000.00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	14.900.000.00	100%	14.900.000.00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000.00	1 Paket	5.000.000.00
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	1.650.000.00	2 Dokumen	1.650.000.00
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	8.250.000.00	4 Orang	8.250.000.00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	100%	133.359.800.00	100%	133.359.800.00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.355.900.00	2 Paket	5.355.900.00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.881.900.00	2 Paket	3.881.900.00
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3.867.000.00	2 Paket	3.867.000.00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	23.466.000.00	4 Paket	23.466.000.00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.000.000.00	2 Paket	10.000.000.00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.900.000.00	12 Dokumen	3.900.000.00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.789.000.00	12 Laporan	2.789.000.00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	74.600.000.00	12 Laporan	74.600.000.00
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	5.500.000.00	12 Dokumen	5.500.000.00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	25.300.000.00	100%	25.300.000.00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	5.500.000.00	2 Unit	5.500.000.00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	11.000.000.00	2 Unit	11.000.000.00
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.500.000.00	2 Unit	5.500.000.00
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.300.000.00	1 Unit	3.300.000.00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang opersional kantor yang tersedia	100%	31.340.200.00	100%	31.340.200.00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.140.200.00	12 Laporan	29.140.200.00
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.200.000.00	1 Laporan	2.200.000.00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	100%	134.786.606.00	100%	134.786.606.00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	116.635.000.00	10 Unit	116.635.000.00
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	3.300.000.00	4 Unit	3.300.000.00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	5.500.000.00	6 Unit	5.500.000.00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.351.606.00	1 Unit	9.351.606.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	77.982.000.00	100%	77.982.000.00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	72.482.000.00	100%	72.482.000.00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	17.482.000.00	1 Laporan	17.482.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	55.000.000.00	10 Dokumen	55.000.000.00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN)	100%	2.750.000.00	100%	2.750.000.00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2.750.000.00	2 Laporan	2.750.000.00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Realisasi PBB-P2	100%	2.750.000.00	100%	2.750.000.00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	2.750.000.00	12 Laporan	2.750.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100%	54.153.000.00	100%	54.153.000.00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	48.653.000.00	100%	48.653.000.00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.500.000.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.500.000.00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	43.153.000.00	10 Laporan	43.153.000.00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	100%	5.500.000.00	100%	5.500.000.00
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20 Keluarga	5.500.000.00	20 Keluarga	5.500.000.00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	17.486.000.00	100%	17.486.000.00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%	17.486.000.00	100%	17.486.000.00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	7.486.000.00	12 Laporan	7.486.000.00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10 Laporan	10.000.000.00	10 Laporan	10.000.000.00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	15.000.000.00	100%	15.000.000.00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasiona	150 Orang	15.000.000.00	150 Orang	15.000.000.00
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	15.000.000.00	100 Orang	15.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	16.500.000.00	100%	16.500.000.00
7	01	06	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitasi. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti	100%	16.500.000.00	100%	16.500.000.00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	2.750.000.00	8 Dokumen	2.750.000.00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	2.750.000.00	8 Dokumen	2.750.000.00
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8 Dokumen	11.000.000.00	8 Dokumen	11.000.000.00
					KECAMATAN TUTUR			**1.728.152.359.00**		**1.728.152.359.00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.728.152.359.00		1.728.152.359.00
7	01				KECAMATAN			1.617.491.909.00		1.617.491.909.00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Dokumen Atau Laporan Adminitrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	100%	1.617.491.909.00	100%	1.617.491.909.00
7	01	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegi atan/subkegiatan pada dok rencana. anggaran. dan evaluasi	100%	4.000.000.00	100%	4.000.000.00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	4.000.000.00	10 Laporan	4.000.000.00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan sesuai ketentuan	100%	1.473.193.189.00	100%	1.473.193.189.00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	1.181.468.341.00	10 Orang/bulan	1.181.468.341.00
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	291.379.248.00	15 Dokumen	291.379.248.00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	345.600.00	4 Dokumen	345.600.00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	118.500.000.00	100%	118.500.000.00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	40.000.000.00	3 Paket	40.000.000.00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.500.000.00	2 Paket	8.500.000.00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	70.000.000.00	45 Laporan	70.000.000.00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Pengadaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	10.000.000.00	100%	10.000.000.00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000.00	2 Unit	10.000.000.00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3.433.900.00	100%	3.433.900.00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	3.433.900.00	48 Laporan	3.433.900.00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	8.364.820.00	100%	8.364.820.00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	7.764.820.00	8 Unit	7.764.820.00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	3 jenis	600.000.00	3 jenis	600.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	40.000.000.00	100%	40.000.000.00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	5 Laporan	40.000.000.00	5 Laporan	40.000.000.00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	40.000.000.00	5 Laporan	40.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100%	39.060.450.00	100%	39.060.450.00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	39.060.450.00	100%	39.060.450.00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	39.060.450.00	5 Laporan	39.060.450.00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	100%	25.000.000.00	100%	25.000.000.00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%	25.000.000.00	100%	25.000.000.00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	15.000.000.00	2 Laporan	15.000.000.00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	10.000.000.00	2 Laporan	10.000.000.00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	6.600.000.00	100%	6.600.000.00
7	01	06	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitasi. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti	100%	6.600.000.00	100%	6.600.000.00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	6.000.000.00	12 Dokumen	6.000.000.00
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen	600.000.00	12 Dokumen	600.000.00
					KECAMATAN WINONGAN			**3.072.419.220.00**		**3.072.419.220.00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.072.419.220.00		3.072.419.220.00
7	01				KECAMATAN			2.887.766.840.00		2.887.766.840.00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	2.887.766.840.00	100%	2.887.766.840.00
7	01	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegi atan/subkegiatan pada dok rencana. anggaran. dan evaluasi	100%	3.000.000.00	100%	3.000.000.00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	3.000.000.00	13 Laporan	3.000.000.00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabk an	100%	2.599.236.980.00	100%	2.599.236.980.00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	2.288.466.634.00	15 Orang/bulan	2.288.466.634.00
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	267.078.346.00	12 Dokumen	267.078.346.00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	43.692.000.00	12 Dokumen	43.692.000.00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	9.500.000.00	100%	9.500.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	9.500.000.00	3 Orang	9.500.000.00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	148.139.900.00	100%	148.139.900.00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	45.000.000.00	4 Paket	45.000.000.00
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1.016.400.00	4 Paket	1.016.400.00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	18.727.500.00	4 Paket	18.727.500.00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.020.000.00	12 Laporan	4.020.000.00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	79.376.000.00	12 Laporan	79.376.000.00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang opersional kantor yang tersedia	100%	46.706.220.00	100%	46.706.220.00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.042.000.00	12 Laporan	42.042.000.00
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.664.220.00	12 Laporan	4.664.220.00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	81.183.740.00	100%	81.183.740.00
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	81.183.740.00	10 Unit	81.183.740.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	7.236.000.00	100%	7.236.000.00
						Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.51 Indeks		3.65 Indeks	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Realisasi PBB-P2	100%	7.236.000.00	100%	7.236.000.00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7.236.000.00	4 Laporan	7.236.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100%	48.847.140.00	100%	48.847.140.00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	27.197.140.00	100%	27.197.140.00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	8.500.000.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	8.500.000.00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	18.697.140.00	4 Laporan	18.697.140.00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	8 Keluarga	21.650.000.00	8 Keluarga	21.650.000.00
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	8 Keluarga	21.650.000.00	8 Keluarga	21.650.000.00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	100%	55.317.200.00	100%	55.317.200.00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%	50.317.200.00	100%	50.317.200.00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	20.187.200.00	12 Laporan	20.187.200.00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	30.130.000.00	4 Laporan	30.130.000.00
7	01	04	7.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan perda dan perkada yang terlaksana	100%	5.000.000.00	100%	5.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	04	7.04	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	5.000.000.00	1 Laporan	5.000.000.00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	13.533.740.00	100%	13.533.740.00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	13.533.740.00	100 Orang	13.533.740.00
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	13.533.740.00	100 Orang	13.533.740.00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	59.718.300.00	100%	59.718.300.00
7	01	06	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitasi. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti	100%	59.718.300.00	100%	59.718.300.00
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	26.000.000.00	2 Dokumen	26.000.000.00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	17.594.500.00	4 Dokumen	17.594.500.00
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	16.123.800.00	4 Dokumen	16.123.800.00
					KECAMATAN WONOREJO			**3.530.000.000.00**		**3.635.000.000.00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.481.000.000.00		3.586.000.000.00
7	01				KECAMATAN			3.256.000.000.00		3.381.000.000.00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	3.256.000.000.00	100%	3.381.000.000.00
7	01	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi idikator kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan pada dokumen perencana anggaran dan evaluasi	100%	10.000.000.00	100%	10.000.000.00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	10.000.000.00	12 Laporan	10.000.000.00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung jawabkan	100%	2.815.000.000.00	100%	2.940.000.000.00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/bulan	2.200.000.000.00	210 Orang/bulan	2.300.000.000.00
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	575.000.000.00	12 Dokumen	600.000.000.00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	40.000.000.00	12 Dokumen	40.000.000.00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	presentase laporan/ dokumen BMD yang akurat dan sesuai dengan ketentuan	100%	5.000.000.00	100%	5.000.000.00
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.000.000.00	12 Laporan	5.000.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	10.000.000.00	100%	10.000.000.00
7	01	01	2.05	05	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	10.000.000.00	12 Dokumen	10.000.000.00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum perangkat daerah	100%	176.000.000.00	100%	176.000.000.00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	25.000.000.00	30 Paket	25.000.000.00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	25.000.000.00	30 Paket	25.000.000.00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	10.000.000.00	30 Paket	10.000.000.00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.000.000.00	12 Dokumen	6.000.000.00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000.00	12 Laporan	25.000.000.00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	85.000.000.00	12 Laporan	85.000.000.00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penggadaan BMD yang terealisasi	100%	50.000.000.00	100%	50.000.000.00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	15.000.000.00	2 Unit	15.000.000.00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25.000.000.00	2 Unit	25.000.000.00
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000.00	2 Unit	10.000.000.00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	55.000.000.00	100%	55.000.000.00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000.00	12 Laporan	45.000.000.00
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10.000.000.00	10 Laporan	10.000.000.00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	135.000.000.00	100%	135.000.000.00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	110.000.000.00	7 Unit	110.000.000.00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	25.000.000.00	12 Unit	25.000.000.00
X	XX	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.000.000.00	1 Unit	49.000.000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu (Wonorejo)	100%	50.000.000.00	100%	50.000.000.00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	50.000.000.00	100%	50.000.000.00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	25.000.000.00	1 Laporan	25.000.000.00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	25.000.000.00	12 Dokumen	25.000.000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100%	50.000.000.00	100%	50.000.000.00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	25.000.000.00	100%	25.000.000.00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25.000.000.00	12 Laporan	25.000.000.00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat kelurahan yang mengikuti pemberdayaan di kelurahan	100%	25.000.000.00	100%	25.000.000.00
						Persentase kebutuhan sarpras masyarakat kelurahan yang terpenuhii	100%		100%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000.00	10 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000.00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum	100%	40.000.000.00	100%	40.000.000.00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%	40.000.000.00	100%	40.000.000.00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	20.000.000.00	12 Laporan	20.000.000.00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	20.000.000.00	12 Laporan	20.000.000.00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100%	40.000.000.00	100%	40.000.000.00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	40.000.000.00	100 Orang	40.000.000.00
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	40.000.000.00	100 Orang	40.000.000.00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	45.000.000.00	100%	25.000.000.00
7	01	06	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitasi. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti	100%	45.000.000.00	100%	25.000.000.00
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	20.000.000.00	12 Dokumen	10.000.000.00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	20.000.000.00	12 Dokumen	10.000.000.00
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	5.000.000.00	1 Dokumen	5.000.000.00
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			90.364.374.248.00		26.286.533.578.00
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			90.364.374.248.00		26.286.533.578.00
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			90.364.374.248.00		26.286.533.578.00
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	5.216.540.826.00	100%	5.422.046.600.00
8	01	01	2.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator program/kegiatan/sub kegiatan pada dokumen rencana anggaran dan evaluasi	100%	47.118.000.00	100%	50.492.100.00
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	14.418.000.00	1 Dokumen	17.301.600.00
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	32.700.000.00	14 Laporan	33.190.500.00
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%		100%	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.409.068.226.00	26 Orang/bulan	3.578.736.000.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	396.240.000.00	12 Dokumen	405.164.800.00
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	97.980.000.00	12 Dokumen	99.449.700.00
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	92.397.000.00	100%	93.782.900.00
8	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	92.397.000.00	44 Orang	93.782.900.00
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	100%	543.580.100.00	100%	552.301.100.00
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16.686.000.00	4 Paket	17.019.700.00
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	45.050.200.00	4 Paket	45.951.000.00
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	116.903.600.00	4 Paket	118.072.600.00
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	49.969.300.00	4 Paket	50.468.900.00
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.650.000.00	12 Dokumen	6.783.000.00
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	48.150.000.00	8 Laporan	48.631.500.00
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	260.171.000.00	12 Laporan	265.374.400.00
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	165.448.000.00	100%	168.786.800.00
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	21.384.000.00	1 Unit	21.841.600.00
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	144.064.000.00	12 Unit	146.945.200.00
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang opersional kantor yang tersedia	100%	134.069.400.00	100%	136.080.400.00
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	134.069.400.00	12 Laporan	136.080.400.00
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang baik	100%	330.640.100.00	100%	337.252.800.00
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	301.726.600.00	14 Unit	307.761.100.00
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	28.913.500.00	17 Unit	29.491.700.00
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat yang paham akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90%	1.332.915.400.00	91%	1.360.033.700.00
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase realisasi Kebijakan terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	1.332.915.400.00	100%	1.360.033.700.00
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1200 Orang	1.305.915.400.00	1200 Orang	1.332.033.700.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 Orang	27.000.000.00	300 Orang	28.000.000.00
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang paham akan Etika dan Budaya Politik	82%	74.511.550.000.00	84%	8.978.070.000.00
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Instansi Vertikal yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	2 Lembaga	74.511.550.000.00	0 Lembaga	8.978.070.000.00
						Jumlah Parpol yang terfasilitasi mendapatkan bantuan keuangan	9 Parpol		9 Parpol	
						Persentase Realisasi Kebijakan terkait pendidikan politik. etika budaya politik dan peningkatan demokrasi	100%		100%	
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1200 Orang	74.491.550.000.00	1200 Orang	8.956.070.000.00
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang	20.000.000.00	200 Orang	22.000.000.00
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif	22%	3.109.997.822.00	25%	4.194.717.778.00
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	12 Lembaga	3.109.997.822.00	14 Lembaga	4.194.717.778.00
						Persentase Realisasi Kebijakan terkait Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%		100%	
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	800 Orang	3.104.747.822.00	800 Orang	4.186.842.778.00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	5.250.000.00	2 Laporan	7.875.000.00
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL. DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang terfasilitasi dalam penguatan dan pengembangan ketahanan ekonomi. sosial dan budaya	100%	490.000.000.00	100%	507.700.000.00
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya	Persentase Realisasi Kebijakan terkait Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya	100%	490.000.000.00	100%	507.700.000.00
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	16.000 Orang	460.000.000.00	950 Orang	465.200.000.00
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 Orang	20.000.000.00	300 Orang	22.500.000.00
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	10.000.000.00	4 Laporan	20.000.000.00
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase laporan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti	100%	5.703.370.200.00	100%	5.823.965.500.00
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Instansi Vertikal yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	4 Lembaga	5.703.370.200.00	4 Lembaga	5.823.965.500.00
						Persentase Realisasi Kebijakan terkait kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik di Masyarakat	100%		100%	
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	1000 Orang	5.200.000.200.00	1000 Orang	5.300.000.000.00
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	300 Orang	25.000.000.00	300 Orang	27.500.000.00
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	166.370.000.00	12 Laporan	168.865.500.00
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	312.000.000.00	4 Dokumen	327.600.000.00

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TOTAL							**90.364.374.248.00**		**26.286.533.578.00**

KABUPATEN PASURUAN
GUNA KARYA SARANA BHAKTI